PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

RPJMD
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025 - 2029

"PINRANG BERKELANJUTAN, INKLUSIF, MAJU DAN MANDIRI"

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Pendahuluan;
    b. Gambaran Umum Daerah;
    c. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. Penutup.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KERRANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.044.25

DAFTAR ISI

Daftar isi i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3 Hubungan Antar Dokumen 11

1.4 Maksud dan Tujuan 14

1.5 Sistematika Penulisan..... 15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 1

2.2 Gambaran Keuangan Daerah 262

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 337

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1

3.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 24

3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan 81

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah 1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 51

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2
Tabel 2.2 Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan kabupaten Pinrang 2
Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Dari Permukaan Laut (MDpl) 6
Tabel 2.4 Luas dan Persentase Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan tahun 2024 7
Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pinrang Tahun 2024 12
Tabel 2.6 Destinasi Wisata Kabupaten Pinrang 16
Tabel 2.7 Konsumsi Listrik perKapita (Kwh) Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 21
Tabel 2.8 Kapasitas Air Baku Menurut Sumber dan Kapasitas Terpakai Kabupaten Pinrang..... 30
Tabel 2.9 Jumlah Unit SPAM dan Alokasi Air Baku Kabupaten Pinrang..... 30
Tabel 2.10 Proporsi Realisasi penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Subsidi (Kimia) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 34
Tabel 2.11 Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 35
Tabel 2.12 Luas Panen dan Produksi padi sawah menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023-2024..... 35
Tabel 2.13 Luas Panen dan Produksi padi sawah di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 36
Tabel 2.14 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 36

Tabel 2.15 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 37
Tabel 2.16 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 38
Tabel 2.17 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 39
Tabel 2.18 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 45
Tabel 2.19 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengelola Sampah di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024..... 46
Tabel 2.20 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 47
Tabel 2.21 Distribusi Luas Wilayah menurut Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang..... 48
Tabel 2.22 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024..... 51
Tabel 2.23 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024..... 52
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 53
Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 54
Tabel 2.26 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 55
Tabel 2.27 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2020- 2024 57
Tabel 2.28 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 60

Tabel 2.29 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Kawasan Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 62
Tabel 2.30 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2020-2024..... 63
Tabel 2.31 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 64
Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas harga dasar konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)..... 65
Tabel 2.33 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... 69
Tabel 2.34 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan menurut harga Berlaku Tahun 2020-2024 70
Tabel 2.35 Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 70
Tabel 2.36 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 71
Tabel 2.37 Perbandingan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 72
Tabel 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 73

Tabel 2.39 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 73
Tabel 2.40 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024 74
Tabel 2.41 Komponen IPM Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024..... 75
Tabel 2.42 Perbandingan IPM Wilayah Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 76
Tabel 2.43 Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kawasan Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 77
Tabel 2.44 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 78
Tabel 2.45 Persentase Persalinan di Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 79
Tabel 2.46 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024..... 80
Tabel 2.47 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA + Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024..... 81
Tabel 2.48 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024..... 82
Tabel 2.49 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 83
Tabel 2.50 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 84
Tabel 2.51 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024 84
Tabel 2.52 Persentase Pekerja yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024 88

Tabel 2.53 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 89
Tabel 2.54 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) 90
Tabel 2.55 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 92
Tabel 2.56 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2023 .. 94
Tabel 2.57 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024 96
Tabel 2.58 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2024 97
Tabel 2.59 Indeks Pendidikan Kabupaten PinrangTahun 2020-2024 98
Tabel 2.60 Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 99
Tabel 2.61 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 100
Tabel 2.62 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 101
Tabel 2.63 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 102
Tabel 2.64 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 103
Tabel 2.65 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 104
Tabel 2.66 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 105
Tabel 2.67 Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2023 106
Tabel 2.68 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 108

Tabel 2.69 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 109
Tabel 2.70 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2024 .. 111
Tabel 2.71 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD..... 112
Tabel 2.72 Produktivitas Pertanian Kabupaten Pinrang Tahun 2021 - 2024..... 112
Tabel 2.73 Skor Komponen Penyusun Indikator Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 116
Tabel 2.74 Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang Tahun 2021 – 2024 120
Tabel 2.75 Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 120
Tabel 2.76 Produksi Perikanan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 121
Tabel 2.77 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024..... 122
Tabel 2.78 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 123
Tabel 2.79 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 124
Tabel 2.80 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 125
Tabel 2.81 Indeks Infrastruktur Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2024 127
Tabel 2.82 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 128
Tabel 2.83 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020- 2024 128

Tabel 2.84 Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 129
Tabel 2.85 Aspek Keterjangkauan Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 129
Tabel 2.86 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2020-2024 130
Tabel 2.87 Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024 131
Tabel 2.88 Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 132
Tabel 2.89 Rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 .. 133
Tabel 2.90 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2023..... 135
Tabel 2.91 Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 136
Tabel 2.92 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 136
Tabel 2.93 Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang Tahun 2020– 2024 137
Tabel 2.94 Range Indeks Pelayanan Publik..... 138
Tabel 2.95 Indeks Pelayanan Publik 139
Tabel 2.96 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024..... 139
Tabel 2.97 Predikat Indeks SPBE 140
Tabel 2.98 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024 144
Tabel 2.99 Variabel Penilaian dan Nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pinrang Tahun 2023-2024..... 145
Tabel 2.100 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024..... 147
Tabel 2.101 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024.. 154

Tabel 2.102 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 – 2024 . 157
Tabel 2.103 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 161
Tabel 2.104 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 163
Tabel 2.105 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 165
Tabel 2.106 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024..... 166
Tabel 2.107 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024. 169
Tabel 2.108 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024..... 170
Tabel 2.109 Kinerja Penyelenggaran Urusan Pangan Tahun 2020-2024..... 171
Tabel 2.110 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020–2024 .. 173
Tabel 2.111 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 174
Tabel 2.112 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 176
Tabel 2.113 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024..... 177
Tabel 2.114 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 178
Tabel 2.115 Kinerja Penyelengaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 .. 179
Tabel 2.116 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024..... 180

Tabel 2.117 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020–2024 181
Tabel 2.118 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 182
Tabel 2.119 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 184
Tabel 2.120 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020-2024 185
Tabel 2.121 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ... 185
Tabel 2.122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 . 186
Tabel 2.123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 -2024 187
Tabel 2.124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 188
Tabel 2.125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024 188
Tabel 2.126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 191
Tabel 2.127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 192
Tabel 2.128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 194
Tabel 2.129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 199
Tabel 2.130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 203
Tabel 2.131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 206
Tabel 2.132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan Tahun 2020-2024 208
Tabel 2.133 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Tahun 2020-2024..... 209

Tabel 2.134 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Tahun 2020-2024 210
Tabel 2.135 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Tahun 2020-2024 211
Tabel 2.136 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 212
Tabel 2.137 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Pinrang 236
Tabel 2.138 Capaian Indikator SPM Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 256
Tabel 2.139 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 265
Tabel 2.140 Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Periode Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang 272
Tabel 2.141 Komposisi Komponen Utama Pendapatan Daerah Periode Tahun 2020 – 2024 275
Tabel 2.142 Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Periode Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang 283
Tabel 2.143 Komponen Utama Belanja Daerah Periode Tahun 2020 – 2024 285
Tabel 2.144 Realisasi Pembiayaan Daerah 286
Tabel 2.145 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 289
Tabel 2.146 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 294
Tabel 2.147 Perhitungan Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 296

Tabel 2.148 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 297
Tabel 2.149 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 299
Tabel 2.150 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 303
Tabel 2.151 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 305
Tabel 2.152 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kabupaten Pinrang Selatan Tahun 2020-2024 307
Tabel 2.153 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 308
Tabel 2.154 Rasio Belanja Modal Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 310
Tabel 2.155 Rasio Belanja Daerah per Kapita Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 311
Tabel 2.156 Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 312
Tabel 2.157 Share APBD terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 313
Tabel 2.158 Share Belanja Modal APBD terhadap Pengeluaran Pembentukan Modal tetap Bruto Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 314
Tabel 2.159 Rasio Lancar Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 315
Tabel 2.160 Rasio Total Hutang Terhadap Aset Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 316
Tabel 2.161 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2025 - 2030 317

Tabel 2.162 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2030 326
Tabel 2.163 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2030 . 329
Tabel 2.164 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2030 332
Tabel 2.165 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 335
Tabel 2.166 Isu Pokok Menurut OPD / Bidang hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang 374
Tabel 3.1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten 2
Tabel 3.2 Reformulasi Misi Berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah Yang Diserahkan KPUD 4
Tabel 3.3 Keselarasan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045 7
Tabel 3.4 Keselarasan Misi pada RPJMN 2025 - 2029 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029 8
Tabel 3.5 Keselarasan Misi pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2029 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029 9
Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 - 2029 13
Tabel 3.7 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025 - 2029 20
Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan RPJMD 24
Tabel 3.9 Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 – 2029..... 25
Tabel 3.10 Rumusan Strategi Pembangunan 30

Tabel 3.11 Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2029 51
Tabel 3.12 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah 52
Tabel 3.13 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029 53
Tabel 3.14 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029 56
Tabel 3.15 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan 83
Tabel 3.16 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Suppa..... 94
Tabel 3.17 Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Kecamatan Mattirobulu..... 102
Tabel 3.18 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Mattiro Sompe..... 109
Tabel 3.19 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Lanrisang 118
Tabel 3.20 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Watang Sawitto 126
Tabel 3.21 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Paleteang..... 133
Tabel 3.22 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Tiroang 141
Tabel 3.23 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Cempa..... 147
Tabel 3.24 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Patampanua..... 154
Tabel 3.25 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Batulappa..... 162
Tabel 3.26 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Duampanua..... 169
Tabel 3.27 Highlight indikasi intervensi Kecamatan Lembang 177
Tabel 4.1 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2025 – 2030 2

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2030 (Rupiah) 6
Tabel 4.3 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030 Kabupaten Pinrang 10
Tabel 4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 51
Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 53
Tabel 4.6 Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 56
Tabel 4.7 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 79
Tabel 4.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Pinrang 87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 24
Grafik 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 25
Grafik 2.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 28
Grafik 2.4 Kapasitas Air Baku Kabupaten Pinrang (m3/detik) Tahun 2020 – 2024 30
Grafik 2.5 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan dan Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Aman Perpipaan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 31
Grafik 2.6 Kualitas Air Permukaan (BOD) Satuan (Nilai) Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 40
Grafik 2.7 Kualitas Udara (No2) satuan (nilai) Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 42
Grafik 2.8 Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 (nilai) 57
Grafik 2.9 Proporsi Penduduk Migran berstatus Seumur Hidup antar Kabupaten / Kota menurut Generasi Hasil LF SP2020 Kabupaten Pinrang 58
Grafik 2.10 Proporsi Penduduk Migran Risen antar Kabupaten/Kota menurut Generasi Hasil LF SP2020 Kabupaten Pinrang 60
Grafik 2.11 Indeks Literasi Membaca Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024..... 86
Grafik 2.12 Indeks Numerasi Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024..... 87
Grafik 2.13 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 88
Grafik 2.14 Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 90

Grafik 2.15 Indeks Pembangunan Pemuda dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2023 93
Grafik 2.16 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024 95
Grafik 2.17 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 107
Grafik 2.18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 110
Grafik 2.19 Nilai Tukar Petani 2020 – 2024 115
Grafik 2.20 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023 117
Grafik 2.21 Skor Komponen Penyusun Indikator Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Pinrang Tahun 2023 118
Grafik 2.22 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 129
Grafik 2.23 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 134
Grafik 2.24 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024 141
Grafik 2.25 Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2024 142
Grafik 2.26 Nilai MCP KPK Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 143
Grafik 2.27 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 146
Grafik 2.28 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 148
Grafik 2.29 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024 150
Grafik 2.30 Realisasi Pendapatan Daerah 274

Grafik 2.31 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang 276
Grafik 2.32 Realisasi Objek Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang 277
Grafik 2.33 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang..... 282

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Komposisi Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang 58

Diagram 2.2 Komposisi Migran Risen Antar Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang 59

Diagram 2.3 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Periode 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang 278

Diagram 2.4 Komposisi Pendapatan Transfer tahun 2020 - 2024 Kabupaten Pinrang, Satuan (Persen)..... 279

Diagram 2.5 Komposisi Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2020–2024 Kabupaten Pinrang, Satuan (Persen) 280

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterikatan antara Dokumen Perencanaan 13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang 4
Gambar 2.2 Peta Sebaran Iklim di Wilayah Kabupaten Pinrang Menurut Klasifikasi Oldema 11
Gambar 2.3 Peta Sebaran Wilayah menurut Kriteria Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang Tahun 2023 50
Gambar 2.4 Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri 200
Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang 81
Gambar 3.2 Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan Dalam RPJMN 2025 - 2029 82

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sistematis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan peran pemerintah daerah dalam era desentralisasi, diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif mengingat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah memiliki tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Selanjutnya, Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2025-2030. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setelah dilantiknya **H. A. Irwan Hamid, S.Sos.** sebagai Bupati Pinrang dan **Sudirman Bungi, S.IP., M.Si.** sebagai Wakil Bupati Pinrang pada tanggal 20 Februari 2025, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode 2025-2029 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih, yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan dan stakeholder guna memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka dalam penyusunan RPJMD tetap memperhatikan instrumen perencanaan yang berbasis keberlanjutan, salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS berfungsi sebagai alat analisis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, KLHS berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis lingkungan yang berpotensi muncul akibat implementasi kebijakan dalam RPJMD. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan, guna menghindari degradasi lingkungan yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang.

Adapun capaian indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 antara lain: Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,71%, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita sebesar Rp62,77 Juta, Tingkat Inflasi berada pada angka 1,73%, Indeks Gini tercatat sebesar 0,299, Tingkat Kemiskinan mencapai 8,55%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,12%, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,43.

Perekonomian Kabupaten Pinrang mengalami kontraksi sebesar -0,44 persen pada tahun 2020 akibat pandemi. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 5,04 persen, didorong oleh sektor transportasi dan jasa. Pada 2022, pertumbuhan melambat menjadi 4,52 persen, terutama karena mulai terganggunya sektor pertanian. Tahun 2023 pertumbuhan kembali menurun tajam menjadi 2,18 persen akibat El Nino dan proyek irigasi yang menghambat produksi pertanian. Namun, pada 2024, ekonomi kembali tumbuh kuat sebesar 5,71 persen, dengan pulihnya sektor pertanian dan meningkatnya kinerja sektor jasa dan komunikasi.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang menunjukkan tren yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 73,27 dan secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2021 naik menjadi 73,46, kemudian meningkat lagi menjadi 73,90 pada 2022. Percepatan peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 74,70, dan pada tahun 2024 mencapai 75,43. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang pembangunan manusia. Untuk mengetahui kesenjangan gender dalam pembangunan diukur dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) . IPM yang tinggi dapat mendorong kesetaraan gender, sementara IPG yang baik dapat meningkatkan IPM. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Pinrang Tahun 2024 sebesar 96,37 . IPG KAb. Pinrang dari tahun 2021 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Semakin tinggi nilai IPG mendekati 100, semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPG, semakin besar ketimpangan pembangunan berdasarkan jenis kelamin. IPG Kab. Pinrang yaitu Tahun 2024 yaitu 96,37 menunjukkan kesetaraan gender yang tinggi dalam

pembangunan. Artinya, pencapaian pembangunan di berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi) relatif sama antara laki-laki dan perempuan. ini berarti bahwa pembangunan di Kab. Pinrang relatif setara antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih ada sedikit ketidaksetaraan.

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal (Periode 2025-2029) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang menjadi dasar bagi pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada periode ini, fokus utama diarahkan pada Penataan dan Penguatan Fondasi Transformasi untuk mewujudkan Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. RPJMD ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 6775)
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan/Kabupaten Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelyanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayan Minimal Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana

Daerah Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM sub urusan Kebakaran Kab/Kota;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
53. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 7);
57. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 2)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD Kabupaten Pinrang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Sementara itu, RPJMD dan RKPD ditetapkan sesuai periode pemerintahan melalui peraturan daerah yang berlaku. RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045 terbagi dalam empat tahapan RPJMD. Selain berpedoman pada RPJPD, penyusunan RPJMD juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045 merupakan tahap pertama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD, mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan daerah. RKPD disusun untuk mengakomodasi program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat, serta mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan RKPD berpedoman pada RKP serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen yang diperbarui setiap tahun, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun berjalan.

Gambar 1. Keterikatan antara Dokumen Perencanaan

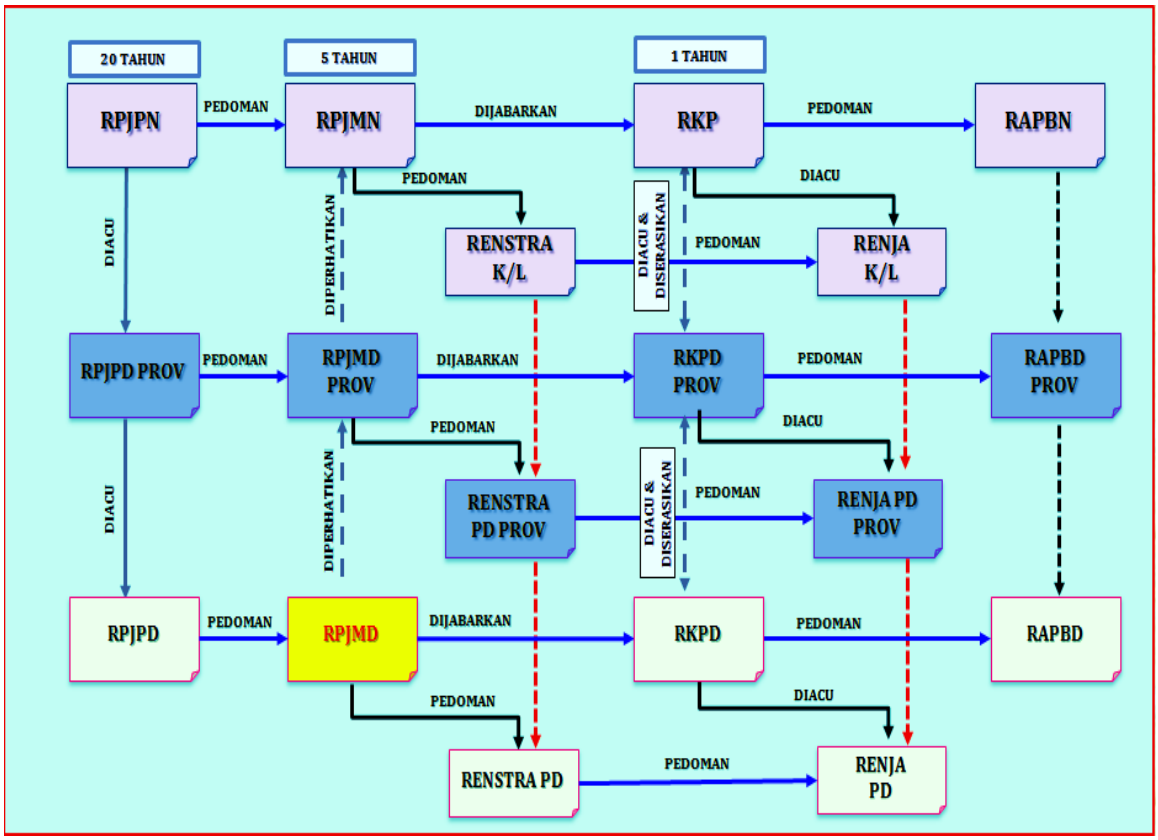

Sumber : Pemendagri 86 Tahun 2017 dan telah diolah Tim Penyusun

Penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan bagan alur menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. RPJMD kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target prioritas kepala daerah. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahun, dengan memperhitungkan kebijakan pembangunan terbaru, terutama kebijakan pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun berjalan. RKPD kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang disusun dengan mengacu pada RENSTRA-PD.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 disusun untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk komitmen terhadap janji politik serta aspirasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan program dan kegiatan prioritas daerah.

RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai pencapaian kinerja daerah dalam jangka menengah, yang pelaksanaannya dijabarkan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Buapti diukur berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Seluruh program prioritas yang dirancang untuk lima tahun dalam RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menginterpretasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2025-2029 ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah.
2. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan rencana strategis lima tahunan yang memuat program dan kegiatan pendukung pencapaian prioritas RPJMD serta meningkatkan kinerja pelayanan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam dokumen RENSTRA PD.
3. Berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
4. Berfungsi sebagai instrumen bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah, guna memastikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

5. Menjadi alat dalam menetapkan target kinerja, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan nasional.
6. Memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dalam mendukung pendanaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang; dasar hokum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika Perubahan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan dasar-dasar analisis secara logis, menggambarkan kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Setiap aspek didukung dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran kondisi umum daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan kajian yang relevan, sehingga selaras dengan isu strategis, permasalahan pembangunan, visi dan misi kepala daerah, serta kebutuhan dalam merumuskan strategi pembangunan, Bab ini jg menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terkait pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, serta kerangka pendanaan. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik serta membahas permasalahan serta isu-isu strategis daerah yang menjadi landasan utama dalam merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Uraian ini menyoroti aspek-aspek krusial yang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas, terarah, dan terukur serta menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang mendukung setiap strategi tersebut. Selain itu, dijelaskan keterkaitan antara strategi dan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan setiap strategi yang dipilih guna menentukan program prioritas. Program ini mencerminkan keselarasan antara sasaran pembangunan dan strategi yang diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan program prioritas dalam mencapai visi dan misi, serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif, target yang ditetapkan, serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Bab ini jg menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat pedoman pelaksanaan RPJMD yang mencakup konsistensi perencanaan antar dokumen pembangunan, optimalisasi berbagai sumber pendanaan secara inovatif dan tepat sasaran, kerangka pengendalian melalui regulasi dan sistem terintegrasi, mekanisme perubahan untuk mengantisipasi dinamika pembangunan, serta komunikasi publik yang transparan dan partisipatif. Kaidah ini menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 185 km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Pinrang kurang lebih 1.895,008 km^2 yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300-2-2-2138-2025 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau.

Secara astronomis Kabupaten Pinrang terletak pada $4^0$10’30” sampai $3^0$19’13” Lintang Selatan (LS) dan $119^0$26’30” sampai $119^0$47’20” Bujur Timur (BT), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-pare,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Pinrang terbagi atas 12 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Batulappa, Cempa, Duampanua, Lanrisang, Lembang, Mattiro Bulu, Mattiro Sompe, Paleteang, Patampanua, Suppa, Tiroang, dan Watang Sawitto. Pada bulan Juli 2021, Kabupaten Pinrang mengalami penambahan 1 kelurahan sebagai hasil pemekaran dari 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Tiroang. Sehingga wilayah administratif Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Luas kecamatan (km^2)	Persentase
1	Suppa	69,7867	3,68
2	Mattiro Sompe	90,4624	4,77
3	Lanrisang	65,4841	3,45
4	Mattiro Bulu	127,7136	6,73
5	Watang SFawitto	61,7674	3,26
6	Paleteang	46,3225	2,44
7	Tiroang	75,8822	4,08
8	Patampanua	124,0209	6,54
9	Cempa	88,0100	4,64
10	Duampanua	284,4202	15,00
11	Batulappa	164,5922	8,68
12	Lembang	696,5458	36,73
Pinrang		**1.895,008 km^2**	**100,00**

Sumber: Perda RTRW No. 3 Tahun 2022

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 69.654,58 ha atau sekitar 36,73% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 28.442,02 (15,00%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah hanya 4.632,25 atau sekitar 2,44% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.2
Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RT	RK
1	Suppa	8	2	22	5	64	34
2	Mattiro Sompe	7	2	19	4	74	35
3	Lanrisang	6	1	16	3	64	38
4	Mattiro Bulu	7	2	19	6	97	54

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RT	RK
5	Watang Sawitto	-	8	-	17	-	-
6	Paleteang	-	6	-	14	-	-
7	Tiroang	-	6	-	13	-	-
8	Patampanua	7	4	17	13	122	74
9	Cempa	6	1	15	2	51	34
10	Duampanua	10	5	25	10	89	51
11	Batulappa	4	1	11	4	75	16
12	Lembang	14	2	37	5	186	95
Pinrang		**69**	**40**	**181**	**96**	**433**	**822**

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 total wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa, 40 kelurahan, 181 dusun, 96 lingkungan , 433 RT dan 822 RK. Secara detail wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang

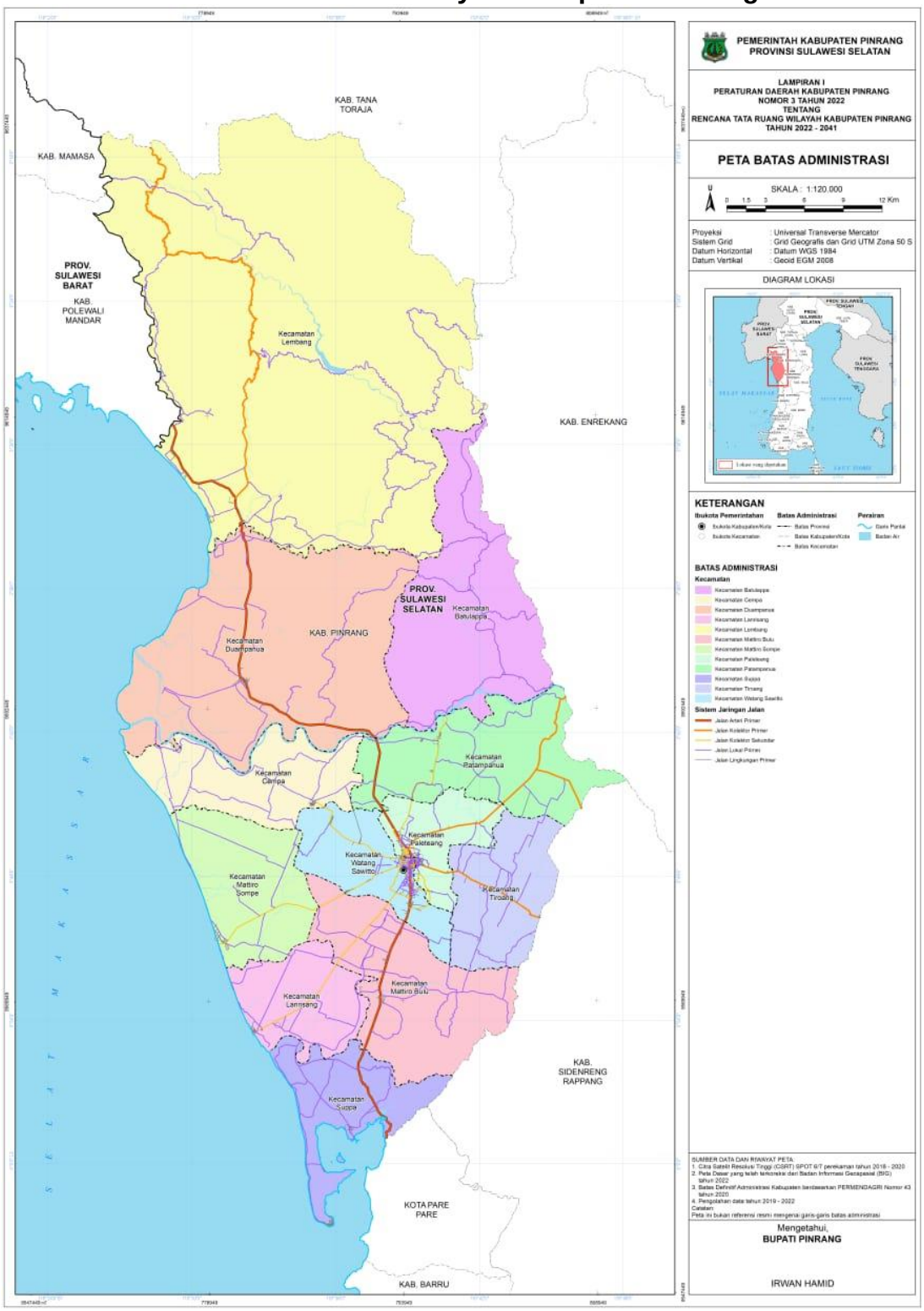

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 101,54 km sesuai yang termuat dalam Perda No. 3 tahun 2022 tentang RTRW

Kabupaten Pinrang 2022 – 2041 dan Peta Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG). Garis Pantai tersebut terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pinrang pada umumnya memiliki permukaan bervariasi, wilayah bagian utara terdiri dataran tinggi dan perbukitan yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini cocok dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultural dan sayur-sayuran.

Wilayah bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian. Wilayah bagian barat meliputi wilayah pesisir dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan potensi perikanan. Klasifikasi ketinggian/topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Ketinggian 0 – 100 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
- **Ketinggian 100–400 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.

- **Ketinggian 400–1000 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.
- **Ketinggian di atas 1000 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Dari Permukaan Laut (MDpl)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Ketinggian (Meter)
1	Suppa	Majenang	2-265
2	Mattiro Sompe	Langnga	2-12
3	Lasinrang	Jampue	2-14
4	Mattiro Bulu	Bua	12-228
5	Watang Sawito	Sawitto	6-14
6	Paleteang	Lallengbata	14-157
7	Tiroang	Tiroang	13-23
8	Patampanua	Teppo	13-86
9	Cempa	Cempa	2-18
10	Duampanua	Lampa	2-965
11	Batulappa	Bilajeng	20-1007
12	Lembang	Tuppu	2-1908

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari:

1. Kemiringan 0-3 % Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
2. Kemiringan 3 – 8 % Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa

dan Kecamatan Paleteang.

3. Kemiringan 8 – 45 % Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua.
4. Kemiringan > 45 % Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah kaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Tabel 2.4
Luas dan Persentase Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan Tahun 2024

No	Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 -2	Datar	98.850,20	52,12
2	2-15	Landai	15.696,80	8,28
3	15 -40	Berbukit	49.246	25,97
4	>40	Berbukit	25.864	13,64
Jumlah			**189.657**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Endapan alluvium dan sungai, endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan brekiterfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare).

Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api.

3. Batuan aliran lava, batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekartiang, penyebarannya ke arah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), batuan ini terletak di bagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai ke wilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400 meter.
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar BuluTirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

Keadaan hidrologi Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil data yang diperoleh, ditemukan daerah-daerah yang masih mengalami genangan periodik. Sedangkan untuk sumber air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang mengaliri wilayah-wilayah Kabupaten Pinrang. Terdapat dua sungai besar di Kabupaten Pinrang, yaitu Sungai Mamasa, dan Sungai Saddang. Sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak Sungai Saddang.

Saat ini Sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang. PLTA yang ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian dengan cakupan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten bahkan hingga kabupaten Sidenreng Rappang-Sidrap. Sungai Saddang

yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar sangat potensial dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan reservoir untuk pembangkit listrik.

Selain Sungai Saddang, air tanah dangkal berupa sumur-sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur artesis juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Selain itu, pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di daerah aliran sungai, karena memungkinkan adanya limpasan air sungai yang merupakan ancaman banjir di daerah yang bersangkutan.

Dua belas wilayah kecamatan di Kabupaten Pinrang terletak pada rentang elevasi yang cukup besar, yaitu wilayah dataran rendah hingga daratan tinggi pegunungan dengan ketinggian sampai 2.000 mdpl. Wilayah ini mempunyai keseimbangan hidrologi yang tinggi bila DAS yang ada dikelola dengan baik. Kondisi ini didukung oleh banyaknya sungai dan anak sungai yang mengalirkan air dari pegunungan sampai bermuara ke laut. Potensi ketersediaan air permukaan sangat bergantung pada iklim, bentang alam, jenis sifat fisik batuan atau tanah, penggunaan lahan, serta struktur geologis.

Bentang wilayah yang cukup luas dari daerah utara hingga selatan dan dari wilayah pesisir barat hingga pegunungan di daerah utara timur laut, membentuk kondisi iklim yang cukup bervariasi. Secara umum, kondisi iklim di Kabupaten Pinrang tergolong kering, cukup basah sampai sangat basah, menurut klasifikasi Oldeman (1977), type iklim yang mengenai Kabupaten Pinrang digolongkan kedalam kelas iklim D1, B2, C2, D2, dan E2 yang secara terinci dapat dilihat sebagai berikut :

- Tipe B2 (7-9 bulan basah, <2 bulan kering), tipe iklim yang dominan di wilayah pesisir utara, meliputi sebagian wilayah kecamatan Mattiro Sompe, Cempa, Duampanua, dan sebagian wilayah Lembang;
- Tipe C2 (5-6 bulan basah, 2-3 bulan kering), bagian besar kecamatan Lembang, Batulappa, Mattirosompe, Watang Sawitto, dan kecamatan Suppa; seluruh wilayah kecamatan Lanrisang, dan sebagian wilayah

kecamatan Cempa, Patampanua, dan Mattiro bulu;

- Tipe D1 (3-4 bulan basah, <2 bulan kering), hanya meliputi sebagian kecil wilayah utara kecamatan Lembang;
- Tipe D2 (3-4 bulan basah, 2-3 bulan kering). Meliputi wilayah timur selatan, sebagian wilayah kecamatan Patampanua, Paleteang, Watang Sawitto, Tiroang, Mattirobulu dan sebagian kecil wilayah kecamatan Suppa; dan
- Tipe E2 (<3 bulan basah, 2-3 bulan kering), sebagian kecil wilayah timur kecamatan Patampanua, dan Mattiro Bulu, dan sebagian wilayah kecamatan Tiroang.

Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2

Peta Sebaran Iklim di Wilayah Kabupaten Pinrang

Menurut Klasifikasi Oldema

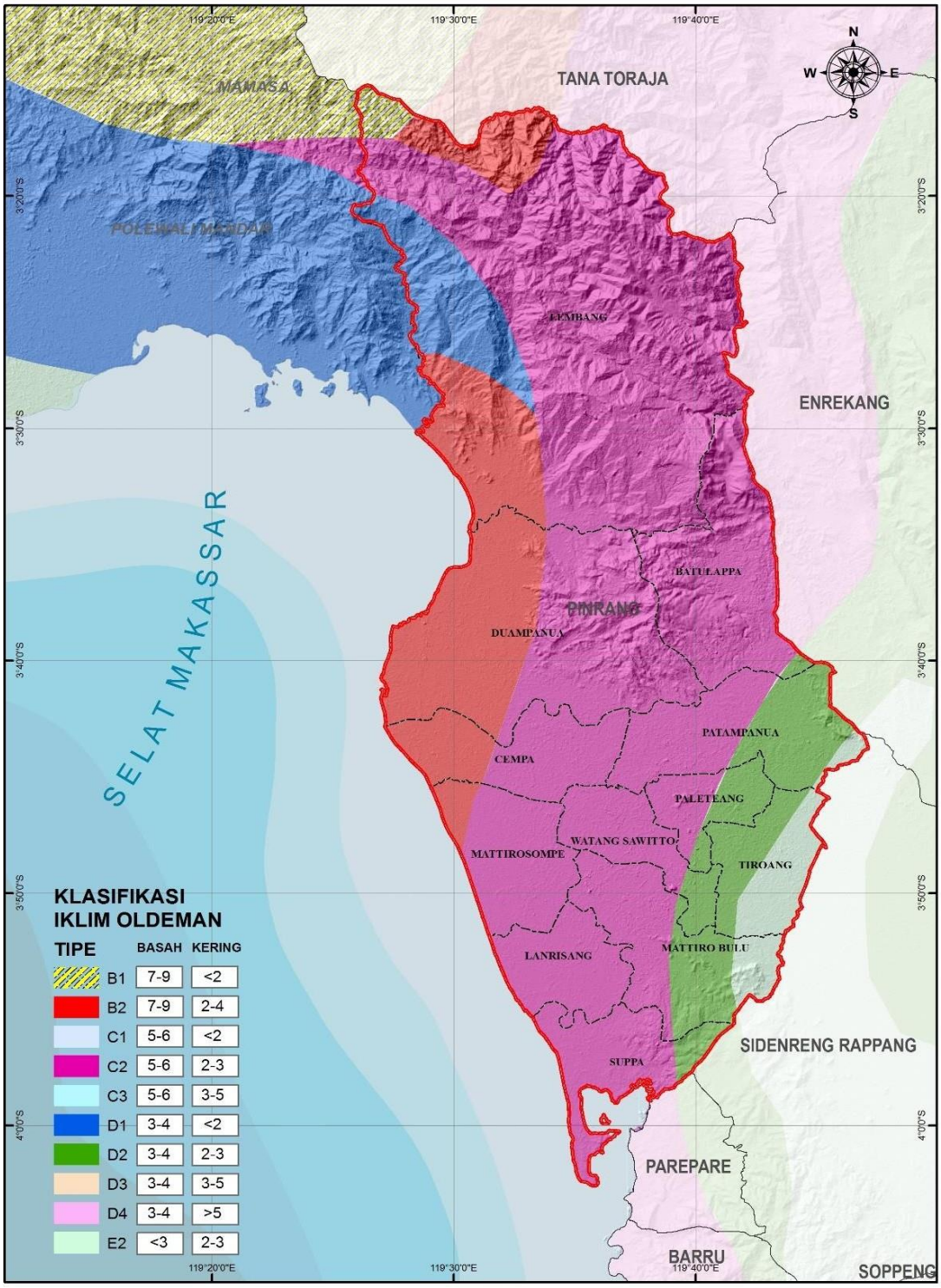

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 sebesar 55,92 mm³/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yakni sebesar 0,80 mm³, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 1.337,50 mm³.

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2024

Bulan	Curah Hujan (mm³)	Hari Hujan
Januari	693,40	30
Februari	491,40	26
Maret	415,50	27
April	82,30	22
Mei	65,00	15
Juni	111,40	16
Juli	99,00	27
Agustus	0,80	31
September	7,60	29
Oktober	194,40	31
November	337,40	29
Desember	1.337,50	31

Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2025

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah Kabupaten Pinrang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.

Gambaran potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang dicerminkan dari potensi pada kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

- **Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian terdiri atas: kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan**.** Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 45.061 (empat puluh lima ribu enam puluh satu) hektare, terdapat di seluruh kecamatan. Pada kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B seluas kurang lebih 43.948 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan. Adapun yang menjadi komoditas unggulan seperti padi dan jagung dimana pada tahun 2024 jumlah produksi padi sebanyak 533.629 ton/tahun sementara produksi jagung sebanyak 113.030 ton/tahun. Komoditas yang lain seperti ubi kayu dan ubi jalar dengan jumlah produksi sebanyak 3.420 ton untuk ubi kayu dan 319 ton untuk produksi ubi jalar.

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan. Yang menjadi komoditas hortikultura dengan jumlah produksi terbesar dari komoditas pisang sebanyak 34.952,30 ton kemudian disusul oleh produksi mangga sebanyak 14.094,50 ton. Komoditas lainnya seperti rambutan, durian, salak, semangka, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 20.394 (dua puluh ribu tiga

ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi: Kecamatan Batulappa; Kecamatan Duampanua; Kecamatan Lanrisang; Kecamatan Lembang; Kecamatan Mattiro Bulu; Kecamatan Paleteang; Kecamatan Patampanua; Kecamatan Suppa; dan Kecamatan Tiroang. Komoditas dari sector perkebunan ini seperti kelapa dalam dan kelapa hybrida yang menjadi bahan baku pembuatan kopra, dengan jumlah produksi kelapa dalam sebanyak 1.857,04 ton dan 97,67 ton untuk kelapa hybrida. Komoditas lainnya seperti kopi Robusta dan kopi Arabica yang berada di Kecamatan Lembang dan Batulappa dengan jumlah produksi sebanyak 1. 725,35 ton (kopi Robusta) dan 218,00 ton (kopi Arabica). Selain itu terdapat juga komoditas kakao sebanyak 8.185,84 ton kemudian kelapa sawit sebanyak 843,00 ton. Komoditas lainnya seperti cengkeh, jambu mete, kemiri, pala, aren, dan pinang.

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. Kawasan peternakan seluas kurang lebih 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hektare, sebagian besar terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu dengan komoditas antara lain ayam buras sebanyak 2.493.535 ekor, ayam pedaging sebanyak 1.947.698 ekor, ayam ras petelur 1.732.964 ekor, itik 1.289.205 ekor, kambing 41.610 ekor, sapi potong 16.950 ekor, kerbau 1.090 ekor.

- **Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan terdiri atas: kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya. Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan tangkap” adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan**.** Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, meliputi: Kecamatan Lembang dan Kecamatan Suppa. Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 14.184 (empat belas ribu seratus delapan puluh empat) hektare, meliputi: Kecamatan Cempa; Kecamatan Duampanua; Kecamatan Lanrisang; Kecamatan Lembang; Kecamatan Mattiro Sompe; dan Kecamatan Suppa. Untuk komoditi perikanan laut yaitu ikan dan udang dengan produksi sebanyak 15.134,40 ton dan perikanan budi daya (empang/tambak) terdiri dari ikan bandeng (9.926,80 ton), udang windu (864,13 ton), udang vaname (11.954,90 ton), dan udang api-api (1.088,90 ton).

- **Kawasan Pertambangan dan Energi**

  Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas: kawasan pertambangan mineral; dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral” adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang. Kawasan pertambangan mineral meliputi: kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Mattiro Bulu; dan kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Bulu. Yang dimaksud dengan “kawasan pembangkitan tenaga listrik” adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektare, meliputi: Kecamatan Lembang; Kecamatan Patampanua; Kecamatan Suppa; dan Kecamatan Watang Sawitto.

- **Kawasan Peruntukan Industri**

  Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan

peruntukan industri seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektare, meliputi: Kecamatan Mattiro Bulu; dan Kecamatan Suppa.

- **Kawasan Pariwisata**

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare, yang berada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Lembang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto.

Tabel 2.6
Destinasi Wisata Kabupaten Pinrang

Jenis Wisata	Nama Objek Wisata	Lokasi
Pantai	Wae Tuoe	Lanrisang
	Gusungnge/Dewata	Cempa
	Kanipang	Lembang
	Kampung Nelayan	Lembang
	Ujung Lero	Suppa
	Kappe	Duampanua
	Ujung Tape	Mattiro Sompe
	Harapan Ammani	Mattiro Sompe
	Lowita	Suppa
	Salopi	Lembang
	Biru	Mattiro Sompe
Pegunungan	Gunung Paleteang	Paleteang
	Air Terjun Karawa	Lembang
	Air Terjun Kalijodo	Lembang
	Air Terjun Bidadari	Lembang
	Batu Pandan	Lembang
	Batu Papan Salulue	Lembang
	Air Terjun Latta Pitu	Lembang
	Air Terjun Kaba-kaba	Lembang
	Pegunungan Karomba	Lembang
Air Panas	Sulili	Lembang
	Lemo Susu	Lembang
Budaya	Makam Pallipa Pute	Mattiro Sompe
	Masjid Tua Tondo Bunga	Lembang
	Makam Raja-raja Kaballangan	Duampanua

Jenis Wisata	Nama Objek Wisata	Lokasi
	Istana Datu Lanrisang	Lanrisang
	Istana Datu Suppa	Suppa
	Makam Besse Kajuara	Suppa
	Makam Lanrisang	Paleteang
	Arajang Sawitto	Watang Sawitto
	Saoraja (rumah adat)	Watang Sawitto
	Monumen Lanrisang	Watang Sawitto

Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

- **Kawasan Transportasi**

  Yang dimaksud dengan “kawasan transportasi” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, meliputi: Kecamatan Lembang; Kecamatan Mattiro Sompe; dan Kecamatan Suppa**.**

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) untuk pangan, secara umum hampir separuh total wilayah berada pada kondisi “rendah” yaitu sebesar 44,2%; kemudian 33,4% masuk dalam kategori “sedang” atau berimbang; dan 22,4% berada pada kategori “tinggi”. Dilihat secara per wilayah, Kecamatan Lembang adalah kecamatan dengan luas wilayah kategori “rendah” dan “sedang” yang paling besar, 54,3% wilayahnya masuk dalam kategori “rendah”; 44,2% masuk dalam kategori “sedang”; dan 1,5% yang masuk dalam kategori “tinggi”. Keadaan yang relative sama juga terlihat di Kecamatan Batulappa; dan Kecamatan Duampanua. Ketiga kecamatan bertetangga tersebut berada di bagian utara wilayah kabupaten yang sebagian besar penggunaan lahannya berupa Belukar, Hutan, Pertanian Lahan Kering dan campuran, sehingga secara proporsional lahan pertanian khususnya sawah terhitung menjadi lebih rendah dibanding dengan wilayah kecamatan lainnya. Walaupun secara rasio, terlihat daya dukung lahan dengan kelas “rendah” hingga “sedang” nampak dominan, namun pada

dasarnya kapasitas produksi/ penyediaan pangan, khususnya pangan pokok di Kabupaten Pinrang memiliki surplus yang tinggi, indikasi rasio kebutuhan dan ketersediaan dapat dilihat dari pemetaan daya dukung dan daya tampung pangan, perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan nilai kalori untuk kabupaten sebesar 2.413,6 juta kKal/tahun; kebutuhan sebesar 397,7 juta kKal/tahun; sehingga diperoleh selisih surplus sebesar 2.015,9 juta kKal/tahun. Secara total proporsi luas lahan dengan jasa lingkungan penyediaan pangan pada kriteria “sangat rendah” hanya sekitar 0,5% dari total wilayah kabupaten; bahkan jika diakumulasi dengan luas wilayah yang masuk dalam kriteria “rendah”, persentasenya masih dibawah 5%. Berikutnya adalah wilayah dengan potensi penyediaan jasa lingkungan pada kategori “sedang”, dengan persentase sebesar 38,8 persen; yang dominan ditemukan di Kecamatan Lembang, kemudian di Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Batulappa. Total luas wilayah pada kelompok “tinggi” dan “sangat tinggi” mencapai 57,2%.

Wilayah dengan jasa lingkungan penyediaan air kategori “sangat rendah” terdapat seluas 2,9%; 23,5% masuk dalam kategori “rendah”; dan 73,6% masuk dalam kategori “sedang”. Berdasarkan kecamatan, wilayah dengan lahan jasa penyediaan air “sangat rendah” yang paling luas adalah di Kecamatan Mattiro Bulu, yaitu sebesar 1.352,2 ha (10.45%); pada kategori “rendah” paling luas di Kecamatan Tiroang, seluas 6.003,7ha (74.49%); dan pada kategori “sedang” di Kecamatan Lanrisang seluas 5.859,8 ha (88.77%). Kecamatan Tiroang adalah satu-satunya kecamatan dengan proporsi lahan dengan jasa lingkungan penyediaan air kategori “sedang” yang paling rendah dibandingkan dengan luas wilayahnya. Diketahui, berdasarkan analisis penggunaan lahan, kecamatan Tiroang memang memiliki penutupan lahan yang umumnya berupa lahan yang terbangun/tidak alami, yakni: sekitar 261,38 ha area permukiman; 8,63 ha lahan perkebunan; 1.676,37 ha pertanian lahan kering campuran; dan 6.030,31 ha lahan persawahan.

Sedangkan dari kriteria jasa lingkungan penyediaan serat/fiber secara umum tidak ada wilayah di Kabupaten Pinrang yang masuk

dalam kategori “Sangat tinggi”, hanya terdapat tiga kecamatan yang masuk dalam kategori “Tinggi”; dan dua kecamatan masuk dalam kategori “Sedang”. Tiga kecamatan yang masuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Duampanua, Batu Lappa, dan kecamatan Lembang.

Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Kecamatan Lembang, BatuLappa, dan kecamatan Duampanua memiliki wilayah dengan kriteria dengan IJL “tinggi” hingga “sangat tinggi”, sebagaimana diketahui bahwa ketiga kecamatan memiliki daerah pegunungan dan tutupan hutan yang masih baik.

Secara umum, potensi fungsi jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Pinrang dominan pada kategori “sedang” dan “rendah”, dengan proporsi yang cukup besar pada masing-masing kabupaten. Kecamatan Mattiro Sompe menunjukkan wilayah dengan kriteria “sangat rendah” dan “rendah” dengan proporsi yang paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu 42,2% “sangat rendah” dan 50,1% “rendah”. Selain kondisi bentang alam yang relatif datar, bentuk penggunaan lahan dominan seperti tambak, sawah, pertanian lahan kering campuran, dan permukiman yang menyebabkan rendahnya tutupan vegetasi pepohonan merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai fungsi jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kecamatan tersebut.

Sedangkan luas wilayah dengan jasa lingkungan pengendalian bencana tanah longsor di Kabupaten Pinrang secara umum masuk dalam kelas “rendah” hingga “sedang”; dan sekitar 8% yang masuk dalam kelas “tinggi” hingga “sangat tinggi”. Kondisi ini tentu sejalan dengan besar ancaman bencana longsor yang memang hanya berpotensi besar pada sebagian kecil wilayah di Kabupaten Pinrang.

Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan penggunaan lahan dan fisiografi suatu kawasan, berdasarkan kedua komponen tersebut terlihat bahwa sebagian besar (>90%) wilayah di Kabupaten Pinrang masuk dalam kategori “sangat rendah” dan “rendah”; dan kurang dari 10% yang memiliki potensi jasa

ekosistem untuk pengendalian banjir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah kabupaten sangat bergantung pada pengaturan teknis (buatan) dalam hal pengendalian banjir. Kondisi bentang alam, vegetasi alami, dan penggunaan lahan yang ada secara alami sangat lemah dalam pengendalian dan pencegahan banjir.

Potensi jasa lingkungan perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Pinrang paling besar pada kelompok “rendah”, dan “sangat rendah”. Kecamatan Lembang adalah kecamatan yang memiliki tingkat resiko kebakaran hutan/lahan yang paling tinggi, yakni seluas 2.967 ha (5% wilayah); disaat yang sama kecamatan ini juga memiliki lahan dengan fungsi jasa lingkungan kelompok “tinggi” hingga “sangat tinggi” seluas 18.877 ha atau sekitar 26,5% dari total wilayahnya. Kemampuan pencegahan dan perlindungan ini banyak dipengaruhi oleh bentuk bentang alam pegunungan dan kondisi vegetasi yang memungkinkan *run off* air dan kelembaban di kawasan hutan.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan tidak terlepas dari potensi geografi Kabupaten Pinrang yang dikelola secara optimal dan berkelajutan.

- **Ketahanan Energi**

Ketahanan energi adalah kemampuan jaringan listrik, bangunan, dan masyarakat untuk bertahan dan pulih dengan cepat dari pemadaman listrik dan terus beroperasi dengan listrik, pemanas, pendingin, ventilasi, dan layanan lain yang bergantung pada energi. Sistem ketenagalistrikan yang berketahanan mengurangi kemungkinan pemadaman listrik dalam jangka waktu lama di wilayah layanan yang luas, membatasi cakupan dan dampak pemadaman listrik ketika pemadaman listrik terjadi, dan memulihkan listrik dengan cepat setelah pemadaman listrik terjadi. Pemadaman listrik dapat disebabkan oleh cuaca ekstrem, pelanggaran keamanan siber, tingginya permintaan energi yang membebani jaringan listrik, kegagalan peralatan yang menua, dan gangguan fisik pada peralatan. Gangguan jaringan listrik adalah perubahan tegangan dan frekuensi listrik pada jaringan listrik

yang dapat mengakibatkan padamnya listrik. Infrastruktur energi—fasilitas atau peralatan yang digunakan untuk menghasilkan, menyalurkan, memproses, atau menghasilkan energi—yang dapat bertahan dan pulih dengan cepat dari gangguan pada infrastruktur yang berketahanan. Ketahanan meningkatkan keandalan energi. Energi bersih dapat membantu mencegah gangguan jaringan listrik dan memungkinkan pemulihan yang cepat setelah terjadi gangguan. Penggunaan sumber daya energi terbarukan—matahari, air, angin, panas bumi, dan bioenergi—dan peningkatan daya elektronik memberi kita lebih banyak cara untuk mempertahankan atau menghidupkan kembali listrik setelah pemadaman listrik. Departemen Energi AS (DOE) berupaya memodernisasi dan memperluas jaringan listrik sehingga dapat mengintegrasikan energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan.

Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk.

Kabupaten Pinrang di tahun 2020 memiliki rata-rata konsumsi Listrik per Kapita sebesar 1.581 Kwh sampai dengan tahun 2024 mencapai nilai 1.809 Kwh. Keadaan ini merupakan peningkatan konsumsi listrik perkapita dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan menunjukkan pertumbuhan atau perubahan dalam pola konsumsi energi listrik masyarakat Kabupaten Pinrang.

Tabel 2.7
Konsumsi Listrik perKapita (Kwh) Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyaluran kwh	Kwh	273.019.069	290.709.399	308.252.434	327.550.113	364.260.878
2.	Jumlah Pelanggan	pelanggan	172.645	181.551	187.561	193.852	201.345
3.	Konsumsi Listrik perKapita	Kwh	1.581	1.601	1.643	1.690	1.809

Sumber data : PLN Kabupaten Pinrang, 2025

Peningkatan konsumsi listrik perkapita dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas listrik, atau perubahan dalam gaya hidup masyarakat, atau faktor lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pertanda positif karena menunjukkan kemajuan dalam penggunaan dan akses terhadap energi listrik. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dari peningkatan konsumsi energi. Konstruksi dan operasi infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik, dapat mengganggu ekosistem lokal, termasuk kehilangan habitat bagi satwa liar dan perubahan pada ekosistem sungai dan laut. Namun, penting juga untuk diingat bahwa peningkatan konsumsi listrik juga dapat mendukung pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro, yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah daripada pembangkit listrik konvensional. Selain itu, efisiensi energi dan penggunaan teknologi hijau juga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi listrik yang meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini secara holistik ketika mengevaluasi dampak lingkungan dari peningkatan konsumsi listrik di Kabupaten Pinrang atau di mana pun. Upaya-upaya untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

- **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika setiap saat semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan makanan yang bernutrisi dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat.

Salah satu dimensi dari ketahanan pangan adalah ketersediaan bahan pangan secara fisik, yang dapat ditentukan antara lain melalui tingkat produksi, ketersediaan dan perdagangan bahan pangan yang terjadi Secara sederhana, ketersediaan pangan juga dapat diartikan sebagai rasio keseimbangan antara kemampuan produksi pangan terhadap kebutuhan konsumsi penduduk dalam suatu wilayah, kondisi ini akan memberikan tiga kemungkinan kondisi, yaitu: kondisi berlebih

(surplus), kondisi kekurangan (defisit), dan kondisi yang relatif seimbang (equivalent). Posisi ketersediaan pangan ini, ditentukan oleh garis ambang batas daya dukung pengan. Jika kemampuan produksi pangan berada diatas garis kebutuhan, maka kondisi wilayah ada pada keadaan surplus, sebaliknya jika kebutuhan berada jauh diatas kemampuan produksi, maka keadaan masuk dalam kondisi defisit.

Karena secara kuantitatif agak sulit untuk menentukan kebutuhan pangan berdasarkan jenis komoditi, maka pendekatan analisis dapat dilakukan melalui kebutuhan energi (kKal/hari/ kapita) penduduk. Mengacu pada DKP dan WFP, (2009), maka beberapa jenis bahan/komoditi pangan sumber energi antara lain: Padi, Jagung, dan Umbi-umbian (ketela pohon, dan ketela rambat). Masing-masing komoditi memiliki nilai energi (kKal) yang akan diperbandingkan bersama dengan kebutuhan normatif yang digunakan oleh BPS, yaitu sebesar 2100 kKal/kapita/hari16 sebagai nilai minimum angka kecukupan energi (AKE) untuk hidup layak.

1). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Tahun 2020 hingga 2024 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) mengalami tren fluktuatif. Perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga pangan serta beberapa tantangan diantaranya: a) Perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) Akses terhadap pangan yang masih belum merata akibat faktor ekonomi dan kondisi fisik; dan c) Jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan kecukupan konsumsi pangan. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaran pangan serta regulasi yang mendukung pembangunan ketahanan

pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Pinrang.

Grafik 2.1
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024

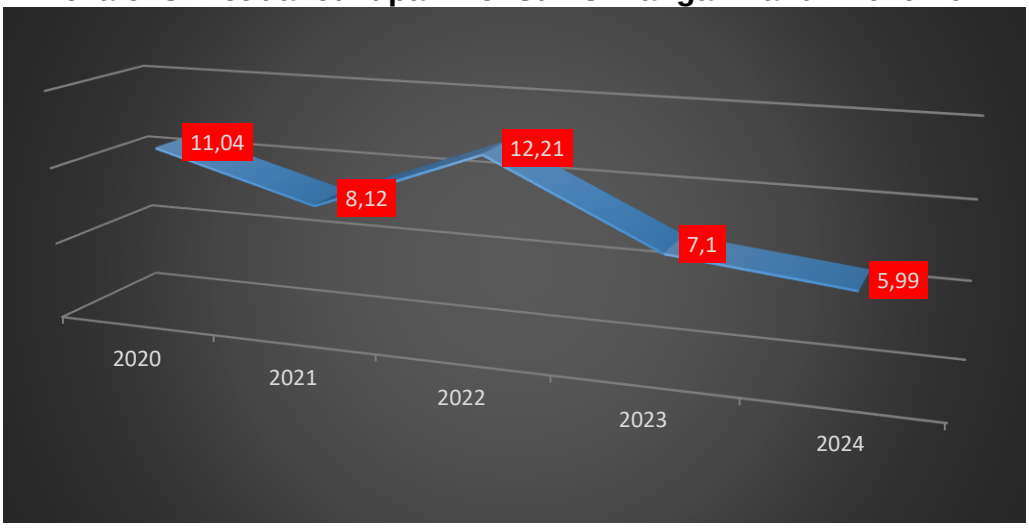

Sumber data : BPS Nasional, 2025

Tahun 2023 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 7,10 persen dan pada tahun 2024 sebesar 5,99 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kekurangan konsumsi pangan di Kabupaten Pinrang yang cukup tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh aspek ketahanan pangan, dimana Kabupaten Pinrang masuk dalam kategori Sangat Tahan Pangan.

2) Indeks Ketahanan Pangan

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran tersebut. Salah satu bentuk penyediaan sistem informasi yang dihasilkan oleh Badan Pangan Nasional berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*-FSVA). IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah. Indeks Ketahanan Pangan diperoleh dengan menilai 3 (tiga) aspek yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan

aspek pemanfaatan pangan, yang kemudian terbagi lagi menjadi 9 (sembilan) indikator.

Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

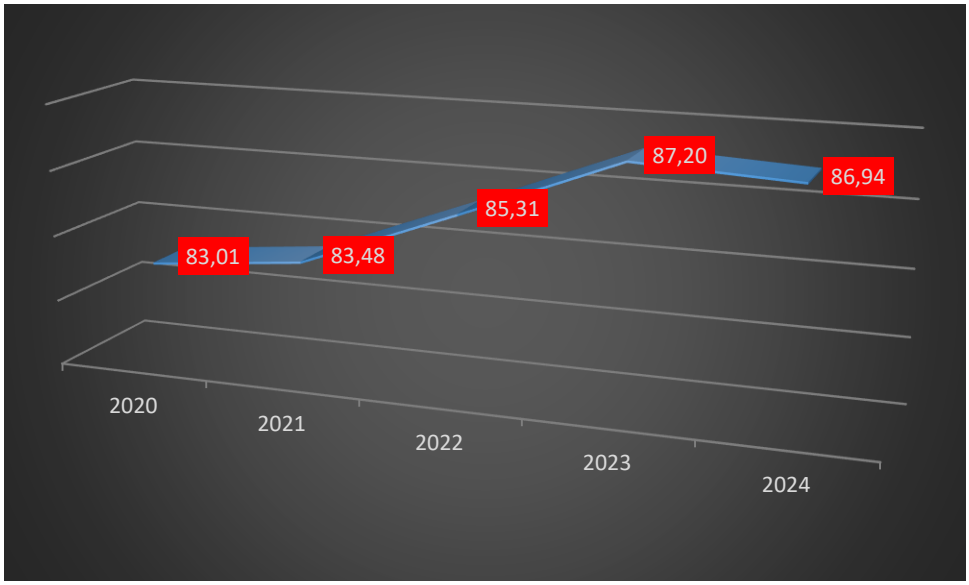

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Pada tahun 2020-2023, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 nilai IKP ini sedikit menurun menjadi 86,94. Walaupun nilai indeks mengalami penurunan sebesar 0,26 poin, namun masih tergolong stabil. Kabupaten Pinrang masih merupakan salah satu kabupaten yang memiliki ketahanan pangan sangat baik atau masuk kategori sangat tahan.

3) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang

didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indicator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didapatkan dari jumlah keragaman konsumsi pada setiap individu yang dikonsumsi setiap harinya, yaitu kelompok padi-padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok buah + kelompok lain-lainnya yang nilainya didapatkan dari aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, yang mana dengan besarnya keragaman pangan dikonsumsi oleh masyarakat makin besar pula skor PPH Konsumsi.

Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 sebesar 89,50% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 90,60. Pada tahun 2022 PPH Konsumsi Kabupaten Pinrang sebesar 91,20 dan pada tahun 2023 sebesar 91,60. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 sebesar 91,90. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang memiliki pola konsumsi yang semakin beragam. Salah satu factor yang menyebabkan kondisi ini adalah karena Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar melakukan

sosialisasi mengenai pemanfaatan pekarangan kepada kelompok tani sehingga mereka dapat memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan menanam berbagai macam tanaman pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi dengan angka ini Kabupaten Pinrang harus meningkatkan nilai skor PPH atau paling tidak mempertahankannya.

4) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan didapatkan dari jumlah produksi dari kelompok padi-padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok sayur dan buah dan kelompok lain-lain melalui aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan meningkatnya jumlah produksi pada setiap komoditi maka makin besar skor PPH Ketersediaan yang didapatkan.

Pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berada pada nilai 82,10 dan pada tahun 2021 sebesar 81,05. Pada tahun 2022 capaian PPH Ketersediaan ini sebesar 82,70 dan tahun 2023 sebesar 81,99. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 84,70. Pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan dan sayur-sayuran, jagung dan umbi-umbian, dan perhitungan neraca bahan makanan.

Grafik 2.3
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

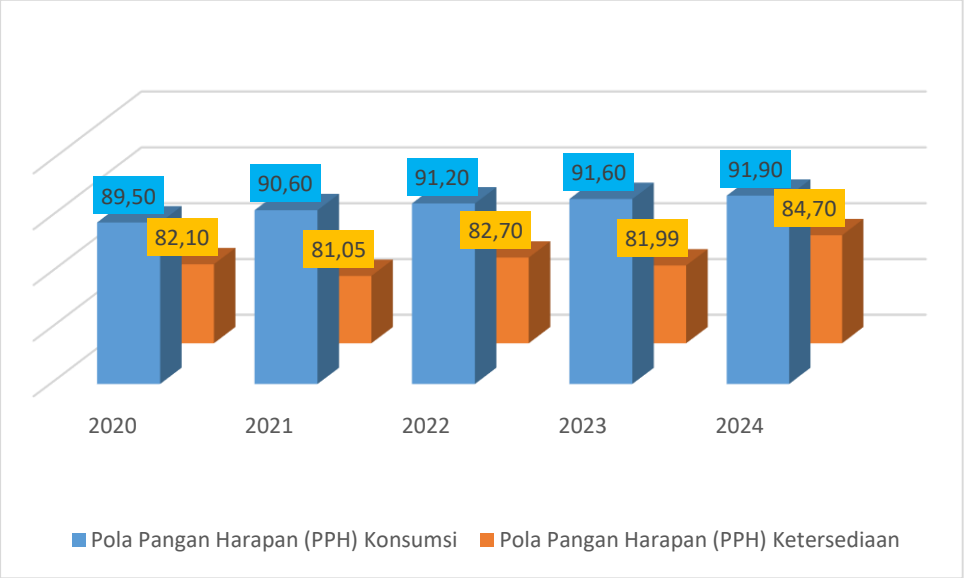

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

- **Ketahanan Air**

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan air di Sulawesi Selatan meliputi:

1). Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Air merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Air menjadi elemen penting bagi keberlangsungan metabolisme makhluk hidup. Air berada hampir di manapun di dunia namun kuantitas dan kualitasnya sangat bergantung kepada waktu dan tempat. Di gurun keberadaan air sangat sedikit sedang di lautan air tersedia dengan jumlah yang sangat banyak. Air hujan adalah air yang sangat murni yang hampir 100% merupakan senyawa H2O, sedangkan air laut adalah air yang banyak mengandung berbagai macam garam dengan jumlah yang besar. Senyawa garam terbesar di laut adalah NaCl yang terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Keberadaan garam, bahan terlarut lainya dan bahan tak terlarut menentukan kualitas air tersebut. Keberadaan makhluk hidup sangat tergantung dari ketersediaan air dengan kualitas yang tertentu. Pada mulanya manusia dapat memanfaatkan air langsung dari sumbernya,

yaitu tempat berkumpul air. Pada perkembangannya kemudian manusia merasa bahwa kualitas dan kuantitas air pada sumbernya dianggap tidak mencukupi. Dari aspek kuantitas perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia telah meningkatkan kebutuhan akan kuantitas air secara ekponensial. Pada saat ini dianggap bahwa kebutuhan manusia untuk kehidupannya yang layak adalah ketika terpenuhi ketersediaan air sebanyak 2.000 m^3/kapita/tahun. Dengan kuantitas itu maka kebutuhan manusia akan air untuk kegunaan air minum, pertanian, pertanian, energi, rekreasi, dan sebagainya dapat dipenuhi.

Air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu. Kegunaan air baku terbesar adalah untuk air minum. Dalam PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, air baku air minum dapat dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu.

Dapat dilihat pada grafik 2.4 di bawah ini bahwa indikator Kapasitas Air Baku Kabupaten Pinrang dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 kapasitas air baku sebesar 0,433 m^3/detik, kemudian sedikit menurun menjadi 0,418 m^3/detik pada tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana kapasitas hanya mencapai 0,284 m^3/detik. Kemudian pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 0,437 m^3/detik yang merupakan capaian tertinggi pada periode ini. Namun pada tahun 2024 kapasitas kembali mengalami penurunan yaitu 0,263 m^3/detik. Fluktuasi ini menunjukkan belum stabilnya pasokan air baku di Kabupaten Pinrang. Adanya perubahan iklim, curah hujan, dan ketersediaan sumber air permukaan menjadi faktor eksternal dari penyebab fluktuatifnya pasokan air baku. Kemudian belum adanya pembangunan baru dan belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pada unit air baku juga menyebabkan tidak stabilnya pasokan air baku ini.

Tabel 2.8
Kapasitas Air Baku Menurut Sumber dan Kapasitas Terpakai
Kabupaten Pinrang

No.	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (L/detik)	Kapasitas Terpakai (L/detik)
1	Sungai Wt. Sawitto	-	Sungai	5.000	70
2	Mata Air Pakeng	-	Mata air	3	3
3	Salo Maninning	-	Mata air	3	3
4	Sun	-	Mata air	3	3
5	Saluran Sekunder Langnga	-	Sungai	50	10
6	Sungai Dewata	-	Sungai	0	0
7	Sungai Kariango	-	Sungai	20	20
8	Sungai Boddi	-	Sungai	20	20

Tabel 2.9
Jumlah Unit SPAM dan Alokasi Air Baku
Kabupaten Pinrang

Jumlah Unit SPAM	Alokasi Air Baku (L/detik)	Kapasitas Terpasang (L/detik)	Kapasitas Produksi (L/detik)	Kapasitas Distribusi (L/detik)	Kapasitas Air Terjual (L/detik)	Idle Cap Terpasang (L/detik)	Idle Cap Produksi (L/detik)
84	263,40	281,90	149,40	124,68	120,10	-18,50	132,50

Sumber: SIMSPAM KemenPU

Grafik 2.4
Kapasitas Air Baku Kabupaten Pinrang (m^3/detik)
Tahun 2020 - 2024

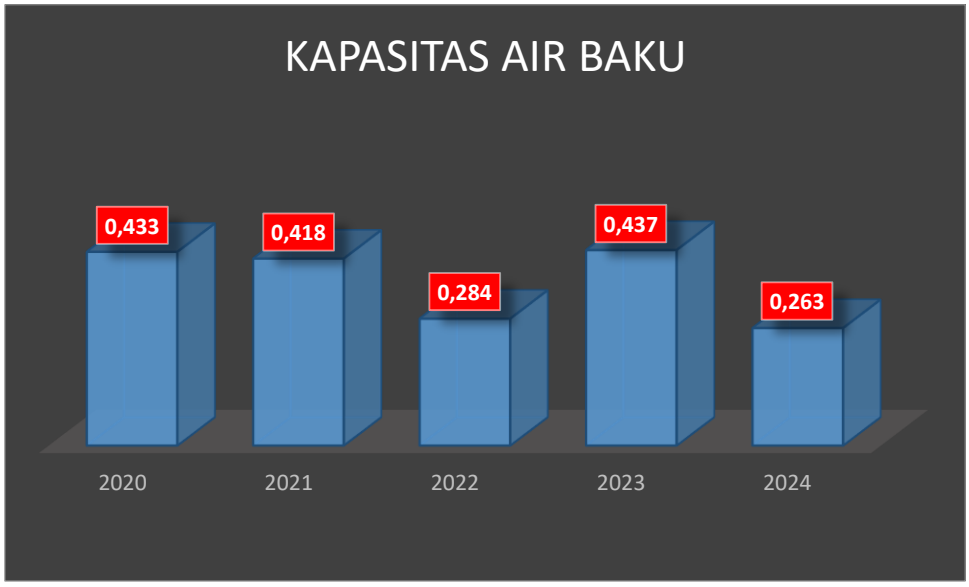

Sumber: SIMSPAM KemenPU

2). Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan dan Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Aman Perpipaan (%)

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pinrang telah ditetapkan melalui Rencana Induk SPAM (RISPAM) Tahun 2010-2025 dengan kondisi eksisting : (1) SPAM ibukota kabupaten : SPAM jaringan perpipaan dikelola oleh PDAM Tirta Sawitto dengan sumber air baku dari saluran induk Sawitto dengan debit aliran 5.000 liter/detik dan kapasitas produksi 125 liter/detik, dan SPAM jaringan non perpipaan oleh masing-masing masyarakat berupa sumur gali dan sumur bor. Namun sejak tahun 2012 PDAM Tirta Sawitto mengalami kesulitan non teknis sehingga tidak beroperasi lagi, dan SPAM di ibukota mengandalkan SPAM jaringan non perpipaan yaitu sumur gali dan sumur bor. Hal ini mengakibatkan capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum aman perkotaan tidak ada.

Grafik 2.5
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan dan Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Aman Perpipaan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 - 2024

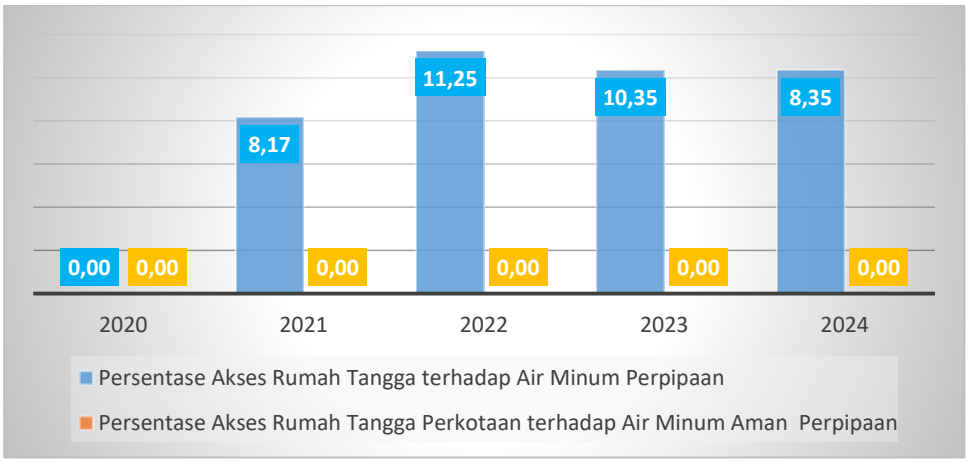

Sumber: Pokja PKP, 2025

Pada grafik di atas terlihat pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan sebesar 11,25% dan pada tahun 2023 sebesar 10,35%. Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan sebesar 8,35% dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 7.690 SR.

Sedangkan persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum siap minum perpipaan realisasinya masih nol. Di Kabupaten Pinrang tidak ada rumah tangga yang bermukim di wilayah perkotaan yang mengakses air siap minum perpipaan disebabkan karena dari sejumlah 7 (tujuh) unit SPAM IKK di Kabupaten Pinrang yang berfungsi hanya 1 (satu) unit yaitu IKK Manarang di Kecamatan Mattiro Bulu yang melayani rumah tangga di wilayah perdesaan dengan jumlah 625 SR. Sedangkan SPAM IKK Tuppu di Kecamatan Lembang yang melayani rumah tangga di wilayah perkotaan juga tidak berfungsi. Untuk akses rumah tangga terhadap air minum aman, baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan berdasarkan data PKAM dari total 10.448 SR hanya 27,87 persen.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

- **Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati**

Dalam mengukur Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah indikator penyusunnya terbagi atas 2 jenis pilar yaitu pilar pengurangan ancaman yang merupakan upaya pengayaan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan proporsi penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia. Sedangkan pilar pemanfaatan berkelanjutan antara lain sektor pertanian dan perkebunan berupa produktivitas padi, proporsi sawah irigasi, dan Indeks Pertanaman; dan sektor perikanan berupa produktivitas perikanan budidaya dan angka konsumsi ikan.

1). Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang menjelaskan tentang berbagai jenis kehidupan yang ada di planet

ini. Ini mencakup keanekaragaman organisme, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta keanekaragaman ekosistem yang mereka huni.

Ekosistem adalah serangkaian interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisik tempat mereka tinggal. Contoh ekosistem meliputi hutan, perairan, padang rumput, dan terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki ciri khasnya sendiri, seperti jenis tanah, iklim, dan keanekaragaman spesies yang ada di dalamnya.

Keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang begitu besar, seperti pemurnian air dan udara, penyerbukan tanaman, serta pengendalian hama alami. Melindungi keanekaragaman hayati juga berarti melindungi sumber daya alam yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, semakin tinggi pula kemampuan ekosistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan.

Produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung, dan kedelai yang merupakan komoditas strategis nasional dirasa belum mencapai titik maksimal sesuai dengan potensi, baik pada musim hujan dan saat musim kemarau. Ini menjadi tantangan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mencapai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Upaya Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan produksi beras selama ini lebih banyak dilakukan pada lahan sawah subur baik sawah irigasi teknis maupun setengah teknis melalui intensifikasi, diantaranya dengan penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia. Kabupaten Pinrang menyalurkan Pasokan Pupuk Kimia di 5 (lima) tahun terakhir dimulai tahun 2020 – 2024 sebanyak 180.200,34 ton sedangkan Pasokan Pupuk Organik sebanyak 2.657,81 ton. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia menggambarkan perbandingan antara jumlah pupuk organik yang disalurkan dibandingkan

dengan jumlah pupuk kimia yang disalurkan. Proporsi ini memberikan gambaran tentang seberapa besar penggunaan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia dalam praktik pertanian. Disajikan pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Proporsi Realisasi penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Subsidi (Kimia) Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

NO.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pupuk Organik	ton	703,00	814,90	1.139,91	-	-
2.	Pupuk Kimia (NPK&NPK Khusus, Urea)	ton	38.604,52	35.603,14	37.138,84	32.269,76	36.584,08
3.	Proporsi Realisasi penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Subsidi (Kimia)	persen	1,79	2,24	2,98	-	-

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, diolah oleh Bapperida Kabupaten Pinrang, 2025

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia meningkat dari 1,79% pada tahun 2020 menjadi 2,24% pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 2,98% pada tahun 2022. Artinya, meskipun secara volume pupuk organik jauh lebih kecil, perannya terhadap total pupuk subsidi meningkat. Indikasi menunjukkan adanya kebijakan diversifikasi pupuk atau kesadaran petani terhadap keberlanjutan. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024, sudah tidak ada lagi subsidi untuk pupuk organik dari Kementerian Pertanian.

2). Indeks Pertanaman Padi

Potensi ketersediaan daya air dan lahan merupakan faktor penentu dalam peningkatan indeks pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam

satu tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya. Indeks Pertanaman di Kabupaten Pinrang menggunakan IP: 200 artinya bahwa rata-rata masa tanam dan masa panen di Kabupaten Pinrang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Indeks Pertanaman Padi ini digunakan sejak tahun 2015 – 2024.

Tabel 2.11
Indeks Pertanaman Padi
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pertanaman Padi	nilai	200	200	200	200	200

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2025

Tabel 2.12
Luas Panen dan Produksi padi sawah menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton) Gabah Kering Giling (GKG)		Produktivitas (Kw/Ha) Gabah Kering Giling (GKG)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Suppa	1.448	1.135	5.794	5.273	39,55	46,46
2	Mattirosompe	5.691	11.221	46.951	54.535	50,75	48,6
3	Lanrisang	4.441	9.487	18.765	50.982	47,98	53,74
4	Mattirobulu	5.939	9.739	41.778	51.871	48,07	53,26
5	Watangsawitto	4.655	9.420	47.865	56.591	55,46	60,08
6	Paleteang	2.761	5.405	28.014	29.340	50,81	54,28
7	Tiroang	5.683	10.548	55.541	54.200	48,86	51,38
8	Patampanua	6.779	13.558	61.253	69.973	46,96	51,61
9	Cempa	5.727	10.780	48.686	52.275	46,53	48,49
10	Duampanua	7.664	13.466	92.625	75.209	56,90	55,85
11	Batulappa	1.826	1.947	8.264	9.686	48,73	49,75
12	Lembang	3.710	4.718	21.708	23.693	50,62	50,22
	Jumlah	**94.602**	**101.424**	**477.244**	**533.629**	**50,45**	**52,61**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2025

Pada tahun 2023 hingga tahun 2024, luas panen dan produksi padi sawah mengalami peningkatan. Dimana luas panen pada tahun 2023 sebesar 94.602 ha dengan jumlah produksi sebesar 477.244 ton dan produktivitas sebesar 50,45 kw/ha. Sedangkan luas panen pada tahun 2024 sebesar 101.424 ha dengan jumlah produksi sebesar 533.629 ton dan produktivitas sebesar 52,61 kw/ha.

Tabel 2.13
Luas Panen dan Produksi padi sawah di Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas panen	ha	108.302	108.594	105.569	94.602	101.424
2.	Produksi	ton	638.983	660.252	626.332	477.244	533.629
3.	Produktivitas	Kw/ha	59,00	60,80	59,30	50,45	52,61

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2025

3). Proporsi Sawah Irigasi

Kabupaten Pinrang tahun 2023 memiliki luas lahan sawah 56.365 hektare dengan proporsi sawah irigasi mengacu pada persentase atau bagian dari total luas sawah yang memiliki sistem irigasi. Sistem irigasi ini mencakup berbagai teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan air ke lahan pertanian secara teratur dan terkendali, seperti melalui saluran irigasi, bendungan, pompa air, dan kanal. Luas areal sawah yang dialiri air irigasi adalah 48.327 hektare tahun 2023. Maka didapat proporsi sawah irigasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 adalah sekitar 85,74%. Sedangkan pada tahun 2024 luas lahan sawah 51.124,38 hektare dengan luas sawah yang telah dialiri air irigasi 44.164,47 hektare sehingga proporsi sawah irigasi sebesar 86,39%. Hal ini menunjukkan bahwa Pinrang memiliki tingkat penggunaan irigasi yang cukup luas dalam kegiatan pertanian.

Tabel 2.14
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sawah yang dialiri air irigasi	ha	NA	NA	NA	48.327	44.164,47
2.	Luas lahan sawah	ha	NA	NA	NA	56.365	51.124,38
3.	Proporsi sawah irigasi	persen	NA	NA	NA	85,74	86,39

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, 2025

Dalam konteks pertanian, sawah irigasi biasanya lebih produktif karena air dapat dikelola dengan lebih baik, memungkinkan untuk lebih dari satu kali panen dalam setahun dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau ketidakpastian cuaca.

4). Produksi Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Dengan penekanan pada kondisi terkontrol dan orientasi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, definisi ini mengandung makna bahwa kegiatan budidaya perikanan adalah kegiatan ekonomi (prinsip-prinsip ekonomi) yang mengarah pada industri (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga). Sebelum definisi tersebut di atas, sudah berkembang definisi budidaya perikanan sebagai campur tangan atau upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah usaha pemeliharaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survival), menumbuhkan (growth) dan memperbanyak (reproduction) biota akuatik. Definisi ini berkembang dengan memperhatikan evolusi produksi yang berlangsung di dalam perikanan.

Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang meliputi perikanan budidaya air tawar dan payau.

Tabel 2.15
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	62.023,41	66.826,90	69.811,70	70.920,69	69.811,55

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2025

Peningkatan produksi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam manajemen, teknologi, atau praktik budidaya yang digunakan di sektor perikanan budidaya Pinrang selama periode tersebut. Ini bisa

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbaikan dalam manajemen tambak, penggunaan pakan yang lebih efisien, peningkatan genetika organisme, atau peningkatan pemantauan dan pengendalian kesehatan hewan budidaya.

Peningkatan produksi seperti ini merupakan indikator positif untuk keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Pinrang, serta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kontribusi Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang terus mengalami kenaikan rata rata yakni mencapai 136,20 persen pertahun selama periode 2020 sampai dengan 2023. Tingginya produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 didukung oleh pencapaian produksi pada komoditas Udang Windu, Udang Vaname, Bandeng, Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Nila, Ikan Mas Mina Padi, Nila Mina Padi, Mas KJA, Nila KJA, E.Cottoni dan Glacillaria. Namun pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya sedikit mengalami penurunan.

5). Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan di Kabupaten Pinrang sejak tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan dan rata-rata melebihi target yang telah ditentukan. Namun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 68,18 kg/kapita, yang mungkin disebabkan oleh preferensi konsumsi terhadap bahan makanan yang lebih beragam. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian, salah satunya dengan menggelar kampanye Gerakan Makan Ikan. Dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Angka Konsumsi Ikan
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	53,56	59,20	66,00	70,05	68,18

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan hutan (ITH). Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Pinrang diperoleh nilai 68,74. Sedangkan pada tahun 2021 nilai IKLH adalah 67,56 dan tahun 2022 sebesar 66,88. Pada tahun 2023 nilai IKLH sebesar 68,83%. Peningkatan nilai IKLH dibandingkan tahun 2022 ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai Indeks Kualitas Air sebesar 57,00.

Tabel 2.17
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Kabupaten PinrangTahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKA = Indeks Kualitas Air	Nilai	70	52,22	50,83	57,00	53,33
2	IKU = Indeks Kualitas Udara	Nilai	94,31	95,52	95,14	94,24	93,04
3	ITH = Indeks Tutupan Hutan	Nilai	48,62	42,16	42,16	42,13	42,61
4	IKLH Kab/Kota = (IKA30%)+(IKD30%)+(ITH 40%).	%	68,74	67,56	66,88	68,83	67,07

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Sementara pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengalami penurunan menjadi sebesar 67,07. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan dari beberapa komponen pendukungnya yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara, namun nilai indeks kualitas air masih masuk kategori “sedang” dan nilai indeks kualitas udara masuk kategori “sangat baik”. Sementara nilai indeks tutupan hutan meningkat walaupun nilai indeks tutupan lahan ini masih masuk kategori “kurang” sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 sehingga diperlukan upaya penambahan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pinrang.

1). Kualitas Air Permukaan (BOD)

Kualitas air permukaan secara nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kualitas badan air tergantung dari karakteristik dan kuantitas air yang masuk ke dalamnya. Oleh

karena itu, limbah cair yang masuk ke perairan juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memperburuk kualitas air permukaan.

Air permukaan merupakan air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah, atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air bawah tanah atau awan.

Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Meskipun ada sumber lainnya untuk air bawah tanah, yakni air jebak dan air magma, presipitasi merupakan faktor utama dan air bawah tanah yang berasal dari proses ini disebut air meteor. Air permukaan merupakan sumber terbesar untuk air bersih.

Kualitas Air Permukaan tidak mempunyai unit dan mempunyai kisaran skor dari 0 – 100 dengan skor yang tinggi menunjukkan kualitas air yang lebih baik.

Grafik 2.6
Kualitas Air Permukaan (BOD) Satuan (Nilai)
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

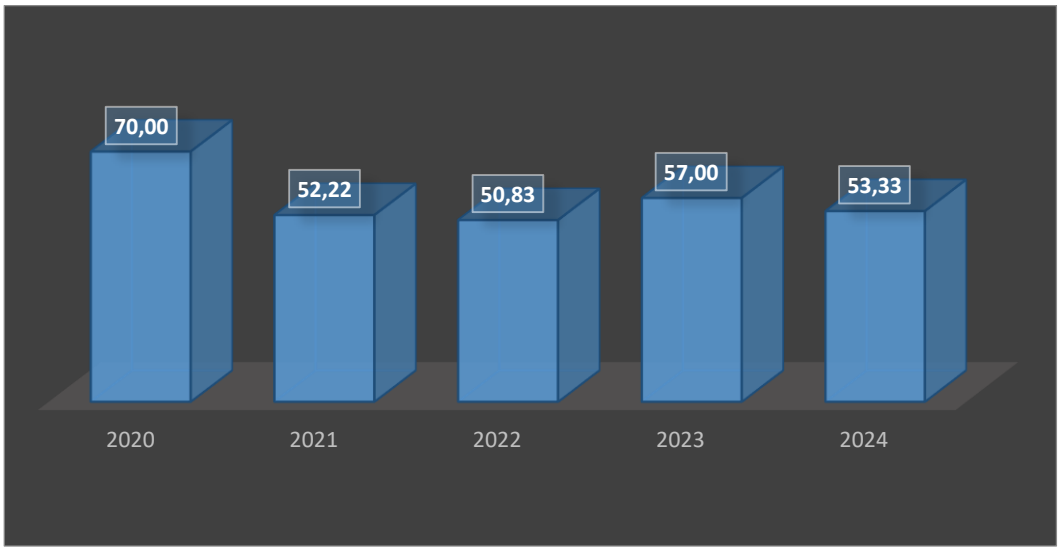

Sumber Data : *DPKPLH-Pinrang, diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pinrang Tahun 2025*

Secara umum, pencemaran air berasal dari limbah cair domestik dan limbah cair industri yang tidak dikelola dengan baik, sampah domestik, pemakaian air berlebihan, dan penataan fungsi

lahan yang tidak baik. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya penduduk yang membuang hajat sembarangan di badan air (sungai, danau, dan rawa). Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan kualitas air menurun. Bukan hanya itu, ketersediaan air juga dapat terganggu akibat alih fungsi lahan yang berakibat pada peningkatan aliran permukaan (*run-off*) di kawasan hilir yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan banjir. Kondisi tersebut yang menyebabkan kualitas air pada badan air dalam wilayah Kabupaten Pinrang berfluktuasi sebagaimana disajikan pada grafik di atas.

Indeks Kualitas Air Kabupaten Pinrang di tahun 2020 sebesar 70, hal ini menunjukkan bahwa kualitas air permukaan di Kabupaten Pinrang memiliki kategori baik, masih terjaga tetapi dengan sedikit kerusakan, sedangkan di tahun 2021 – 2024 situasi kualitas air permukaan mengalami tren fluktuasi, tahun 2024 sebesar 53,33.

Nilai capaian di tahun tersebut merupakan kategori sedikit memenuhi dengan kata lain kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar.

2). Kualitas Udara (No2)

Dalam keadaan normal, baku kualitas udara ambien akan terdiri dari 20% oksigen, 78% nitrogen, 0,93% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Setiap negara menetapkan baku mutu udara ambiennya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan tingkat pencemaran udara yang terjadi di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri kualitas udara selalu menjadi isu yang ramai dibincangkan oleh para ahli lingkungan hidup. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh *Air Quality Life Index* (AQLI), Indonesia memiliki kualitas udara yang cenderung menurun semenjak dua puluh tahun terakhir. Dijelaskan dalam PP No. 22/2021 bahwa udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi RI yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya. Hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang

terakumulasi pada parameter indeks kualitas udara.

Grafik 2.7
Kualitas Udara (No2) satuan (nilai) Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 - 2024

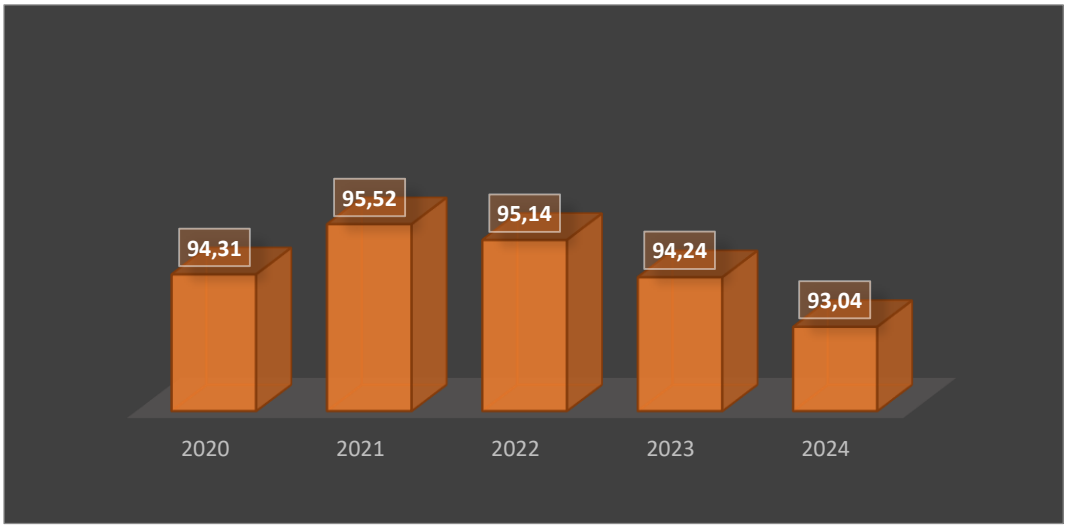

Sumber Data : DPKPLH Kabupaten Pinrang,diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pinrang, 2025

Berdasarkan Grafik 2.7 diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai Kualitas Udara Pinrang mengalami kondisi yang berfluktiatif dengan kondisi terbaik pada tahun 2021; kemudian terus menurun hingga tahun 2024. Udara merupakan unsur yang terpenting di dalam kehidupan makhluk hidup. Karena setiap hari makhluk hidup akan menghirup udara. Dampak yang ditimbulkan akibat kualitas udara di suatu daerah adalah berdampak pada kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Kualitas udara yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan di suatu wilayah.

Dengan menggunakan konversi rumusan baru untuk mengukur indeks kualitas udara di tahun 2023 sesuai dengan Sosialisasi Ditjen PPKL, hasilnya mungkin mencerminkan situasi yang lebih akurat dan terperinci tentang kondisi udara. Rumusan baru ini merupakan penambahan parameter P.M 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan). Kabupaten Pinrang sesuai konversi rumusan baru, tahun 2023 mencapai nilai indeks kualitas udara sebesar 80.08. Ini menandakan bahwa penggunaan rumusan baru memiliki nilai yang lebih rendah pada capaian IKU.

3). Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645 - 2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Kondisi perkembangan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, disajikan pada grafik 2.8.

Grafik 2.8
Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024 (nilai)

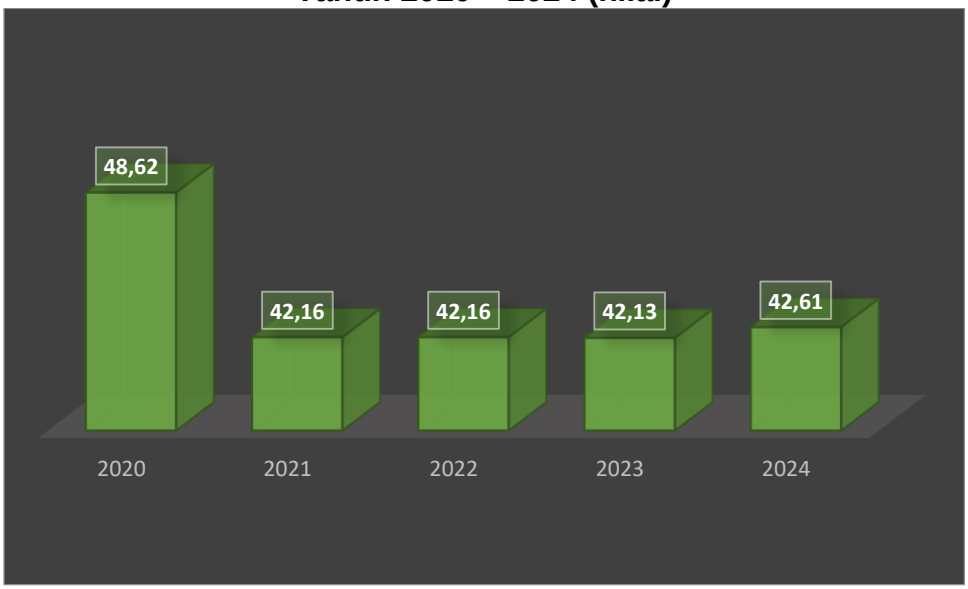

Sumber Data : DPKPLH Kabupaten Pinrang,diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pinrang, 2025

Secara umum terlihat terjadinya trend penurunan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pinrang, pada tahun 2020 nilai indeks yang diperoleh sebesar 48,62 kemudian mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2021 hingga tahun 2023, namun mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 42,61. Penurunan kualitas tutupan lahan bisa terjadi karena berbagai faktor, dan ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)

merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu- satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Penyebab turunnya nilai IKTL adalah penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campur.

Dengan memakai konversi rumusan baru, 23 (dua puluh tiga) klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL sebelumnya hanya 9 (sembilan) klasifikasi dan memasukkan faktor koreksi ekosistem Gambut (FKEG) bagi Kab/Kota dengan Ekosistem Gambut. Maka Kabupaten Pinrang di tahun 2023 mencapai nilai 61.05, nilai tersebut lebih besar daripada rumusan lama.

- **Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**

Kriteria rumah tangga bersanitasi yaitu memiliki sarana dan prasarana seperti air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

Air Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan sebagainya. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran.

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Pinrang tahun 2020-2025, sistem pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Pinrang umumnya masih dikelola dengan SPALD

setempat dengan skala individual maupun skala komunal serta pengolahan SPALD Terpusat dengan IPALD skala permukiman berbasis masyarakat. Untuk mengetahui capaian Rumah Tangga (RT) dengan akses Sanitasi Aman tahun 2020-2024 Kabupaten Pinrang dapat dilihat di bawah.

Tabel 2.18
Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	RT dengan Akses Sanitasi Aman	persentase	5,29	2,69	5,29	4,75	2,66

Sumber data : Tim Penyusun Roadmap Sanitasi Aman Provinsi Sulsel, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pinrang tahun 2022 mencapai 5,29 persen dan tahun 2023 mencapai 4,75 persen. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 2,66 persen. Pencapaian ini masih tergolong rendah, hal ini disebabkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh Pemerintah melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah, belum dilakukan kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah terkait penyedotan. Dari pihak Pemerintah Daerah menyediakan 4 unit mobil pengangkut tinja dengan kapasitas 3,5 m^3 yang melayani seluruh Kabupaten Pinrang. Salah satu faktor utama yaitu kurang optimalnya pengelolaan air limbah khususnya di kolam pengumpul karena sudah *over capacity* dan masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja.

- **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang masih sangat terbatas sehingga berpotensi menimbulkan peningkatan timbunan sampah domestik dan industri. Dampak Pengelolaan Sampah yang kurang maksimal juga ditemukan di area Pasar Rakyat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau yang tidak

sedap serta potensi timbulnya berbagai penyakit yang dapat secara langsung mengganggu masyarakat yang ada disekitarnya. Keluhan yang sama juga dilihat pada beberapa lokasi destinasi wisata, dimana penanganan dan pengolahan sampah pada lokasi tersebut masih cukup terbatas.

Jumlah timbulan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menggambarkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak diolah.

Tabel 2.19
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengelola Sampah di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Timbulan Sampah Tahunan	(ton/tahun)	63.304,14	64.570 ,25	65.861,77	67.178,98	68.522,47
2.	Penanganan Sampah Tahunan	(ton/tahun)	36.205,97	28.973 ,70	29.183,87	29.007,54	30.050,45
3.	Penanganan Sampah	(Persen)	57,19	44,87	44,31	43,18	43,85
4.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(Persen)	NA	21,96	23,16	16,95	18,09

Sumber Data: Pokja PKP, 2025

Pada tahun 2020 hingga 2024 capaian penanganan sampah mengalami tren fluktuatif. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya atau tidak memadainya infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA), TPST, dan fasilitas Armada atau angkutan sampah yang semakin sedikit karena banyak yang sudah tidak layak pakai. Ketika infrastruktur ini tidak memadai atau tidak tersedia, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk menangani sampah dengan baik. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah. Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilihan sampah di sumber, (2) pengelolaan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, berupa (1) penampungan sampah berupa TPS, (2) pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengelolaan sampah skala kota, dan (4) pemrosesan akhir sampah.

Tabel 2.20
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Timbulan Sampah Tahunan	(ton/tahun)	63.304,14	64.570,25	65.861,77	67.178,98	68.522,47
2.	Pengurangan Sampah Tahunan	(ton/tahun)	NA	14.182,80	15.251,54	11.385,64	12.395,12
3.	Pengurangan Sampah	(Persen)	NA	21,96	23,16	16,95	18,09
4.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(Persen)	NA	13,27	13,92	14,04	5,36

Sumber Data: Pokja PKP, 2025

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi bencana di Kabupaten Pinrang digambarkan dari capaian Indeks Resiko Bencana dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai berikut :

- **Indeks Resiko Bencana**

  Indeks Resiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu terdapat 3

(tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian resiko bencana, wilayah Kabupaten Pinrang merupakan wilayah yang rentan terhadap resiko, adapun terdapat 5 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Lokasi bencana tanah longsor yang tertinggi berada di Kecamatan Lembang karena penutupan lahan yang kurang baik (perubahan tutupan lahan) serta tergolong daerah pegunungan, dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.21
Distribusi Luas Wilayah menurut Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Luas Wilayah (ha) menurut Jasa Lingkungan					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Suppa	97.0	3,692.7	4,725.3	242.2	-	8,757.1
Matirro Sompe	463.2	5,098.2	3,635.6	-	-	9,197.0
Lansirang	294.2	5,859.8	447.1	-	-	6,601.1
Mattiro Bulu	361.4	7,503.0	5,080.6	0.0	-	12,945.0
Watang Sawito	487.6	5,825.9	-	-	-	6,313.4
Paleteang	394.0	4,197.2	143.9	-	-	4,735.1
Tiroang	-	8,003.9	56.1	-	-	8,060.0
Patampanua	358.1	8,295.7	3,461.1	-	-	12,114.9
Cempa	171.1	6,370.7	2,215.1	-	-	8,757.0
Duampanua	625.5	10,308.4	16,984.4	589.6	-	28,507.9
Batu Lappa	46.6	1,636.9	12,928.1	617.9	-	15,229.5
Lembang	295.1	10,670.0	47,054.0	12,404.1	698.6	71,121.7
Pinrang	**3,593.9**	**77,462.3**	**96,731.3**	**13,853.7**	**698.6**	**192,339.8**
Persentase	**1.9**	**40.3**	**50.3**	**7.2**	**0.4**	**100.0**

Sumber data: KLHS RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045

Dari tabel Distribusi Luas Wilayah menurut Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang, kita dapat melihat distribusi luas wilayah di berbagai kecamatan berdasarkan tingkat risiko tanah longsor.

Data menunjukkan distribusi luas wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan tingkat risiko tanah longsor, Kecamatan Lembang dengan luas wilayah 71,121.7 ha, dimana mayoritas wilayahnya memiliki tingkat risiko sangat tinggi. Sementara itu, Kecamatan Lembang juga memiliki luas wilayah terluas secara keseluruhan, dengan mayoritas wilayahnya memiliki risiko sedang dan sangat tinggi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah sebesar 189.008,00 ha. Dari data tersebut, sebagian besar wilayah (50,3%) memiliki risiko sedang, diikuti oleh wilayah dengan risiko rendah (40,3%) dan risiko sangat rendah (1,9%). Wilayah dengan risiko sangat tinggi dan sangat rendah masing-masing menyumbang persentase yang lebih kecil dari total luas wilayah.

Data ini penting untuk mendukung perencanaan mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Pinrang, karena memungkinkan identifikasi area-area yang rentan terhadap risiko tanah longsor dan alokasi sumber daya yang tepat untuk upaya pencegahan dan mitigasi.

Gambar 2.3
Peta Sebaran Wilayah menurut Kriteria Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

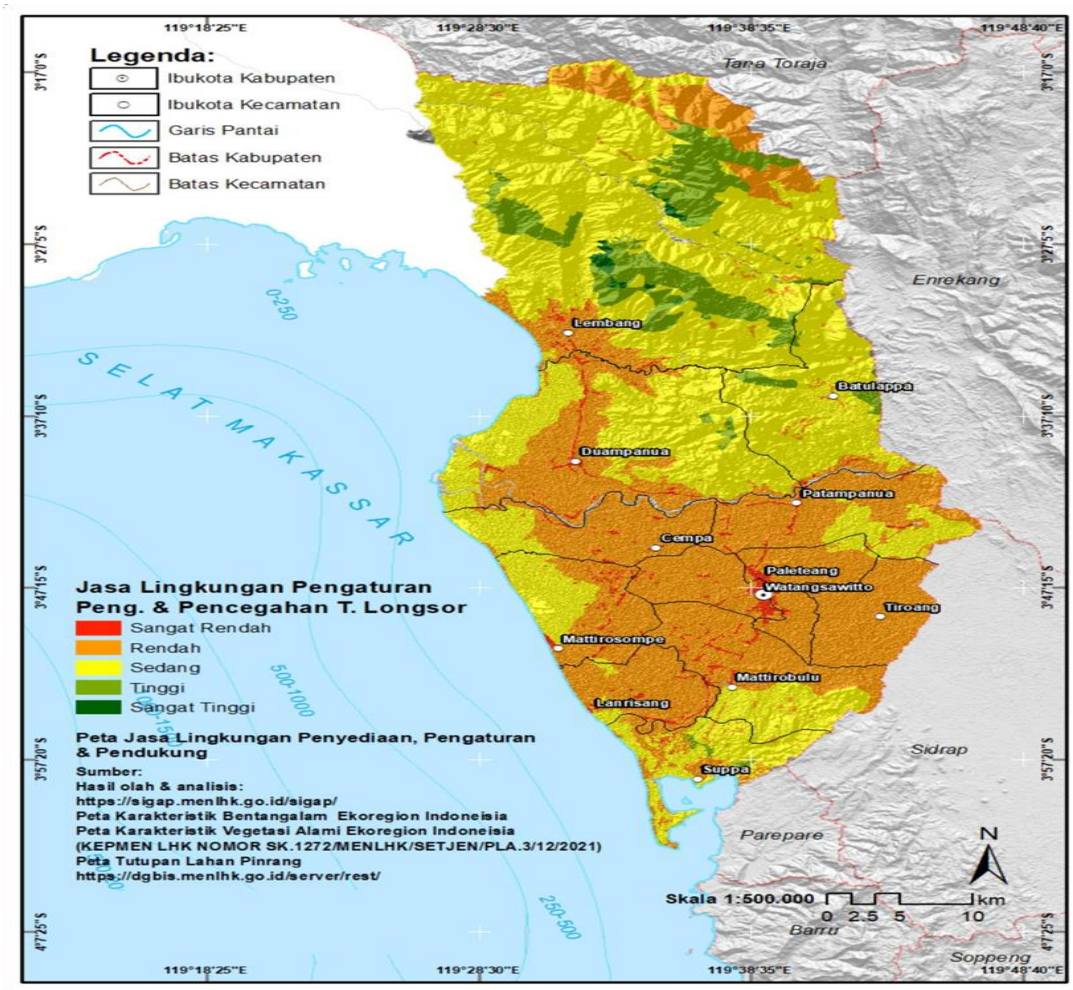

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa berdasarkan administrasi potensi terjadinya resiko longsor terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang dan Batulappa. Hal ini dikarenakan topografi kedua kecamatan tersebut sebagian wilayahnya berupa pengunungan. Sementara penggunaan lahan umumnya berupa semak belukar dan pertanian, dimana pemanfaatan lahan secara umum tidak berkelanjutan.

Tabel 2.22
Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Nilai	179,20	161,57	148,84	148,84	157,36
2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	NA	NA	NA	NA	0,48

Sumber: BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pinrang selama tahun 2020-2023 mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2024 nilai indeks ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 157,36. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi terjadinya bencana pada tahun 2024, seperti banjir, angin kencang dan tanah longsor.

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sebesar 0,48. Indeks Ketahanan Daerah yang rendah menunjukkan bahwa meskipun risiko bencana cukup tinggi, kemampuan daerah mengantisipasi, merespon dan memulihkan diri dari bencana masih terbatas.

- **Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Listrik, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Intensitas Emisi GRK adalah besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu. Pada prinsipnya, efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, dimana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut kaca. Yang termasuk kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida (CO_2),

nitrogen dioksida (N_2O), metana (CH_4), dan freon (SF_6, HFC dan PFC). Secara alamiah, rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari, namun sejak tahun 1950-an emisi gas CO_2 meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Sumber penghasil rumah kaca seringkali kita jumpai di sekeliling kita, misalnya penggunaan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, juga membakar sampah. Komitmen pemerintah daerah terkait pengurangan risiko bencana yang terjadi juga perlu memperhatikan dampak dari perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan *enhanced Nationally Determined Contributions (eNDC)* untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030.

Pemerintah Kabupaten Pinrang kemudian menindaklanjuti dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target tersebut dengan menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga tahun 2030 sebesar 35,78 persen. Target tersebut termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2025 dan menjadi salah satu indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data pada platform AKSARA dari periode 2010 sampai dengan sekarang yaitu Kabupaten Pinrang menjalankan total 39 kegiatan aksi PRK perubahan iklim telah dilaksanakan, dengan 23.848,69 TonCO2eq total potensi penurunan emisi kumulatif dan berkontribusi sebesar 0,48 persen terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.23
Penurunan Emisi GRK Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No	Sektor	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Energi	TonCO2eq	-	-	21547.83	21547.83	21547.83
2	Lahan	TonCO2eq	1935.29	1935.94	2300.86	2300.86	2300.86
3	Pengelolaan Limbah	TonCO2eq	-	-	-	-	-

No	Sektor	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	Kawasan Pesisir dan Kelautan	TonCO2eq	-	-	-	-	-
T O T A L			**1935.29**	**1935.94**	**23848.69**	**23848.69**	**23848.69**

Sumber Data : Sistem AKSARA Bappenas

2.1.1.7. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data terakhir tahun 2024 berjumlah 423.146 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebanyak 60.595 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Duampanua berjumlah 51.980 jiwa. Secara rinci penyebaran penduduk di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mattiro Sompe	30.155	30.873	30.461	28.457	31.638
2	Suppa	34.434	34.580	34.965	34.361	36.112
3	Mattiro Bulu	31.524	31.410	32.255	31.524	32.646
4	Watang Sawitto	56.570	57.975	57.277	59.730	60.595
5	Patampanua	37.577	38.051	38.559	33.370	39.327
6	Duampanua	50.226	50.076	51.139	51.159	51.980
7	Lembang	46.932	47.796	48.427	38.666	49.185
8	Cempa	19.543	19.673	19.866	17.614	20.256
9	Tiroang	23.409	23.848	23.744	23.322	24.978
10	Lanrisang	19.713	19.918	20.092	19.876	20.940
11	Paleteang	42.630	42.588	43.528	42.360	43.899
12	Batulappa	11.281	11.381	11.532	12.713	11.590
Jumlah		**403.994**	**408.109**	**411.392**	**417.932**	**423.146**

Sumber Data : Disdukcapil Kabupaten Pinrang, 2025

- **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,51, hal ini disebabkan oleh karena jumlah kelahiran lebih rendah daripada jumlah kematian. Selain itu adanya migrasi atau perpindahan penduduk.

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mattiro Sompe	-3.04	0.38	0.63	1.51	0,94
2	Suppa	1.57	0.64	0.89	2.25	1,09
3	Mattiro Bulu	1.02	1.03	1.28	1.75	0,98
4	Watang Sawitto	-1.43	0.45	0.70	1.63	1,45
5	Patampanua	-1.59	1.17	1.42	1.39	1,20
6	Duampanua	1.01	0.78	1.03	1.50	1,60
7	Lembang	-1.00	1.46	1.71	1.75	1,17
8	Cempa	-0.74	0.70	0.95	1.63	1,14
9	Tiroang	-1.07	0.59	0.84	2.51	1,06
10	Lanrisang	-0.50	0.83	1.08	1.70	1,60
11	Paleteang	0.99	0.92	1.17	0.67	1,50
12	Batulappa	-1.30	0.98	1.23	0.78	0,17
	Pinrang	**-0.51**	**0.84**	**1.08**	**1.59**	**1,25**

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2024

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya

penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Tabel 2.26
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Suppa	464	467	500.66	511.94	517,51
2	Mattiro Sompe	311	312	341.33	346.47	349,75
3	Lanrisang	270	272	309.5	314.77	319,79
4	Mattiro Bulu	238	240	248.77	253.14	255,63
5	Watang Sawitto	959	964	951.64	967.13	981,14
6	Paleteang	1143	1154	927.5	933.74	947,73
7	Tiroang	301	303	311.34	319.16	322,55
8	Patampanua	275	278	309.03	313.33	317,10
9	Cempa	216	218	223.9	227.55	230,16
10	Duampanua	172	173	177.21	179.87	182,76
11	Batulappa	71	72	69.76	70.3	70,42
12	Lembang	64	65	68.6	69.80	70,61
	Pinrang	**206**	**208**	**216.9**	**220.36**	**223,11**

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 981,14 jiwa/Km^2 . Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Batulappa yaitu sekitar 70,42 jiwa/Km^2 .

- **Rasio Jenis Kelamin Penduduk**

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin biasanya dinyatakan dalam jumlah penduduk laki laki per 100 perempuan. Jika rasio jenis kelamin lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 dimana terdapat sebanyak 206.252 jiwa penduduk laki-laki; dan 211.680 jiwa penduduk

perempuan, yang menghasilkan rasio total perbandingan penduduk menurut jenis kelaminnya dengan rasio total laki-laki berbanding perempuan sebesar 97,86 persen. Sementara pada tahun 2024 jumlah penduduk perempuan sebanyak 214.357 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 208.789 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 97,89 persen.

Tabel 2.27

Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten PinrangTahun 2020- 2024

No	Kecamatan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				2024			
		Laki -laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki -laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Mattiro Sompe	14.729	15.426	30.155	7,46	15.061	15.812	30.873	7,56	15.065	15.812	30.877	7,40	15.281	16.061	31.342	95,14	15.413	16.225	31.638	95,00
2	Suppa	17.143	17.291	34.434	8,52	17.173	17.407	34.580	8,47	17.420	17.516	34.936	8,49	17.767	17.956	35.723	98,95	17.965	18.147	36.112	99,00
3	Mattiro Bulu	15.449	16.075	31.524	7,80	15.386	16.024	31.410	7,69	15.556	16.215	31.771	7,83	15.801	16.527	32.328	95,61	15.964	16.682	32.646	95,70
4	Watang Sawitto	27.810	28.760	56.570	14,00	28.478	29.437	57.975	14,19	28.895	29.878	58.773	13,90	29.407	30.323	59.730	96,98	29.806	30.789	60.595	96,81
5	Patampanua	18.490	19.087	37.577	9,30	18.679	19.372	38.051	9,32	18.785	19.541	38.326	9,36	19.071	19.788	38.859	96,38	19.366	19.961	39.327	97,02
6	Duampanua	24.692	25.534	50.226	12,43	24.620	25.456	50.076	12,27	24.745	25.658	50.403	12,42	25.163	25.996	51.159	96,8	25.511	26.469	51.980	96,38
7	Lembang	23.569	23.363	46.932	11,62	23.975	23.821	47.796	11,71	23.940	23.842	47.782	11,76	24.411	24.205	48.616	100,85	24.646	24.539	49.185	100,44
8	Cempa	9.702	9.841	19.543	4,84	9.791	9.882	19.673	4,82	9.807	9.898	19.705	4,82	9.970	10.057	20.027	99,13	10.057	10.199	20.256	98,61
9	Tiroang	11.533	11.876	23.409	5,79	11.744	12.104	23.848	5,84	11.833	12.277	24.110	5,77	12.176	12.540	24.716	97,1	12.289	12.689	24.978	96,85
10	Lanrisang	9.630	10.083	19.713	4,88	9.743	10.175	19.918	4,88	9.922	10.344	20.266	4,88	10.099	10.512	20.611	96,07	10.283	10.657	20.940	96,49
11	Paleteang	21.098	21.532	42.630	10,55	21.140	21.448	42.588	10,43	21.271	21.691	42.962	10,57	21.466	21.785	43.251	98,54	21.814	22.085	43.899	98,77
12	Batulappa	5.624	5.657	11.281	2,79	5.612	5.769	11.381	2,78	5.636	5.845	11.481	2,80	5.640	5.930	11.570	95,11	5.675	5.915	11.590	95,94
	Jumlah	**199.469**	**204.525**	**403.994**	**97,53**	**201.402**	**206.707**	**408.109**	**97,77**	**202.875**	**208.517**	**411.392**	**97,82**	**206.252**	**211.680**	**417.932**	**97,86**	**208.789**	**214.357**	**423.146**	**97,89**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

- **Migrasi Penduduk**

Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 menurut Hasil LF SP2020 merupakan kab/kota yang memiliki 11 hingga 12 dari 100 penduduk pinrang lahir di luar kabupaten pinrang atau 11,20 persen. Komposisi migrasi seumur hidup menurut jenis kelamin, pada laki laki sebesar 52,71 persen lebih banyak dibandingkan perempuan sebesar 47,27 persen. Lebih dari setengah migran seumur hidup di Kabupaten Pinrang berjenis kelamin laki laki.

Diagram 2.1
Komposisi Migran Seumur Hidup
Antar Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang

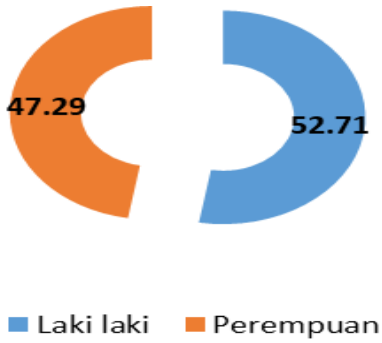

Sumber Data : Hasil LF SP2020, BPS Kabupaten Pinrang

Adapun Proporsi Penduduk Migran berstatus Seumur Hidup antar Kabupaten/Kota menurut Generasi Hasil LF SP2020 Kabupaten Pinrang, yaitu Proporsi penduduk berstatus Migran Seumur Hidup pada Generasi X dan Generasi Milenial lebih tinggi daripada generasi Pre – Bomer dan Baby Bomer. Sebanyak 14 hingga 15 dari 100 penduduk generasi X lahir diluar Kabupaten Pinrang.

Grafik 2.9
Proporsi Penduduk Migran berstatus Seumur Hidup antar Kabupaten/Kota menurut Generasi Hasil LF SP2020 Kabupaten Pinrang

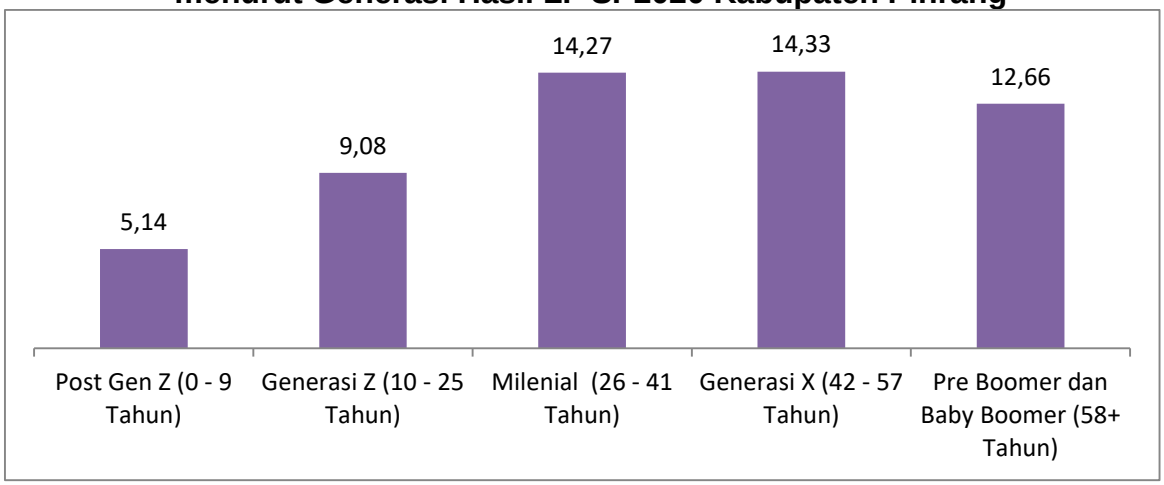

Sumber : Data BPS Kabupaten Pinrang, diolah oleh Bappelitbangda

Fenomena yang sama dengan komposisi migrasi risen, pada tahun 2022 sebanyak 5 hingga 6 dari 100 penduduk atau 5.45 persen yang berumur 5 tahun keatas di Kabupaten Pinrang bertempat tinggal di Kabupaten/kota lain 5 tahun sebelumnya. Komposisi Migrasi Risen antar Kabupaten/Kota menurut jenis kelamin Kabupaten Pinrang Hasil LF SP2020 pada laki - laki sebesar 52,24 persen lebih banyak dibandingkan perempuan sebesar 47,76 persen**.** Lebih dari setengah migran risen di Kabupaten Pinrang berjenis kelamin Laki-laki.

Diagram 2.2
Komposisi Migran Risen
Antar Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang

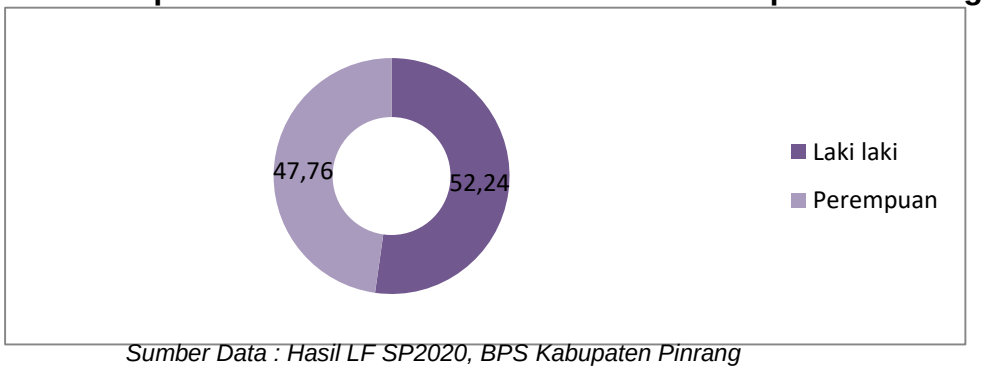

Sumber Data : Hasil LF SP2020, BPS Kabupaten Pinrang

Sementara Proporsi penduduk berstatus migrasi Risen antar Kabupaten/Kota menurut Generasi sesuai Hasil LF SP2020 yaitu sebanyak 7 hingga 8 dari 100 penduduk generasi milenial di Kabupaten

Pinrang merupakan migran risen. Generasi yang lebih muda Kabupaten Pinrang (post gen z, generasi z, dan milenial) memperlihatkan proporsi migran risen yang lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (generasi X, pre-boomer dan baby boomer).

Grafik 2.10
Proporsi Penduduk Migran Risen antar Kabupaten/Kota menurut Generasi Hasil LF SP2020 Kabupaten Pinrang

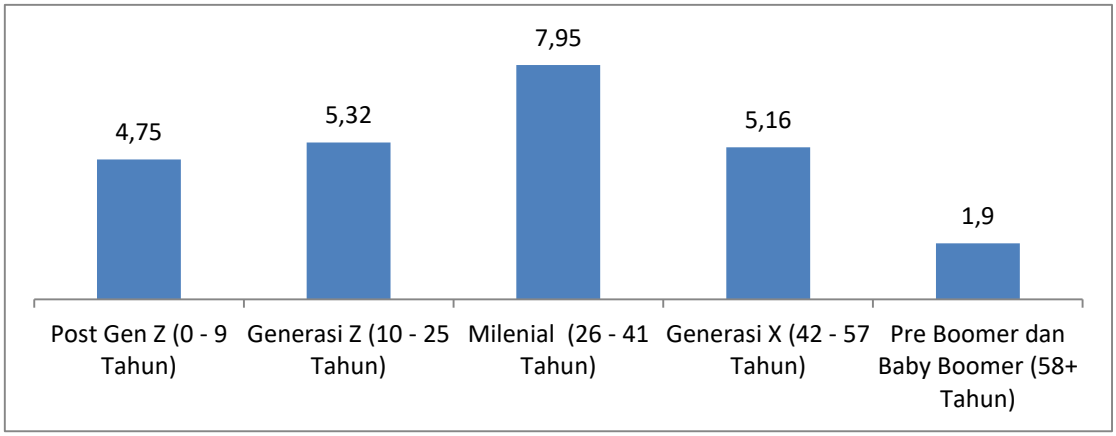

Sumber Data : Hasil LF SP2020, BPS Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah, struktur dan komposisi penduduk di masa mendatang maka dilakukan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Pada tabel di bawah ini disajikan data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 dengan data penduduk tahun awal yaitu tahun 2024 sebesar 423.146 jiwa.

Tabel 2.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Matirro Sompe	31.638	31.937	32.236	32.534	32.833	33.132	33.431
2	Suppa	36.112	36.505	36.898	37.292	37.685	38.078	38.471
3	Mattiro Bulu	32.646	32.967	33.288	33.609	33.931	34.252	34.573
4	Watang Sawito	60.595	61.473	62.350	63.228	64.105	64.983	65.860
5	Patampanua	39.327	39.801	40.274	40.748	41.222	41.695	42.169

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Duampanua	51.980	52.814	53.648	54.483	55.317	56.151	56.985
7	Lembang	49.185	49.761	50.336	50.912	51.488	52.063	52.639
8	Cempa	20.256	20.488	20.719	20.951	21.182	21.414	21.646
9	Tiroang	24.978	25.243	25.508	25.772	26.037	26.302	26.567
10	Lanrisang	20.940	21.274	21.609	21.943	22.277	22.611	22.946
11	Paleteang	43.899	44.557	45.214	45.872	46.530	47.188	47.845
12	Batu Lappa	11.590	11.610	11.630	11.650	11.670	11.690	11.710
Total		**423.146**	**428.430**	**433.710**	**438.994**	**444.277**	**449.559**	**454.842**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Kabupaten Pinrang selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 14,16 persen; disusul Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 12,80 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 11,32 persen. Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi pertanian Kabupaten Pinrang. Fenomena Elnino yang berkepanjangan membuat sejumlah komoditi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti komoditi tanaman pangan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perbaikan irigasi di beberapa daerah sehingga lahan pertanian tidak dapat ditanami. Selain itu, industri pengolahan tumbuh tidak seoptimis tahun 2022.

Sedangkan ekonomi Kabupaten Pinrang selama tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen.

Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,16 persen; disusul Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 7,64 persen. Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menggembirakan karena pertanian Kabupaten Pinrang meningkat cukup baik setelah tahun lalu mengalami kontraksi. Pertanian Kabupaten Pinrang tumbuh 5,64 persen pada tahun 2024, sebelumnya kontraksi sebesar -1,95 persen.

Jika dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dengan kabupaten/kota lainnya di Kawasan Ajatappareng seperti Kabupaten Sidrap dan Kota Pare-pare, berada di atas capaian kabupaten/kota tersebut.

Tabel 2.29
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Kawasan Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pinrang	%	0,44	5,04	4,52	2,18	5,71
2	Kabupaten Sidrap	%	-0,59	5,54	4,86	3,28	4,05
3	Kota Pare Pare	%	-0,08	4,41	5,93	3,88	5,09
4	Kabupaten Enrekang	%	1,25	6,36	3,71	2,33	4,54
5	Provinsi Sulawesi Selatan	%	-0,71	4,64	5,1	4,51	5,02
6	Nasional	%	-2,07	3,70	5,31	5,31	5,03

Sumber data : BPS, 2025

- **PDRB**

Struktur PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Pinrang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 42,83 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,72 persen; Konstruksi sebesar 10,82 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 6,37 persen. Peranan keempat

lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Pinrang mencapai 75,74 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.30
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,22	45,9	44,73	43,54	42,83
2	Pertambangan dan penggalian	2,80	2,78	2,85	3,01	2,96
3	Industri pengolahan	6,14	6,09	6,26	6,21	6,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	10,78	10,29	10,62	10,8	10,82
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,42	14,48	14,89	15,43	15,72
8	Transportasi dan Pergudangan	2,31	2,42	2,95	3,36	3,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	0,89	0,97	1,06	1,07
10	Informasi dan Komunikasi	2,59	2,57	2,57	2,57	2,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	2,02	1,97	1,86	1,81
12	Real Estate	3,32	3,17	3,11	3,15	3,19
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,1	0,11	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,08	4,07	3,72	3,57	3,64
15	Jasa Pendidikan	3,09	2,93	2,95	2,93	2,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,53	1,52	1,57	1,60
17	Jasa Lainnya	0,67	0,68	0,71	0,76	0,78
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Tabel 2.31
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44,57	44,6	43,14	41,39	41,37
2	Pertambangan dan penggalian	2,37	2,39	2,48	2,65	2,62
3	Industri pengolahan	6,13	6,16	6,47	6,51	6,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,01	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	9,7	9,21	9,42	9,64	9,61
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,35	15,58	16,08	16,74	16,77
8	Transportasi dan Pergudangan	2,59	2,69	3,02	3,23	3,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,88	0,98	1,1	1,10
10	Informasi dan Komunikasi	3,55	3,61	3,69	3,82	3,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	1,95	1,83	1,75	1,68
12	Real Estate	3,27	3,18	3,2	3,32	3,31
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,95	3,75	6,68	36,72
15	Jasa Pendidikan	3,35	3,3	3,32	3,38	3,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,53	1,6	1,68	1,69
17	Jasa Lainnya	0,71	0,73	0,76	0,83	0,85
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas harga dasar konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.081,43	5.716,12	9. 986,57	6.009,18	10. 630,00	6.074,26	10.949,08	5.956,37	11.414,64	6.292,39
2	Pertambangan dan penggalian	563, 22	303,56	604,73	321,63	676,20	349,12	757,21	382,05	788,68	398,69
3	Industri pengolahan	1. 233,48	785,74	1.324,63	829,31	1. 486,57	910,85	1.561,90	936,550	1.698,76	992,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,16	16,00	17,53	17,07	18,89	18,30	20,30	19.18	21,92	20,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,90	0,67	0,95	0,70	1,10	0,80	1,25	901,24	1,16	0,83
6	Konstruksi	2.165,47	1.243,77	2.239,87	1.241,39	2 .523,70	1.326,74	2.714,70	1.386,98	2.883,60	1.462,33
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.895,76	1.968,92	3.151,61	2.099,01	3.538,60	2.264,08	3.880,28	2.408,83	4.191,14	2.550,61
8	Transportasi dan Pergudangan	463,60	331,95	527,05	362,37	700,91	424,73	844,99	464,90	911,93	489,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175,70	109,44	192,76	118,31	230,48	138,25	265,83	157,83	285,64	167,72
10	Informasi dan Komunikasi	520,70	455,10	558,56	486,32	611,31	520,23	645,91	549,97	695,29	593,56

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	404,48	250,30	438,50	262,24	468,00	258,15	466,66	251,31	483,13	255,64
12	Real Estate	667,14	419,11	690,64	428,87	737,99	451,15	791,41	477,89	850,39	503,74
13	Jasa Perusahaan	20,01	14,38	21,43	15,15	25,82	17,59	29,03	19,294	31,20	20,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	819,87	497,66	886,32	532,49	883,34	527,74	897,29	528,99	970,44	558,25
15	Jasa Pendidikan	621,25	429,79	637,27	444,02	701,21	468,00	736,48	486,51	791,59	518,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	298,70	193,54	332,30	206,65	361,80	225,22	393,76	242,50	425,92	256,71
17	Jasa Lainnya	135,15	90,40	147,86	97,77	169,20	106,83	190,40	118,92	207,97	128,62
PDRB		**20.083,01**	**12.826,45**	**21.758,58**	**13.472,49**	**23.765,15**	**14.082,03**	**25.146,49**	**14.388,99**	**26.653,40**	**15.210,21**

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2021 sebesar Rp 6.009,18 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 6.074,26. Jika disandingkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku maka sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang.

PDRB Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 atas dasar harga konstan mencapai Rp. 13.472,49 (dalam milyar rupiah) jika dibandingkan total capaian PDRB pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.826, 45 (dalam milyar rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 646,04 (dalam milyar rupiah). Jika dipersentasekan, Kabupaten Pinrang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi 5,04% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan sebesar 0,44%. Pada tahun 2022, Total PDRB Kabupaten Pinrang mencapai Rp. 14.082,03 (dalam milyar rupiah), jika dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar Rp. 13.472,49 (dalam milyar rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 609,54 (dalam milyar rupiah). Jika melihat dari besaran kenaikan PDRB tersebut akan nampak bahwa besaran peningkatan PDRB pada tahun 2022 lebih kecil bila dibandingkan dengan besaran peningkatan PDRB pada tahun 2021. Bila disajikan dalam bentuk persentase maka laju tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 kembali mengalami perlambatan sebesar 4,52%. Kondisi ini disebabkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami perlambatan dari 5,13% pada tahun 2021 menjadi 1,09% pada tahun 2022. Berdasarkan analisa tabel 2.21 maka terlihat capaian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.009,18 (dalam milyar rupiah) dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.716,12 (dalam milyar rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 293,06 (dalam milyar rupiah). Bila dipersentasekan sebesar 5,13 %. Sementara capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun

2022 sebesar Rp. 6.074,26 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 hanya meningkat sebesar Rp. 65,08 (dalam milyar rupiah), dalam penyajian persentase sebesar 1,09%. Hal ini menunjukkan dibandingkan kecepatan laju pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021 sebesar 5,13% maka pada tahun 2022 tingkat laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan dengan tingkat pertumbuhan hanya 1,09% saja. Perlambatan tingkat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mengingat distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, sebagian besar masih ditopang oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 43,14%. Laju pertumbuhan terbesar selanjutnya berasal dari sector transportasi dan pergudangan sebesar 17,21% kemudian disusul oleh sector penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,85%.

Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menggembirakan karena pertanian Kabupaten Pinrang meningkat cukup baik setelah tahun lalu mengalami kontraksi. Pertanian Kabupaten Pinrang tumbuh 5,64 persen pada tahun 2024, sebelumnya kontraksi sebesar -1,95 persen. Tumbuhnya pertanian membawa angin segar pada lapangan usaha lainnya. Misalnya industri pengolahan tumbuh sangat optimis mencapai 6,01 persen. Ekonomi Kabupaten Pinrang selama tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,16 persen; disusul Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 7,64 persen. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,28	5,13	1,08	-1,95	5,64
2	Pertambangan dan penggalian	2,25	5,95	8,55	9,43	4,36
3	Industri pengolahan	-1,05	5,55	9,83	2,82	6,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,46	6,71	7,17	4,83	7,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,84	4,58	13,69	12,8	(7,96)
6	Konstruksi	0,89	-0,19	6,88	4,54	5,43
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,05	6,61	7,86	6,39	5,89
8	Transportasi dan Pergudangan	-11,58	9,16	17,21	9,46	5,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,45	8,11	16,85	14,16	6,27
10	Informasi dan Komunikasi	13,41	6,86	6,97	5,72	7,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	4,77	-1,56	-2,65	1,72
12	Real Estate	4,58	2,33	5,2	5,93	5,41
13	Jasa Perusahaan	-7,97	5,3	16,11	9,71	5,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,55	7	-0,89	0,24	5,53
15	Jasa Pendidikan	5,7	3,31	5,4	3,95	6,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,23	6,78	8,99	7,67	5,86
17	Jasa Lainnya	-11,08	8,16	9,26	11,32	8,16
	PDRB	**0,44**	**5,04**	**4,52**	**2,18**	**5,71**

Sumber data: Pinrang Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Pinrang

- **PDRB Perkapita**

Salah satu indicator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Pinrang sebesar 53,26 juta rupiah atau naik sebesar 3,42 dibanding pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 PDRB per kapita kembali naik 4,15 poin dengan nilai sebesar 57,41 juta rupiah dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 59,97. Pada tahun 2024, PDRB per kapita

tercatat sebesar 62,77 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan menurut harga Berlaku Tahun 2020-2024

No	PDRB Perkapita (ADHB)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kabupaten Pinrang	(Juta Rp)	52,93	53,41	57,71	59,97	62,77
2	Kabupaten Sidrap	(Juta Rp)	44,12	47,34	51,37	55,51	59,31
3	Kota Pare Pare	(Juta Rp)	48,50	51,03	55,78	58,78	61,97
4	Kabupaten Enrekang	(Juta Rp)	33,54	36,03	39,05	41,15	43,96
5	Provinsi Sul Sel	(Juta Rp)	55,68	59,65	65,59	69,70	73,57

Sumber data: BPS, 2025

- **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 sebesar Rp 400.091 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 414.198 atau naik sebesar Rp 33.283.

Tabel 2.35
Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	33,56	33,51	33,64	34,23	33,04
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,86	8,81	8,79	8,90	8,55
3	Garis Kemiskinan	rupiah/ kapita/ bulan	338.731	345. 892	366.808	400.091	414.198

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebanyak 33,51 ribu jiwa atau sebesar 8,81%. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 33,64 ribu jiwa, jumlah ini meningkat sebesar 0,13 atau sekitar 130 jiwa dibandingkan tahun lalu. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin salah satunya dipicu oleh kenaikan harga baik bahan makanan maupun bukan makanan. Kenaikan harga bahan makanan dan bukan makanan ini tentu akan berdampak pada tingkat konsumsi penduduk Kabupaten Pinrang. Jika dilihat dari persentase yang menurun dimana pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 8,81% dan di tahun 2022 sebesar 8,79% atau menurun sebanyak 0,02 poin sedangkan jumlah penduduk miskin meningkat, hal ini disebabkan karena yang menjadi pembanding dari persentase penduduk miskin tersebut adalah pertambahan jumlah penduduk dimana jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 bertambah sebanyak 3.686 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 33,04 ribu jiwa atau 8,55%, jumlah ini menurun sebesar 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.36
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	Persentase Penduduk Miskin	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kabupaten Pinrang	%	8,86	8,81	8,79	8,90	8,55
2	Kabupaten Sidrap	%	5,05	5,04	5,11	5,14	5,02
3	Kota Pare Pare	%	5,44	5,40	5,41	5,34	5,27
4	Kabupaten Enrekang	%	12,17	12,47	12,39	12,69	11,25
5	Sul Sel	%	8,99	8,53	8,66	8,70	8,06
6	Nasional	%	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber data: Publikasi BPS, 2025

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis

kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini musti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.37
Perbandingan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kabupaten Pinrang	%	91,14	91,19	91,21	91,10	91,45
2	Kabupaten Sidrap	%	94,95	94,96	94,89	94,86	94,98
3	Kota Pare Pare	%	94,56	94,60	94,59	94,66	94,73
4	Kabupaten Enrekang	%	87,83	87,53	87,61	87,31	88,75
5	Sul Sel	%	91,04	91,22	91,37	91,30	91,94
6	Nasional	%	89,81	90,29	90,43	90,64	91,43

Sumber data: BPS, 2025

Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Pinrang di tahun 2024 sebesar 91,45 persen. Angka ini masih berada di bawah persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Sidrap yang sebesar 94,98 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 91,94 persen, namun berada di atas angka nasional sebesar 91,43 persen.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indicator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indicator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian,

selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	7.020	6.717	4.658	6.995	6.470
Penduduk Angkatan Kerja	orang	167.701	165.431	166.763	192.418	207.383
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,19	4,06	2,79	3,64	3,12

Sumber Data: BPS, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan sebesar 1,27% poin, dimana pada tahun 2022 yang sebesar 2,79% menjadi 3,64% di tahun 2023. Hal ini berarti bahwa jumlah pengangguran usia angkatan kerja bertambah dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024 kembali beroperasinya sistem pengairan pada sektor pertanian di Kabupaten Pinrang berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun. Pada Agustus 2024, TPT Kabupaten Pinrang sebesar 3,12 persen, turun 0,52 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tabel 2.39
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang, Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kabupaten Pinrang	persen	4,19	4,06	2,79	3,64	3,12
2	Kabupaten Sidrap	persen	5,91	4,93	3,56	3,29	3,02
3	Kota Pare Pare	persen	7,14	6,72	5,60	5,86	5,23
4	Kabupaten Enrekang	persen	2,44	2,34	0,58	1,53	1,51
5	Provinsi Sul Sel	persen	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
6	Nasional	persen	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber Data: BPS, 2025

Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Pinrang berada pada peringkat 13 menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 3,12% dan masih berada di bawah rata-rata TPT Sulawesi Selatan dengan nilai 4,19%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa persentase pengangguran di Kabupaten Pinrang berada di bawah persentase pengangguran rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Indeks Gini**

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang indeks gini dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila indeks gini lebih kecil dari 0,3; dikategorikan ketimpangan sedang apabila indeks gininya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila indeks gininya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan indeks gini Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2020-2024 pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pinrang	nilai	0,375	0,367	0,363	0,340	0,299
2	Sul Sel	nilai	0,389	0,382	0,377	0,377	0,360
3	Nasional	nilai	0,385	0,381	0,402	0,388	0,381

Sumber data: BPS Sulsel, 2025

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2020–2024 Kabupaten Pinrang Indeks Gininya terkategorikan ketimpangan sedang. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang.

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Peringkat tertinggi nomor enam dalam pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Pemerintah Kabupaten

Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro-rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti jika berbagai indikator sudah terpenuhi Kabupaten Pinrang bisa bertransformasi menjadi sebuah kota.

Komponen IPM Kabupaten Pinrang dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Komponen IPM Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024

Uraian Angka	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Hidup (Tahun)	73,94	74,09	74,29	74,47	74,63
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	8,04	8,30	8,53
Pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)	11.844	11.956	12.102	12.559	13.010
IPM	**73,27**	**73,46**	**73,90**	**74,70**	**75,43**

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang

Pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada angka IPM yang terus mengalami kenaikan. Penggunaan perhitungan IPM metode baru ternyata memberikan dampak terjadinya penurunan dari segi nilai tetapi pada hakikatnya tetap terjadi kenaikan. Setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 IPM Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan sebesar 1,43 poin dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan indikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa di Kabupaten Pinrang telah terjadi perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan serta ekonomi.

Tabel 2.42
Perbandingan IPM Wilayah Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

No	IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pinrang	nilai	73,27	73,46	73,90	74,70	75,43
2	KabupatenSidrap	nilai	71,93	73,39	73,81	74,38	74,81
3	Kabupaten Enrekang	nilai	73,98	74,13	74,61	75,11	75,83
4	Kota Pare-pare	nilai	79,20	79,56	79,87	80,36	80,97
5	Kabupaten Barru	nilai	72,43	72,56	72,96	73,80	74,51
6	Sul Sel	nilai	73,08	73,38	72,82	73,46	75,18

Sumber data: BPS Sulsel, 2025

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Pinrang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan capaian IPM Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam 6 kabupaten/kota dengan IPM di atas capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Ajatappareng, Kota Parepare yang status pembangunannya “sangat tinggi” mencapai IPM sebesar 80,97. Meskipun pembangunan manusia Kabupaten Pinrang masih berstatus “tinggi”, namun pertumbuhan IPM Kabupaten Pinrang masih di atas pertumbuhan IPM Kota Parepare (0,76 persen), Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Barru (0,96 persen) serta Kabupaten Sidenreng Rappang (0,58 persen) di Wilayah Ajatappareng. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Pinrang (0,98 persen) pada tahun 2024 juga di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan (0,78 persen).

2. Kesehatan Untuk Semua

- **Usia Harapan Hidup (UHH)**

  Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang

dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat mencapai harapan hidup yang lebih baik pula.

Tabel 2.43
Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kawasan Ajatappareng dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024

No	Usia Harapan Hidup (UHH)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pinrang	tahun	73,94	74,09	74,29	74,47	74,63
2	KabupatenSidrap	tahun	73,83	74,00	74,17	74,32	74,45
3	Kabupaten Enrekang	tahun	73,52	73,53	73,76	73,92	74,07
4	Kota Pare-pare	tahun	73,97	74,01	74,25	74,44	74,63
5	Kabupaten Barru	tahun	72,05	72,10	72,37	72,57	72,75
6	Sul Sel	tahun	73,02	73,11	73,40	73,63	73,83

Sumber data: BPS Sulsel, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kawasan Ajatappareng, capaian UHH di Kabupaten Pinrang masih relative lebih baik.

- **Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa

nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya angka kematian ibu, bayi dan masih rendahnya angka harapan hidup secara nasional dan daerah sehingga perlu peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi, balita dan anak. Kasus Kematian Ibu masih terjadi cukup signifikan. Kematian bayi faktor berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal. Berat badan lahir rendah (BBLR) dibedakan dalam 2 katagori yaitu: BBLR karena premature (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi berat kurang untuk usianya.

Tabel 2.44
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	151	160	154	129	82,64

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

Sepanjang tahun 2020-2024 kematian ibu di Kabupaten Pinrang masih berfluktuatif. Pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu menurun jika dibandingkan kondisi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 129,7 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 8 dan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.168. Pada tahun 2024 angka kematian ibu kembali menurun menjadi sebesar 82,64 dengan jumlah kematian sebanyak 5 dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.050. Angka ini merupakan AKI yang paling rendah sepanjang 5 tahun terakhir. Informasi mengenai AKI menggambarkan hasil dari pelaksanaan program peningkatan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas serta ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan peran masyarakat melalui desa siaga dan peran keluarga melalui suami

siaga.

- **Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

Persentase Persalinan di fasilitasi Kesehatan yaitu Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pada Tahun 2023 Ibu bersalin yang mendapatkan fasilitas Kesehatan mencapai 96,28 persen dan pada tahun 2024 telah mencapai 100%, ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Persentase Persalinan di Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	Persentase	91,00	96,48	95,40	96,28	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, hal ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap anak Indonesia khususnya di kabupaten pinrang dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Integragsi penurunan stunting melalui 8 aksi meliputi; Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati tentang Peran

Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting serta Reviu Kinerja Tahunan.

Tabel 2.46
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	N/A	24,50	20,90	17,60	22,20

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

Prevalensi stunting pada balita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur status gizi dan kesehatan anak di suatu daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, perkembangan prevalensi stunting pada balita menunjukkan dinamika yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Pada tahun 2020, data prevalensi belum tersedia secara lengkap (N/A). Namun, mulai tahun 2021 tercatat prevalensi stunting balita sebesar 24,50%, menandakan bahwa hampir satu dari empat balita di Pinrang mengalami kondisi tubuh pendek atau sangat pendek akibat kekurangan gizi kronis.

Seiring dengan berbagai upaya intervensi gizi dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, terjadi penurunan bertahap:

- Tahun 2022: prevalensi menurun menjadi 20,90%, menunjukkan penurunan sebesar 3,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
- Tahun 2023: prevalensi kembali turun ke 17,60%, atau turun sekitar 3,3 poin dari tahun 2022.

Penurunan yang konsisten selama dua tahun ini menjadi indikasi bahwa program-program percepatan penurunan stunting, baik dari sisi intervensi spesifik (gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, PMT balita) maupun intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, edukasi), telah menunjukkan efektivitasnya di tingkat lokal.

Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan kembali angka prevalensi menjadi 22,20%, atau naik 4,6 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena dapat mengindikasikan berbagai kemungkinan:

- Terjadinya penurunan cakupan atau kualitas layanan gizi dan kesehatan dasar.
- Disrupsi pada rantai pasok makanan bergizi atau layanan posyandu.
- Kelemahan koordinasi antar perangkat daerah dan kurang optimalnya peran lintas sektor.
- Ketidaksesuaian data atau perubahan metode pengukuran yang mempengaruhi hasil akhir.

Secara keseluruhan, meskipun sempat menunjukkan tren penurunan, peningkatan kembali prevalensi pada tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target.

- **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA +**

Pencapaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) tahun 2020 – 2024 menunjukan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung positif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yang diindikasikan akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap layanan kesehatan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang menunjukkan optimalisasi program penemuan dan penanganan TBC, dengan kata lain pelaksanaan kinerja dalam melakukan penemuan dan penanganan telah sesuai mekanisme yang dijalankan dengan dukungan program kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 81,93%, mengindikasikan adanya tantangan keberlanjutan program atau factor lain seperti ketidakpatuhan pasien, keterbatasan sumber daya, atau kendala pendeteksian kasus.

Tabel 2.47
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA +
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA +	Persentase	75,57	70,00	100	95,00	81,93

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**

Tuberkulosis adalah penyakit yang sudah lama disebabkan oleh patogen bakteria dan tidak pernah tertangani dengan baik. Upaya penyelesaian sudah dilakukan selama 77 tahun sejak Indonesia merdeka, vaksin dan obatnya sudah ditemukan sejak puluhan tahun lalu, tapi tidak pernah bisa tertangani dengan baik.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Pinrang mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 89,18 persen, 2021 sebesar 91,58 persen kembali menurun di tahun 2023 sebesar 79,74 persen, angka ini masih akan berubah karena masih ada beberapa pasien yang masih pengobatan atau belum selesai pengobatannya. Sedangkan pada tahun 2024 angka keberhasilan ini meningkat menjadi 88,18 persen. Kinerja pengobatan TB di Kabupaten Pinrang masih relative baik dan sesuai standar global walaupun ada fluktuasi signifikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola program TB, pengawasan minum obat, serta intervensi kesehatan masyarakat.

Tabel 2.48
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persentase	89,18	91,58	88,95	79,74	88,18

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pinrang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sampai

dengan Desember 2024 cakupan kepesertaan di Kabupaten Pinrang mencapai 414.435 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 420.493 jiwa atau jika dipersentasekan sebesar 98,56 persen dengan jumlah peserta aktif sebanyak 337.287 jiwa atau 81,38 persen dan jumlah peserta non aktif sebanyak 77.148 jiwa atau 18,62 persen. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren sangat positif. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pinrang dan BPJS dalam memperluas kepesertaan, khususnya melalui optimalisasi PBI (Penerima Bantuan Iuran), peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat JKN, dan integrasi program kesehatan dengan layanan dasar dan rujukan.

Tabel 2.49
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	74,74	73,99	86,00	97,18	98,56

Sumber data: Laporan Pelaksanaan Program JKN BPJS Kesehatan, 2025

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

- **Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)**

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam suatu populasi atau negara. Kedua indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa lama individu-individu dalam suatu populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka Rata-rata lama sekolah dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu.

Tabel 2.50
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,87	8,04	8,30	8,53
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2024

Dari tabel diatas data capaian Angka rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pinrang terus meningkat dari tahun 2020-2024.

- **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 25,94% dan tahun 2021 sebesar 26,96%. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh jumlah koleksi perpustakaan yang meningkat sebanyak 3,84% dari koleksi tahun lalu. Juga adanya peningkatan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Tahun 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 28,42% dan pada tahun 2023 sebesar 28,77%. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 72,19 persen.

Tabel 2.51
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	UPLM1 = Pemerataan Layanan perpustakaan	%	0,123	0,123	0,123	0,119	0,3799

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	%	78	81,84	81,88	83,20	0,5539
3	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan	%	0,107	0,107	0,107	0,128	0,5008
4	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	85,05	88,32	98,26	99,05	0,6186
5	UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP	%	-	0,03	0,03	0,02	1,0000
6	UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	0,005	0,03	0,057	0,064	1,0000
7	UPLM7=Anggota perpustakaan	%	18,26	18,26	18,54	18,81	1,0000
8	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = ∑UPLM/AM**	**%**	**25,94**	**26,96**	**28,42**	**28,77**	**72,19**

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2025

- **Indeks Literasi Membaca**

Kemampuan Literasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan ini diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, social, maupun professional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar, guru diharapkan mampu berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui pengajaran yang berpusat kepada siswa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu tahun 2022-2024 indeks literasi membaca semakin meningkat baik itu di tingkat SD maupun tingkat SMP. Pada tahun 2024 indeks literasi membaca tingkat SD sebesar 54,00 sedangkan tingkat SMP sebesar 65,69. Adanya peningkatan yang cukup signifikan tersebut menandakan bahwa minat baca anak dan masyarakat semakin meningkat. Namun angka ini belum mencapai target nasional sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan indeks literasi diantaranya adalah dengan melakukan

pendampingan mengenai cara membangun kemampuan pondasi literasi dan numerasi dan tentu saja dengan menyediakan buku teks dan non teks yang berkualitas sebagai sumber baca dan menjadi salah satu indicator tinggi atau rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Grafik 2.11
Indeks Literasi Membaca Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024

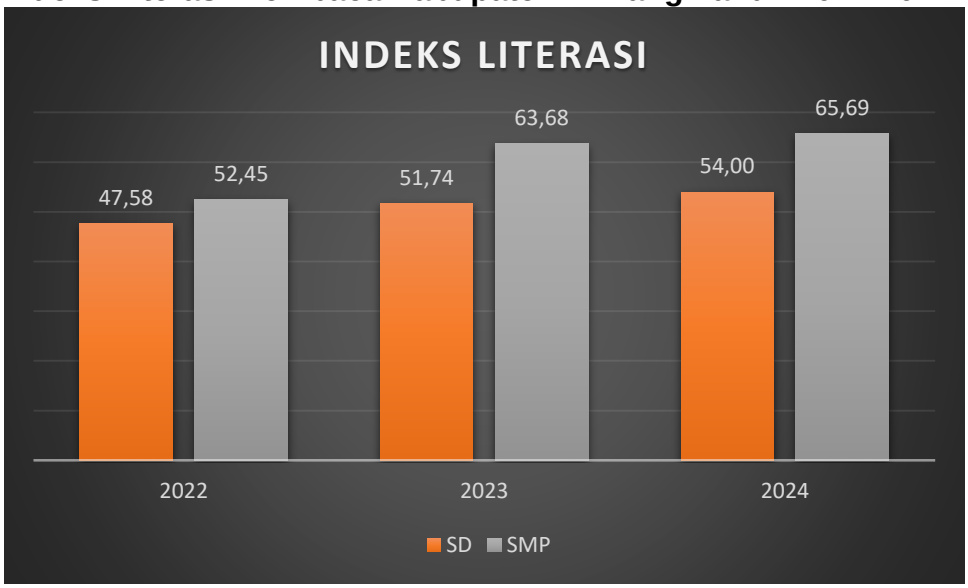

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Numerasi**

Indeks Numerasi diukur melalui survei yang mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam tiga ranah, yaitu kemampuan memahami bacaan, kecakapan numerasi, dan kecakapan literasi sains. Saat ini pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam melakukan assessment terkait kualitas pendidikan. Salah satu assessment yang dilakukan adalah Asesmen Kompetensi Numerasi dimana mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Negara Indonesia dan dunia.

Di Kabupaten Pinrang, indeks numerasi siswa juga mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024 indeks numerasi SD sebesar 49,73 sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 59,87. Seperti halnya dengan indeks literasi, capaian ini perlu untuk terus

ditingkatkan dengan melakukan pendampingan mengenai cara membangun kemampuan pondasi literasi dan numerasi dan tentu saja dengan menyediakan buku teks dan non teks yang berkualitas sebagai sumber baca dan menjadi salah satu indicator tinggi atau rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Grafik 2.12
Indeks Numerasi Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024

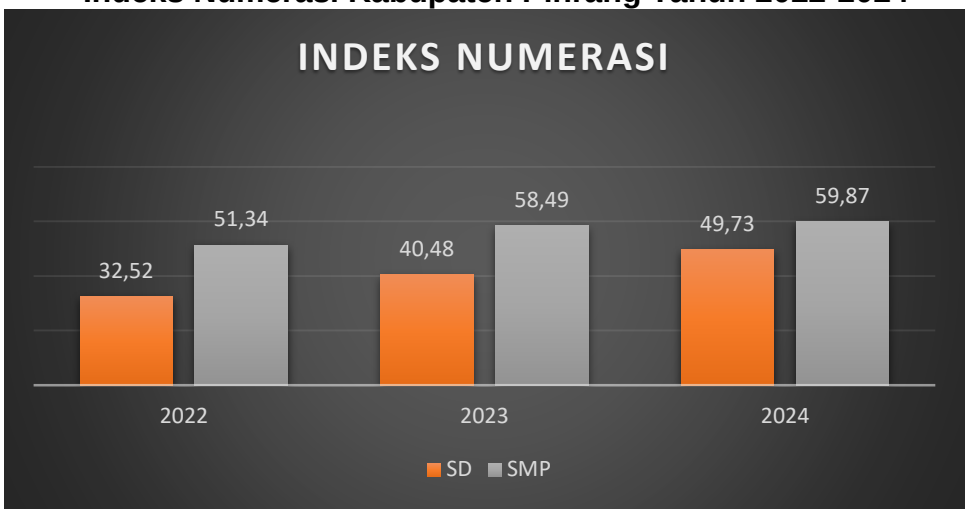

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui dan memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi menggambarkan bahwa kualitas pendidikan semakin baik.

Di Kabupaten Pinrang proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sejak tahun 2020 sampai 2024 semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa kualitas penduduk Kabupaten Pinrang semakin baik dari segi pendidikan.

Grafik 2.13
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

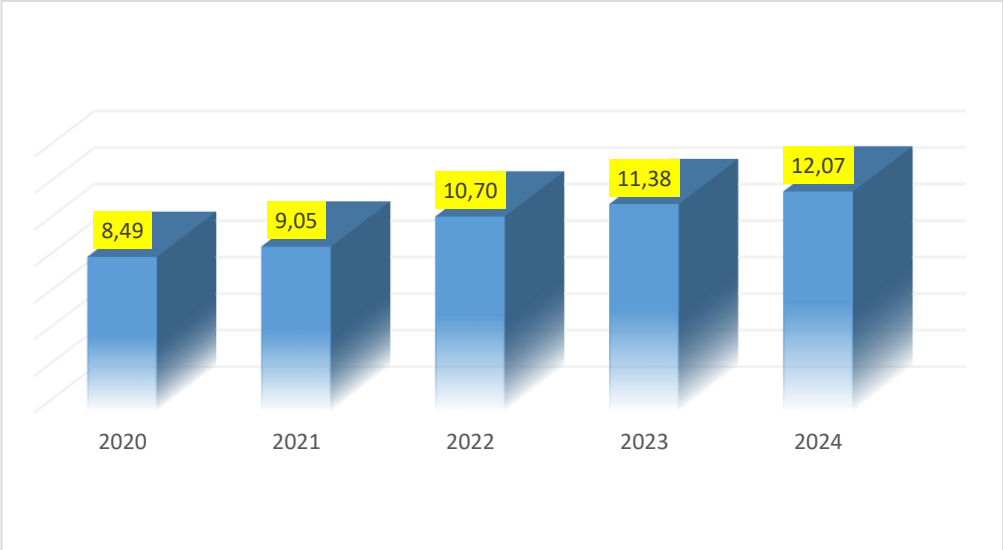

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

- **Persentase Pekerja Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Persentase pekerja yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama kurun waktu 2020-2024 pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2023 persentase pekerja yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh tamatan SD sebesar 41,75% dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 192.918 orang. Sementara jika melihat persentase pekerja usia 15 tahun ke atas, pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA sebesar 27,21 pada tahun 2023. Begitu pula pada tahun 2024, persentase pekerja usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh tamatan SMA yaitu sebesar 20,71 persen.

Tabel 2.52
Persentase Pekerja yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD	%	42,27	38,43	35,81	41,75	33,52
2.	SMP	%	18,79	17,86	16,67	17,36	17,59

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3.	SMA	%	27,92	30,45	33,75	27,21	20,71
4.	Perguruan Tinggi	%	11,02	13,27	13,77	14,92	15,83

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

- **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Pemerintah terus mengupayakan perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia terkhusus bagi warga Kabupaten Pinrang. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pinrang di tahun 2022 mencapai 72,16 persen sedangkan di tahun 2023 dan 2024 menurun menjadi 72,02 persen atau menurun 0,14 persen. Hal ini disebabkan adanya beberapa perusahaan baru di Kabupaten Pinrang yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 2.53
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	79,75	79,10	72,16	72,02	72,02

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang, 2025

- **Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)**

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas pada tahun 2022-2024 sebesar 0,38 dengan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sebanyak 4 orang dengan rincian 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2.54
Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	DISABILITAS YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL (orang)	orang	NA	NA	4	4	4
2	ANGKATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS (orang)	orang	NA	NA	1.044	1.044	1.044
3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	persen	NA	NA	0,38	0,38	0,38

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang, 2025

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

- **Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi**

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Grafik 2.14
Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diolah oleh Bappelitbangda tahun 2025

Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan atau fasilitasi Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 mencapai 70,83%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan keagamaan di Kabupaten Pinrang pada tahun tersebut mendapatkan dukungan atau fasilitasi dari pemerintah setempat atau lembaga terkait.

Dengan tingkat dukungan atau fasilitasi sebesar 70,83%, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah atau lembaga terkait di Kabupaten Pinrang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan keagamaan. Dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun komunikasi dan mempererat sinergi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya menjaga dan memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Kabupaten Pinrang. Adapun bentuk dukungan ini mencakup pemberian bantuan pembangunan masjid dan gereja, izin kegiatan, atau dana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan yang beragam di wilayah tersebut.

Tingkat dukungan yang tinggi ini dapat mencerminkan pentingnya peran agama dan kegiatan keagamaan dalam kehidupan masyarakat setempat, serta komitmen pemerintah dalam menjaga dan mendukung kegiatan tersebut sebagai bagian dari kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

- **Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**

  Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Pinrang yang masih dalam proses pengiriman pengregistrasian ke Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) dapat menjadi indikator penting dari upaya pelestarian dan perlindungan warisan budaya di wilayah tersebut.

  Dengan kata lain, persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah diakui keberadaannya dan sedang dalam proses pengiriman informasi registrasi resmi kepada otoritas kebudayaan pusat.

Jika persentase ini masih dalam proses pengiriman, bisa jadi itu menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang sedang aktif dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan warisan budayanya. Ini dapat menandakan komitmen pemerintah dan masyarakat setempat terhadap pelestarian warisan budaya mereka.

Sementara itu, proses pengiriman pengregistrasian yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama dengan masyarakat lokal mengakui pentingnya pelestarian dan perlindungan warisan budaya mereka serta berupaya untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya pelestarian tersebut.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- **Indeks Pembangunan Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Permen PPPA Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Pengukuran IPK Kabupaten Pinrang berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu Kemandirian, ketentraman, dan Kebahagiaan. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	Persentase	NA	65,78	56,55	62,71	61,74

Sumber Data : Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang,2025

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Kabupaten Pinrang dari 65,78 pada tahun 2021 menjadi 61,74 pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga di wilayah Kabupaten Pinrang. Penurunan tersebut berpengaruh pada faktor perubahan kondisi ekonomi atau adanya perlambatan laju ekonomi lokal yang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

- **Indeks Pembangunan Pemuda**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda di Indonesia dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas beserta kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda.

Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Pemuda dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2023

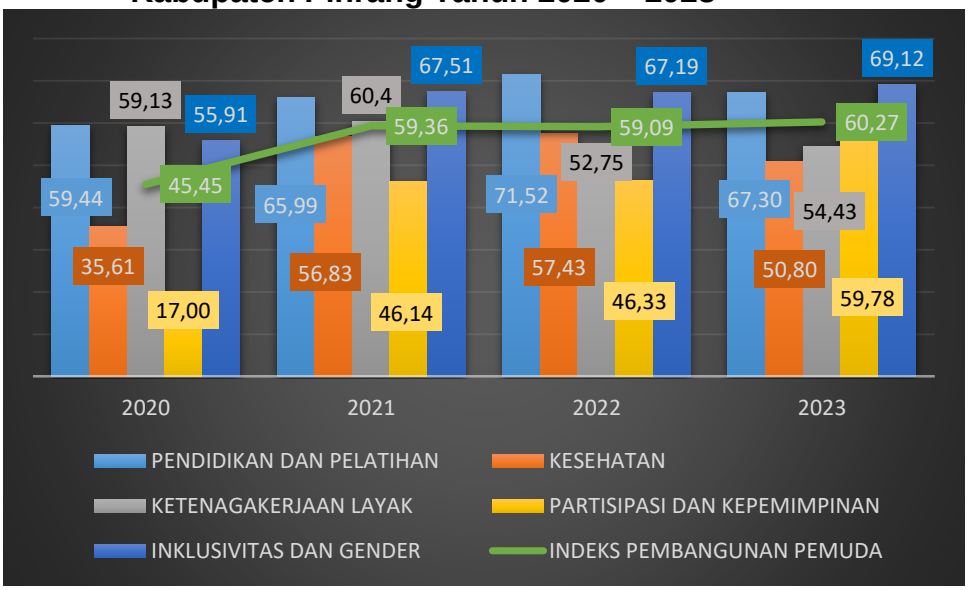

Sumber data: Rekapitulasi Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Hasil Peninjauan Tahun 2020-2023 (Bappenas), 2024

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Pinrang menunjukkan perkembangan positif dalam empat tahun terakhir. Aspek pendidikan dan pelatihan meningkat pesat hingga tahun 2022 sebelum

mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, menandakan perlunya upaya mempertahankan kualitas. Kesehatan sempat melonjak pada tahun 2021 namun kembali menurun mengindikasikan tantangan keberlanjutan layanan kesehatan pemuda. Ketenagakerjaan layak relatif stabil di awal periode, namun melemah sejak tahun 2022, menunjukkan perlunya peningkatan akses pekerjaan berkualitas. Sementara itu partisipasi dan kepemimpinan mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan. Inklusivitas dan gender terus mengalami perbaikan, mengarah pada lingkungan yang lebih setara dan inklusif. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan tren meningkat, meski perlambatan pada beberapa indikator menuntut perhatian khusus.

- **Indeks Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang disusun oleh Kemen PPPA bersama dengan BPS menyajikan potret perlindungan anak di Indonesia melalui presentasi atas 5 Klaster. Penyajian lima Klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 Klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 Klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci Klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; dan Klaster V: Perlindungan Khusus.

Tabel 2.56
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak	nilai	NA	60,47	58,48	64,19	Belum rilis

Sumber Data : Publikasi KemenPP dan PA, 2023

Di Kabupaten Pinrang, Indeks Perlindungan Anak pada tahun 2021 sebesar 60,47 dan tahun 2022 sebesar 58,48. Dan pada tahun

2023 meningkat menjadi 64,19. Capaian ini menempatkan Kabupaten Pinrang pada urutan keempat tertinggi pada Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Pare-pare, Makassar, dan Palopo.

- **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks Ketimpangan Gender adalah matriks gabungan ketidaksetaraan gender yang menggunakan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Grafik 2.16
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pinrang
Tahun 2020 – 2024

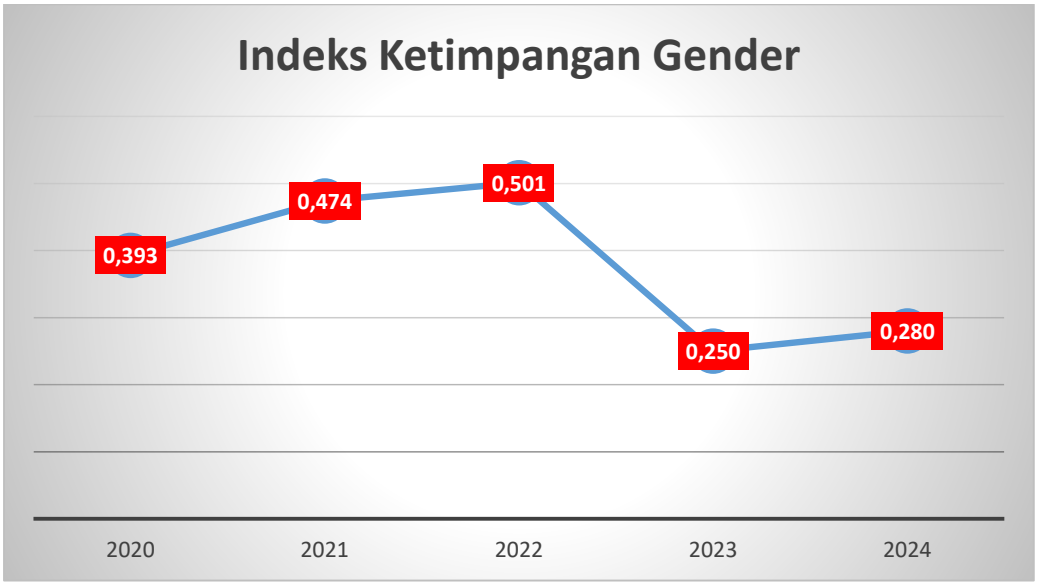

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin rendah menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan gender. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif. Pada periode 2020-2022, IKG mengalami kenaikan signifikan dari 0,393 menjadi 0,501 yang menandakan meningkatnya kesenjangan gender pada periode tersebut. Namun pada tahun 2023 IKG menurun drastis menjadi 0,250 yang menunjukkan perbaikan besar dalam mengurangi ketimpangan gender. Pada tahun 2024 nilai IKG sedikit meningkat ke 0,280 namun masih berada pada tingkat rendah dibandingkan pada awal periode.

- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variable yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan semua variable signifikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat penduduk perempuan, APS SMP/Sederajat penduduk perempuan, APS SMA/Sederajat penduduk perempuan, Angka Buta Huruf penduduk perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk perempuan, rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin saat lahir, dan persentase penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Adapun hasil dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.57
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	95,79	95,87	96,10	96,37	96,69

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pinrang menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode tahun 2020-2024. Nilai IPG meningkat dari 95,79 pada tahun 2020 menjadi 96,69 pada tahun 2024, atau naik 0,90 poin dalam 5 tahun. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan akses, partisipasi, dan kualitas pembangunan yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan khususnya dalam penguatan kualitas peran perempuan dalam pengambilan keputusan

public dan sector ekonomi produktif, sehingga target pembangunan berkelanjutan yang berperspektif gender dapat tercapai lebih optimal.

- **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indicator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indicator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tabel 2.58
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,11	68,43	65,12	68,92	63,06

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2020-2024 menunujukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, indeks berada pada level stabil yaitu sekitar 68 poin. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 65,12 yang mengindikasikan adanya penurunan partisipasi dan peran perempuan dalam sector public maupun ekonomi. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 68,92, nilai tersebut kembali menurun tajam di tahun 2024 menjadi 63,06. Penurunan IDG tahun 2022 disebabkan oleh penurunan sumbangan pendapatan perempuan. Sedangkan penurunan IDG tahun 2024 disebabkan oleh penurunan keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan. Kedua hal tersebut menjadi tantangan dalam upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Pinrang.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

- **Indeks Pendidikan**

Tercapainya pembangunan sumber daya manusia ditandai dengan tingginya kualitas hidup yang dicapai masyarakat. Salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur atau membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor pendidikan dan disajikan dalam bentuk angka/indeks. Angka Indeks yang praktis dan mudah dibaca yang dapat memberikan gambaran kondisi output kinerja sektor pendidikan di daerah yang dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Hasil dari perhitungan Indeks Pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 2.59
Indeks Pendidikan Kabupaten PinrangTahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	indeks	62,95	63,01	63,61	64,53	68,35

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Pada tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir nilai indeks pendidikan Kabupaten Pinrang semakin meningkat.

Indeks pendidikan dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 nilai indeks ini mencapai 68,35. Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Pinrang semakin membaik.

- **Indeks Kesehatan**

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Dari indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 2.60
Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	indeks	76,32	76,57	77,15	77,68	77,92

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 2025

Di Kabupaten Pinrang Indeks Kesehatan pada tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun angka indeks kesehatan di Kabupaten Pinrang masih tergolong baik akan tetapi masih perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dari segi fasilitas dan pelayanan kesehatan.

- **Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depencency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya *prosentase Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020-2022 rasio menurun dari 47,22% ke

46,25%. Ini menandakan peningkatan proporsi usia produktif, yang merupakan indikasi bonus demografi mulai dimanfaatkan. Namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 48,50%, menunjukkan peningkatan beban ketergantungan yang disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang tidak produktif. Kemudian pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi 47,97%. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding usia tidak produktif, sehingga mampu menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan potensi tenaga kerja yang meningkat. Namun peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang disebakan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif mengindikasikan momentum bonus demografi dapat melemah.

Tabel 2.61
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Tidak Produktif	Orang	129.575	129.691	130.227	136.502	137.178
Usia Produktif	Orang	274.419	277.680	281.568	281.430	285.968
Rasio Ketergantungan	Persen	**47,22**	**46,71**	**46,25**	**48,50**	**47,97**

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

- **Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru

dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Tabel 2.62
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,14	6,09	6,26	6,21	6,37
2.	Laju Pertumbuhan	%	-1,05	5,55	9,83	2,82	6,01

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase distribusi PDRB industri pengolahan dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Tahun 2024 distribusi PDRB sektor industri pengolahan meningkat sebesar 6,37 atau mengalami pertumbuhan cukup optimis sebesar 6,01 persen. Dari keenam belas sub sektor pada industri pengolahan, terdapat empat sub sektor yang bertumbuh cukup optimis yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, dan industri furnitur.

- **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Tabel 2.63
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	%	0,87	0,89	0,97	1,06	1,07
2.	Laju Pertumbuhan	%	-10,45	8,11	16,85	14,16	6,27

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum selama lima tahun terakhir cenderung mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan pemulihan signifikan pasca pandemi dan berkontribusi makin besar terhadap PDRB. Meskipun kontribusinya masih kecil, namun tren positif ini menunjukkan potensi pertumbuhan sektor pariwisata, kuliner lokal dan UMKM di sektor jasa.

- **Jumlah Kunjungan Wisata**

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut salah satu indikator penting untuk mewujudkan Kabupaten Pinrang sebagai daerah tujuan wisata adalah dengan melihat tingkat kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang.

Hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pinrang adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat tentang jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan khususnya terhadap manajemen pengelolaan hotel, penginapan, home stay dan lain-lain serta bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha dan tempat-tempat pariwisata.

Tabel 2.64
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Satuan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara	Total Kunjungan
1.	2020	orang	7.379	-	7.379
2.	2021	orang	13.468	19	13.487
3.	2022	orang	72.130	28	72.158
4.	2023	orang	89.889	36	89.925
5.	2024	orang	163.827	6	163.833

Sumber data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, 2025

Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun juga berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisata ini sempat anjlok pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid 19, namun pada tahun-tahun berikutnya roda perekonomian mulai pulih termasuk dari sektor pariwisata ini. Pada awal tahun 2021 PAD kontribusi sektor pariwisata sebesar Rp 2.093.106.223, yang jika dipersentasekan menjadi sebesar 1,56%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 3.215.628.219,90 dari total PAD sebesar Rp 158.112.645.854,63 yang jika dipersentasekan menjadi sebesar 2,033%. Seiring dengan meningkatnya PAD sektor pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga semakin meningkat. Pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 1,68%.

- **Persentase Koperasi Sehat (%)**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi dapat dikatakan aktif apabila koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai penilaian untuk koperasi sehat, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek

efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, dan kepatuhan prinsip koperasi. Realisasi capaian kinerja jumlah koperasi aktif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dibandingkan dengan trend kondisi terakhir tahun 2023 baru mencapai 70 persen. Ini mengindikasikan nilai realisasi kinerja masuk kategori sedang sehingga masih butuh upaya meningkatkan kinerja. Selain itu jumlah koperasi KSP/USP yang cukup sehat di Kabupaten Pinrang masih kecil yaitu baru sebanyak 33 persen malah menurun di tahun 2024 menjadi 22,60 persen. Kondisi dimana masih sedikitnya jumlah koperasi KSP/USP yang cukup sehat, tentu akan berkolerasi terhadap banyaknya masyarakat yang terjerat persoalan koperasi. Sedangkan untuk kategori koperasi sehat pada tahun 2024 jumlahnya berkurang dibanding tahun 2023 dengan persentase sebesar 0,60 persen.

Tabel 2.65
Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	3	3	3	3	1
2	Jumlah Koperasi Cukup Sehat	Koperasi	49	51	52	54	37
3	Persentase Koperasi Cukup Sehat	persen	30	31	32	33	22,60
4	Persentase Koperasi sehat	persen	1,80	1,80	1,80	1,80	0,60

Sumber data: Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang, 2025

- **Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)**

Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan

perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

Tabel 2.66
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	74	487	729	1.135	3.307

Sumber data: Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2024

Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang semakin meningkat secara signifikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Adanya peningkatan jumlah industri kecil dan menengah ini tak luput dari usaha pemerintah daerah yang memberikan fasilitas berupa kemudahan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku industri dan usaha perdagangan serta dinas yang terkait dalam pengembangan teknologi informasi sehingga membuka peluang usaha bagi pelaku industri dan perdagangan.

- **Return On Asset (ROA) BUMD (%)**

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sector atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Di Kabupaten Pinrang, jumlah BUMD sebanyak 2 perusahaan yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sawitto dan Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Pinrang. Setelah dilakukan audit laporan keuangan, *Return On Asset* (ROA) kedua perusahaan ini bernilai negative. Pada tahun 2022 nilai ROA sebesar -2,749 dengan rincian total laba (rugi) sebesar Rp -334.039.925,00 dan total asset Rp

12.148.352.920 sedangkan pada tahun 2023 nilai ROA sebesar -1,3285. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMD tersebut tidak sehat. Kemudian pada tahun 2024 nilai ROA sebesar 2,756. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang antara lain melakukan kerjasama antar daerah melalui Perumda Karya Niaga Kota Samarinda dengan Perumda Karya Lasinrang, melakukan rencana revitalisasi pelayanan air bersih bersama para investor, mengikuti Program SPAM Regional Ajatappareng dalam penyediaan layanan air bersih.

Tabel 2.67
Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Pinrang
Tahun 2022-2023

NO.	INDIKATOR	Satuan	2022	2023	2024
1.	Return On Asset (ROA)	nilai	-2,749	-1,3285	2,756

Sumber data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2024

- **Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (%)**

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Biasanya, ekonomi kreatif mencakup industri-industri seperti desain, film, musik, seni rupa, mode, media, dan teknologi digital.

Konsep ini berfokus pada ide-ide inovatif dan kemampuan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik, yang sering kali melibatkan pemanfaatan teknologi modern dan pendekatan baru dalam bisnis.

Grafik 2.17
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

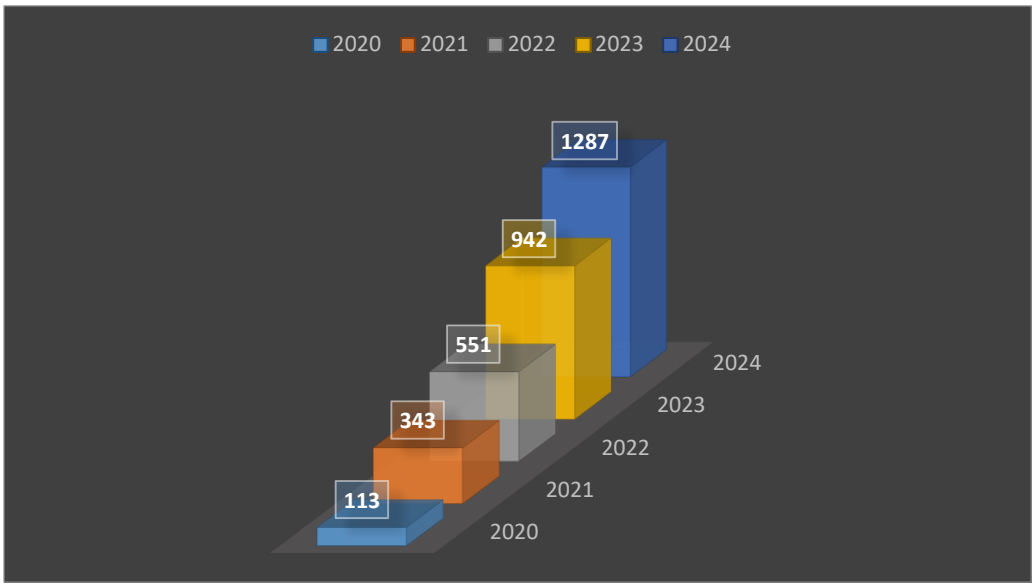

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Pinrang, 2025

Di Kabupaten Pinrang, jumlah industry ekonomi kreatif pada tahun 2024 sebanyak 1.287 industri yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner sebanyak 775 industri, industry kerajinan sebanyak 312 industri dan sisanya bergerak di sektor pariwisata.

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	59,11	57,78	57,72	60,51	64,17

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir mengalami tren fluktuasi. TPAK di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Pinrang sebesar 64,17 persen yang artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 60-64 orang diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,66 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Pinrang.

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**

Berdasarkan jenis kelamin, di Kabupaten Pinrang TPAK laki-laki masih lebih tinggi dibanding dengan TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia kerja masih didominasi oleh laki-laki. Pada tabel di bawah ini terlihat pada tahun 2024 TPAK laki-laki sebesar 82,58 yang menggambarkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia kerja terdapat 82 laki-laki angkatan kerja sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan signifikan sebesar 6,61 persen poin dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 46,53 yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 46 orang angkatan kerja perempuan.

Tabel 2.69
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Laki-laki	persen	82,64	80,95	79,21	82,02	82,58
TPAK Perempuan	persen	37,47	36,44	37,92	39,92	46,53
TPAK	persen	59,11	57,78	57,72	60,51	64,17

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Inovasi Daerah**

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah didasarkan pada dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Pada tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pinrang mendapat nilai skor sebesar 466 dengan kategori Kurang Inovatif dengan skala nilai 0-1000. Namun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 skala nilai yang digunakan adalah 0-100 dan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pinrang sudah masuk kategori Inovatif dengan nilai skor yang terus meningkat setiap tahunnya. Capaian tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.18
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

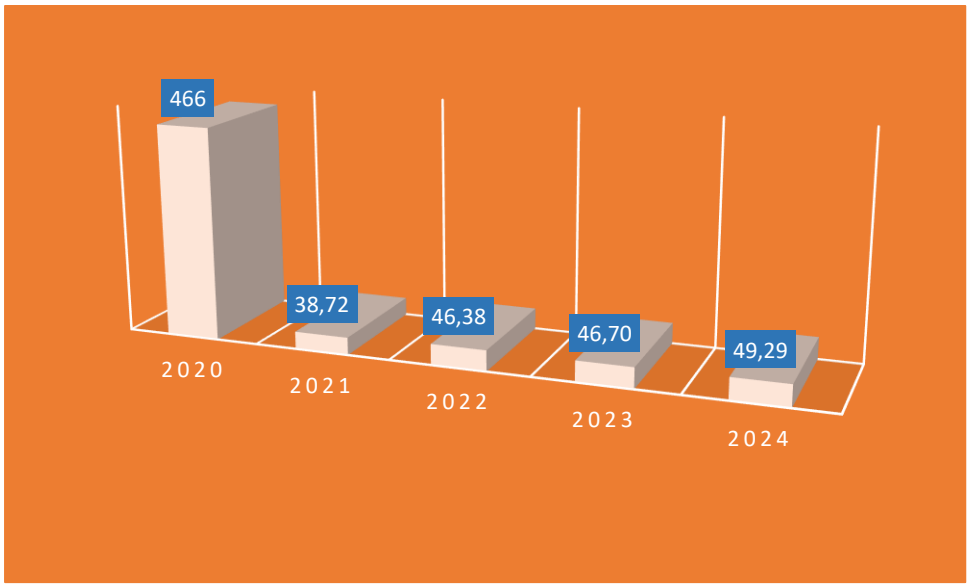

Sumber data : Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, 2025

- **Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah**

Indeks Kapabilitas Inovasi mengukur kemampuan suatu negara, perusahaan, atau organisasi dalam menciptakan, mengadopsi, dan memanfaatkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Indeks ini sering digunakan untuk menilai seberapa baik suatu entitas mampu berinovasi dan bersaing dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan.

Beberapa aspek yang biasanya dinilai dalam indeks kapabilitas inovasi meliputi:

1. **Sumber Daya Riset dan Pengembangan (R&D):** Investasi dalam riset dan pengembangan, baik dari sektor publik maupun swasta.
2. **Kualitas dan Kuantitas Publikasi Ilmiah:** Jumlah dan dampak dari publikasi penelitian dan inovasi.
3. **Patents and Intellectual Property:** Jumlah paten yang diajukan dan dilindungi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
4. **Kualitas Pendidikan dan Pelatihan:** Kualitas pendidikan tinggi dan pelatihan teknis yang mendukung keterampilan inovatif.

5. **Lingkungan Inovasi:** Infrastruktur, kebijakan, dan ekosistem yang mendukung inovasi, seperti inkubator bisnis, akses ke modal ventura, dan kerjasama antara industri dan akademia.
6. **Komersialisasi Inovasi:** Kemampuan untuk mengkomersialkan hasil inovasi dan penelitian ke dalam produk dan layanan yang berhasil di pasar.

Kapabilitas Inovasi ini merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Daya Saing Daerah pilar 12. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pinrang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Pinrang
Tahun 2022 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kapabilitas Inovasi	nilai	0,75	1,66	1,74

Sumber Data : Publikasi BRIN Buku IDSD, 2024

- **Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD**

Perbandingan antara Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada tahun 2021 proporsi anggaran riset pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap anggaran APBD Pinrang adalah sebesar 0,06 persen dan tahun 2023 sebesar 0,03 persen. Sementara untuk tahun 2024 sebesar 0,04 persen.

Tabel 2.71
Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD	Persentase	0,06	0,05	0,03	0,04

Sumber Data : APBD Kabupaten Pinrang, diolah Bapperida

- **Produktivitas Pertanian**

Produktivitas Pertanian dihitung dengan menggunakan rata-rata skor dari tiga komoditas utama, yaitu produktivitas tanaman pangan, produktivitas perkebunan, dan produktivitas perikanan budidaya. Setiap komoditas memiliki nilai produktivitas yang dihitung berdasarkan ukuran tertentu yang relevan dengan jenis pertanian tersebut. Setelah itu, nilai-nilai ini dapat dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah komoditas yang dihitung untuk mendapatkan rata-rata skor produktivitas pertanian.

Jika produktivitas tanaman pangan dihitung berdasarkan kilogram hasil per hektar, produktivitas perkebunan dihitung berdasarkan kilogram hasil per hektar kebun, dan produktivitas perikanan budidaya dihitung berdasarkan kilogram hasil per hektar budidaya, maka nilai-nilai ini dapat dijumlahkan dan dibagi dengan tiga (jumlah komoditas) untuk mendapatkan rata-rata skor produktivitas pertanian.

Produktivitas Pertanian Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Produktivitas Pertanian Kabupaten Pinrang Tahun 2021 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	10,26	10,20	8,28	7,68

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2.	Produktivitas Perkebunan	Ton/Ha	0,49	0,44	0,45	0,46
3.	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/Ha	2,51	2,84	3,17	4,42
4.	**Produktivitas Pertanian**	Ton/Ha	**4,42**	**4,49**	**3,97**	**4,19**

Sumber data : Distanhorti, Disnakbun, dan Dinas Perikanan, diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pinrang tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Produktivitas Pertanian tahun 2021 mencapai total rata rata 4,42 ton/Ha, meningkat di tahun 2022 menjadi 4,49 ton/Ha, sampai dengan 2023 rata rata per tahun produktivitas mengalami sedikit penurunan dengan nilai capaian 3,97 ton/Ha. Beberapa penyebab menurunnya produktivitas pertanian pada tahun 2023 terutama pada produktivitas tanaman pangan diantaranya :

1. Iklim dan Cuaca. Perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memiliki dampak signifikan pada produktivitas pertanian. Misalnya, kekeringan, banjir, atau perubahan pola curah hujan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.
2. Penyakit dan Hama. Serangan penyakit atau hama pada tanaman dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada produksi pertanian. Fluktuasi dalam keparahan atau prevalensi penyakit dan hama dapat memengaruhi hasil panen dari tahun ke tahun.
3. Teknologi dan Praktik Budidaya Penggunaan teknologi pertanian, seperti varietas unggul, sistem irigasi, dan metode budidaya yang tepat, dapat memengaruhi produktivitas pertanian. Perubahan dalam praktik budidaya atau adopsi teknologi baru dapat mengakibatkan fluktuasi dalam hasil pertanian.

4. Harga dan Pasar, Variasi harga komoditas pertanian dan permintaan pasar dapat mempengaruhi insentif petani untuk meningkatkan produksi atau memilih tanaman tertentu. Perubahan dalam kondisi pasar dapat memengaruhi keputusan petani dan, akibatnya, produktivitas pertanian.
5. Infrastruktur Pertanian. Ketersediaan infrastruktur pertanian, seperti akses ke air irigasi, transportasi yang baik, dan pasar yang efisien, juga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Perubahan dalam infrastruktur dapat memengaruhi kemampuan petani untuk menghasilkan dan memasarkan hasil pertanian dengan efisien.

Sedangkan di tahun 2024 produktivitas pertanian meningkat menjadi 4,19 ton/ha. Peningkatan ini dipengaruhi terutama dari peningkatan produktivitas perikanan budidaya yang meningkat cukup signifikan dari 3,17 ton/ha pada tahun 2023 menjadi 4,42 ton/ha pada tahun 2024.

- **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Pada indikator NTP di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif yang disebabkan oleh produktivitas komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cenderung turun dikarenakan iklim yang sulit diprediksi serta hasil cetak sawah baru belum optimal produksinya juga harga gabah yang cenderung menurun, sementara harga barang jasa juga cenderung meningkat disebabkan tingkat inflasi walaupun sarana pertanian terutama pupuk yang relatif stabil. Ini menjadikan NTP Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif, namun menunjukan NTP tetap lebih besar dari 100, ini menggambarkan bahwa pendapatan petani masih tinggi dibandingkan pengeluarannya sebesar 105,13% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 NTP Kabupaten Pinrang sebesar 109,79% karena produktivitas pertanian meningkat sedangkan biaya produksi tidak berubah secara signifikan, begitupun dengan harga gabah yang

masih hampir sama dengan tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022, Nilai Tukar Petani kembali meningkat menjadi 115,87. Walaupun produktivitas sedikit menurun, namun harga gabah masih tetap stabil sehingga pendapatan petani relative masih baik. Sementara pada tahun 2024 Nilai Tukar Petani ini meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 150,43.

Grafik 2.19
Nilai Tukar Petani 2020 – 2024

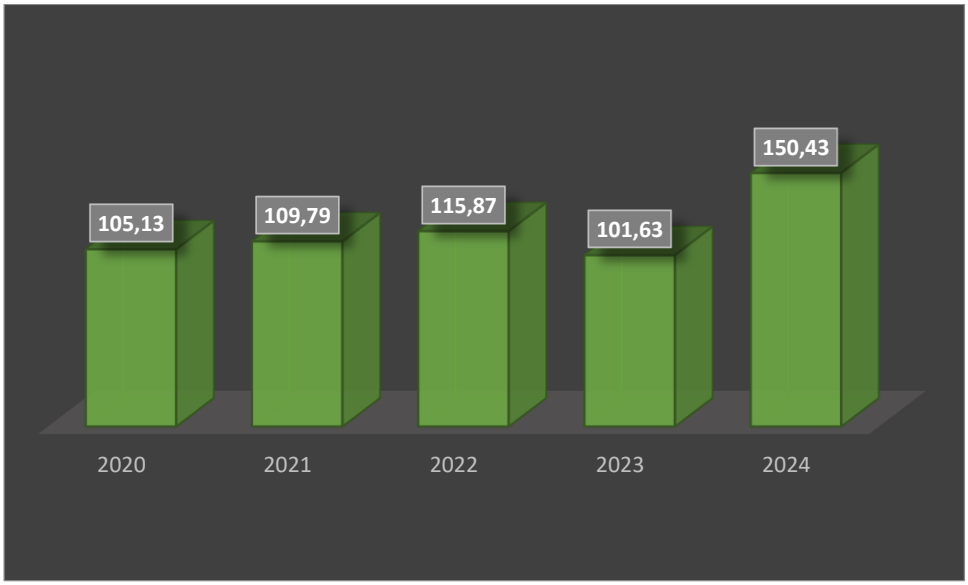

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2025

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

- **Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Bappenas. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Strategis ini menjadi suatu upaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Indeks Ekonomi Hijau merupakan tolok ukur indikator untuk mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan.

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan

menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini merupakan indeks komposit bukan hanya dari pilar lingkungan saja. Indeks ini menggabungkan 3 pilar dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

Tabel 2.73
Skor Komponen Penyusun Indikator Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Pilar	2020	2021	2022	2023	2024
Pilar 1 (Lingkungan)	54,92	64,29	63,84	57,30	NA
Pilar 2 (Ekonomi)	11,33	14,25	15,36	11,10	NA
Pilar 3 (Sosial)	68,23	68,80	71,72	71,00	NA
GEI	**44,50**	**50,18**	**50,87**	**55,57**	**belum rilis**

Sumber data : Bappelitbangda Provinsi Sulsel 2024, diolah

Grafik 2.20
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2023

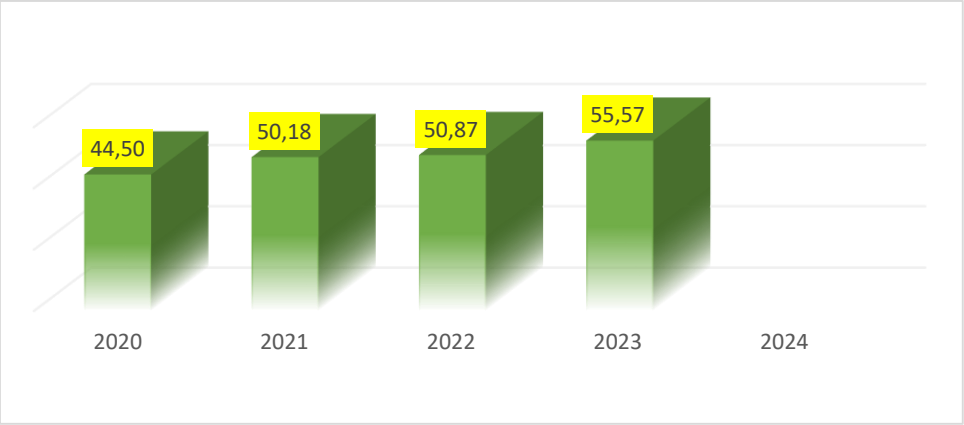

Sumber data : Bappelitbangda Provinsi Sulsel 2024, diolah

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Pinrang menunjukkan pertumbuhan positif dan konsisten selama 2020–2023. Peningkatan tajam di 2023 menjadi bukti keberhasilan kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini secara berkelanjutan.

- **Indeks Ekonomi Biru**

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) adalah alat ukur untuk memantau perkembangan ekonomi biru di Indonesia, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kelestarian lingkungan, serta aspek sosial seperti tenaga kerja dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, skor IBEI Kabupaten Pinrang tahun 2023 mencapai 75,80. Nilai ini menunjukkan capaian kategori cukup tinggi, yang menandakan bahwa secara umum pembangunan ekonomi biru di Pinrang telah berada pada jalur yang positif. Namun, jika dianalisis lebih rinci per pilar, terlihat adanya ketidakseimbangan antar aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pilar ekonomi mencerminkan kinerja sektor kelautan dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nilai 57,50 menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini masih berada pada tingkat sedang. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya diversifikasi

produk, terbatasnya inovasi pengolahan hasil laut, dan belum optimalnya akses pasar. Aspek lingkungan merupakan pilar dengan skor terendah, yang mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Isu yang menonjol meliputi pencemaran perairan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Pilar sosial mendapatkan skor tertinggi yang mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk mengakselerasi pencapaian pilar lainnya. Secara agregat, capaian IBEI Kabupaten Pinrang sudah cukup baik dengan skor **75,80**. Namun, keberlanjutan ekonomi biru memerlukan keseimbangan antar pilar. Fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada peningkatan pilar ekonomi dan lingkungan, sementara mempertahankan kinerja positif pilar sosial. Dengan langkah strategis yang terintegrasi, Pinrang berpotensi meningkatkan IBEI ke level sangat tinggi dalam 3–5 tahun ke depan.

Grafik 2.21
Skor Komponen Penyusun Indikator Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Pinrang Tahun 2023

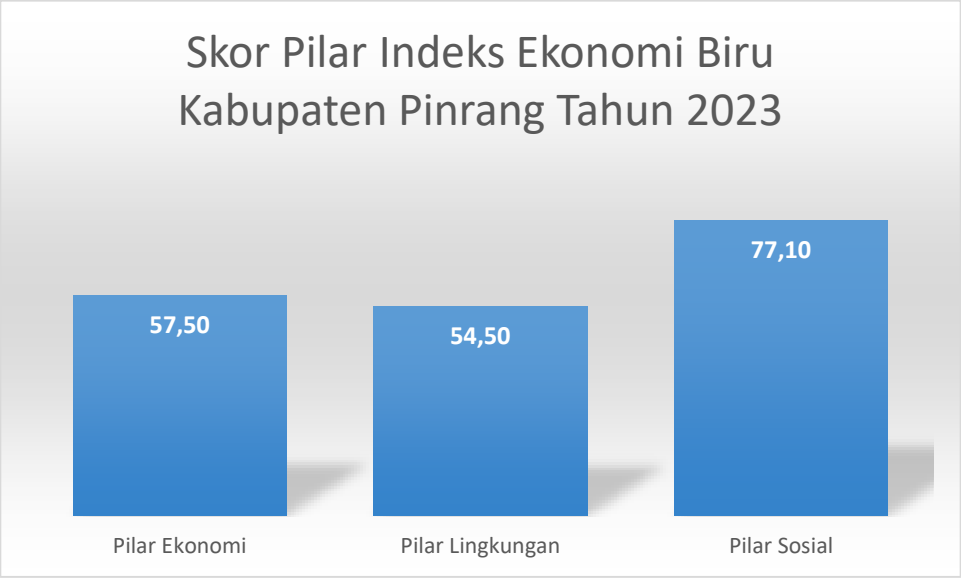

Sumber data : Bappelitbangda Provinsi Sulsel 2024, diolah

- **Produktivitas Perikanan Budidaya**

Budidaya perikanan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Dengan penekanan pada kondisi terkontrol dan orientasi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, definisi ini mengandung makna bahwa kegiatan budidaya perikanan adalah kegiatan ekonomi (prinsip-prinsip ekonomi) yang mengarah pada industri (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga). Sebelum definisi tersebut di atas, sudah berkembang definisi budidaya perikanan sebagai campur tangan atau upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah usaha pemeliharaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survival), menumbuhkan (growth) dan memperbanyak (reproduction) biota akuatik. Definisi ini berkembang dengan memperhatikan evolusi produksi yang berlangsung di dalam perikanan.

Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang meliputi perikanan budidaya air tawar dan payau, masing masing memiliki hasil produksi dan luas lahan. Produktivitas perikanan budidaya di Pinrang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, di tahun 2021 Produktivitas Perikanan Budidaya mencapai 2,51 Ton/Ha, tahun 2022 sebesar 2,84 Ton/Ha dan meningkat di tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 3,17 Ton/Ha dan 4,42 ton/ha.

Peningkatan produktivitas ini menunjukkan adanya kemajuan dalam manajemen, teknologi, atau praktik budidaya yang digunakan di sektor perikanan budidaya Pinrang selama periode tersebut. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbaikan dalam manajemen tambak, penggunaan pakan yang lebih efisien, peningkatan genetika organisme, atau peningkatan pemantauan dan pengendalian kesehatan hewan budidaya.

Peningkatan produktivitas seperti ini merupakan indikator positif untuk keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Pinrang,

serta dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 2.74
Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Pinrang
Tahun 2021 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/ha	NA	2,51	2,84	3,17	4,42

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2025

- **Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak**

Variasi capaian Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak di Kabupaten Pinrang tahun 2020 hingga 2024 terjadi fluktuasi dalam produktivitas per hektar (ton/ha) selama periode lima tahun terakhir namun memiliki kecenderungan meningkat. Spesifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak	Ton/ha	3,48	3,28	3,12	2,31	4,42

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2025

Fluktuasi pada produktivitas budidaya perikanan tambak disebabkan oleh Kondisi Cuaca : Variasi cuaca seperti curah hujan yang tidak terduga, suhu yang ekstrem, atau kejadian cuaca ekstrem lainnya dapat mempengaruhi suhu air, ketersediaan oksigen, dan kualitas air tambak. Hal ini dapat berdampak langsung pada pertumbuhan dan kesehatan ikan.

- **Produksi Perikanan Tangkap**

Wilayah pesisir Kabupaten Pinrang telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumber daya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein

hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria. Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan. Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagaimana masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Tabel 2.76
Produksi Perikanan Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15.236,00	13.689,68	13.820,70	14.277,30	15.365,15
2	Produksi Perikanan	Ton	77.259,41	80.516,58	83.632,40	85.197,99	85.176,70

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang , 2025

4. Transformasi Digital

- **Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**

  Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2020 ditargetkan 26 sistem untuk diintegrasikan dan yang terealisasi hanya 4 sistem saja sehingga realisasi capaian hanya 15,38%. Pada tahun 2021 persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online mencapai 43,75%

dan pada tahun 2022 mencapai 52,94%. Kemudian pada tahun 2023 mencapai 100% dengan jumlah layanan publik sebanyak 9 layanan publik. Dan pada tahun 2024 jumlah layanan public yang terintegrasi dan diselenggarakan secara online sebanyak 27 layanan publik.

Tabel 2.77
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan publik	4	7	9	9	27
2	Jumlah layanan publik	Layanan publik	26	16	17	9	27
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	15,38	43,75	52,94	100	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2025

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- **Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang

dan jasa. Proporsi PMTB terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (% ADHB) selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Struktur PDRB Kabupaten Pinrang menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Komponen yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Pinrang setelah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 35,74 persen.

Tabel 2.78
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	35,97	34,23	35,24	35,55	35,74

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

- **Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok**

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, angka ini menggambarkan tingkat stabilitas harga barang barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun), diperoleh dari rerata koefisien variasi antar waktu untuk 10 macam komoditi yang ditentukan. Koefisien variasi antar waktu per komoditi dihitung dengan membandingkan antara standar deviasi dengan harga rerata dari Januari s/d Desember tiap komoditas dikali 100%. Standar Deviasi diperoleh dari jumlah selisih harga bulanan dengan harga rerata bulanan per komoditi per tahun dibagi periode. Ada 10 komoditi (beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur). Semakin kecil angka koefisien variasi antar waktu yang diperoleh berarti variasi (simpangan) harga kebutuhan pokok antar waktu makin rendah ini berarti stabilitas harga sepanjang waktu semakin baik, kondisi ini adalah yang seharusnya atau yang diharapkan.

Tabel 2.79

Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	Persen	9	0,71	7,05	2,04	13,10

Sumber data : Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2025

Di Kabupaten Pinrang, koefisien variasi harga dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2024 persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok sebesar 13,10% setelah cenderung stabil pada tahun 2023 lalu.

- **Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Pinrang, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Pinrang.

Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh penduduk (resident) Kabupaten Pinrang di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pinrang terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 2.80
Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa						
a. ADHB (milyar RP)	-521,94	-570,04	-176,65	-261,61	-546,91	-783,63
b. ADHK 2010 (milyar Rp)	-159,21	-179,92	-33,20	189,08	-307,38	- 257,37
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-2,66	-2,84	-0,81	-1,10	-2,17	-2,94

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Secara total, dalam kurun waktu 2019–2024 net ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa lebih kecil dibanding nilai impor barang dan jasa. Pada tahun 2019 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -521,94 miliar rupiah menurun menjadi sebesar -570,04 miliar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021-2023 nilai net ekspor barang

dan jasa sebesar -176,65 miliar rupiah; -261,61 miliar rupiah; dan -546,91 miliar rupiah. Pada tahun 2019 net ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar -2,66 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi net ekspor barang dan jasa justru cenderung menurun menjadi -2,84 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi -0,81 persen tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022-2023 proporsi net ekspor barang dan jasa sebesar -1,10 persen dan -2,17 persen.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- **Indeks Layanan Infrastruktur**

Indeks Layanan Infrastruktur adalah alat ukur yang menilai kualitas dan efektivitas layanan infrastruktur di suatu wilayah atau negara. Fokus dari indeks ini adalah pada bagaimana layanan infrastruktur—seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi—mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan berkontribusi pada efisiensi ekonomi.

Berikut adalah beberapa aspek umum yang sering dinilai dalam indeks layanan infrastruktur:

1. **Kualitas Transportasi:** Penilaian mengenai kondisi jalan, kualitas transportasi publik, dan sistem logistik yang mempengaruhi mobilitas dan konektivitas.
2. **Akses dan Kualitas Energi:** Evaluasi terhadap keandalan pasokan energi (seperti listrik dan gas), serta kualitas dan kestabilan infrastruktur energi.
3. **Akses ke Air Bersih dan Sanitasi:** Ketersediaan dan kualitas pasokan air bersih serta fasilitas sanitasi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
4. **Layanan Telekomunikasi:** Kualitas jaringan telekomunikasi dan internet, termasuk kecepatan, aksesibilitas, dan biaya layanan.
5. **Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan:** Penilaian terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas layanan publik.

Indeks Infrastruktur ini juga merupakan salah satu komponen pengukuran Indeks Daya Saing Daerah pilar 2. Keberadaan infrastruktur

yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah. Kabupaten Pinrang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik akan tetapi masih terkendala dalam pengembangan infrastruktur karena kondisi topografi yang berada di pegunungan sehingga perkembangan pembangunan di wilayah ini perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan. Indeks Infrastruktur Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 1,81 dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,18. Tahun 2024 Indeks Infrastruktur Kabupaten Pinrang kembali meningkat menjadi 3,35.

Tabel 2.81
Indeks Infrastruktur Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Infrastruktur	Nilai	1,81	2,18	3,35

Sumber Data : Publikasi BRIN Buku IDSD, 2024

- **Tingkat Kemantapan Jalan**

Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 65,73% pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 61,35% karena adanya relokasi anggaran covid 19 sehingga anggaran infrastruktur mengalami keterbatasan. Pada tahun 2022 tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat menjadi 63,31%. Pada tahun 2023 dilakukan revisi panjang ruas jalan berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 600/266/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2023 yaitu panjang ruas jalan kabupaten sebesar 653,83 km dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 67,72%. Dan pada tahun 2024 tingkat kemantapan jalan meningkat dengan persentase sebesar 68,54 % dengan komposisi panjang jalan kondisi baik 364,76 km dan panjang jalan kondisi sedang 83,39 km.

Tabel 2.82
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	km	566,38	528,69	545,565	442,80	448,15
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	861,70	861,70	861,70	653,83	653,83
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65,73	61,35	63,31	67,72	68,54

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

Tabel 2.83
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pinrang
Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kondisi baik	km	338,90	391,13	373,37	354,16	364,76
2	Panjang jalan kondisi sedang	km	177,48	137,55	172,20	88,64	83,39
3	Panjang jalan kondisi rusak	km	212,20	208,86	208,91	112,00	108,05
4	Panjang jalan kondisi rusak berat	km	133,12	124,16	107,23	99,028	97,63
5	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	861,70	861,70	861,70	653,83	653,83

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

- **Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan**

  Berdasarkan Metadata Nasional SDGs Edisi 2 Tahun 2023, kategori hunian layak harus memenuhi empat kriteria yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak.

Tabel 2.84
Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024

No.	Tahun	Satuan	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Air Minum Layak	Sanitasi Layak	Rumah Layak Huni
1.	2024	persen	84,90	94,16	90,47	92,74	67,31

Sumber Data: BPS, 2025

Berdasarkan aspek keterjangkauan yang diukur dari pengeluaran perkapita sebulan untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga di Kabupaten Pinrang mengalami tren fluktuasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran perkapita untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga menurun cukup drastis jika dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan menurunnya pengeluaran konsumsi bukan makanan.

Tabel 2.85
Aspek Keterjangkauan Hunian Layak dan Terjangkau
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata Pengeluaran perkapita sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	Persen	45,08	42,61	49,57	47,35	23,11

Sumber Data: Susenas, diolah Bappelitbangda Provinsi Sulsel, 2025

Grafik 2.22
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

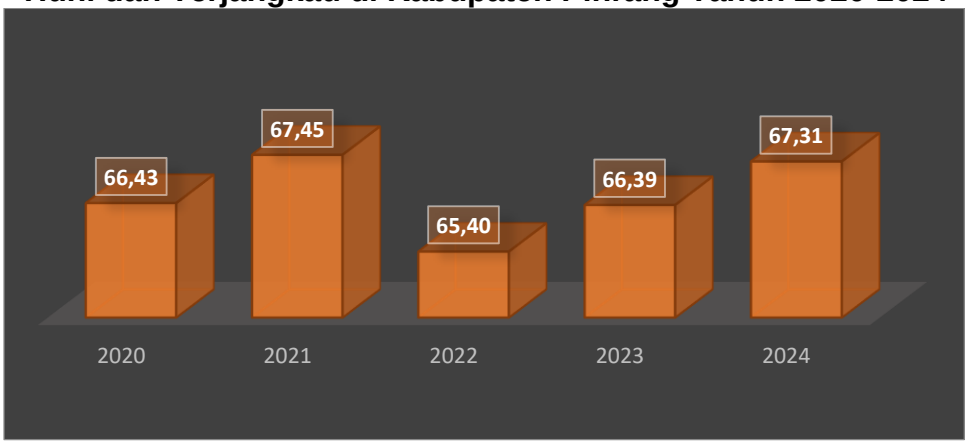

Sumber data : Susenas, diolah Bappelitbangda Provinsi Sulsel, 2025

- **Persentase Desa Mandiri**

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Pada Tahun 2020 hingga 2021 dari 69 Desa yang berada dalam Kabupaten Pinrang belum ada satu pun yang memenuhi kriteria Desa Mandiri. Pada Tahun 2022 terdapat 5 Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Mandiri dan Tahun 2023 jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Mandiri meningkat 17 Desa. Sehingga pada akhir Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri adalah 22 Desa dari 69 Desa di Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2024 jumlah desa mandiri meningkat menjadi 36 desa.

Untuk meningkatkan perekonomian desa, dibentuk usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum yang disebut BUM Desa. Dari 69 desa yang ada di Kabupaten Pinrang masing-masing memiliki bumdes namun hanya ada 45 bumdes yang bersertifikat badan hukum, selebihnya dengan status terverifikasi.

Tabel 2.86
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Desa	N.A	0	5	17	3
2	Jumlah desa Berkembang dan Maju (Per Awal Tahun n)	Desa	N.A	50	55	52	14
3	Jumlah Desa Berkembang dan Maju (Per Akhir Tahun n)	Desa	N.A	55	52	39	11
4	Jumlah Desa Mandiri	Desa	N.A	0	5	22	36
5	Jumlah Desa	Desa	N.A	69	69	69	69
6	Persentase Desa Berkembang dan Maju (3/4) x100%	%	N.A	79,71%	75,36%	56,52%	30,56%
7	Persentase Desa Mandiri (4/5) x 100%	%	N.A	0,00%	7,25%	31,88%	52,17%
8	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (1/2) x 100%	%	N.A	0,00%	9,09%	32,69%	21,43%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

➢ **Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi**

Proporsi kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Pinrang terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2023 proporsi kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Pinrang terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,85% dengan nilai PDRB Kabupaten Pinrang sebesar 25.146,49 (milyar rupiah) dan nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 652.648,09 (milyar rupiah). Sedangkan pada tahun 2024 proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,83% dengan nilai PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 26.653,40 (milyar rupiah) dan nilai PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 696.252,76 (milyar rupiah). Kontribusi ini berasal dari lima kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Industri Pengolahan; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Tabel 2.87
Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi	persen	3,98	3,99	3,93	3,85	3,83

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

7. Stabilitas Ekonomi Makro

➢ **Tingkat Inflasi Gabungan**

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain,

inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indicator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Tabel 2.88
Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

No	Inflasi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kabupaten Pinrang	%	1,61	4,09	6,66	2,22	1,73
2	Kota Pare Pare	%	1,61	4,09	6,66	2,22	1,73
3	Provinsi SulSel	%	0,15	2,40	6,35	5,77	1,23
4	Nasional	%	1,68	1,87	5,47	5,47	1,57

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2025

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pinrang mengacu pada inflasi Kota Pare-pare. Perkembangan inflasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami pasang surut. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,66 yang disebabkan oleh adanya kenaikan indeks harga pada 11 kelompok pengeluaran yaitu Pendidikan (13,66 persen); Transportasi (13,63 persen); Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (10,16 persen); Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (6,32 persen); Makanan, Minuman dan Tembakau (6,09 persen); Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (5,27 persen); Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (4,29 persen); Pakaian dan Alas Kaki (2,05 persen); Rekreasi, Olahraga dan Budaya (2,04 persen); Kesehatan (0,95 persen); Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,22 persen), sedangkan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,61%. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 angka inflasi telah berhasil diturunkan menjadi sebesar 2,22 dan 1,73. Dalam mengendalikan inflasi ini,

Pemerintah Kabupaten Pinrang melakukan beberapa langkah seperti melakukan pemantauan harga di beberapa pasar modern dan pasar tradisional, melakukan Gerakan Pangan Murah di kecamatan, menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.

- **Kontribusi PAD terhadap APBD**

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Rasio PAD terhadap APBD selama 5 tahun terakhir masih masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah belum dikelola secara maksimal baik dari segi intensifikasi maupun dari segi ekstensifikasi sehingga porsi PAD terhadap total belanja APBD Kabupaten Pinrang masih sangat minim. Jika memperhatikan statistic, PAD hanya menyumbang pada kisaran 8 - 13% dari total belanja APBD. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi dan keuangan daerah.

Tabel 2.89
Rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah APBD	Rasio PAD
1	2020	131.176.927.320,35	1.325.082.586.616,00	9,90
2	2021	134.066.655.485,33	1.293.820.146.095,00	10,36
3	2022	158.121.561.743,63	1.329.639.820.623,00	11,89
4	2023	175.213.230.611,99	1.339.302.613.667,00	13,08
5	2024	177.567.793.822,94	1.511.916.158.512,00	11,74

Sumber Data: BPKPD, 2025

- **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (HB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut

menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (HB) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Grafik 2.23
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

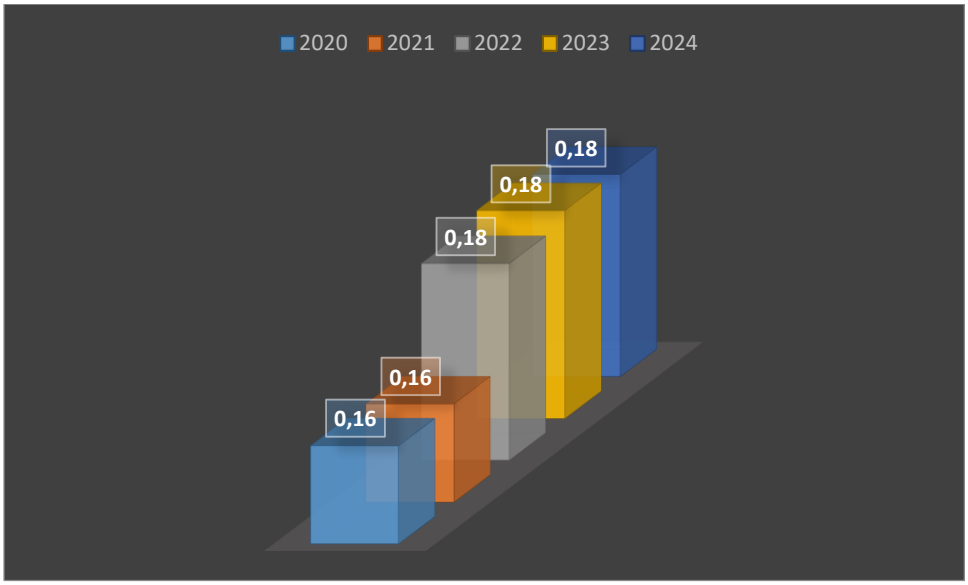

Sumber Data : BPKPD dan BPS Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan alat ukur untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran,

(5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tabel 2.90
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	69,0272 (B)	77,4276 (B)	78,8606 (B)

Sumber Data : Bidang Litbang Bappelitbangda Kabupaten Pinrang, 2025

Setelah dilakukan pengukuran dari 6 dimensi tersebut maka diperoleh nilai total Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebesar 69,0272 dengan kategori/predikat B (Perlu Perbaikan) dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 77,4276 dengan kategori/predikat B (Perlu Perbaikan). Pada tahun 2024 nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam kategori B dengan nilai 78,8606.

- **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan dan pemerataan akses masyarakat. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan, dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10, menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten/kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Pada tahun 2024, baseline Kabupaten Pinrang sebesar 4,57. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal, kemudian masih terdapat kesenjangan akses dan layanan digital keuangan belum optimal terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah.

- **Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang**

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 1,95% dan pada tahun 2021 sebesar 5,22%.

Sedangkan pada tahun 2022, persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang sebesar 5,09%. Dan pada tahun 2023 persentase peningkatan investasi meningkat kembali menjadi 9,85%. Namun pada tahun 2024 persentase peningkatan investasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,02%.

Tabel 2.91
Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang	%	1,95	5,22	5,09	9,85	0,02

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

- **Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel.

Tabel 2. 92
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	58,28	61,40 (B)	70,97 (BB)	79,47 (BB)

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

Di Kabupaten Pinrang untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021-2024 terus meningkat. Pada tahun 2024 nilainya meningkat cukup signifikan mencapai 79,47 dengan predikat BB.

- **Nilai SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana system ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di tahun 2021 sebesar 63,59 dan melampaui target tahun 2021 sebesar 63,35. Sedangkan di tahun 2022 kembali meningkat sebesar 64,08, namun belum mencapai target tahun 2022 sebesar 65. Sedangkan pada tahun 2023, capaian nilai SAKIP meningkat sebesar 64,93. Pada tahun 2024 nilai SAKIP Kabupaten Pinrang kembali meningkat menjadi 65,32.

Tabel 2.93
Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang Tahun 2020– 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,59	64,08	64,93	65,32

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

- **Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik

(keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori :

Tabel 2.94
Range Indeks Pelayanan Publik

No.	Range Nilai	Kategori	Makna
1	0 - 1.00	F	Gagal
2	1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
3	1.51 - 2.00	D	Buruk
4	2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
5	2.51 - 3.00	C	Cukup
6	3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
7	3.51 - 4.00	B	Baik
8	4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
9	4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 sebesar 4,40 menempatkannya dalam kategori A- dan pada tahun 2024 sebesar 3,95. Ini menandakan bahwa layanan publik di Pinrang pada tahun tersebut memiliki kinerja yang baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Tabel 2.95
Indeks Pelayanan Publik

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	NA	NA	NA	4,40	3,95

Sumber data : Bagian Ortala Setda Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.

Tabel 2.96
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85,99	86,45	87,38	89,77	90,25

Sumber Data: Bagian Ortala SETDA Kabupaten Pinrang, 2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 85,99. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 86,45 dan melampaui target RKPD tahun 2021 sebesar 86,25. Pada tahun 2022 angkanya meningkat menjadi 87,38 atau kategori B. Angka ini juga melampaui target tahun 2022 yang sebesar 87,35. Diharapkan agar nilai IKM Kabupaten Pinrang terus dipertahankan dan

lebih ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat kembali meningkat menjadi sebesar 90,25

- **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Predikat indeks SPBE tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.97
Predikat Indeks SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4.2 - 5.0	Memuaskan
3.5 - < 5.0	Sangat Baik
2.6 - < 3.5	Baik
1.8 - < 2.6	Cukup
< 1.8	Kurang

Sumber Data : Laporan Evaluasi SPBE di olah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pinrang

Adapun Kabupaten Pinrang memiliki Nilai Indeks SPBE pada tahun 2021 yaitu 2,62 skor, ini menunjukkan bahwa di tahun 2021 indeks SPBE Pinrang mempunyai predikat baik dan di tahun 2022 mencapai nilai skor 2,79 juga baik. Dan pada tahun 2024 nilai Indeks SPBE Kabupaten Pinrang meningkat menjadi 3,49 dengan predikat sangat baik.

Grafik 2.24
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2024

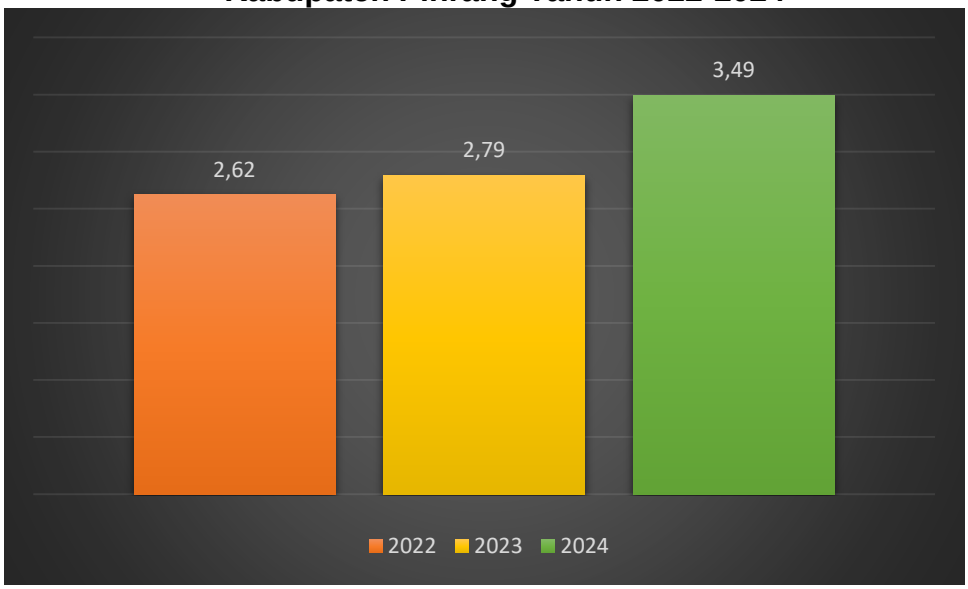

Sumber Data : Dinas Kominfosandi Kabupaten Pinrang, 2025

- **Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)**

Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses

layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (ekspert). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Grafik 2.25
Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2024

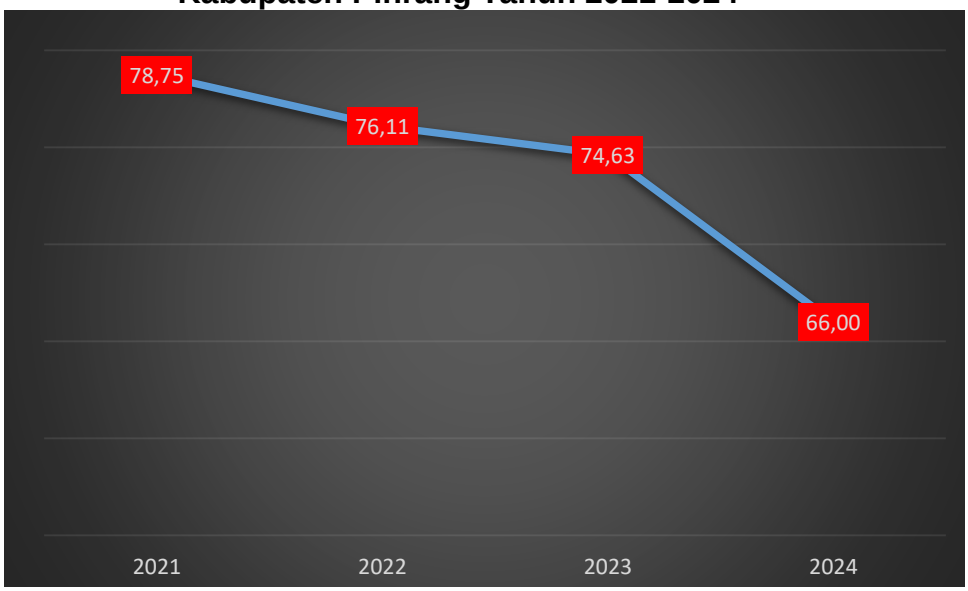

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Pinrang, 2025

Nilai Indeks Survey Integritas Kabupaten Pinrang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami tren penurunan namun masih berada di atas nilai 70, kecuali pada tahun 2024 yang menurun drastis ke 66,00. Penurunan SPI menunjukkan adanya penurunan persepsi atau kondisi integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Diperlukan adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan integritas dan penguatan sistem pengawasan internal agar nilai indeks ini bisa meningkat kembali.

- **Nilai MCP KPK**

Di dalam kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, ada satu bagian yang sangat penting, yaitu Monitoring Center for Prevention atau MCP. MCP KPK ini bertugas untuk menjaga agar

korupsi tidak terjadi atau setidaknya dikurangi di berbagai tempat di Indonesia. MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Grafik 2.26
Nilai MCP KPK Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

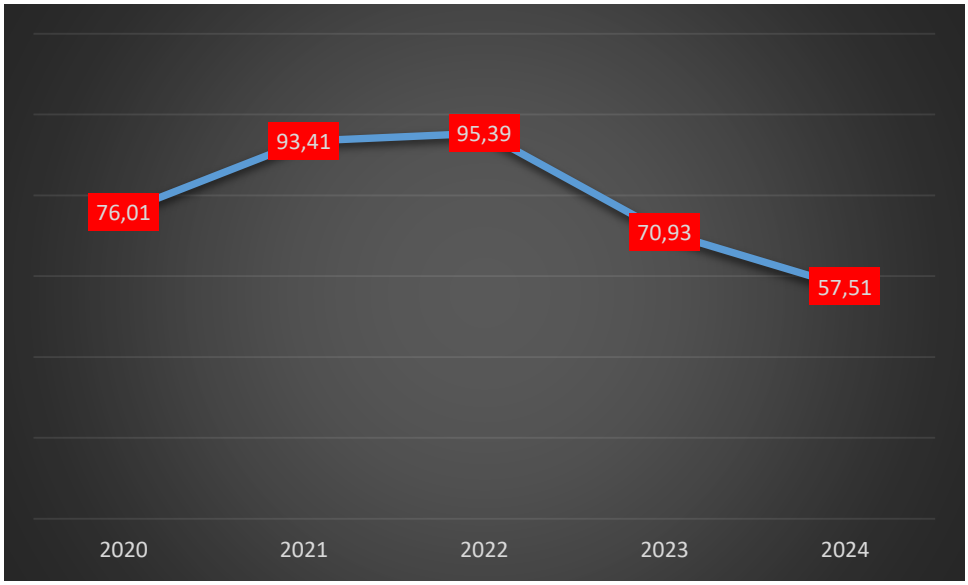

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Pinrang, 2025

Di Kabupaten Pinrang, nilai MCP KPK dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami tren fluktuatif. Penurunan setelah tahun 2022 mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi nilai tersebut.

- **Indeks Maturitas**

Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat mat uritas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Tabel 2.98
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Pinrang
Tahun 2022-2024

No.	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	Indeks Maturitas SPIP	nilai	3,290 (Level 3)	3,078 (Level 3)	3,001 (Level 3)

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Pinrang, 2025

Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 3,290, pada tahun 2023 sebesar 3,078 dan pada tahun 2024 sebesar 3,001 yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (Terdefinisi). Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memiliki sistem pengendalian intern yang terstruktur dan terdokumentasi, serta sudah diterapkan meskipun belum sepenuhnya optimal.

- **Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan system regulasi nasional. Indeks ini sering digunakan untuk menilai seberapa efektif sistem hukum dan reformasi

hukum dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 180/170/2024 Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 93,80 pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 95,30 dengan rincian hasil dari beberapa variabel seperti yang tergambar pada tabel di bawah. Capaian ini masuk kategori sangat tinggi yang menandakan bahwa Kabupaten Pinrang telah melakukan reformasi hukum secara komprehensif dan berkelanjutan.

Tabel 2.99
Variabel Penilaian dan Nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pinrang Tahun 2023-2024

Variabel	Skor	
	2023	2024
Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Harmonisasi Regulasi	23,60	23,60
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan	20,20	23,70
Kualitas Re-regulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-undangan	20,00	28,00
Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	30,00	20,00
Indeks Reformasi Hukum	**93,80**	**95,30**

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Pinrang, 2024

- **Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, adanya standar pelayanan sangat penting karena memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja, serta memberikan transparansi bagi masyarakat. Standar pelayanan memungkinkan masyarakat mengetahui persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu pelayanan secara jelas,

sehingga dapat diukur dan dikontrol. Standar pelayanan juga membantu penyelenggara untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam pelayanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat. Agar pelayanan public yang diberikan pemerintah oleh pemerintah bisa berjalan maksimal, maka perlu diberikan pengawasan. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang memberi pengawasan adalah Ombudsman.

Terdapat empat dimensi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai sempurna yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dari segi pengelolaan pengaduan. Pada tahun 2024 Kabupaten Pinrang memperoleh nilai untuk opini ini sebesar 95,05.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

- **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan**

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini tentunya merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak baik pemerintah daerah, swasta maupun elemen masyarakat yang ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Pinrang.

Grafik 2.27
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

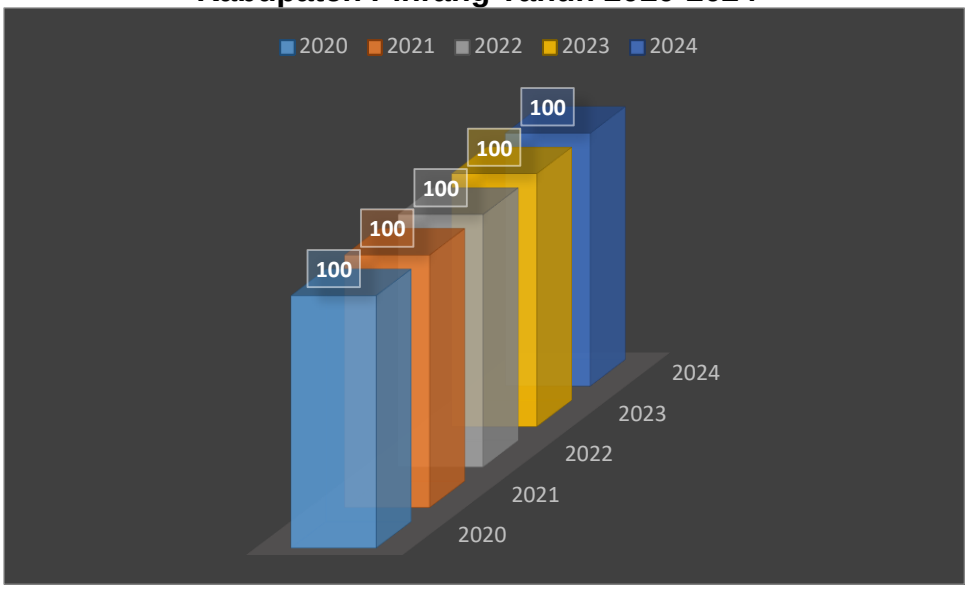

Sumber Data: Satpol P3K, 2025

- **Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Selama kurun waktu empat tahun terakhir persentase perda dan perkada yang ditegakkan telah mencapai 100%.

Tabel 2.100
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	75,76	100	100	100	100

Sumber Data: Satpol P3K, 2025

- **Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani**

Persentase tindak kriminal yang ditangani sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2023 persentase tindak kriminal yang ditangani sebesar 99,48% dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 1.174 laporan dan yang telah diselesaikan sebanyak 1.168 laporan. Adapun laporan yang belum diselesaikan karena masih dalam proses pemberkasan dan menunggu P21 atau putusan dari kejaksaaan. Sedangkan pada tahun 2024 persentase tindak kriminal yang ditangani mencapai 87,73% dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 1.209 kasus dari total 1.378 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang telah responsif terhadap penanganan kasus kriminalitas terutama pada tahun 2023.

Grafik 2.28
Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

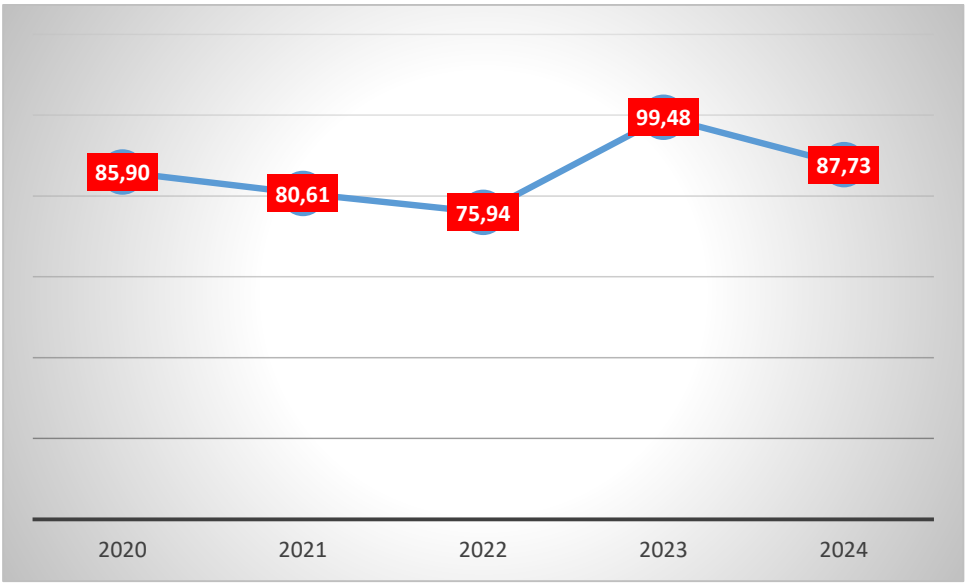

Sumber Data: Satpol P3K, 2025

- **Indeks Demokrasi Indonesia**

1). Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebesar 15% dengan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 6 orang dari 40 orang total jumlah anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk periode 2019-2024. Sementara untuk periode 2024-2029, persentase perempuan terpilih anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebesar 10% dengan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 4 orang.

2). Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Jumlah Perda yang merupakan inisitif anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) perda yaitu tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

3). Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 sebesar 33,50% dengan jumlah perempuan pengurus partai sebanyak 143 orang dengan jumlah pengurus partai politik keselurahan sebanyak 427 orang.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

- **Indeks Daya Saing Daerah**

Di tengah tantangan global yang makin kompleks, Indonesia perlu bertransformasi menjadi negara maju yang ditopang oleh sektor yang bernilai tambah tinggi. Untuk mewujudkan hal ini, penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangatlah penting. Dalam konteks ini, IDSD didesain menjadi alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

IDSD 2024 tetap merujuk pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019, dengan penyesuaian indikator dan metodologi agar lebih relevan. Jumlah indikator daya saing mencapai 64 untuk provinsi dan 51 untuk kabupaten/kota, dengan cakupan yang diperluas menjadi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Kabupaten Pinrang menunjukkan tren positif dan progresif dalam meningkatkan daya saing daerah selama periode tahun 2022-2024. Nilai Indeks Daya Saing Kabupaten Pinrang untuk tahun 2022 sebesar 3,02 dan tahun 2023 sebesar 3,18 atau meningkat sebesar 0,16 poin. Skor ini lebih besar jika dibandingkan dengan skor Kabupaten Sidrap yang sebesar 3,08 namun lebih rendah dibanding skor Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70. Sementara pada tahun 2024, nilai Indeks Daya Saing Kabupaten Pinrang meningkat menjadi 3,43.

Grafik 2.29
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2022-2024

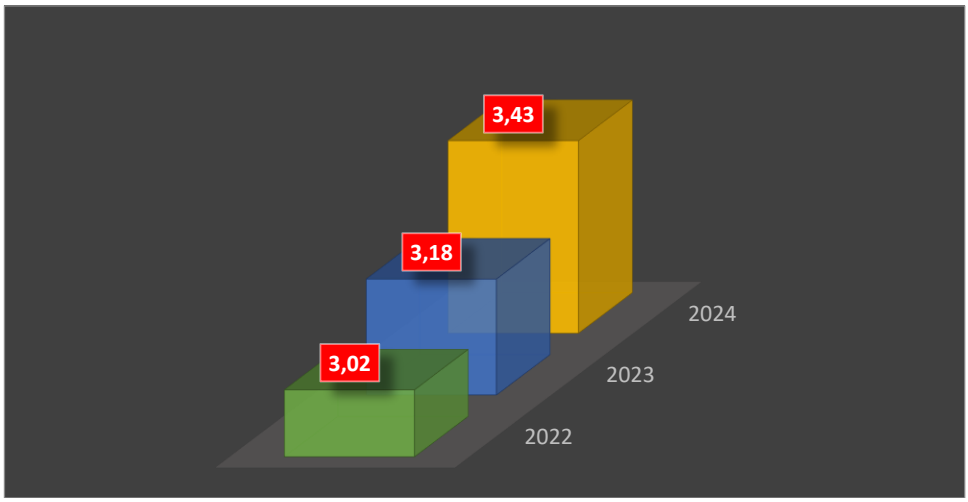

Sumber data : Publikasi BRIN Buku Indeks Daya Saing Daerah, 2025

- **Persentase Kerjasama Kab/Kota dengan Kab/Kota lainnya/Provinsi/Sister City/Skala Regional yang Ditindaklanjuti**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga menjelaskan bahwa yang dimaksud kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah lain seperti Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Sidrap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan Pemerintah Kota Samarinda. Berikut daftar kerjasama yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) yaitu :

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Pengembangan Pembangunan Daerah, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun.

- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Pelayanan Tera Tera Ulang Alat UTTP, jangka waktu pelaksanaan 1 tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Pengembangan Pembangunan Daerah, jangka waktu pelaksanaan 5 tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan, jangka waktu pelaksanaan 3 tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang dengan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pinjam Pakai Alat Standar Kemetrologian, jangka waktu pelaksanaan 1 tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang tentang Penanggulangan Bencana di Daerah, jangka waktu pelaksanaan 5 tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah, jangka waktu pelaksanaan 5 tahun.

Dari ketujuh perjanjian kerjasama tersebut, kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda belum ditindaklanjuti, sehingga persentase kerjasama kab/kota dengan kab/kota lainnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 85,71%.

Sedangkan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah yaitu:

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerja

Sama Pengembangan Pembangunan Daerah, diperbaharui setiap tahun.

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Perangkat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, diperbaharui setiap tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah, diperbaharui setiap tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian , Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pinjam Pakai Alat Standar Kemetrologian, diperbaharui setiap tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah di Kabupaten Pinrang, diperbaharui setiap tahun.
- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pelayanan Tera Tera Ulang Alat UTTP, diperbaharui setiap tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota ParePare Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggula Antar Daerah, diperbaharui setiap tahun.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan, diperbaharui setiap tahun.

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah, diperbaharui setiap tahun.

Dari kesembilan kerjasama tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti 100%.

4. Indikator Kinerja Kunci

➢ **Bidang Urusan Pendidikan**

1) Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD selama rentang tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung berfluktuatif. Menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022, namun pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

2) Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2021 sebesar 95,32% dengan jumlah anak sebanyak 44.003 anak dan pada tahun 2022 sebesar 97,31% dengan jumlah anak 44.492 anak. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 91,26% dengan jumlah anak 41.292 anak. Capaian ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 89,78%.

3) Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Menengah Pertama

Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2021 sebesar 98,27% dan pada tahun 2022 sebesar 98,45%. Kemudian pada

tahun 2023 menurun menjadi 67,58%. Kemudian pada tahun 2024, capaiannya mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,93%.

4) Pendidikan Kesetaraan

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2020 sebesar 97,27% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 97,02%. Pada tahun 2021 jumlah warga Negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan indicator. Jika pada tahun sebelumnya yang diukur adalah rentang usia 7- 56 tahun sedangkan pada tahun 2021 rentang usia yang diukur adalah usia 7-18 tahun. Pada tahun 2022 capaian tersebut meningkat menjadi 97,27% dan pada tahun 2023 sebesar 9,33%. Pada tahun 2024 capaian ini meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 57,43%.

Tabel 2.101
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,83	95,79	95,96	70,73	53,91
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,28	95,32	97,31	91,26	89,78
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	92,06	98,27	98,45	67,58	68,93
4	Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	97,27	97,02	97,27	9,33	57,43

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

- **Bidang Urusan Kesehatan**

1) **Rasio DayaTampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk**

Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu 2020-2024 berada pada kisaran 0,07%-0,08%. Artinya, hanya terdapat kurang dari 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk, sementara menurut standar WHO adalah sekitar 3 tempat tidur per 1.000 penduduk yang jika dipersentasekan sebesar 0,3%. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas menyebabkan gap antara kebutuhan dan kapasitas semakin melebar, dan tentu saja ini bisa beresiko terhadap kualitas layanan kesehatan publik.

2) **Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi**

Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai 100%.

3) **Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 90,31% dan 2023 mencapai 95,61%. Dan pada tahun 2024 mencapai 100%.

4) **Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan**

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2020 sebesar 91,00% dan 2024 mencapai 100%. Dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 3,8%.

5) **Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2020 mencapai 91,24% dan 2024 mencapai 100%.

6) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun pada tahun 2024 telah mencapai 100%.

7) **Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2022 mencapai 73,10% dan 2023 telah mencapai 73,29%. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif namun pada tahun 2024 telah mencapai 100%.

8) **Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan**

Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 96,52% dan pada tahun 2022 sebesar 96,99%. Kemudian pada tahun 2023 mencapai 98,34%. Pada tahun 2024 telah mencapai 100%.

9) **Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar**

Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 mencapai 91,93% dan tahun 2022 sebesar 91,98%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 91,82% dan mencapai 100% pada tahun 2024.

10) **Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 83,51% dan tahun 2022 telah mencapai 85,32%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 82,20% dan pada tahun 2024 mencapai 100%.

11) **Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Persentase penderita diabetes mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 91,32% dan tahun 2022 telah mencapai 93,11%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 91,82% dan tahun 2024 mencapai 100%.

12) Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar pada tahun 2022 mencapai 86,13% dan pada tahun 2023 sebesar 95,79% dan tahun 2024 mencapai 61,39%.

13) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 93,63% dan tahun 2022 telah mencapai 92,92%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 93,20% dan tahun 2024 telah mencapai 100%.

14) Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 telah mencapai 96,43%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 97,65% dan tahun 2024 mencapai 100%.

Tabel 2.102
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 - 2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	%	0,07	0,08	0,08	0,05	0,07
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,31	94,27	95,82	95,61	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	91,31	96,48	95,4	96,28	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi Baru lahir	%	91,24	100	94,85	98,24	100

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita Sesuai standar	%	95,63	95,18	98,6	97,01	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	73,00	72,94	73,1	73,29	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,00	96,52	96,99	98,34	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan Sesuai standar	%	90,37	91,93	91,98	91,82	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,00	83,51	85,32	82,20	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,00	91,32	93,11	91,82	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Sesuai standar	%	93,00	88,45	86,13	95,79	61,39
13	Persentase orang terdugaTBC mendapatkan pelayanan TBC Sesuai standar	%	97,00	93,63	92,92	93,20	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	92,00	100	96,43	97,65	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2025

- **Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1) Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS yang menjadi kewenangan kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan dari 33,50% pada tahun 2020 menjadi 25,80% pada tahun 2024.

2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 30,72% dan pada tahun 2021 sebesar 31,43%. Capaian indicator ini mengalami tren peningkatan selama tahun 2020-2024.

3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 77,71% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 79,79%. Pada tahun 2024 telah mencapai 80,71%.

4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 95,05% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 95,97% akan tetapi belum memenuhi target 100% karena selisih 4,03% tersebut termasuk kategori yang belum ada akses karena rumah tangga tersebut mengambil air minum langsung melalui sungai, laut dan danau. Sedangkan untuk capaian tahun 2023 meningkat sebesar 96,07% dan tahun 2024 mencapai 96,88%.

5) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestic

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic pada tahun 2021 mencapai 97,78% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 98,32%. Untuk tahun 2023

capaian indicator tersebut sebesar 98,46% dan pada tahun 2024 mencapai 98,63%.

6) Rasio kepatuhan IMB

Rasio kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah mencapai 100%.

7) Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Pinrang

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 sebesar 65,73% dan naik sebesar 61,35% pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terjadi perubahan menjadi 63,31% dan pada tahun 2023 dilakukan revisi panjang ruas jalan berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 600/266/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2023 yaitu panjang ruas jalan kabupaten sebesar 653,83 km dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 67,72%.

8) Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi selama kurun waktu lima tahun terakhir secara kuantitas terus meningkat namun jumlah kebutuhan juga terus meningkat. Hal ini menyebabkan rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai 100%.

9) Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi telah mencapai 100% walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 2.103
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	33,50	30,70	29,80	27,40	25,80
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	30,72	31,43	31,97	37,35	37,89
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	77,71	79,79	80,25	80,36	80,71
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	93,43	95,05	95,97	96,07	96,88
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,56	97,78	98,32	98,46	98,63
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	65,73	61,35	63,31	67,72	68,54
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	89,91	94,13	95	95	95,61
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	95	96	100

Sumber Data: Dinas SDA&BK dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, 2025

- **Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mencapai 28,91%.

Sedangkan pada tahun 2022-2024 capaiannya mencapai 100%.

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Pinrang belum tersedia.

3) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Pinrang yang ditangani

Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha Kabupaten Pinrang yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 49,67% dan tahun 2021 sebesar 4,55%. Namun pada tahun 2022-2023, jumlah kawasan kumuh dengan luas 2,94 ha belum tertangani disebabkan oleh anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan lain. Pada tahun 2024 persentase kawasan kumuh yang ditangani sebesar 1,02%.

4) Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 berkurang sebanyak 4,53% dan tahun 2022 naik lagi sebanyak 4,59%. Sedangkan pada tahun 2023 persentase berkurangnya jumlah unit RTLH sebesar 4,50% dengan jumlah unit RTLH sebanyak 5.468 rumah dari total unit rumah di Kabupaten Pinrang sebanyak 121.405 rumah. Pada tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni berkurang menjadi 5.296 dengan persentase sebesar 4,36%.

5) Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 sebesar 2,05%.

Tabel 2.104
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	28,91	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah10ha di kab/ kota yang ditangani	%	49,67	4,55	0	0	1,02
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,62	4,53	4,59	4,5	4,36
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	6,4	0,35	1,1	2,05

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

- **Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase gangguan trantibum di Kabupaten Pinrang yang dapat diselesaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai 100%.

2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,76% dan pada tahun 2021 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%.

3) Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2021 sebanyak 323.039 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 411.392 jiwa yang berada di 12 kecamatan. Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ini adalah

penduduk usia 13-59 tahun, dimana bentuk layanan informasinya berupa surat edaran tentang rawan bencana. Pada tahun 2023 jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 281.430 jiwa, dimana jumlah penduduk yang terdata tersebut adalah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Di tahun 2024 jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 250.060 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

4) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan pada tahun 2021 hingga tahun 2024 sebanyak 79.108 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk yang berada di lokasi rawan bencana.

5) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah korban sebanyak 292 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Di tahun 2022, jumlah warga Negara yang diselamatkan dan dievakuasi sebanyak 1.097 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dan pada tahun 2023, jumlah warga Negara yang diselamatkan dan dievakuasi sebanyak 1.546 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah ini bertambah pada tahun 2024 sebanyak 6.199 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

6) Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 83,51% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 96,12%. Adapun kejadian kebakaran yang lambat tertangani disebabkan oleh lokasi kejadian yang jauh dan sulit terjangkau sehingga penanganan kebakarannya di atas

waktu tanggap (response time) yaitu 6,37 menit. Adapun capaian tahun 2023 untuk indicator ini yaitu sebesar 96,40%. Pada tahun 2024 jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Pinrang menurun drastis dibanding pada tahun 2023 yaitu sebanyak 84 kejadian dengan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 95,24%.

7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 15 menit dan tahun 2021 selama 6,37 menit. Pada tahun 2022 waktu tanggap (response time) yaitu 8,94 menit dan pada tahun 2023 selama 8,77 menit. Waktu tanggap ini terus berkurang menjadi 7,69 menit pada tahun 2024. Artinya bahwa para petugas pemadam kebakaran lebih cepat sampai di lokasi kebakaran.

Tabel 2.105
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,76	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa/kec	403.994 Jiwa / 12 kecamatan	323.039 jiwa / 12 kecamatan	411392 jiwa / 12 kecamatan	281.430 jiwa / 12 kecamatan	250.060 Jiwa/ 12 Kecamatan
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	jiwa/kec	407236 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatandan evakuasi korban bencana	jiwa/kec	407.236 jiwa,12 kec	292 jiwa, 12 kec	1.097 jiwa/ 12 kec	1.546 jiwa/ 12 kec	6.199 Jiwa / 12 kec
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83,51	96,12	93,88	96,4	95,24
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	6,37	8,94	8,77	7,69

Sumber Data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

- **Bidang Urusan Sosial**

1) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Menurunnya jumlah anak terlantar disebabkan oleh adanya program penelusuran dan reunifikasi keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, sehingga anak terlantar dapat dikembalikan kepada keluarganya.

2) Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah

Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Akan tetapi di tahun 2021 jumlah korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meningkat karena banyaknya kejadian bencana alam salah satunya kebakaran dan angin puting beliung.

Tabel 2.106
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Sosial, 2025

- **Bidang Urusan Tenaga Kerja**

1) Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,92% dan meningkat sebesar 80,00% pada tahun 2021. Adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan oleh karena pada tahun 2021 sudah terpecah menjadi sub kegiatan sedangkan pada tahun 2020 masih berupa kegiatan. Capaian ini jauh melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 1,02%. Namun pada tahun 2022, capaian indicator ini menurun menjadi sebesar 55,56%. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat dengan capaian sebesar 75%.

2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,68% dan pada tahun 2021 sebesar 87,49%. Pada tahun 2022 persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 59,18%. Kemudian pada tahun 2023 persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 60,83% dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 5.124 tenaga kerja. Pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebanyak 234 tenaga kerja. Jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan data yang diambil bukan merupakan jumlah akumulasi dari data tahun sebelumnya sehingga persentasenya menurun menjadi 3,18%.

3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 7.982,56 pada tahun 2020 dan sebesar Rp 155.087,98 pada tahun 2021. Di tahun 2022 tingkat produktivitas meningkat sebesar Rp 167.833,00. Kemudian pada tahun 2023 tingkat produktivitas tenaga kerja menurun menjadi 7.760,09 juta rupiah. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja yang bertambah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 185.423 tenaga

kerja. Sementara di tahun 2024 tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 7.570,44 juta rupiah.

4) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 36,69% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,16%. Walaupun jumlah perusahaan di tahun 2021 berkurang karena adanya penyelarasan dari Kemendagri dan Inspektorat, namun jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak semakin meningkat. Pada tahun 2022, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak meningkat menjadi 78,36%. Kemudian pada tahun 2023 persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak menurun menjadi 73,32% dikarenakan jumlah perusahaan yang bertambah dengan jumlah sebanyak 446 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 327 dengan total jumlah perusahaan sebanyak 356 perusahaan yang jika dipersentasekan sebesar 91,85%.

5) Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 58,10% dan pada tahun 2021 sebesar 63,02%. Jumlah pencaker yang mengambil kartu kuning pencaker (AK.1) semakin meningkat disebabkan oleh banyaknya permintaan tenaga kerja seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang. Tentu saja ini juga berdampak mengurangi tingkat pengangguran. Pada tahun 2022 persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 70,21% dimana sebanyak 2.171 tenaga kerja yang ditempatkan dari 3.092 jumlah pencaker yang terdaftar. Dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 71,80% dimana sebanyak 1.525

tenaga kerja yang ditempatkan dari 2.124 jumlah pencaker yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2024 baik jumlah pencaker yang ditempatkan maupun jumlah pencaker yang terdaftar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu sehingga persentasenya menjadi sebesar 64,56%.

Tabel 2.107
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana tenaga kerja	%	0,92	80	55,56	75	75
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,68	87,49	59,18	60,83	3,18
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rupiah)	7.982,56	155.087,98	167.833,00	7.760,09	7.570,44
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	36,69	74,16	78,36	73,32	91,85
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	58,1	63,02	70,21	71,80	64,56

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2025

- **Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten Pinrang selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren fluktuasi. Di tahun 2024 persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 30,81% dengan jumlah ARG pada

belanja langsung APBD sebesar Rp 415.262.290.303.

2) Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,12% dan menurun pada tahun 2021 sebesar 0,07%. Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupakan peran aktif dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tanggap menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Pada tahun 2022 persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait sebesar 0,064%. Dan pada tahun 2023 persentase anak korban kekerasan menurun menjadi 0,02%. Sedangkan pada tahun 2024 persentasenya sebesar 100%.

3) Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2021 sebesar 0,018% dan pada tahun 2022 sebesar 0,036%. Kemudian pada tahun 2023 rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO sebesar 0,057 dan tahun 2024 sebesar 0,084%.

Tabel 2.108
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	%	9,19	39,8	24,23	30,6	30,81
2	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	0,12	0,072	0,064	0,02	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan	%	0,05	0,018	0,036	0,057	0,084

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A, 2025

- **Bidang Urusan Pangan**

1) Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)

Capaian persentase cadangan pangan mengalami fluktuatif setiap tahunnya karena cadangan pangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh wilayah terdampak bencana, prevalensi kerawanan pangan, jumlah penduduk dan konsumsi cadangan pangan pemerintah.

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 35,43% dan meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 55,29%. Jumlah cadangan pangan pada tahun 2021 sebanyak 26.988,24 ton dimana jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah cadangan pangan bulog sebanyak 26.977,25 ton dan cadangan Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 10,99 ton. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 48.815,28 ton dihitung berdasarkan kebutuhan beras per kapita yaitu 120 kg/kapita dikali dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 persentase ketersediaan pangan yaitu sebesar 29,32%. Angka ini jauh berkurang dari cadangan pangan tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 terjadi banyak kejadian bencana di Kabupaten Pinrang sehingga cadangan pangan yang ada digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan dari para korban bencana. Pada tahun 2024 persentase ketersediaan pangan sebesar 12,51% (berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah).

Tabel 2.109
Kinerja Penyelenggaran Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	%	35,43	55,29	29,32	216,119	12,51

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

- **Pertanahan**

1) Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2020 mencapai 21,25% dan pada tahun 2021-2024 telah mencapai 100%. Pemanfaatan tanah yang peruntukannya sesuai dengan izin lokasi ini antara lain bergerak di bidang usaha perumahan subsidi, pembibitan ayam niaga, pembangunan fasilitas kesehatan, wisata pantai, mini market dan department store.

2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitasi Umum

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mencapai 59,60% dan pada tahun 2022-2024 telah mencapai 100%. Adapun jenis fasilitas umum yang dibangun yaitu taman kota, hutan kota, jalur hijau jalanan sendapan sungai lapangan olahraga, pekarangan kantor/mesjid/sekolah, dan area pemakaman.

3) Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Persentase ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021-2024 telah mencapai 100% dengan luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya pada tahun 2024 seluas 130.200 ha.

4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 40,78% dan pada tahun 2022 naik menjadi 109%. Kemudian turun menjadi 92% di tahun 2024.

5) Tersedianya tanah untuk masyarakat

Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat berdasarkan izin membuka tanah yang telah diterbitkan pada tahun 2021-2024 telah mencapai 100%. Namun di tahun 2020 hanya sebesar 21%.

6) Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Pinrang selama tahun 2021 sebanyak 6 kasus yang telah terselesaikan atau telah mencapai 75%. Adapun kasus yang lain masih sementara dalam proses penyelesaian. Pada tahun 2022 jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani sebanyak 5 kasus dari 6 kasus jumlah pengaduan, atau mencapai 83%. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai 100% dengan jumlah sengketa tanah sebanyak 3 kasus dan 5 kasus.

Tabel 2.110
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020–2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	21,25	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	22,5	59,6	100	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	21,18	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	16,6	40,78	109	100	92
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	21	100	100	100	100
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	20	75	83	100	100

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2025

- **Lingkungan Hidup**

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan hutan. IKLH di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 dengan nilai 67,56% dan pada tahun 2022 dengan nilai 66,88%. Pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Pinrang sebesar 68,83% dan di tahun 2024 realisasinya menurun menjadi 67,07 disebabkan komponen penyusunnya juga mengalami penurunan.

2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Pinrang

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 57,19%, namun menurun sebesar 44,21% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang sebesar 44,31% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 43,18%. Namun pada tahun 2024 pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang meningkat menjadi 43,85%.

3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mencapai 100% selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.111
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	IKLH Kab/Kota = (IKA30%)+(IKD30%)+(ITH40%).	%	68,74	67,56	66,88	68,83	67,07
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Kab/Kota	%	57,19	44,21	44,31	43,18	43,85

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

- **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1) Perekaman KTP Elektronik

Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang yang telah melakukakan perekaman KTP elektronik meningkat dari tahun 2020 sebanyak 96,91% menjadi 99,15% di tahun 2021 dan di tahun 2022 menurun menjadi 97%. Dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,44% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 99,29%.

2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu lima tahun mengalami tren yang fluktuatif.

3) Kepemilikan akta kelahiran

Jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pinrang yang telah memiliki akta kelahiran selama tahun 2020 sebesar 96,74%. Pada tahun 2021 realisasi kepemilikan akta kelahiran meningkat menjadi 97,88%. Pada tahun 2022 mencapai 99% dan tahun 2023 99,86%. Dan pada tahun 2024 menurun menjadi 99,46%.

4) Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian KerjaSama

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan di tahun 2022 menurun menjadi 20%, kemudian di tahun 2023 ada peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 34%. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Kerjasama yang dibuat memiliki

masa berlaku selama 2 tahun, dan tahun ini masih banyak OPD yang belum memperbaharui Perjanjian Kerjasamanya. Di tahun 2024 jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 42,00%.

Tabel 2.112
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	%	96,91	99,15	97	99,44	99,29
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	%	26,91	50,72	74	90	55,63
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,74	97,88	99	99,86	99,46
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	72,09	100	20	34	42,00

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Desa Tertinggal adalah desa yang masyarakatnya serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan desa lainnya. Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 26,32% dengan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang sebanyak 5 desa dari 19 desa yang memiliki status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2022 sebesar 14,29% dengan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang sebanyak 2 desa dari 14 desa yang memiliki status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dan pada tahun 2023 sebesar 33,33% dengan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang sebanyak 4 desa dari 12 desa yang memiliki status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan pada tahun 2024 persentase desa tertinggal/sangat tertinggal sebesar 10,14% dan persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 14,29%.

2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Pada Tahun 2022 terdapat 5 Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Mandiri dan tahun 2023 jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Mandiri meningkat 17 Desa. Sehingga pada akhir tahun 2023 jumlah Desa Mandiri adalah 22 Desa dari 69 Desa di Kabupaten Pinrang. Sedangkan di tahun 2024 jumlah desa mandiri bertambah menjadi 36 desa sehingga persentase desa mandiri sebesar 52,17%.

Tabel 2.113
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	N.A	26,32	14,29	33,33	14,29
2	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	N.A	0	9,09	32,69	21,43

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

➢ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1) TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pinrang pada 2020 sebesar 2,64 dan pada tahun 2021 menjadi 2,61. Pada tahun 2022 Angka Kelahiran Total atau TFR Kabupaten Pinrang sebesar 2,57%. Dan pada tahun 2023 angka kelahiran total atau TFR sebesar 2,33% kemudian menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 2,15%.

2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2021 sebesar 68,05% dan tahun 2022 sebesar 68,11%. Dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 71,48% dengan jumlah peserta KB aktif modern sebanyak 38.497 peserta. Capaian ini menurun di tahun 2024 menjadi 59,13% disebabkan jumlah

peserta KB aktif menurun sedangkan jumlah pasangan usia subur meningkat.

3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) pada tahun 2021 sebesar 10,76% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 10,27%. Kemudian pada tahun 2023 persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebanyak 8,20% dan tahun 2024 sebesar 12,19%.

Tabel 2.114
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,64	2,61	2,57	2,33	2,15
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,02	68,05	68,11	71,48	59,13
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	11,48	10,76	10,27	8,20	12,19

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A, 2025

➢ **Perhubungan**

1) Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang

Rasio konektivitas di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan jumlah trayek dikali bobot trayek kemudian dibagi dengan jumlah kebutuhan trayek. Pada tahun 2020 diperoleh capaian 1,3 dan pada tahun 2021 dengan rasio konektivitas sebesar 1,5. Dengan kata lain rasio konektivitas kabupaten dengan indeks baik. Begitupun pada tahun 2022, rasio konektivitas masih 1,5. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 rasio konektivitas sebesar 1.

2) Kinerja lalu lintas Kabupaten

Kinerja lalu lintas di Kabupaten Pinrang diperoleh persentase sebesar 0,44-0,45 pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lalulintas di Kabupaten Pinrang relative lancar dengan arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.

Tabel 2.115
Kinerja Penyelengaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas	angka	1,3	1,5	1,5	1	1
2	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	angka	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2025

- **Komunikasi dan Informatika**

1. **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo**

   Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2020-2024 dengan jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi sebanyak 83 OPD termasuk kelurahan. Dan pada tahun 2022, bertambah 1 OPD yg terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian 100%.

2. **Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**

   Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2020 ditargetkan 26 sistem untuk diintegrasikan dan yang terealisasi hanya 4 sistem saja sehingga realisasi capaian hanya 15,38%. Pada tahun 2021 persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online mencapai 43,75% dan pada tahun 2022 mencapai 52,94%. Kemudian pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 100%.

3. **Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah**

   Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 90,97 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak

257.960 jiwa dari 283.553 jiwa yang ada di Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2021 capaian persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang sebesar 98,73% dengan sasaran sebanyak 284.620 jiwa dari 288.275 jumlah penduduk usia 17 tahun keatas. Pada tahun ini juga terdapat 3 tambahan media yang tadinya sebanyak 7 media sebagai media diseminasi informasi public. Dan pada tahun 2023 mencapai 91,67% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 92,66%.

Tabel 2.116
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	15,38	43,75	52,94	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	%	90,97	98,73	98,79	91,67	92,66

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2025

- **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1) Persentase Koperasi yang berkualitas

Persentase koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 13,10% dan pada tahun 2021 sebesar 19,52%. Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terdapat 73 koperasi yang meningkat kualitasnya dari total 374 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Pinrang. Namun terdapat sekitar 120 koperasi yang tidak aktif dan sudah direkomendasikan untuk dibubarkan. Pada tahun 2022-2023, persentase koperasi yang berkualitas sebesar 14,71%. Sementara pada

tahun 2024 persentase koperasi yang berkualitas sebesar 11,14%.

2) Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 8,94% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 13,96%. Adanya peningkatan jumlah usaha mikro pada tahun ini, salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan klasifikasi kelas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan criteria modal usaha yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2022, persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,48%. Kemudian pada tahun 2023 persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha menurun kembali menjadi 4,9% dengan jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 1.381 usaha. Namun pada tahun 2024 jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi sebanyak 14.109 usaha mikro sehingga persentasenya menjadi sebesar 50,13%.

Tabel 2.117
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020–2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	13,1	19,52	14,71	14,71	11,14
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	8,94	13,96	25,48	4,9	50,13

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2025

➢ **Penanaman Modal**

1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 1,95% dan pada tahun 2021 sebesar 5,22%. Sedangkan pada tahun 2022, persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang sebesar 5,09%. Dan pada tahun 2023 persentase peningkatan investasi meningkat kembali menjadi 9,85%. Namun pada

tahun 2024 persentase peningkatan investasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,02%.

Tabel 2.118
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang	%	1,95	5,22	5,09	9,85	0,02

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

- **Kepemudaan dan Olahraga**

1) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu strategi pelayanan kepemudaan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi menuju kemandirian pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,52%. Di tahun 2021 naik menjadi 15,66%. Pada tahun 2022, persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri meningkat menjadi sebesar 20,77% dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 22,93%. Sementara pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menurun menjadi 21,39%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Pinrang meningkat. Sejak tahun 2021 cara perhitungannya berbeda dari tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun sebelumnya hanya mengambil jumlah pemuda usia 16-30 tahun

yang berwirausaha hanya di ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Watang Sawitto saja, tetapi pada tahun 2021 sudah mencakup seluruh kecamatan sehingga jumlahnya meningkat drastis.

2) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan pada tahun 2020 sebesar 2,39%. Di tahun 2021 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan meningkat menjadi 15,80%. Hal ini berbeda dengan tahun lalu karena perhitungan tahun lalu mengambil jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha hanya di ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Watang Sawitto saja tetapi tahun ini sudah mencakup seluruh kecamatan sehingga jumlahnya meningkat drastis. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan meningkat menjadi 20,95%. Dan pada tahun 2023 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat sebesar 20,60. Sementara pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan menurun menjadi 10,50%. Hal ini disebabkan jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

3) Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pinrang dilihat dari jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2020 tidak ada perolehan medali dikarenakan tidak ada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti oleh Kabupaten Pinrang. Di tahun 2021 Kabupaten Pinrang menyumbang medali emas di cabang olahraga takraw dan futsal sehingga jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional menjadi 2 medali. Di tahun 2022, perolehan medali Kabupaten Pinrang sebanyak 5 medali. Dan pada tahun 2023 jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional di

Kabupaten Pinrang sebanyak 7 medali dari cabang olahraga sepak takraw. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah perolehan medali sebanyak 5 medali dari cabang olahraga sepak takraw dengan rincian 2 medali emas dan 3 medali perak.

Tabel 2.119
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,52	15,66	20,77	22,93	21,39
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	2,39	15,8	20,95	20,6	10,50%
3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	Tidak ada	2	5	7	5

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

- **Statistik**

1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini berkat strategi pengumpulan data dan distribusi data statistic melalui suatu system (Decision Support System DSS) Lontara Pinrang yang sudah terintegrasi di pusat data Kabupaten Pinrang.

2) Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% selama 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.120
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2025

- **Persandian**

1) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019-2020 masih menunjukkan pencapaian kinerja 0% dimana belum melakukan system elektronik (S.E) yang menerapkan System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian, salah satu upaya dalam melaksanakan system keamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019-2023 melalui pemasangan Firewall di tahun 2020 penambahan system keamanan dengan pemasangan Honypot sebagai system keamanan data dan informasi Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2021-2023, jumlah OPD yang dinilai sebanyak 84 OPD yang dibagi ke dalam 5 area penilaian dan mencapai persentase sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 31,47%.

Tabel 2.121
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	100	100	100	31,47

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2025

- **Kebudayaan**

1) Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah cagar wisata yang terdata dan telah dilestarikan di Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu 2020-2023 telah mencapai 100%. Namun pada tahun 2024 jumlah cagar budaya yang dilestarikan hanya sebanyak 2 cagar budaya dari total 44 cagar budaya yang terdata sehingga persentasenya menjadi 4,55%.

Tabel 2.122
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	4,55

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

- **Perpustakaan**

1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 mencapai 59,96%. Pada tahun 2023, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat menjadi sebesar 60,25%. Dan pada tahun 2024 tingkat kegemaran membaca meningkat menjadi 71,34%. Angka ini diperoleh melalui survey dengan metode kuisioner yang dilakukan secara sampling acak.

2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 26,96% dan tahun 2022 sebesar 28,42%. Tahun 2023, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 28,77%. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh jumlah koleksi perpustakaan yang meningkat sebanyak 1,32% dari koleksi tahun lalu. Juga adanya peningkatan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Pada tahun 2024, Indeks pembangunan literasi masyarakat ini meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 72,19%.

Tabel 2.123
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 -2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	%	Tidak ada	42,06	59,96	60,25	71,34
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	25,94	26,96	28,42	28,77	72,19

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2025

- **Kearsipan**

1. **Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja**

   Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 75% dan pada tahun 2021 sebesar 75,18%. Pada tahun 2022-2023 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebesar 75,24%. Namun pada tahun 2024 capaian indicator ini menurun menjadi 75,03%.

2. **Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat**

   Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 33,33% dan pada tahun 2021-2023 mencapai 66,67%. Dan pada tahun 2024 capaian indicator ini meningkat cukup signifikan menjadi 83,33%.

Tabel 2.124
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	75	75,18	75,24	75,24	75,03
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	33,33	66,67	66,67	66,67	83,33

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2025

- **Kelautan dan Perikanan**

1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Selama kurun waktu 2020–2024, produksi perikanan Kabupaten Pinrang meningkat per tahunnya, yakni 77.259,41 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat lagi sebesar 80.516,58 ton. Pada tahun 2022 jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di wilayah Kabupaten Pinrang sebanyak 83.632,40 ton dan pada tahun 2023 sebanyak 85.197,99 ton. Namun pada tahun 2024 jumlah total produksi perikanan mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 85.176,70 ton.

Tabel 2.125
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020- 2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data:one Data KKP)	Ton	77.259,41	80.516,58	83.632,40	85.197,99	85.176,70

Sumber Data: Dinas Perikanan, 2025

- **Pariwisata**

1) Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan citra pariwisata daerah. Seperti dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi pariwisata dalam memperkenalkan produk wisata untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan.

Realisasi persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 tidak ada wisatawan mancanegara. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tetapi di tahun 2021 meningkat menjadi 11,76% dikarenakan pandemi covid19 sudah menurun. Pada tahun 2022, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat cukup pesat dengan persentase sebesar 64,71% dan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 35%. Di tahun 2024 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pinrang sebanyak 6 orang sehingga persentase pertumbuhannya sebesar 16,67%.

2) Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang di Kabupaten Pinrang meningkat menjadi 82,52%. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kedatangan wisatawan nusantara ke Kabupaten Pinrang meningkat cukup pesat dengan jumlah wisatawan sebanyak 72.130 wisatawan sehingga persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang sebesar 877,5% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 89,88%. Pada tahun 2024 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten

Pinrang sebanyak 163.827 orang dengan persentase sebesar 163,83%.

3) Tingkat Hunian Akomodasi

Pesatnya pertumbuhan di sector Pariwisata mempengaruhi pesatnya pembangunan di bidang pendukungnya, salah satu komponen industry pariwisata yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat dari fungsi utama hotel adalah sewa kamar atau jasa penginapan. Konsumen mengharapkan sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar menginap, namun mereka lebih mengharapkan hal lain seperti pelayanan, fasilitas dan kondisi lingkungan yang menyenangkan, sopan santun dan rasa hormat dari seluruh karyawan dalam melayani. Hal tersebut membutuhkan sebuah kegiatan komunikasi untuk dapat saling mendapat pengertian dari berbagai pihak terutama pihak yang paling berpengaruh untuk perusahaan. Sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya.

Realisasi Persentase tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren fluktuatif namun memiliki kecenderungan pertumbuhan positif.

4) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan secara bertahap. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2024 dimana pada tahun 2022 dan tahun 2023 nilainya stagnan kemudian meningkat menjadi 1,85%.

5) Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren fluktuatif namun terdapat kecenderungan pertumbuhan positif.

Tabel 2.126
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	%	-100	11,76	64,71	35	16,67
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang	%	-88,01	82,52	877,5	89,88	163,83
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	12,24	2,12	3,41	3,43	4,37
4	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,55	1,56	1,68	1,68	1,85
5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,72	1,49	2,03	1,95	2

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

- **Pertanian**

1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Selama kurun waktu 2020-2024, produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,08 ton/ha sedangkan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,04 ton/ha. Setelah terjadi penurunan selama tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,26 ton/ha. Adanya penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal misalnya factor cuaca ekstrim, serangan hama penyakit, adanya pengerjaan irigasi, dan subsidi pupuk yang masih kurang.

2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular yang terjadi di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami penurunan, karena bidang yang membidani ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pencegahan penyakit hewan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian perhektar Pertahun	ton/ha	5,90	6,08	5,93	5,04	5,26
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	9,68	6,52	4,57	1,3	-21,11

Sumber Data: Distanhorti dan Disnakbun Kabupaten Pinrang, 2025

- **Energi dan Sumber Daya Mineral**

1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas,uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energy lain untuk keperluan non listrik.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satupertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas : pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung, dan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk :(1) wisata; (2) agrobisnis; (3) industri; dan (4) kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata

alam. Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

Izin Pemanfaatan Langsung diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung harus berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan konsep pemanfaatan panas bumi diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota, selama tahun 2020-2024 belum ada perusahaan pemanfaatan panas bumi yang mendapatkan izin di Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.128
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang	%	0	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2025

- **Perdagangan**

1) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Izin usaha toko modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri :(1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain: (1) memiliki hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. Pemenuhan Komitmen sampai batas waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan : (1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pencapaian IKK Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan pada tahun 2020 sebesar 92,31 % atau terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang belum memperoleh izin. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% yang artinya bahwa seluruh pelaku usaha telah memperoleh izin. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah pelaku

usaha yang telah memperoleh izin sebanyak 65 pelaku usaha dari 68 jumlah seluruh pelaku usaha dan pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh izin sebanyak 59 pelaku usaha dari 65 jumlah seluruh pelaku usaha atau terdapat 6 (enam) pelaku usaha yang belum mendapatkan izin. Pada tahun 2024 hanya ada 3 pelaku usaha yang belum memperoleh izin dari total 66 pelaku usaha sehingga persentasenya meningkat menjadi sebesar 95,45%.

2) Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten. Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

Pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Persentase kinerja realisasi pupuk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 40,34% dan pada tahun 2021 sebesar 44,84%. Sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 44%. Walaupun capaian ini meningkat namun jumlah realisasi masih jauh dari jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani. Pada tahun 2023, persentase realisasi pupuk sedikit menurun sebesar 50,04% dengan realisasi 34.396,77 ton sedangkan rencana kebutuhan petani sebesar 68.733,59. Jumlah realisasi ini tentu masih jauh dari jumlah kebutuhan pupuk para petani. Sementara pada tahun 2024 realisasi kinerja pupuk mengalami peningkatan walaupun kebutuhan pupuk cenderung menurun dimana persentase kinerjanya sebesar 58,00%.

3) Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku,atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP. Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.

Uji Sampel dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel. Uji sampel hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 83,37% dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 54,51%.

Tabel 2.129
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	92,31	100	96	91	95,45
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	40,34	44,84	44	50,04	58,00
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku	%	63,17	54,51	83,37	58,04	61,90

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2025

- **Perindustrian**

1) Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang

Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industry besar. Kegiatan usaha industry ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, bahwa Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Industri besar merupakan industry yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua) puluh orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Matriks penggambaran criteria industry dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini:

Gambar 2.4
Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Nilai Investasi / Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Izin usaha industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. IUI meliputi IUI kecil untuk industry kecil, IUI menengah untuk industry menengah, dan IUI besar untuk industry besar. Berdasarkan PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, bahwa IUI diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri. Perusahaan wajib berlokasi di Kawasan industri kecuali perusahaan dengan ketentuan: (1) berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan industry atau telah memiliki Kawasan industry tetapi seluruh kaveling industry dalam Kawasan industrinya telah habis, (2) termasuk klasifikasi industry kecil dan industry menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau (3) industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industry dan berlokasi di luar Kawasan industry dapat diberikan IUI dengan ketentuan: (1) berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) termasuk klasifikasi industri menengah, wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industry sesuai dengan RTRW.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang positif. Pertambahan industry ini disebabkan oleh adanya kemudahan dalam pemberian izin usaha melalui aplikasi OSS dan juga adanya bantuan UMKM dari Dinas Koperasi untuk para pelaku usaha industry kecil dan menengah.

2) Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK. RPIP atau RPIK mengatur industri pengolahan nonmigas yaitu industri yang masuk kategori C dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk industry batubara dan pengilangan migas.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK pada tahun 2020 mencapai 39,20%. Pada tahun 2021 persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK adalah sebesar 428,64 dengan rata-rata capaian sasaran RIPIN dalam RPIK sebesar 71,44%. Angka ini merupakan akumulasi dari capaian 5 indikator dalam RPIK yaitu pertumbuhan sector industry sebesar 78,50%; kontribusi industry terhadap PDRB sebesar 61,45%; nilai ekspor sector industry sebesar 80,71%; nilai investasi sector industry sebesar 186,7%; dan jumlah tenaga kerja di sector industry sebesar 21,28%.

3) Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020

sebesar 13,67%. Pada tahun 2021 capaian ini meningkat menjadi 23,95% dengan jumlah izin yang dipantau langsung di lokasi sebanyak 250 izin. Sedangkan sisanya tetap dipantau dan diawasi melalui aplikasi. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah sudah mencapai 100%.

4) Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020-2024 masih 0%.

5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang

Kawasan industri diatur dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industry berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hokum dan didirikan berdasarkan hokum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha dapat berbentuk: (1) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (2) Koperasi; atau (3) Perseroan Terbatas. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling

sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. IUKI diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sampai tahun 2024 masih 0%.

6) Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

Informasi industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri dan Informasi Lain, Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

Tabel 2.130
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang	%	4,11	567,12	185,02	148,17	67,31

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jika terdapat N indicator pembangunan industry dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indicator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indicator tersebut	%	39,2	428,64	107,96	83	107,22
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	13,67	23,95	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	0	0	0	0	0
6	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industry (1+2)	%	0	95	100	100	100

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2025

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini pada tahun 2019-2020 sebesar 0%. Hal tersebut terjadi karena Pengelola SllNas belum memberikan Akun SllNas tipe D kepada Kepala Daerah. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang terdaftar di akun SIINas sebanyak 13 perusahaan dan mereka juga telah melaporkan perusahaannya melalui aplikasi tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut dalam melaporkan usahanya, terutama

kendala di aplikasi yang terkadang sulit untuk diakses. Selain itu kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan aplikasi tersebut. Namun pada tahun 2022 hingga tahun 2024, capaian indicator ini telah mencapai 100%.

- **Perencanaan dan Keuangan**

1) Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren fluktuatif.

2) Rasio PAD Terhadap APBD Nonmigas Tahun 2020-2024

Rasio PAD terhadap APBD nonmigas pada tahun 2020 sebesar 9,99%. Pada tahun 2021 rasio PAD terhadap APBD non migas sebesar 10,24% dimana jumlah PAD sebesar Rp 134.066.665.485,33 dan jumlah APBD non migas sebesar Rp 1.309.369.355.200,18. Tahun 2022 rasio PAD terhadap APBD Non migas sebesar 11,80% dengan jumlah PAD sebesar 158.121.561.743,63 dan jumlah APBD non migas sebesar 1.340.046.114.987,63. Dan pada tahun 2023 rasio PAD terhadap APBD Non migas sebesar 13,22% dengan jumlah PAD sebesar 175.213.230.611,99 dan jumlah APBD non migas sebesar 1.325.357.098.535,81. Pada tahun 2024 rasio ini menurun menjdai 12,69%.

3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam SPIP ada lima unsur penilaian yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan. Penilaian SPIP ini pun terdiri dari 26 sub unsur yang nanti akan dirangkum kedalam tingkatan. Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020-2024 masih berada di level 3.

4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aspek penilaian APIP adalah pengelolaan SDM sebesar 30%, Praktik profesional sebesar 30%, Akuntabilitas dan manajemen kinerja

10%, Budaya dan hubungan organisasi 10% dan struktur tata kelola 20%. Kemudian nilai elemen tersebut dirangkumdan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level1/level2/level3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 sampai tahun 2024 berada di level 3.

5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) pada tahun 2020 sebesar 81,94%. Pada tahun 2021 rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 70,64% dan pada tahun 2022 sebesar 62,87%. Kemudian di tahun 2023, rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 79,61% dan di tahun 2024 menurun menjadi 69,13%.

6) Opini Laporan Keuangan

Kabupaten Pinrang terus mempertahankan opini WTP sejak tahun 2012 tanpa terputus. Ini berarti bahwa Kabupaten Pinrang telah meraih WTP yang ke-12 kalinya. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya sebagai bentuk konsistensi dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 2.131
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan KeuanganTahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai diLuar Guru danTenaga Kesehatan	%	20,68	17,16	16	20,37	12,91
2	Rasio PAD	%	9,99	10,24	11,8	13,22	12,69
3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang Dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	78,42	70,64	62,87	79,61	69,13
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data: BPKPD dan Inspektorat Kabupaten Pinrang, 2025

- **Pengadaan**

1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 0%.

2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2021 sebesar 8,66% dan pada tahun 2022 sebesar 9,37%. Di tahun 2023 meningkat menjadi 15,90%. Sedangkan pada tahun 2024, persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menurun drastis menjadi 0,33% disebabkan oleh jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif semakin berkurang sementara yang dilakukan tanpa metode kompetitif semakin bertambah.

3) Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2020 sebesar 34,82%. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 52,63% dimana jumlah belanja langsung yang melalui pengadaan sebesar Rp 184.079.242.386,47. Kemudian pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 43,59% dan pada tahun 2023 sebesar

29,17%. Di tahun 2024 rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan meningkat cukup pesat menjadi 95,05%.

Tabel 2.132
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	10,60	8,66	9,37	15,90	0,33
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan Melalui pengadaan	%	34,82	52,63	43,59	29,17	95,05

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda KabupatenPinrang, 2025

- **Kepegawaian**

1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 309,75% dan pada tahun 2023 sebesar 354,95%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai 2020 sampai tahun 2024, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu saja hal ini juga tak luput dari dukungan pemerintah daerah yang memfasilitasi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan baik dengan beasiswa maupun mandiri.

2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 61,32% dan pada tahun 2021 sebesar 27,92%. Menurunnya rasio pegawai fungsional di tahun 2021 disebabkan adanya penyusunan peta dan analisa jabatan di

masing-masing Perangkat Daerah dimana berdasarkan analisa jabatan fungsional yang dibutuhkan. Selain itu terdapat perbedaan metode perhitungan dimana pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pegawai fungsional termasuk jumlah pegawai fungsional umum. Kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi mejadi 63,13% dan pada tahun 2023 sebesar 70,38%. Namun pada tahun 2024 rasio pegawai fungsional mengalami penurunan kembali menjadi 41,88%.

3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2021 sebesar 29,37% dan pada tahun 2022 sebesar 43,29%. Dan pada tahun 2023 sebesar 31,48% dimana jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 181 orang dari 525 orang pegawai fungsional (tidak termasuk pegawai fungsional umum). Pada tahun 2024 jumlah pegawai fungsional yang bersertifikat kompetensi bertambah menjadi sebanyak 380 pegawai sehingga rasionya menjadi 31,64%.

Tabel 2.133
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	%	266,67	293,38	309,75	354,95	528,95
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru Dan tenaga kesehatan)	%	61,32	27,92	63,13	70,38	41,88
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,74	29,37	43,29	31,48	31,64

Sumber Data: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

- **Manajemen Keuangan**

1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2019-2023

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 yaitu -8,08% dan pada tahun 2022 -5,49%. Pada tahun 2023 deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar 4,48%.

2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 4,23 dan pada tahun 2021 sebesar -4,17. Pada tahun 2022 deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 13,98 dan pada tahun 2023 sebesar -5,23.

3) Assets Management Tahun 2020-2024

Manajemen aset Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi syarat dari semua indikator.

4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD pada tahun pada tahun 2021 sebesar 3,63% dan pada tahun 2021 sebesar 0,01%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 4,38% dengan nilai realisasi silpa sebesar Rp 60.225.951.130 dan total belanja anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 1.373.728.855.144.

Tabel 2.134
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total Dalam APBD	%	-5,435	-8,08	-5,49	4,48	-5,43
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	4,23	-4,17	13,98	-5,23	-8,61
3	Assets Management	%	100	100	100	100	100
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,93	3,63	0,01	4,38	3,17

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

- **Transparansi dan Partisipasi Publik**

1) Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan

Informasi tentang sumberdaya yang tersedia untuk pelayanan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 102,42%. Untuk tahun 2021 informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan sebesar 106,23% dan pada tahun 2022 sebesar 94,19%.

2) Akses public terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2020-2024

Akses public terhadap informasi keuangan daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 25% dan tahun 2021 sebesar 58,33%. Pada tahun 2022 akses public terhadap informasi keuangan daerah sebesar 75% dan meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 2.135
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
(Transparansi dan Partisipasi Publik)
Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	102,42	106,23	106,17	94,59	105,72
2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	%	25	58,33	75	100	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2025

Tabel 2.136
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Konsumsi Listrik perKapita (Kwh)	kwh	1.581	1.601,00	1.643,00	1.690,00	1.809
2	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,433	0,418	0,284	0,437	0,263
3	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	persentase	NA	8,17	11,25	10,35	8,35
4	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan)	persentase	NA	NA	NA	0	0
5	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	persentase	11,04	8,12	12,21	7,10	5,99
6	Indeks Ketahanan Pangan	nilai	83,01	83,48	85,31	87,20	86,94
7	PPH Konsumsi	skor	89,50	90,60	91,20	91,60	91,90
8	PPH Ketersediaan	skor	82,10	81,05	82,70	81,99	84,70
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	68,74	67,56	66,88	68,83	67,07
10	Kualitas Air Permukaan	nilai	70,00	52,22	50,83	57,00	53,33
11	Kualitas Udara	nilai	94,31	95,52	95,14	94,24	93,04

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
12	Kualitas Tutupan Lahan	nilai	48,62	42,16	42,16	42,13	42,61
13	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	persentase	5,29	2,69	5,29	4,75	2,66
14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persentase	NA	21,96	23,16	16,95	18,09
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persentase	NA	13,27	13,92	14,04	5,36
16	Indeks Resiko Bencana	nilai	179,2	161,57	148,84	148,84	157,36
17	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	NA	NA	NA	NA	0,48
17	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCO2eq	1925,39	1935,94	23848,69	23848,69	23848,69
18	Jumlah Penduduk	jiwa	403.994	408.109	411.392	417.932	423.146
19	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	persentase	-0,51	0,06	1,08	1,59	1,25
20	Rasio Jenis Kelamin (%)	persentase	97,53	97,77	97,82	97,86	97,89
21	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	206	208	216,90	220,36	223,11
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
KESEJAHTERAAN EKONOMI							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persentase	0,44	5,04	4,52	2,18	5,71

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Tingkat Kemiskinan	persentase	8,86	8,81	8,79	8,90	8,55
3	PDRB Perkapita	juta rupiah	52,93	53,41	57,71	59,97	62,77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persentase	4,19	4,06	2,79	3,64	3,12
5	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	persentase	91,14	91,19	91,21	91,10	91,45
6	Indeks Gini	nilai	0,375	0,367	0,363	0,340	0,299
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	persentase	71,26	73,46	73,90	74,70	75,43
KESEHATAN UNTUK SEMUA							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,94	74,09	74,29	74,47	74,63
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	151	160	154	129	82,64
3	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	persentase	91,00	96,48	95,40	96,28	100,00
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	persentase	N/A	24,50	20,90	17,60	22,20
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA +	persentase	75,57	70,00	100,00	95,00	81,93
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	persentase	89,18	91,58	88,95	79,74	88,18

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	persentase	74,74	73,99	86,00	97,18	98,56
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA							
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	7,86	7,87	8,04	8,30	8,53
2	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	persentase	25,94	26,96	28,42	28,77	72,19
4	Indeks Literasi Membaca (SD/SMP)	nilai	NA	NA	47,58/52,45	51,74/63,68	54,00/65,69
5	Indeks Numerasi (SD/SMP)	nilai	NA	NA	32,52/51,34	40,48/58,49	49,73/59,87
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persentase	8,49	9,05	10,70	11,38	12,07
PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF							
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	persentase	79,75	79,10	72,16	72,02	72,02
2	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	persentase	NA	NA	0,38	0,38	0,38

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
BERAGAMA DAN BERKEBUDAYAAN							
1	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi	persentase	62,50	62,50	66,67	66,67	70,83
2	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	persentase	0%	0%	0%	0%	0%
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF							
1	Indeks Pembangunan Keluarga	nilai	NA	65,78	56,55	62,71	61,74
2	Indeks Pembangunan Pemuda	nilai	45,45	59,36	59,09	60,27	Belum rilis
3	Indeks Perlindungan Anak	nilai	NA	60,47	58,48	64,19	Belum rilis
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	nilai	0,393	0,474	0,501	0,250	0,280
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	95,79	95,87	96,10	96,37	96,69
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	68,11	68,43	65,12	68,92	63,06
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Indeks Pendidikan	nilai	62,95	63,01	63,61	64,53	68,35
2	Indeks Kesehatan	nilai	76,32	76,57	77,15	77,68	77,92
3	Rasio Ketergantungan	persentase	47,22	46,71	46,25	48,50	47,97

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persentase	6,13	6,71	7,38	9,02	11,91
5	Persentase Pekerja Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	persentase	27,92	30,45	33,75	27,21	20,71
IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persentase	6,14	6,09	6,26	6,21	6,37
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	persentase	0,87	0,89	0,97	1,06	1,07
3	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	7.379	13.487	72.158	89.925	163.833
4	Persentase Koperasi Sehat (%)	persentase	1,80	1,80	1,80	1,80	0,60
5	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	industri	74	487	729	1.135	3.307
6	Return On Asset (ROA) BUMD (%)	persentase	NA	NA	-2,749	-1,329	2,756
7	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	industri	113	343	551	942	1.287
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	persentase	59,11	57,78	57,72	60,51	64,17
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	persentase	37,47	36,44	37,92	39,92	46,53
10	Indeks Inovasi Daerah	nilai	466	38,72	46,38	46,70	49,29
11	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	nilai	NA	NA	0,75	1,66	1,74
12	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	persentase	NA	0,06	0,05	0,03	0,04
13	Produktivitas Pertanian (ton/ha)	ton/ha	NA	4,42	4,49	3,97	4,19
14	Nilai Tukar Petani	nilai	105,13	109,79	115,87	101,63	150,43

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU							
1	Indeks Ekonomi Hijau	nilai	44,50	50,18	50,87	61,18	Belum rilis
2	Produktivitas Perikanan Budidaya (ton/ha)	ton/ha	NA	2,51	2,84	3,17	4,42
3	Produktifitas Budidaya Perikanan Tambak (ton/ha)	ton/ha	3,48	3,28	3,12	2,31	4,42
4	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	15236,00	13689,68	13820,70	14277,30	15365,15
5	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	ton	77.259,41	80.516,58	83.632,40	85.197,99	85.176,70
6	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	kg/kapita	53,56	59,20	66,00	70,05	68,18
TRANSFORMASI DIGITAL							
1	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	persentase	15,38	43,75	52,94	100	100
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL							
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persentase	35,97	34,23	35,24	35,55	35,74
2	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	persentase	9	0,71	7,05	2,04	13,10
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	persentase	-2,84	-0,81	-1,1	-2,17	-2,94
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI							
1	Indeks Layanan Infrastruktur	nilai	NA	NA	1,81	2,18	3,35
2	Tingkat Kemantapan Jalan	persentase	65,73	61,35	63,31	67,72	68,54
3	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persentase	66,43	67,45	65,40	66,39	67,31
4	Persentase Desa Mandiri	persentase	N.A	0,00	7,25	31,88	52,17

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
STABILITAS EKONOMI MAKRO							
1	PDRB HB (milyar Rp)	milyar Rp	20.083,01	21.758,58	23.765,15	25.146,49	26.653,40
2	PDRB HK (milyar Rp)	milyar Rp	12.826,45	13.472,49	14.082,03	14.388,99	15.210,21
3	Inflasi	nilai	1,61	4,09	6,66	2,22	1,73
4	Kontribusi PAD terhadap APBD	persentase	9,90	10,36	11,89	13,08	11,74
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (HB)	persentase	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai	NA	NA	69,0272 (B)	77,4276 (B)	78,8606 (B)
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	nilai	NA	NA	NA	NA	4,57
8	Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	persentase	3,98	3,99	3,93	3,85	3,83
ASPEK PELAYANAN UMUM							
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	NA	NA	61,40 (B)	70,97 (BB)	79,47 (BB)
2	Nilai SAKIP	nilai	62,86	63,59	64,08	64,93	65,32
3	Indeks Pelayanan Publik	nilai	NA	NA	NA	4,40	3,95
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	85,99	86,45	87,38	89,77	90,25
5	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	nilai	NA	NA	2,62	2,79	3,49
6	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	nilai	NA	78,75	76,11	74,63	66,00
8	Nilai MCP KPK	nilai	76,01	93,41	95,39	70,93	57,51

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
9	Indeks Maturitas	nilai	NA	NA	3,290 (Level 3)	3,078 (Level 3)	3,001 (Level 3)
10	Indeks Reformasi Hukum	nilai	NA	NA	NA	93,80	95,30
11	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	NA	NA	NA	NA	95,05
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUNSTANSIAL							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	persentase	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persentase	75,76	100	100	100	100
3	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	persentase	85,90	80,61	75,94	99,48	87,73
4	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	persentase	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD	perda	1	1	1	1	1
6	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	persentase	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN							
1	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	NA	NA	3,02	3,18	3,43
2	Persentase Kerjasama Kab/Kota dengan Kab/Kota lainnya/Provinsi/Sister City/Skala Regional yang Ditindaklanjuti	persentase	NA	NA	NA	85,71	100

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persentase	92,83	95,79	95,96	70,73	53,91
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persentase	95,28	95,32	97,31	91,26	89,78
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persentase	92,06	98,27	98,45	67,58	68,93
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persentase	97,27	97,02	97,27	9,33	57,43
2	**KESEHATAN**						
2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	persentase	0,07	0,08	0,08	0,05	0,07
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persentase	90,31	94,27	95,82	95,61	100,00
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persentase	91,31	96,48	95,40	96,28	100,00

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persentase	91,24	100,00	94,85	98,24	100,00
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persentase	95,63	95,18	98,60	97,01	100,00
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase	73,00	72,94	73,10	73,29	100,00
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persentase	97,00	96,52	96,99	98,34	100,00
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persentase	90,37	91,93	91,98	91,82	100,00
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase	94,00	83,51	85,32	82,20	100,00
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase	83,00	91,32	93,11	91,82	100,00
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persentase	93,00	88,45	86,13	95,79	61,39
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persentase	97,00	93,63	92,92	93,20	100,00
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persentase	92,00	100,00	96,43	97,65	100,00

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persentase	33,50	30,70	29,80	27,40	25,80
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persentase	30,72	31,43	31,97	37,35	37,89
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persentase	77,71	79,79	80,25	80,36	80,71
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persentase	93,43	95,05	95,97	96,07	96,88
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	persentase	97,56	97,78	98,32	98,46	98,63
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	rasio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persentase	65,73	61,35	63,31	67,72	68,54

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persentase	89,91	94,13	95,00	95,00	95,61
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persentase	100,00	100,00	95,00	96,00	100,00
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persentase	100,00	28,91	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persentase	49,67	4,55	0,00	0,00	1,02
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persentase	4,62	4,53	4,59	4,50	4,36
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persentase	100,00	6,40	0,35	1,10	2,05
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persentase	75,76	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa/kecamatan	403.994 Jiwa / 12 kecamatan	323.039 jiwa / 12 kecamatan	411392 jiwa / 12 kecamatan	281.430 jiwa / 12 kecamatan	250.060 Jiwa/ 12 Kecamatan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa/kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa/kecamatan	407.236 jiwa,12 kec	292 jiwa/12 kec	1.097 jiwa/ 12 kec	1.546 jiwa/ 12 kec	6.199 Jiwa / 12 kec
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persentase	83,51	96,12	93,88	96,40	95,24
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	6,37	8,94	8,77	7,69
6	**SOSIAL**						
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
7	**TENAGA KERJA**						
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persentase	0,92	80,00	55,56	75,00	75,00
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	persentase	0,68	87,49	59,18	60,83	3,18
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	juta rupiah	7982,56	155087,98	167833,00	7760,09	7570,44
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persentase	36,69	74,16	78,36	73,32	91,85
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	persentase	58,10	63,02	70,21	71,80	64,56
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persentase	9,19	39,80	24,23	30,60	30,81
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	persentase	0,12	0,072	0,064	0,02	100
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	nilai	0,05	0,018	0,036	0,057	0,084

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
9	**PANGAN**						
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persentase	35,43	55,29	29,32	216,12	12,51
10	**PERTANAHAN**						
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persentase	21,25%	100%	100%	100%	100%
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	persentase	22,50	59,60	100%	100%	100%
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	persentase	21%	100%	100%	100%	100%
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persentase	16,60	40,78	109,00	100,00	92,00
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persentase	21%	100%	100%	100%	100%
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persentase	20,00	75,00	83,00	100%	100%
11	**LINGKUNGAN HIDUP**						
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	nilai	68,74	67,56	66,88	68,83	67,07
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	persentase	57,19	44,21	44,31	43,18	43,85
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
12.1	Perekaman KTP Elektronik	persentase	96,91	99,15	97,00	99,44	99,29
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persentase	26,91	50,72	74,00	90,00	55,63
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	persentase	96,74	97,88	99,00	99,86	99,46
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persentase	72,09	100,00	20,00	34,00	42,00
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	persentase	N.A	26,32	14,29	33,33	14,29
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	persentase	N.A	0,00	9,09	32,69	21,43
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	nilai	2,64	2,61	2,57	2,33	2,15
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persentase	65,02	68,05	68,11	71,48	59,13
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persentase	11,48	10,76	10,27	8,20	12,19
15	**PERHUBUNGAN**						
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	nilai	1,3	1,5	1,5	1	1
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persentase	15,38	43,75	52,94	100,00	100,00
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase	90,97	98,73	98,79	91,67	92,66
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persentase	13,1	19,52	14,71	14,71	11,14
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	persentase	8,94	13,96	25,48	4,9	50,13
18	**PENANAMAN MODAL**						
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	persentase	1,95	5,22	5,09	9,85	0,02
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persentase	0,52	15,66	20,77	22,93	21,39
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persentase	2,39	15,80	20,95	20,60	10,50
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	Tidak ada	2	5	7	5

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
20	**STATISTIK**						
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persentase	100%	100%	100%	100%	100,00
21	**PERSANDIAN**						
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persentase	0	100	100	100	31,47
22	**KEBUDAYAAN**						
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	4,55
23	**PERPUSTAKAAN**						
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	persentase	NA	42,06	59,96	60,25	71,34
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	persentase	25,94	26,96	28,42	28,77	72,19
24	**KEARSIPAN**						
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	persentase	75,00	75,18	75,24	75,24	75,03
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persentase	33,33	66,67	66,67	66,67	83,33

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
URUSAN PILIHAN							
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	ton	77.259,41	80.516,58	83.632,40	85.197,99	85.176,70
26	**PARIWISATA**						
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persentase	-100,00	11,76	64,71	35,00	16,67
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persentase	-88,01	82,52	877,50	89,88	163,83
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi	persentase	12,24	2,12	3,41	3,43	4,37
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persentase	1,55	1,56	1,68	1,68	1,85
26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persentase	1,72	1,49	2,03	1,95	2,00
27	**PERTANIAN**						
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	5,90	6,08	5,93	5,04	5,26
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persentase	9,68	6,52	4,57	1,30	-21,11
28	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di di Kabupaten / Kota	persentase	0	0	0	0	0
29	**PERDAGANGAN**						
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persentase	92,31	100,00	96,00	91,00	95,45

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persentase	40,34	44,84	44,00	50,04	58,00
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persentase	63,17	54,51	83,37	58,04	61,90
30	**PERINDUSTRIAN**						
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	persentase	4,11	567,12	185,02	148,17	67,31
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persentase	39,20	428,64	107,96	83,00	107,22
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persentase	13,67	23,95	100,00	100,00	100,00
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persentase	0	0	0	0	0
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persentase	0	0	0	0	0
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persentase	0,00	95,00	100,00	100,00	100,00

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
31	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**						
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	persentase	20,68	17,16	16,00	20,37	12,91
31.2	Rasio PAD	persentase	9,99	10,24	11,80	13,22	12,69
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persentase	78,42	70,64	62,87	79,61	69,13
31.6	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32	**PENGADAAN**						
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	persentase	0	0	0	0	0
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	persentase	10,60	8,66	9,37	15,90	0,33
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persentase	34,82	52,63	43,59	29,17	95,05
33	**KEPEGAWAIAN**						
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persentase	266,67	293,38	309,75	354,95	528,95
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persentase	61,32	27,92	63,13	70,38	41,88

No.	ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	CAPAIAN				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persentase	11,74	29,37	43,29	31,48	31,64
34	**MANAJEMEN KEUANGAN**						
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persentase	-5,44	-8,08	-5,49	4,48	-5,43
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persentase	4,23	-4,17	13,98	-5,23	-8,61
34.3	Manajemen Aset	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Apakah ada daftar aset tetap		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	persentase	5,93	3,63	0,01	4,38	3,17
35	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**						
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persentase	102,42	106,23	106,17	94,59	105,72
35.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	persentase	25,00	58,33	75,00	100,00	100,00

2.1.5 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Tujuan ini saling terkait dan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dari total 144 indikator, terdapat 72 indikator yang tercapai, kemudian yang akan tercapai sebanyak 19 indikator. Adapun indikator yang perlu mendapat perhatian khusus sebanyak 44 indikator, sisanya data tidak tersedia sebanyak 9 indikator.

Tabel 2.137
Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Kabupaten Pinrang

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
Tujuan SDGs 01 : TANPA KEMISKINAN							
1,2	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	8,9	8,15	8,55	akan tercapai
1,3	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Tercapai
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	72,02	92,31	65,78	perlu perhatian khusus
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINAS SOSIAL	%	100	100	100	tercapai
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINAS SOSIAL	RT	12859	PM	10162	tercapai
1,4	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.**						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	95	100	Tercapai
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	76	perlu perhatian khusus
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS BINA MARGA	%	83,83	100	84,36	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	89,42	97,85	89,78	perlu perhatian khusus
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	62,52	95,47	68,93	perlu perhatian khusus
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDAGEM	%	97,02	98,00	98	Tercapai
1,5	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	PM	4,3	PM	1,8	Tercapai
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12	12	12	Tercapai
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.565.000.000	750.000.000	1.560.000.000	akan tercapai
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DINAS SOSIAL	KK	55	90	60	akan tercapai
Tujuan SDGs 02 : TANPA KELAPARAN							
2,1	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.**						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	5,56	5	5,78	perlu perhatian khusus
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	0	0	0	Tercapai
2,2	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	6,1	14	5,23	Tercapai
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	6,23	9,13	4,81	Tercapai
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,2	7	2,12	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	5,47	33	6,42	perlu perhatian khusus
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	80,15	60	84,94	Tercapai
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	PPH	91,60	90,0	91,90	Tercapai
2.4	**Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**						
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTILKULTURA	Ha	43.946	43.615	43.947,8	Tercapai
Tujuan SDGs 03 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
3,1	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.**						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 KH	115,72	183	150,83	akan tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	100	95	100	Tercapai
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	95	100	Tercapai
3,2	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.**						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,82	30	0,49	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,73	10	0,49	Tercapai
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,82	16	0,49	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Tercapai
3,3	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,014	0,006	0,023	perlu perhatian khusus
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000	152,93	198,4	155,6	perlu perhatian khusus
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	0,27	0,11	0,18	akan tercapai
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	Tercapai
3.3.4.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	Tercapai
3,4	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.**						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	0.75	8,7	21,3	perlu perhatian khusus
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	4,2	35,5	22,4	Tercapai
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	2,3	20,8	12,2	perlu perhatian khusus
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	0,35	0	40	perlu perhatian khusus
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	KAB	n/a	1	1	Tercapai
3,7	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINAS P2KBP3A	%	71,4	67,74	59,13	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS P2KBP3A	%	71,4	67,74	59,13	perlu perhatian khusus
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINAS P2KBP3A	%	16,9	22,67	28,3	Tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINAS P2KBP3A	%	23.39	2,9	26,2	Tercapai
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINAS P2KBP3A	%	2.33	2,06	2,15	akan tercapai
3,8	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.**						
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Jiwa	97,18	360	98,56	Tercapai
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	Jiwa	97	360154	98,56	Tercapai
3,9	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.**						
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	n/a	0	0,000001	Tercapai
3.a	**Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.**						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	n/a	8,7	11,52	akan tercapai
3.b	**Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.**						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	Tercapai
3.c	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.**						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	per 1000	7,21	5,56	1,57	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
Tujuan SDGs 04 : PENDIDIKAN BERKUALITAS							
4,1	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.**						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	100	100	100	Tercapai
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	88,40	88,10	88,13	Tercapai
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%		73,68	71,93	perlu perhatian khusus
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	97,06	102	95,95	perlu perhatian khusus
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	72,15	101	74,09	perlu perhatian khusus
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	8,3	9,62	8,53	perlu perhatian khusus
4,2	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.**						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	52,48	94,50	51,47	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
4,5	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.**						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					akan tercapai
	SD = Perempuan/Laki-laki X100		%	99,33	97,85	92,81	(1) perlu perhatian
	SMP = Perempuan/Laki-laki X100		%	107,31	99,90	106,88	(3)Tercapai
	SMA,SMK,SLB = Perempuan/Laki-laki X100		%		100,00		(-)
4,6	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.**						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	102,26	100	99,98	perlu perhatian khusus
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	100,16	100	100	Tercapai
4.a	**Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.**						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	98,75		95,94	perlu perhatian khusus
	SD = 304/323X100		%	98,75	100	95,54	(1)perlu perhatan khusus
	SMP = 52/58X100		%		100		(-)

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
4.c	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.**						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					akan tercapai
	TK		%	19	33	84,17	(3)Tercapai
	SD		%	39,29	75,5	35,56	(1)perlu perhatan khusus
	SMP		%	44,5	73	42,27	(1)perlu perhatan khusus
Tujuan SDGs 05 : KESETARAAN GENDER							
5,1	**Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.**						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS P2KBP3A	Program	1	1	0	Tercapai
5,2	**Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.**						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINAS P2KBP3A	%	0,009	0,01	0,0019	Tercapai
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS P2KBP3A	%	0,02	0,02	0,006	perlu perhatian khusus
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINAS P2KBP3A	%	0,0084	0,01	0,00068	Tercapai
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DINAS P2KBP3A	%	100	90	100	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
5,3	**Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.**						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINAS P2KBP3A	%	18,23	0,11	14,7	akan tercapai
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINAS P2KBP3A	%	21,5	22,1	22,3	Tercapai
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINAS P2KBP3A	%	23,39	2,9	26,2	Tercapai
5,5	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.**						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DINAS P2KBP3A	%	8,46	30	0	perlu perhatian khusus
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DINAS P2KBP3A	%	6,7	30	10	perlu perhatian khusus
5,6	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.**						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DINAS P2KBP3A	%	8,19	6,88	12,19	perlu perhatian khusus
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DINAS P2KBP3A	%	71,47	67,74	59,13	perlu perhatian khusus
5.b	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.**						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO	%	91,7	94	PM	Data Tidak tersedia
Tujuan SDGs 06 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
6,1	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.**						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS BINA MARGA	%	96,33	100	96,88	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
6,2	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.**						
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS BINA MARGA	%	98,59	PM	98,63	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	desa	109	108	109	Tercapai
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	desa	109	109	109	Tercapai
6,3	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.**						
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS PERKIMLH	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	57	65	53,3	perlu perhatian khusus
6,5	**Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.**						
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DINAS SDABK	Web	0	0	0	Data Tidak tersedia
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DINAS SDABK	Sungai	1	1	1	Tercapai
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DINAS SDABK	Lembaga	628	0	628	Tercapai
Tujuan SDGs 08 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
8,1	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.**						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	0,87	8,15	4,39	akan tercapai
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	59.967	64.220	62766,2	akan tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
8,3	**Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.**						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	4,68	35,85	33,78	Tercapai
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	36,86	34,91	45,94	Tercapai
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	63	95	60	perlu perhatian khusus
8,5	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.**						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp/Jam	21.157	55.271	21.464	perlu perhatian khusus
8.5.2.(a)	tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	26,08	39,49	23,14	Tercapai
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	3,64	3,00	3,12	akan tercapai
8,6	**Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.**						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	10,28	10,88	51.20	Tercapai
8.8	**Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.**						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-		Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
8,9	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.**						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DINAS PARIWIWSATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	%	1,81	1,37	1,85	Tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	DINAS PARIWIWSATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Org	36	60	6	perlu perhatian khusus
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWIWSATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Org	89.889	65.000	163.827	Tercapai
8,10	**Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.**						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	80,7	78	16,63	perlu perhatian khusus
Tujuan SDGs 09 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
9,1	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.**						
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	13	4	13	Tercapai
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	pelabuhan	2	1	2	Tercapai
9,2	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	2,82	12,17	12,17	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	26,51	39,61	30,98	perlu perhatian khusus
9.c	**Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.**						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	%	73,13	59,00	PM	Data Tidak tersedia
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO	%	91,70	94,00	PM	Data Tidak tersedia
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	%	73,13	59,00	PM	Data Tidak tersedia
Tujuan SDGs 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN							
10,1	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**						
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS		0,34	0,355	0,299	tercapai
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	8,9	8,15	8,55	akan tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DINAS PMD	Desa Tertinggal	4	2	1	perlu perhatian khusus
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DINAS PMD	Desa Tertinggal	8	4	7	perlu perhatian khusus
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DINAS PMD	Desa	23	2	36	Tercapai
Tujuan SDGs 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
11,5	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/ orang	4,3	PM	1,8	tercapai
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	1	2 EWS	1	akan tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.565.000.000	750.000.000	1.560.000.000	akan tercapai
11,6	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS PERKIMLH	Ton %	26,599.13	22,199.14 (100%)	24,886.92	Tercapai
Target 11.b.	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.**						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0	1 Dokumen	0	perlu perhatian khusus
Tujuan SDGs 12 : POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB							
12,5	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS PERKIMLH	Ton	20,205.67	21,436.45	21,436.45	Tercapai
Tujuan SDGs 13 : PERUBAHAN IKLIM							
13,1	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.**						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0	1	o	perlu perhatian khusus
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/ orang	4,3	PM	1,8	tercapai
13.2	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.**						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DINAS PERKIMLH	Dokumen	1	1	1	Tercapai
Tujuan SDGs 14 : EKOSISTEM LAUTAN							
14.b	**Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar**						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	710	558	405	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
Tujuan SDGs 15 : EKOSISTEM DARATAN							
15,9	**Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.**						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS PERKIMLH	Dokumen	1	1	1	Tercapai
Tujuan SDGs 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
16,1	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	KESBANGPOL	Kasus	2	0	1	akan tercapai
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	KESBANGPOL	%	0,021	0,1	0,145	perlu perhatian khusus
16,6	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKPD	%	95,17	94,57%	94,85	Tercapai
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKPD	%	100	100	100	Tercapai
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	SEKRETARIAT DAERAH	%	101,33	5,5	100,6	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SEKRETARIAT DAERAH	%	96,96	20,18	36,37	Tercapai
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	SEKRETARIAT DAERAH	%	100	BB (Nilai 72)	100	Tercapai
16,7	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DINAS P2KBP3A	%	15	30	10	perlu perhatian khusus

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DINAS P2KBP3A	%	6,7	30	10	perlu perhatian khusus
16,9	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	99,5	100	99,6	akan tercapai
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	99,44	100	99,46	akan tercapai
16,10	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO	Orang	44	83	PM	Data Tidak tersedia
Tujuan SDGs 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
17,1	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKPD	%	0,70	0,75	0,67	perlu perhatian khusus
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD	%	0,18	0,16	0,18	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKPD	%	13,09	9,00	13,01	Tercapai
17,6	**Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.**						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DISKOMINFO	%	6,34	11,00	PM	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target 2024	Capaian 2024	Status
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DISKOMINFO	%	73,13	59,00	PM	Data Tidak tersedia
17,18	**Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.**						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	%	100	100	100	Tercapai
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	100	98,8	100	Tercapai
17,19	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	-	ada	Ada	ada	Tercapai
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	22.230	18.547	3665	perlu perhatian khusus
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	100	100	100	Tercapai

- **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu – isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mencakup Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut.

Salah satu Sasaran Nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Pendidikan yang tertuang dalam rata – rata lama sekolah, Kesehatan yang tertuang dalam Angka Harapan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketersediaan Akses Air Minum.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Kemampuan Literasi
5. Kemampuan Numerasi
6. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
7. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
8. Iklim Keamanan (Indikator Dasmen)
9. Iklim Kebhinekaan
10. Iklim Inklusivitas
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
12. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

13. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
14. Pelayanan Kesehatan Balita
15. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar
16. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
17. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
18. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
19. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
20. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
21. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
22. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
23. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
24. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
25. Penyediaan & rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota
26. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
27. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
28. Pelayanan informasi rawan bencana
29. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
30. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
31. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
32. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
33. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
34. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti
35. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
36. Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota.

Adapun indikator yang belum mencapai 100% seperti pada urusan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari–hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik, disebabkan oleh kondisi topografi Kabupaten Pinrang yang bervariasi meliputi tiga dimensi

kewilayahan, yaitu: dataran rendah, laut dan dataran tinggi sehingga mempengaruhi tidak meratanya akses air minum kepada masyarakat. Sedangkan untuk pengolahan air limbah domestik, salah satu penyebab indikator ini belum mencapai 100% yaitu kurangnya pembangunan SPALD-S dan SPALD-T terutama pada lokasi permukiman.

Tabel 2.138
Capaian Indikator SPM Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
I	**Pendidikan**								**DIKBUD**
1	**Pendidikan Dasar**	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	persen	96,3	96,76	87,09	83,17	97,88	
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa berdasarkan Asesmen Nasional (pada jenis pelayanan dasar : pendidikan dasar)	persen	NA	NA	SD 47,58 SMP 52,45	SD 51,74 SMP 63,68	SD 54,00 SMP 65,69	
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa berdasarkan Asesmen Nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	persen	NA	NA	SD 32,52 SMP 51,34	SD 40,84 SMP 58,49	SD 49,73 SMP 59,87	
		Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	NA	NA	SD 69,11 SMP 66,09	SD 72,74 SMP 69,08	SD 76,06 SMP 70,89	
		Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	NA	NA	SD 59,70 SMP 56,20	SD 72,52 SMP 73,02	SD 72,98 SMP 70,39	
		Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	NA	NA	SD 53,65 SMP 51,65	SD 55,28 SMP 56,78	SD 59,67 SMP 57,11	

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
2.	**Pendidikan Kesetaraan**	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	persen	97	100	59,31	9,33	32,75	
3.	**Pendidikan Anak Usia Dini**	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	95,78	100	66,54	70,73	74,94	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	persen	NA	NA	72,02	75,20	77,00	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/D4	persen	NA	77,25	74,56	73,79	73,79	
II	**Kesehatan**								**DINKES**
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	90,31	94,27	95,94	96,31	100	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	persen	91,00	96,48	92,20	94,08	100	

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	91,24	100	97,09	98,24	100	
4	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	73	96,20	98,81	83,80	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	97	100	98,32	98,86	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	90,37	87,38	90,90	96,37	100	
7	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	94	96,71	95,28	96,94	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang Mendapatkan layanan kesehatan	persen	83	85	86	87	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	93,00	88,45	86,13	95,79	100	

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
10	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	97	96	98	98	100	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	91,88	93	95	96	100	
III	**Pekerjaan Umum**								**Bimacipta**
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari–hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	97,68	97,76	98,45	98,47	98,49	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	93,68	96,62	98,37	98,44	98,46	
IV	**Perumahan Rakyat**								**PerkimLH**
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100	100	100	

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	100	100	100	
V	**Trantibumlinmas**								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	90	100	100	100	100	**Satpol P3K**
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100	**BPBD**
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100	**BPBD**
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	60	100	100	100	100	**BPBD**
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	84	100	100	100	100	**Satpol P3K**

No.	Urusan	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	OPD PENGAMPU
VI	**Sosial**								**Dinsos**
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	persen	100	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100	100	

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran, meskipun menghadapi tantangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Gambaran keuangan daerah menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Pinrang. Tujuan utama dari penyajian gambaran keuangan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana pendapatan dan belanja daerah dikelola, serta bagaimana pembiayaan daerah diatur untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dengan memahami gambaran keuangan daerah, kita dapat menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Analisis ini mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang merupakan analisa yang menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang harus menyajikan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan dan struktur APBD.

Analisis kemampuan keuangan daerah penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara

efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan pengeluaran, dan memperkuat ketahanan fiskal.

Pada tahap awal, analisa dilakukan dilakukan terhadap penerimaan daerah yang meliputi pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah. Memahami potensi pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan merupakan aspek kunci dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah. Proyeksi ini tidak hanya memberikan pandangan tentang sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan strategi pengelolaan keuangan yang tepat.

Selanjutnya dibuatlah analisa untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah, analisa ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam menganalisa proyeksi pendapatan daerah ini dilakukan berdasarkan pada data dan informasi berbagai aspek yang mempengaruhi pendapatan daerah, antara lain :

1. Angka rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain – lain)
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Pendapatan daerah, pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu indikator makro ekonomi, kebijakan keuangan Negara dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Kinerja keuangan masa lalu merupakan cerminan dari bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat dengan menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan perkembangan Neraca Daerah

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. secara khusus menguraikan perkembangan pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta rincian alokasi belanja langsung dan tidak langsungnya,serta pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya.

Gambaran realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan cerminan dari bagaimana pemerintah daerah mengelola dan melaksanakan anggaran untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dalam suatu periode tertentu. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD tahun 2020 - 2024 disajikan berdasarkan komponen-komponen APBD, berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja Realisasi APBD Kabupaten Pinrang selama periode 2020-2024 secara garis besar disajikan tingkat ketersediaan data realisasi APBD yang terlah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020 - 2024 mencapai 2,88 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah mencapai 3,34 persen pada periode yang sama.

Tabel 2.139
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**PENDAPATAN**	**1,312,939,658,814.18**	**1,272,417,859,811.33**	**1,350,545,415,014.63**	**1,327,580,095,352.81**	**1,471,097,735,122.94**	**2.88%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**131,176,927,320.35**	**134,066,655,485.33**	**158,121,561,743.63**	**175,355,927,428.99**	**177,567,793,822.94**	**7.86%**
1.1.1	Pajak Daerah	31,362,250,639.00	35,439,158,745.00	42,648,264,194.90	45,821,473,681.00	48,253,309,623.00	**11.37%**
1.1.2	Retribusi Daerah	3,952,291,808.00	2,558,134,604.00	4,355,319,543.00	3,438,279,971.00	3,274,642,960.00	**-4.59%**
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,343,822,796.00	8,170,957,229.00	10,656,573,810.00	10,545,217,765.00	10,636,207,917.00	**6.26%**
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87,518,562,077.35	87,898,404,907.33	100,461,404,195.73	115,550,956,011.99	115,403,633,322.94	**7.16%**
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,117,954,673,852.83**	**1,080,037,744,405.00**	**1,187,107,563,643.00**	**1,152,167,058,023.82**	**1,267,309,741,300.00**	**3.18%**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**929,729,919,743.00**	**909,026,705,876.00**	**1,021,668,433,578.00**	**961,307,423,678.00**	**1,103,955,853,958.00**	**4.39%**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	17,336,756,680.00	23,895,614,249.00	25,934,113,868.00	15,359,608,162.00	14,675,315,000.00	**-4.08%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	673,175,379,000.00	661,435,610,000.00	660,008,487,249.00	705,849,309,269.00	763,332,821,442.00	**3.19%**
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	239,217,784,063.00	223,695,481,627.00	335,725,832,461.00	240,098,506,247.00	325,947,717,516.00	**8.04%**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**82,628,748,000.00**	**97,453,004,400.00**	**72,444,282,000.00**	**86,446,217,300.00**	**83,742,974,000.00**	**0.34%**
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	14,413,265,000.00	27,713,245,000.00	10,730,536,000.00	16,484,913,000.00	-	**0.00%**
1.2.2.2	Dana Desa	68,215,483,000.00	69,739,759,400.00	61,713,746,000.00	69,961,304,300.00	70,077,466,000.00	**0.68%**
1.2.2.3	Insentif Fiskal	-	-	-	-	13,665,508,000.00	**0.00%**
1.2.3	**Transfer Pemerintah Daerah**	**105,596,006,109.83**	**73,558,034,129.00**	**92,994,848,065.00**	**104,413,417,045.82**	**79,610,913,342.00**	**-6.82%**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62,993,359,709.83	59,702,535,129.00	83,164,722,565.00	84,508,231,295.82	67,300,380,842.00	**1.67%**
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	42,602,646,400.00	13,855,499,000.00	9,830,125,500.00	19,905,185,750.00	12,310,532,500.00	**-26.68%**
1.3	**Lain Lain Pendapatan yang Sah**	**63,808,057,641.00**	**58,313,459,921.00**	**5,316,289,628.00**	**57,109,900.00**	**26,220,200,000.00**	**-19.94%**
1.3.1	Hibah	63,808,057,641.00	58,313,459,921.00	5,316,289,628.00	57,109,900.00	26,220,200,000.00	**-19.94%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**BELANJA DAERAH**	**1,325,082,586,616.00**	**1,293,820,146,095.00**	**1,329,639,820,623.00**	**1,339,365,736,928.00**	**1,511,435,350,084.00**	**3.34%**
2.1	**Belanja Operasi**	**941,363,802,254.00**	**1,000,443,815,908.00**	**975,908,528,437.00**	**998,809,101,143.00**	**1,127,631,630,353.00**	**4.62%**
	Belanja Pegawai	605,220,248,866.00	584,646,504,506.00	552,338,843,883.00	564,499,860,920.00	593,373,082,756.00	**-0.49%**
	Belanja Barang dan Jasa	277,662,228,865.00	315,506,103,026.00	330,707,702,359.00	390,205,988,943.00	437,218,054,478.00	**12.02%**
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Belanja Hibah	58,299,174,523.00	98,231,208,376.00	92,861,982,195.00	44,103,251,280.00	97,040,493,119.00	**13.59%**
	Belanja Bantuan Sosial	182,150,000.00	2,060,000,000.00	-	-	-	**0.00%**
2.2	**Belanja Modal**	**237,109,008,321.00**	**155,359,754,689.00**	**217,366,099,785.00**	**199,196,048,535.00**	**234,936,012,180.00**	**-0.23%**
	Belanja Modal Tanah	-	587,162,945.00	-	200,000,000.00	0	**0.00%**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,989,193,839.00	43,245,681,385.00	71,197,068,086.00	30,628,529,597.00	48,874,011,697.00	**-3.34%**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,663,715,116.00	20,182,386,564.00	59,987,912,080.00	73,392,927,553.00	109,872,672,203.00	**36.48%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,578,769,024.00	90,064,756,265.00	85,216,894,719.00	89,052,381,961.00	69,886,965,629.00	**-16.62%**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,877,330,342.00	1,279,767,530.00	943,284,900.00	5,519,859,424.00	5,727,956,521.00	**4.10%**
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	20,940,000.00	402,350,000.00	574,406,130.00	**0.00%**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10,152,116,141.00**	**1,848,145,800.00**	**6,163,360,250.00**	**607,004,000.00**	**2,435,689,850.00**	**-30.01%**
	Belanja Tidak Terduga	10,152,116,141.00	1,848,145,800.00	6,163,360,250.00	607,004,000.00	2,435,689,850.00	**-30.01%**
2.4	**Belanja Transfer**	**136,457,659,900.00**	**136,168,429,698.00**	**130,201,832,151.00**	**140,753,583,250.00**	**146,432,017,701.00**	**1.78%**
	Belanja Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Belanja Bantuan Keuangan	136,457,659,900.00	136,168,429,698.00	130,201,832,151.00	140,753,583,250.00	146,432,017,701.00	**1.78%**
3	**PEMBIAYAAN**						
	Penerimaan Pembiayaan						
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	84,658,105,705.05	72,525,777,903.00	51,185,571,869.56	72,153,006,207.19	60,367,364,632.00	**-8.11%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,600,000.00	10,000,000.00	-	-	-	**-100.00%**
	Penerimaan Kembali Pimberian Pinjaman	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**84,668,705,705.05**	**72,535,777,903.00**	**51,185,571,869.56**	**72,153,006,207.19**	**60,367,364,632.00**	**-8.11%**
	Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	**0.00%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pembiayaan Netto	**84,668,705,705.05**	**72,535,777,903.00**	**51,185,571,869.56**	**72,153,006,207.19**	**60,367,364,632.00**	**-8.11%**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**72,525,777,903.23**	**51,133,491,619.33**	**72,091,166,261.19**	**60,367,364,632.00**	**20,029,749,670.94**	**-27.51%**

2.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pada dasarnya, Pendapatan daerah merujuk pada semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari berbagai jenis pajak, retribusi, Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan serta sumber – sumber pendapatan lainnya. Tiga Komponen Utazzma Pendapatan Daerah adalah ; (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer dan (3)Lain – lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Secara Keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan 2.88% meningkat dari Rp. 1,312,939,658,814.18 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,471,097,735,122.94 pada tahun 2024. Secara keseluruhan realisasi kinerja Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel 2.140 berikut ini :

Tabel 2.140
Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**PENDAPATAN**	**1,312,939,658,814.18**	**1,272,417,859,811.33**	**1,350,545,415,014.63**	**1,327,580,095,352.81**	**1,471,097,735,122.94**	**2.88%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**131,176,927,320.35**	**134,066,655,485.33**	**158,121,561,743.63**	**175,355,927,428.99**	**177,567,793,822.94**	**7.86%**
1.1.1	Pajak Daerah	31,362,250,639.00	35,439,158,745.00	42,648,264,194.90	45,821,473,681.00	48,253,309,623.00	**11.37%**
1.1.2	Retribusi Daerah	3,952,291,808.00	2,558,134,604.00	4,355,319,543.00	3,438,279,971.00	3,274,642,960.00	**-4.59%**
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,343,822,796.00	8,170,957,229.00	10,656,573,810.00	10,545,217,765.00	10,636,207,917.00	**6.26%**
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87,518,562,077.35	87,898,404,907.33	100,461,404,195.73	115,550,956,011.99	115,403,633,322.94	**7.16%**
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,117,954,673,852.83**	**1,080,037,744,405.00**	**1,187,107,563,643.00**	**1,152,167,058,023.82**	**1,267,309,741,300.00**	**3.18%**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**929,729,919,743.00**	**909,026,705,876.00**	**1,021,668,433,578.00**	**961,307,423,678.00**	**1,103,955,853,958.00**	**4.39%**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	17,336,756,680.00	23,895,614,249.00	25,934,113,868.00	15,359,608,162.00	14,675,315,000.00	**-4.08%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	673,175,379,000.00	661,435,610,000.00	660,008,487,249.00	705,849,309,269.00	763,332,821,442.00	**3.19%**
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	239,217,784,063.00	223,695,481,627.00	335,725,832,461.00	240,098,506,247.00	325,947,717,516.00	**8.04%**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**82,628,748,000.00**	**97,453,004,400.00**	**72,444,282,000.00**	**86,446,217,300.00**	**83,742,974,000.00**	**0.34%**
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	14,413,265,000.00	27,713,245,000.00	10,730,536,000.00	16,484,913,000.00	-	**0.00%**
1.2.2.2	Dana Desa	68,215,483,000.00	69,739,759,400.00	61,713,746,000.00	69,961,304,300.00	70,077,466,000.00	**0.68%**
1.2.2.3	Insentif Fiskal	-	-	-	-	13,665,508,000.00	**0.00%**
1.2.3	**Transfer Pemerintah Daerah**	**105,596,006,109.83**	**73,558,034,129.00**	**92,994,848,065.00**	**104,413,417,045.82**	**79,610,913,342.00**	**-6.82%**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62,993,359,709.83	59,702,535,129.00	83,164,722,565.00	84,508,231,295.82	67,300,380,842.00	**1.67%**
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	42,602,646,400.00	13,855,499,000.00	9,830,125,500.00	19,905,185,750.00	12,310,532,500.00	**-26.68%**
1.3	**Lain Lain Pendapatan yang Sah**	**63,808,057,641.00**	**58,313,459,921.00**	**5,316,289,628.00**	**57,109,900.00**	**26,220,200,000.00**	**-19.94%**
1.3.1	Hibah	63,808,057,641.00	58,313,459,921.00	5,316,289,628.00	57,109,900.00	26,220,200,000.00	**-19.94%**

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Pinrang, diolah oleh Bapperida Kabupaten Pinrang

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020 – 2024 dari sisi realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari Rp. 1,312,939,658,814.18 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 1,471,097,735,122,94 pada Tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,88%. Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020-2024 secara persentase pertumbuhan mempunyai pembentuk PAD yang berbeda-beda dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,86% dimana persentase Pertumbuhan yang paling tinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar 11,37% sementara pertumbuhan yang paling rendah adalah Retribusi Daerah sebesar -4,59%. Sementara Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan Peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,16%. Realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat di grafik berikut :

Grafik 2.30

Realisasi Pendapatan Daerah

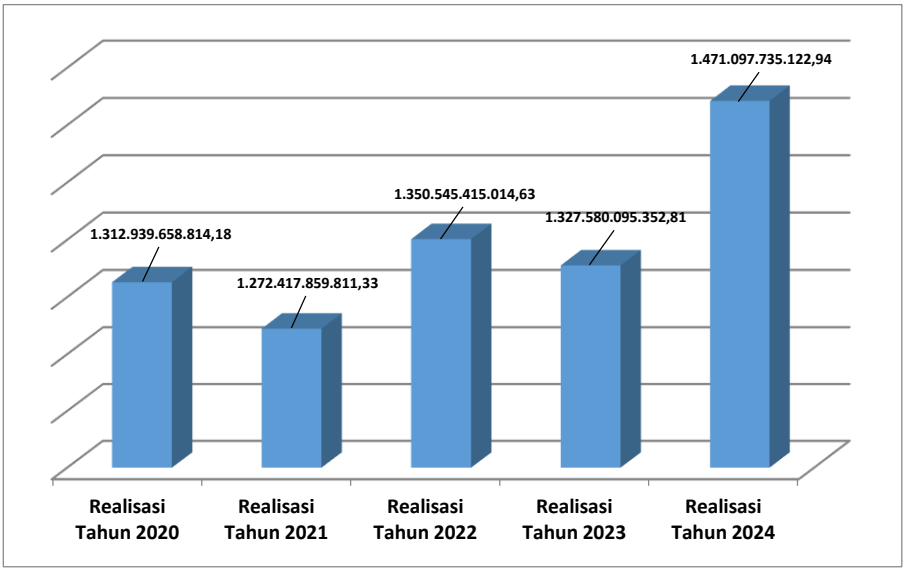

Secara umum persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12,07% sementara persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 86,15% dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 1,78%. Komponen utama terbesar dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Pinrang dari tahun 2020-2024 adalah Pendapatan Transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang masih sangat

bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), dan Dana Insentif Fiskal (DIF). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah.

Komposisi tiga komponen utama Pendapatan Daerah tersajikan dalam Tabel 2.141 sebagai berikut :

Tabel 2.141
Komposisi Komponen Utama Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	9.99%	10.54%	11.71%	13.21%	12.07%
Pendapatan Transfer	85.15%	84.88%	87.90%	86.79%	86.15%
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.86%	4.58%	0.39%	0.004%	1.78%

Berdasarkan data pada tabel 2.141 komponen Utama Pendapatan Daerah terhitung semenjak tahun 2020 – 2024 mengalami trend fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun**.**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang mengalami kecenderungan meningkat pada periode 2020 - 2024. Berikut ini disajikan secara visual kinerja Pendapatan Asli Daerah periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

Grafik 2.31

Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten

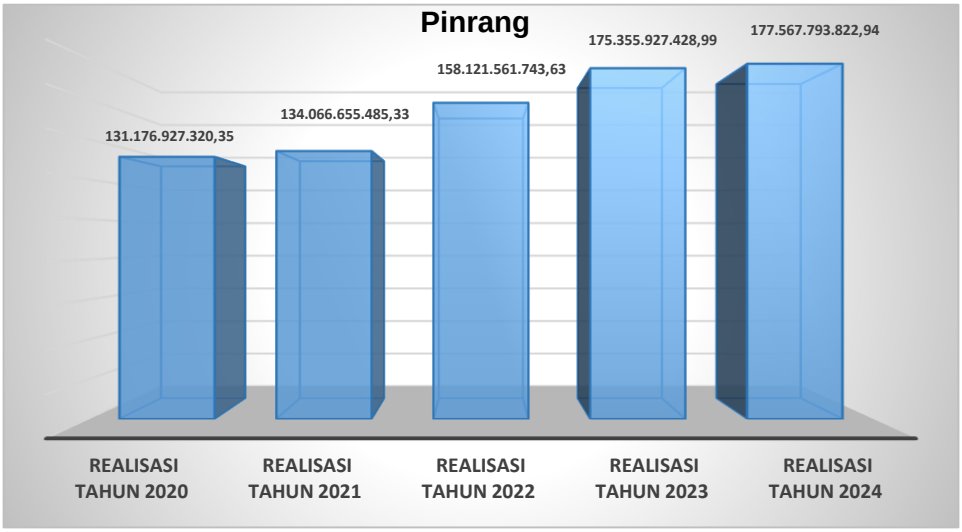

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 131.176.927.320,35 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid – 19 yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menurun, pada tahun 2021 hanya mencapai Rp. 134,066,655,485.33. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat mencapai Rp. 158,121,561,743.63 dan mengalami trend peningkatan pada 3 tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah Mencapai 177,567,793,822.94.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa Komponen yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan. Pada periode 2020 – 2024 Pajak daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Grafik 2.32

Realisasi Objek Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten Pinrang

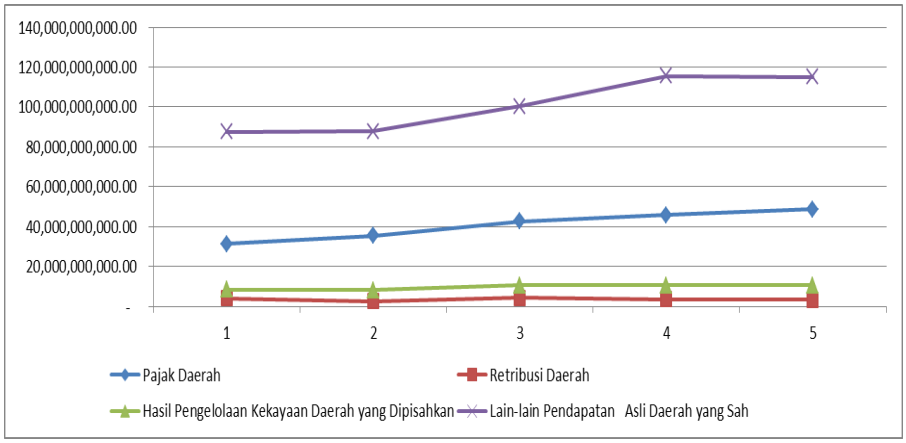

Pajak Daerah meningkat secara signifikan pada periode 2020 – 2024 yang mana capaian pada tahun 2020 hanya Rp. 31,362,250,639.00 menjadi Rp. 48,253,309,623.00 pada tahun 2024. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah pada periode ini mengalami penurunan tetapi tidak signifikan yang mana pada tahun 2020 mencapai Rp. 3,952,291,808.00 menjadi Rp. 3,274,642,960.00 pada tahun 2024. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada periode ini mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencapai Rp. 8,343,822,796.00 meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 10,636,207,917.00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini mencakup Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dalam hal ini Bank SulSelBar.

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami peningkatan pada periode 2020 – 2024. Pada tahun 2020, mencapai

Rp. 87,518,562,077.35 meningkat menjadi Rp. 115,438,633,322.94 pada tahun 2024. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencakup Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dan pengambilan, Pendapatan Zakat, Infaq, Sahadaqah dan Wakaf serta Pendapatan BLUD.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Periode 2020 - 2024 tergambarkan melalui Diagram 2.3 sebagai berikut.

Diagram 2.3

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Periode 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang

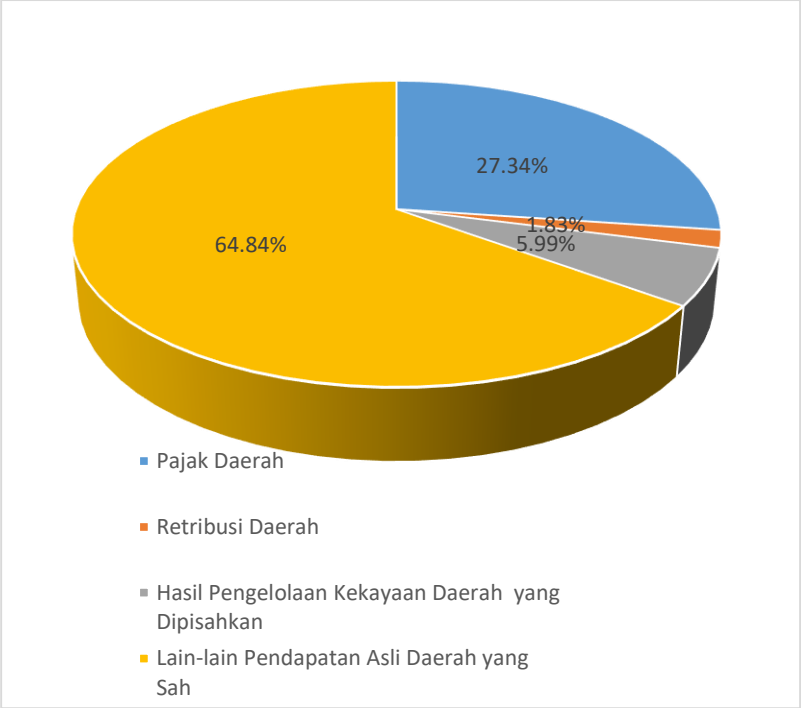

Pendapatan Transfer merupakan salah satu Komponen Utama dalam struktur Pendapatan Daerah yang memiliki kontribusi terbesar hingga mencapai 86,15% dari total Pendapatan daerah pada tahun 2024. Pendapatan Transfer terdiri atas dua komponen yaitu Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) Dana Perimbangan yang terbagi dalam Dana Bagi

Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus Fisik dan non Fisik, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Desa dan (4) Insentif Fiskal. Transfer antar Daerah terdiri atas (1) Pendapatan Bagi Hasil dan (2) Bantuan Keuangan. Secara Garis Besar Komposisi Pendapatan Transfer disajikan dalam Diagram 2.4 berikut ini.

Diagram 2. 4
Komposisi Pendapatan Transfer tahun 2020 - 2024
Kabupaten Pinrang, Satuan (Persen)

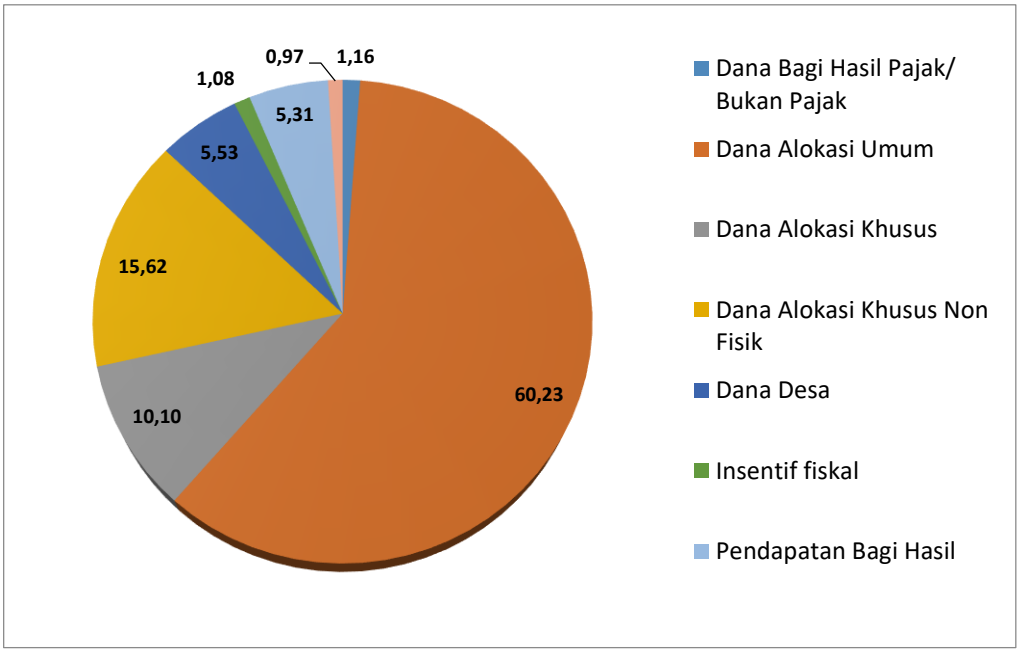

Adapun Kontribusi Pendapatan Hibah dan Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan terhadap Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat Dilihat pada Diagram berikut ini :

Diagram 2. 5

Komposisi Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2020 – 2024

Kabupaten Pinrang, Satuan (Persen)

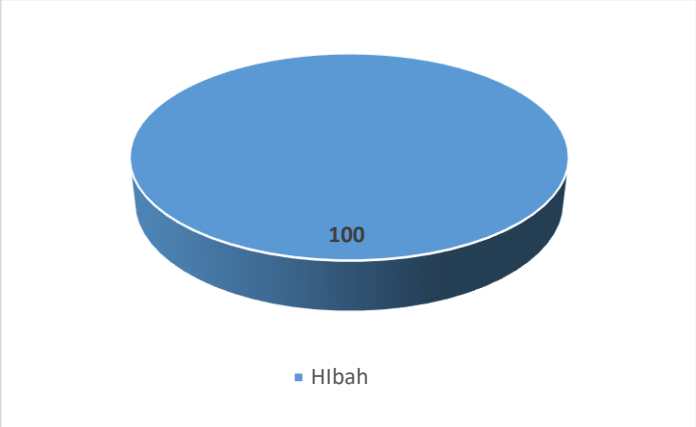

2.2.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merujuk pada pengertian secara umum adalah pengeluaran dari kas umum daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang pada periode 2020 – 2024 cenderung meningkat, hanya pada tahun 2021 saja realisasi belanja daerah mengalami penurunan yang kemudian realisasi tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan

Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 15 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi berdasarkan jenisnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari (satu) periode Akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pertumbuhan realisasi belanja daerah periode 2020 – 2024 yang cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 realisasi belanja daerah sebesar Rp. **1,325,082,586,616.00** meningkat pada tahun 2024 sementara mencapai Rp. **1,511,435,350,084.00.** Bila dibandingkan capaian pada awal periode maka terdapat peningkatan **Rp. 168,352,763,468.00**. Berdasarkan kelompok belanja maka Belanja Operasi mengalami peningkatan yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 941,363,802,254.00 menjadi Rp. 1,127,631,630,353.00 ditahun 2024, meningkat sebesar Rp. 186,267,828,099.00; Belanja Modal mengalami sedikit penurunan dapat dilihat pada tahun 2020 sebesar Rp. 237,109,008,321.00 menjadi Rp. 234,936,012,180.00 menurun sebesar Rp. 2,172,996,141.00; Belanja Tidak Terduga juga mengalami penurunan yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 10,152,116,141.00 menjadi Rp. 2,435,689,850.00 menurun sebesar Rp. 7,716,426,291.00; Sedang untuk Belanja Transfer mengalami peningkatan yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 136,457,659,900.00 menjadi Rp. 146,432,017,701.00 meningkat Rp. 9,974,357,801.00.Berikut ini disajikan secara Grafik kinerja Belanja Daerah periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

Grafik 2.33

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang

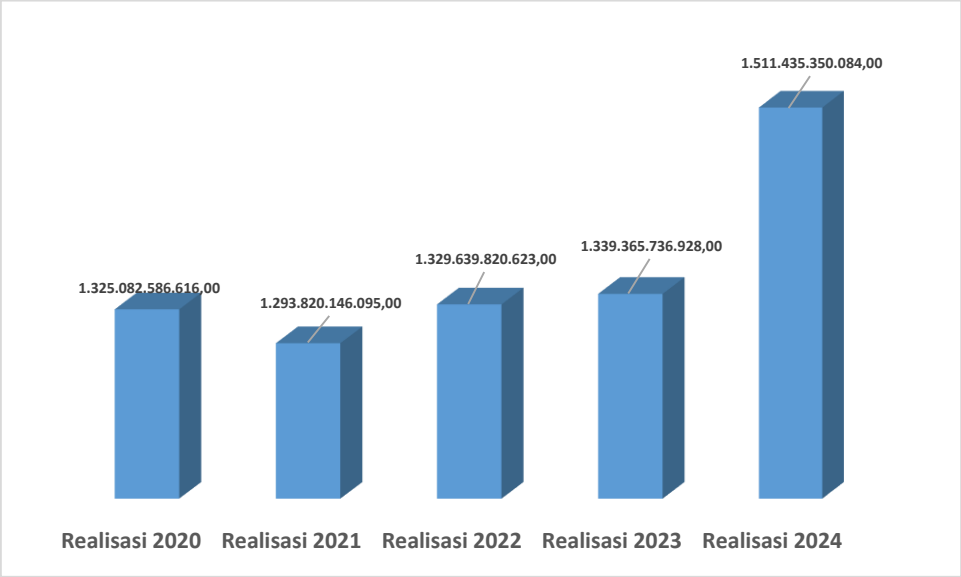

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode 2020-2024 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah tercatat tumbuh positif dengan capaian 3,34 persen, Dimana komponen alokasi belanja daerah yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja Operasional yang rata-rata pertumbuhan mencapai 4,62 persen selama periode 2020-2024.

Tabel 2.142
Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Periode Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pinrang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**BELANJA DAERAH**	**1,325,082,586,616.00**	**1,293,820,146,095.00**	**1,329,639,820,623.00**	**1,339,365,736,928.00**	**1,511,435,350,084.00**	**3.34%**
2.1	**Belanja Operasi**	**941,363,802,254.00**	**1,000,443,815,908.00**	**975,908,528,437.00**	**998,809,101,143.00**	**1,127,631,630,353.00**	**4.62%**
	Belanja Pegawai	605,220,248,866.00	584,646,504,506.00	552,338,843,883.00	564,499,860,920.00	593,373,082,756.00	**-0.49%**
	Belanja Barang dan Jasa	277,662,228,865.00	315,506,103,026.00	330,707,702,359.00	390,205,988,943.00	437,218,054,478.00	**12.02%**
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Belanja Hibah	58,299,174,523.00	98,231,208,376.00	92,861,982,195.00	44,103,251,280.00	97,040,493,119.00	**13.59%**
	Belanja Bantuan Sosial	182,150,000.00	2,060,000,000.00	-	-	-	**0.00%**
2.2	**Belanja Modal**	**237,109,008,321.00**	**155,359,754,689.00**	**217,366,099,785.00**	**199,196,048,535.00**	**234,936,012,180.00**	**-0.23%**
	Belanja Modal Tanah	-	587,162,945.00	-	200,000,000.00	0	**0.00%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,989,193,839.00	43,245,681,385.00	71,197,068,086.00	30,628,529,597.00	48,874,011,697.00	**-3.34%**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,663,715,116.00	20,182,386,564.00	59,987,912,080.00	73,392,927,553.00	109,872,672,203.00	**36.48%**
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,578,769,024.00	90,064,756,265.00	85,216,894,719.00	89,052,381,961.00	69,886,965,629.00	**-16.62%**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,877,330,342.00	1,279,767,530.00	943,284,900.00	5,519,859,424.00	5,727,956,521.00	**4.10%**
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	20,940,000.00	402,350,000.00	574,406,130.00	**0.00%**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10,152,116,141.00**	**1,848,145,800.00**	**6,163,360,250.00**	**607,004,000.00**	**2,435,689,850.00**	**-30.01%**
	Belanja Tidak Terduga	10,152,116,141.00	1,848,145,800.00	6,163,360,250.00	607,004,000.00	2,435,689,850.00	**-30.01%**
2.4	**Belanja Transfer**	**136,457,659,900.00**	**136,168,429,698.00**	**130,201,832,151.00**	**140,753,583,250.00**	**146,432,017,701.00**	**1.78%**
	Belanja Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Belanja Bantuan Keuangan	136,457,659,900.00	136,168,429,698.00	130,201,832,151.00	140,753,583,250.00	146,432,017,701.00	**1.78%**

Berdasarkan data pada tabel dibawah ini, Komponen Utama Belanja Daerah terhitung semenjak tahun 2020 – 2024 mengalami trend fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun**.**

Komposisi empat komponen utama Belanja Daerah tersajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.143
Komponen Utama Belanja Daerah
Periode Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Belanja Operasi	**71%**	**77%**	**73%**	**75%**	**75%**
Belanja Modal	**18%**	**12%**	**16%**	**15%**	**16%**
Belanja Tidak Terduga	**1%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Belanja Transfer	**10%**	**11%**	**10%**	**11%**	**10%**

Berdasarkan data pada tabel diatas komponen Utama Pendapatan Daerah terhitung semenjak tahun 2020 – 2024 mengalami trend fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun**.**

2.2.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Selama periode 2020 – 2024 secara rata – rata kinerja pembiayaan menunjukkan kecenderungan pembiayaan defisit dalam pengertian alokasi belanja daerah selalu lebih besar dari pendapatan daerah. Selisih defisit belanja tersebut tertutupi oleh penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa.

Tabel 2.144

Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	**PEMBIAYAAN**						
	Penerimaan Pembiayaan						
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	84,658,105,705.05	72,525,777,903.00	51,185,571,869.56	72,153,006,207.19	60,367,364,632.00	**-8.11%**
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,600,000.00	10,000,000.00	-	-	-	**-100.00%**
	Penerimaan Kembali Pimberian Pinjaman	-	-	-	-	-	**0.00%**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**84,668,705,705.05**	**72,535,777,903.00**	**51,185,571,869.56**	**72,153,006,207.19**	**60,367,364,632.00**	**-8.11%**
	Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	**0.00%**
	Pembiayaan Netto	**84,668,705,705.05**	**72,535,777,903.00**	**51,185,571,869.56**	**72,153,006,207.19**	**60,367,364,632.00**	**-8.11%**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**72,525,777,903.23**	**51,133,491,619.33**	**72,091,166,261.19**	**60,367,364,632.00**	**20,029,749,670.94**	**-27.51%**

2.2.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Pinrang selama periode pencatatan 2020-2024, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.145

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Juta)	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	Rata rata Pertumbuhan (Persen)
1.	**ASET**						
1.1.	ASET LANCAR	114,796,066,667.82	103,252,929,915.35	129,917,253,247.59	119,112,240,562.33	103,433,915,480.57	-2.57%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	30,318,075,852.49	30,318,075,852.49	30,001,459,647.49	63,801,459,647.49	63,658,535,837.00	20.38%
1.3.	ASET TETAP	2,811,441,418,569.40	2,623,378,395,735.20	2,657,588,044,033.65	2,559,887,209,918.57	2,581,576,502,572.62	-2.11%
1.4.	ASET LAINNYA	42,255,041,935.13	294,596,018,705.27	294,422,633,886.67	303,586,991,268.89	241,892,317,221.34	54.68%
1.5	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	84,242,789,372.28	84,094,672,918.49	-0.18%
	JUMLAH ASET	**2,998,810,603,024.84**	**3,051,545,420,208.31**	**3,111,929,390,815.40**	**3,130,630,690,769.56**	**3,074,655,944,030.02**	**0.63%**
2.	**KEWAJIBAN**						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19,700,154,775.47	19,915,346,004.15	34,262,277,993.21	30,560,464,102.89	43,142,392,343.44	21.65%
	JUMLAH KEWAJIBAN	**19,700,154,775.47**	**19,915,346,004.15**	**34,262,277,993.21**	**30,560,464,102.89**	**43,142,392,343.44**	21.65%

No	Uraian	2020 (Juta)	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	Rata rata Pertumbuhan (Persen)
3.	**EKUITAS DANA**						
3.1.	EKUITAS	2,979,110,448,249.37	3,031,630,074,204.16	3,077,667,112,822.19	3,100,070,235,666.67	3,031,513,551,686.58	0.44%
	JUMLAH EKUITAS	**2,979,110,448,249.37**	**3,031,630,074,204.16**	**3,077,667,112,822.19**	**3,100,070,235,666.67**	**3,031,513,551,686.58**	**0.44%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2,998,810,603,024.84**	**3,051,545,420,208.31**	**3,111,929,390,815.40**	**3,130,630,699,769.56**	**3,074,655,944,030.02**	**0.63%**

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Pinrang, 2025, diolah oleh Bapperida

2.2.1.3. Aset Daerah

Analisis aset meliputi lima aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan property investasi. Selama periode 2020-2024, Kabupaten Pinrang mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 0,63 persen. Pertumbuhan tersebut dikontribusi oleh Aset Lainnya yang mencapai 54,68 persen, kemudian Investasi jangka panjang yang mencapai 20,38 persen, namun untuk aset lancar, aset tetap dan property investasi justru mengalami perlambatan yaitu aset lancar sebesar -2,57 persen, aset tetap sebesar -2,11 persen dan property investasi sebesar -0,18 persen.

2.2.1.4. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasikan kedalam dua komponen yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Kabupaten Pinrang hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Pinrang selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang meningkat. Kewajiban daerah dengan rata-rata 21,65 persen kurung waktu lima tahun.

2.2.1.5. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Pinrang selama periode 2020-2024, menunjukkan trend peningkatan/positif dengan pertumbuhan rata-rata 0,44 persen. Ini mencerminkan kestabilan dan keseimbangan keuangan yang baik,

antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh selama periode 2020-2024 tersebut.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang sebagaiamana tergambar dalam APBD selama periode 2020-2024, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) Proporsi penggunaan anggaran dan (2) Hasil analisis pembiayaan daerah. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan aerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

2.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah lainnya, khususnya pengelolaan sumberdaya alam daerah. Kebijakan dari sisi pendapatan daerah ini bukan hanya dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sangat tergantung kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan

keuangan daerah sisi pendapatan ini, dua hal yang penting diperhatikan, yakni: (1) Upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi; dan (2) Melakukan perluasan sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik PAD maupun DBH pajak dan non pajak. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah, sedang dan perlu diterapkan Kabupaten Pinrang ke depan, antara lain: (1) Penguatan local taxing power, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. (2) Mengoptimalkan pengelolaan obyek- obyek PAD potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan obyek-obyek PAD dan PAD Lainnya yang Sah, antara lain mengoptimalkan kinerja BUMD dan pengelolaan sumberdaya daerah lainnya. (3) Memperluas jangkauan kerjasama pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program-program pembangunan daerah yang bersifat strategis, seperti skim Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembiayaan Pembangunan infrastruktur dasar ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah tidak semata-mata terfokus pada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan alokasi belanja daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.

2.2.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu yang hal yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk

kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh apparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Jenis belanja terdiri atas: belanja operasional, meliputi belanja: (1) Belanja pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Bunga, (4) Belanja Subsidi (5) Belanja Hibah dan (6) Belanja Bantuan Sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer meliputi (1) Belanja bagi hasil (2) Belanja Transfer. Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelengaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Tabel 2. 146
Analisis Proporsi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2020	605,220,248,866.00	1,325,082,586,616.00	45.67
2	2021	584,646,504,506.00	1,293,820,146,095.00	45.19
3	2022	552,338,843,883.00	1,329,639,820,623.00	41.54
4	2023	564,499,860,920.00	1,339,365,736,928.00	42.15
5	2024	593,373,082,756.00	1,511,435,350,084.00	39.26

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

Selama periode 2020-2024 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pinrang cenderung menurun. Alokasi belanja pada tahun 2020 mencapai 45,67 persen dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Pada tahun 2024, proporsi tersebut menurun menjadi 39,26 persen. Penurunan proporsi belanja aparatur menunjukkan upaya efisiensi dalam pengeluaran rutin dan memberi ruang lebih bagi belanja pembangunan (*spending for development*). Dinamika proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020-2024 ini merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada upaya pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, lebih mengarah pada pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selanjutnya pada setiap kebijakan penganggaran tersebut, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pengeluaran pembiayaan kalau mencapai penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Tabel 2.147

Perhitungan Surplus/Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Juta Rp)	2021 (Juta Rp)	2022 (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,312,939,658,814.18	1,272,417,859,811.33	1,350,545,415,014.63	1,327,580,095,352.81	1,471,097,735,122.94
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,325,082,586,616.00	1,293,820,146,095.00	1,329,639,820,623.00	1,339,365,736,928.00	1,511,435,350,084.00
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Surplus/(defisit)rill		**-12,142,927,801.82**	**-21,402,286,283.67**	**20,905,594,391.63**	**-11,785,641,575.19**	**-40,337,614,961.06**

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

Kondisi anggaran Kabupaten Pinrang berada pada posisi defisit sejak tahun 2020 – 2024, kecuali tahun 2022 pada posisi surplus sebesar Rp.20,90 Milyar. Pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.12,14 Milyar dan tahun 2024 sebesar Rp. 40,33 Milyar, yang disebabkan belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan daerah.

Tabel 2.148

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

Selama periode 2020-2024, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan

penerimaan pinjaman daerah. Komponen komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi deficit tidak Nampak signifikan.

Tabel 2. 149

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp (Juta)	% Dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA
1	Jumlah SiLPA	84,658,105,705.05	100	72,525,777,903.23	100	51,185,571,869.56	100	72,153,006,207.19	100	60,367,364,632.00	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp (Juta)	% Dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA	Rp (Juta)	% dari SILPA
5	sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengah akhir tahun sebelum teselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kabupaten Pinrang 2025

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan, optimasi dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya

dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Kabupaten Pinrang selama ini, perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata. Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program Pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpijak secara nyata pada target-target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.2.3. Analisis Keuangan Daerah

2.2.3.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (fiscal space), serta rasio pajak (tax ratio). Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang

sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan Upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020- 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/ dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka- angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki

rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar peleksanaan desentralisais fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 150
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer/Perimbangan (Rp)	Persentase
1	2020	1,312,939,658,814.18	929,729,919,743.00	70.81
2	2021	1,272,417,859,811.33	1,080,037,744,405.00	84.88
3	2022	1,350,545,415,014.63	1,187,107,563,643.00	87.90
4	2023	1,327,580,095,352.81	1,152,167,058,023.82	86.79
5	2024	1,471,097,735,122.94	1,267,309,741,300.00	86.15

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

2. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal (fiscal space) dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat untuk secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah

daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiscal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritasnya.

Pada Tahun 2020-2024 Kondisi ruang fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan trend fluktuatif yaitu pada Tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 30,82 Persen dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 35,73 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 39,39 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang implementasi dan pelaksanaanya dimulai Tahun 2017 dengan pengalihan beberapa urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi antara lain urusan pendidikan menengah atas dan menengah khusus, kehutanan dan kelautan.

Tabel 2.151

Ruang Fiskal Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Selisih	Ruang Fiscal
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2020	1,312,939,658,814.18	63,808,057,641.00	239,217,784,063.00	605,220,248,866.00	0	404,693,568,244.18	30.82
2021	1,272,417,859,811.33	58,313,459,921.00	223,695,481,627.00	584,646,504,506.00	0	405,762,413,757.33	31.89
2022	1,350,545,415,014.63	5,316,289,628.00	335,725,832,461.00	552,338,843,883.00	0	457,164,449,042.63	33.85
2023	1,327,580,095,352.81	57,109,900.00	240,098,506,247.00	564,499,860,920.00	0	522,924,618,285.81	39.39
2024	1,471,097,735,122.94	26,220,200,000.00	325,947,717,516.00	593,373,082,756.00	0	525,556,734,850.94	35.73

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

3. Rasio Pajak Daerah (Tax Ratio)

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagipengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di Kabupaten Pinrang akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRBnya, serta mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait.

Rasio Pajak Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 yang semula 0,16 Persen menjadi 0,18 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tax rasio di Kabupaten Pinrang semakin meningkat dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak semakin membaik dengan melihat trend peningkatan tersebut. Indikasi peningkatan angka tax rasio diantaranya berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pengampuh pendapatan serta unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi dan eksistensifikasi serta memberikan akses informasi dan kemudahan layanan transaksi secara non tunai sehingga tingkat kesadaran dari pembayar pajak terus meningkat.

Tax Rasio sebesar 0,16 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah kabupaten. Rasio Pajak Daerah (local tax ratio) Kabupaten Pinrang, dihitung berdasarkan penerimaan pajak daerah yang dipungut sendiri oleh pemerintah kabupaten, dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut UU No 28/2009 dan UU HKPD (UU No 1/2022), pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan atas 11 jenis pajak daerah, termasuk juga "opsen" (opsional region) pajak tertentu. Perhitungan tax rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang meliputi Pajak Barang dan Jasa (Hotel, Makanan dan/atau minuman, Hiburan, dan Tenaga Listrik), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Opsen diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk mengetahui gambaran tax rasio pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 152
Rasio Pajak (Tax Ratio)
Kabupaten Pinrang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB	Tax Rasio
1	*2*	*3*	*4*
2020	31.362.250.639,00	20.083.012.971.451	0,16
2021	35.439.158.745,00	21.758.576.933.089	0,16
2022	42.648.264.194,90	23.765.146.259.479	0,18
2023	45.821.473.681,00	25.146.489.360.808	0,18
2024	48.253.309.623,00	26.653.401.931.451	0,18

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang cenderung mengalami Penurunan dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 45,67 persen yang menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 39,26 persen. Penurunan tersebut menunjukkan berbaikan menuju target meskipun belum mencapai target, ini berdasarkan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang mana menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 (Tiga Puluh) persen dari total Belanja Daerah dengan periode transisi selama 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2022-2027.

Gambaran kondisi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.153
Rasio Belanja Pegawai
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)
2020	605,220,248,866.00	1,325,082,586,616.00	45.67
2021	584,646,504,506.00	1,293,820,146,095.00	45.19
2022	552,338,843,883.00	1,329,639,820,623.00	41.54
2023	564,499,860,920.00	1,339,365,736,928.00	42.15
2024	593,373,082,756.00	1,511,435,350,084.00	39.26

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

5. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2020 berada pada angka 17,89 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 12,01 persen, kemudian ditahun 2024 meningkat menjadi 15,54 persen. Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, yang berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang akan mempunyai dampak kedepan (forward lingkage) untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sektor swasta dan investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kelancaran distribusi dan peningkatan ekspor barang dan jasa.

Peningkatan belanja modal pada periode tersebut di prioritaskan pada belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk peningkatan kondisi jalan yang semakin baik, pembangunan dan rehabilitasi infrasturktur irigasi, pembangunan renovasi pasar sentral untuk perbaikan atap, drainase dan lapak pedagang, pembangunan sarana dan prasaran pelayanan publik disektor pendidikan dan Kesehatan.

Namun demikian untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten juga mendorong belanja modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur melalui bantuan keuangan kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana untuk mengimbangi kondisi mantap jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah.

Berikut untuk lebih jelasnya capaian kondisi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang pada periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.154
Rasio Belanja Modal
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)
2020	237,109,008,321.00	1,325,082,586,616.00	17.89
2021	155,359,754,689.00	1,293,820,146,095.00	12.01
2022	217,366,099,785.00	1,329,639,820,623.00	16.35
2023	199,196,048,535.00	1,339,365,736,928.00	14.87
2024	234,936,012,180.00	1,511,435,350,084.00	15.54

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan

tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemerintah daerah untuk menyejahterakan penduduknya. Belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.155
Rasio Belanja Daerah per Kapita
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Total belanja	Jumlah Penduduk (jiwa)	Belanja Daerah perKapita
2020	1,325,082,586,616	403,994	3,279,956
2021	1,293,820,146,095	408,419	3,167,875
2022	1,329,639,820,623	411,392	3,232,051
2023	1,339,365,736,928	417,932	3,204,746
2024	1,511,435,350,084	423,146	3,571,900

Sumber data: BPKPD dan BPS Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

2.2.3.2. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Kabupaten Pinrang berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Pinrang. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024, dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar 55,45 persen pada Tahun 2020, meningkat menjadi 57,44 persen pada Tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut Perekonomian Kabupaten Pinrang menurut pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, konsumsi

pemerintah dan Konsumsi LNPRT. Untuk komponen pembentukan PMTB pada Tahun 2020 sebesar Rp. 4,65 Triliun lebih atau 36,25 persen meningkat menjadi Rp. 5,51 Triliun lebih atau 36,26 persen pada Tahun 2024 dari total PDRB. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupate Pinrang Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.156
Kontribusi PDRB menurut pengeluaran
Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

No	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeleuaran Konsumsi Rumah Tangga	7,112,003,805,873	7,512,052,238,388	7,957,637,673,242	8,335,283,256,957	8,738,184,190,912
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	101,115,048,841	102,504,310,840	111,742,700,010	125,851,787,816	137,754,828,271
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	906,997,155,947	966,327,536,751	963,428,554,141	1,005,628,053,437	1,053,979,660,647
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,650,118,972,835	4,695,959,640,061	5,085,079,841,868	5,253,998,566,395	5,515,899,343,472
5	Perubahan Inventori	236,140,749,655	228,852,810,065	153,839,239,738	(14,568,793,977)	21,762,853,160
6	Net Eksport Antar Daerah	(179,923,801,460)	(33,203,744,557)	(189,077,856,273)	(317,206,292,505)	(257,371,937,277)
Total PDRB		**12,826,451,931,691**	**13,472,492,791,548**	**14,082,650,152,726**	**14,388,986,578,123**	**15,210,208,939,185**

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Pertumbuhan Ekonomi Pinrang dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Interpretasi nilai share lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa total belanja APBD lebih besar dari nilai konsumsi pemerintah yang tercatat dalam PDRB. Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang

terhadap komponen konsumsi pemerintah dalam PDRB selama periode 2020–2024 menunjukkan tren stabil namun fluktuatif secara moderat, Secara umum, kontribusi APBD terhadap konsumsi pemerintah dalam PDRB tetap signifikan dan konsisten, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2023. Tahun 2020 mencatat kontribusi tertinggi sebesar 146,10%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh belanja tambahan terkait penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, pada tahun 2024, kontribusi kembali meningkat menjadi 143,40% seiring dengan peningkatan belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Tingginya kontribusi ini mencerminkan peran strategis APBD dalam mendorong aktivitas ekonomi pemerintah daerah, namun juga menjadi catatan penting bahwa tidak semua belanja pemerintah daerah tercermin langsung dalam konsumsi pemerintah dalam PDRB. Hal ini karena sebagian belanja bersifat transfer, subsidi, atau tidak menghasilkan barang/jasa akhir secara langsung.

Untuk lebih jelasnya Share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.157
Share APBD terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Total Belanja APBD	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah
2020	906,997,155,947	1,325,082,586,616	146.10
2021	966,327,536,751	1,293,820,146,095	133.89
2022	963,428,554,141	1,329,639,820,623	138.01
2023	1,005,628,053,437	1,339,365,736,928	133.19
2024	1,053,979,660,647	1,511,435,350,084	143.40

Sumber data: BPKPD dan BPS Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

Sedangkan Kontribusi belanja modal APBD Kabupaten Pinrang terhadap komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan tren yang rendah dan relatif stagnan selama lima tahun terakhir, dengan persentase kontribusi berkisar antara 3,31% hingga 5,10%. Meskipun nilai nominal belanja modal mengalami fluktuasi, kontribusinya terhadap total PMTB masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa peran APBD dalam mendorong pembentukan modal tetap (seperti infrastruktur dan investasi fisik) masih terbatas. Tahun 2020 merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi sebesar 5,10%, sedangkan tahun 2021 mencatat kontribusi terendah yaitu 3,31%. PMTB sendiri mencerminkan investasi jangka panjang, seperti bangunan, peralatan, dan aset tetap lainnya yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk lebih jelasnya Share Belanja Modal APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.158

Share Belanja Modal APBD terhadap Pengeluaran Pembentukan Modal tetap Bruto Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen PMTB	Total Belanja Modal	Share Belanja Modal terhadap Konsumsi PMTB
2020	4,650,118,972,835	237,109,008,321	5.10
2021	4,695,959,640,061	155,359,754,689	3.31
2022	5,085,079,841,868	217,366,099,785	4.27
2023	5,253,998,566,395	199,196,048,535	3.79
2024	5,515,899,343,472	234,936,012,180	4.26

Sumber data: BPKPD dan BPS Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

2.2.4. Rasio Keuangan (Likuiditas. Solvabilitas)

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (kurang dari satu tahun) menggunakan aset lancar. Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Kabupaten Pinrang Tahun 2020–2024 akan dijelaskan sebagai berikut:

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Pinrang menunjukkan kapasitas kas yang bervariasi dalam menghadapi kewajiban jangka pendek.

Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Rasio Lancar Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

Rasio Lancar Tahun	Kas	Utang Jangka Pendek	Persentase
2020	72,525,777,903.23	19,700,154,775.47	368.15
2021	51,133,491,619.33	19,915,346,004.15	256.75
2022	72,091,166,261.19	34,262,277,993.21	210.41
2023	60,367,364,632.00	30,560,464,102.89	197.53
2024	20,029,749,670.94	43,142,392,343.44	46.43

Sumber data: BPKPD Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

Rasio Solvabilitas (Rasio utang terhadap asset) merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan fiskal daerah, khususnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan proporsi kewajiban terhadap total aset, di mana semakin tinggi rasio, semakin besar beban kewajiban terhadap kemampuan aset daerah. Rasio Total Utang terhadap Total Aset pada tahun 2024 sebesar 1,40 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,66 persen. Hal ini berarti Pengaruh Utang terhadap pembiayaan pada tahun 2024 lebih tinggi atau besar. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap asset daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.160
Rasio Total Hutang Terhadap Aset Kabupaten Pinrang
Tahun 2020-2024

Rasio Utang Terhadap Aset (Tahun)	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase
2020	19,700,154,775	2,998,810,603,025	0.66
2021	19,915,346,004	3,051,545,420,208	0.65
2022	34,262,277,993	3,111,929,390,815	1.10
2023	30,560,464,103	3,130,630,690,770	0.98
2024	43,142,392,343	3,074,655,944,030	1.40

Sumber data: BPKPD Kabupaten Pinrang diolah oleh Bapperida Kab Pinrang 2025

2.2.5. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasari asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun

ke depan. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial tertentu daerah Kabupaten Pinrang, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas fiskal daerah yang dapat dialokasikan untuk alokasi belanja langsung daerah ke depan. Pada poin kapasitas fiscal riil ini, penganggaran sudah harus ditunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.5.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

Tabel 2.161
Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2025 - 2030

No	Indikator	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	5,86	6,59	7,12	7,65	8,29	8,59
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	96,73
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,03	2,94	2,75	2,64	2,67	2,57

No	Indikator	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Gini	0,293	0,286	0,280	0,274	0,268	0,261
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	6,31
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,83	76,27	76,83	77,34	77,63	78,04
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	29,56	31,69	32,75	33,84	38,42	40,84

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2025 hingga 2030.

Selama periode tersebut, ekonomi daerah diproyeksikan tumbuh secara konsisten di atas 6% per tahun, mencerminkan optimisme terhadap peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan ini juga didukung oleh investasi infrastruktur dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

Pendapatan per kapita masyarakat menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari sekitar Rp 67 juta pada 2025 menjadi hampir Rp146 juta pada 2030. Hal ini mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat serta distribusi manfaat pembangunan yang semakin merata.

Dalam aspek sosial, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan terus menurun hingga di bawah 2,5% pada akhir periode. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan juga diperkirakan turun drastis, dari 8,35% pada 2025 menjadi 5,05% pada tahun 2030. Penurunan ini

mencerminkan keberhasilan program penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sistem perlindungan sosial di tingkat desa dan kecamatan.

Kesenjangan pendapatan, yang tercermin dari Indeks Gini, juga menunjukkan arah yang membaik secara bertahap. Ini mengindikasikan pembangunan yang semakin inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat rentan.

Selain aspek ekonomi dan sosial, Kabupaten Pinrang juga menaruh perhatian terhadap dimensi lingkungan hidup. Proyeksi penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga hampir 36% di tahun 2030 mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan ketahanan iklim.

2.2.5.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

2.2.5.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah untuk Lima tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang yang semakin membaik. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Pendapatan Daerah merupakan komponen utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Pinrang terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Selama periode 2025-2030 sesuai RPJMD tahun 2025-2030, pendapatan daerah Kabupaten Pinrang diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 1,494 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 1,592 Triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan peningkatan pendapatan transfer. Pada kelompok pendapatan Transfer khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi tingkat rata-rata pertumbuhan masih lebih kecil dibanding komponen PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Pinrang, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Komponen pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025-

2030 diproyeksikan berdasarkan data historis dan potensi riil yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah penghasil pendapatan. Proses penyusunan proyeksi pendapatan dilakukan melalui mekanisme pengumpulan data dan konsultasi teknis dengan seluruh unit yang berwenang mengelola Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi diantaranya yaitu :

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern, membuat kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Pinrang meningkat dalam memenuhi kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah.

   Dalam Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, seperti:

- **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**
  - Memiliki basis pajak yang luas dan stabil.
  - Proyeksi didasarkan pada basis data objek pajak yang diperbarui tiap tahun, serta estimasi tingkat kepatuhan wajib pajak.
  - Optimalisasi melalui digitalisasi SPPT dan penagihan berbasis desa/kelurahan.
- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
  - Fluktuatif karena dipengaruhi oleh aktivitas jual beli tanah/bangunan dan pertumbuhan properti.
  - Proyeksi mempertimbangkan tren transaksi tanah serta dukungan dari sistem informasi pertanahan.
- **PBJT** adalah jenis Pajak Daerah yang dikenakan atas konsumsi atau transaksi atas barang dan jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak ini termasuk dalam

kelompok Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBJT di Kabupaten Pinrang dipungut atas konsumsi atau pemanfaatan atas:

- Makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, warung, kafe, dan sejenisnya.
- Tenaga listrik, Salah satu sumber terbesar dari pajak daerah, dihitung berdasarkan proyeksi konsumsi listrik masyarakat dan usaha, serta tarif yang berlaku. Pemungutan dilakukan melalui kerja sama pemotongan otomatis dengan PLN.
- Jasa perhotelan, termasuk penginapan dan penyewaan ruang pertemuan/fasilitas lainnya.
- Jasa parkir yang diselenggarakan sebagai usaha.
- Jasa hiburan dan kesenian, termasuk tontonan, permainan, konser, dan sejenisnya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Pinrang Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam,bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh lima persen), Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. K o nsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. K onsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

- **Pajak Reklame**

  Pajak Reklame, diproyeksikan meningkat ditahun 2026, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pinrang baru-baru ini memasang videotron pertama di Taman Marannu, dan

berencana menambah titik videotron lainnya. Videotron ini nantinya akan dijadikan media iklan yang disewakan secara publik, sehingga masuk dalam kategori pajak reklame. Untuk reklame elektronik yang terdaftar, tarif pajak reklame adalah 25 % sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2025 tentang perhitungan sewa Reklame

- **Pajak Air Tanah**

  Pajak Air Tanah adalah **Pajak Daerah** yang dikenakan atas **pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah** oleh **perorangan atau badan usaha**, yang digunakan **untuk kepentingan sendiri maupun komersial**. Air tanah yang dimaksud adalah air yang berasal dari **lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah**, yang diambil menggunakan sumur bor, sumur pompa, atau alat sejenis. Kabupaten Pinrang dalam memungut Pajak Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan tarif PAT sebesar 20% (duapuluh persen)

- **Pajak Sarang Burung Walet**

  Dengan Melihat Perkembangan data Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet baik dari rumah wallet buatan maupun habitat alam dan hasil rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Sulawesi Selatan maka Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah menetapkan pajak sarang burung walet sebagai bagian dari instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini menandai komitmen daerah untuk menggali potensi pajak berbasis kekayaan alam lokal, khususnya dari sektor non-tradisional seperti usaha walet yang berkembang pesat di wilayah Pinrang. Tarif Pajak Sarang Burung Wallet sebesar 7% (Tujuh Persen).

2. Opsen Pajak MBLB,PKB dan BBNKB

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 6 (1) menerangkan bahwa Opsen pajak adalah pungutan yang dikenakan

oleh pemerintah provinsi atas pajak kabupaten/kota tertentu, Pasal 6 Ayat (3) Jenis pajak daerah yang dapat dikenakan opsen, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) maka dibuatkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 100.3.7.1/028/IV/Pemotda-/2024 dan nomor 100.3.7.1/010/PKS/IV/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan pajak Daerah di Kabupaten Pinrang.

- Opsen MBLB

  Opsen MBLB adalah pungutan tambahan oleh provinsi sebesar maksimal 25% dari pajak MBLB kabupaten/kota, ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi fiskal antara level pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah.

- Opsen PKB

  Opsen PKB adalah pembagian penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh provinsi, di mana kabupaten/kota menerima tambahan penghasilan, Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

- Opsen BBNKB

  Opsen BBNKB adalah pembagian hasil dari pajak BBNKB yang dipungut provinsi dan diserahkan sebagian ke kabupaten/kota. Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

3. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.

   Selengkapnya hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2030, dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.162
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2025 – 2030

KODE	URAIAN	Baseline Tahun 2024	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
		Jumlah (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**PENDAPATAN DAERAH**							
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**177,567,793,822.94**	**234,768,302,342.00**	**246,892,393,038.00**	**264,267,792,034.00**	**275,598,231,721.00**	**293,854,817,370.00**	**312,323,207,549.00**
4.1.01	Pajak Daerah	48,253,309,623.00	85,861,596,425.00	96,274,217,373.00	111,917,942,215.00	121,475,512,840.00	137,997,710,596.00	154,709,863,318.00
4.1.02	Retribusi Daerah	3,274,642,960.00	132,290,498,000.00	133,669,643,590.00	135,062,347,103.00	136,489,466,110.00	137,871,188,949.00	139,267,708,048.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,636,207,917.00	10,636,207,917.00	10,848,932,075.00	11,065,910,716.00	11,287,228,931.00	11,512,973,509.00	11,743,232,980.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115,403,633,322.94	5,980,000,000.00	6,099,600,000.00	6,221,592,000.00	6,346,023,840.00	6,472,944,316.00	6,602,403,203.00
4	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,267,309,741,300.00**	**1,259,454,475,416.00**	**1,271,249,020,170.00**	**1,273,369,510,371.00**	**1,278,617,205,475.00**	**1,279,093,377,530.00**	**1,280,499,311,305.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,187,698,827,958.00	1,171,614,957,000.00	1,183,331,106,570.00	1,185,164,417,635.00	1,190,116,061,812.00	1,190,387,222,430.00	1,191,379,094,654.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79,610,913,342.00	87,839,518,416.00	87,917,913,600.00	88,205,092,736.00	88,501,143,663.00	88,706,155,100.00	89,120,216,651.00

KODE	URAIAN	Baseline Tahun 2024 Jumlah (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2025 JUMLAH (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2026 JUMLAH (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2027 JUMLAH (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2028 JUMLAH (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2029 JUMLAH (Rp)	Rancangan Tahun Anggaran 2030 JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**26,220,200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	26,220,200,000.00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**1,471,097,735,122.94**	**1,494,222,777,758.00**	**1,518,141,413,208.00**	**1,537,637,302,405.00**	**1,554,215,437,196.00**	**1,572,948,194,900.00**	**1,592,822,518,854.00**

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

2.2.5.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Selama periode 2025-2030, diharapkan meningkat dari Rp 1.543 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 1,592 Triliun pada tahun 2030 seiring dengan meningkatnya secara signifikan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK. Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganguran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, kebijakan penganggaran daerah yang defisit untuk lima tahun ke depan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja operasional, khususnya pada alokasi belanja barang dan jasa. Berikut ini disajikan tabel proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 2026-2030.

Tabel 2.163

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang

Tahun 2025 – 2030

KODE	URAIAN	Baseline Tahun 2024	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
		Jumlah (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**BELANJA DAERAH**							
5	**BELANJA OPERASI**	**1,127,631,630,353.00**	**1,159,677,540,777.00**	**1,139,962,512,548.00**	**1,153,121,251,237.00**	**1,164,051,869,473.00**	**1,175,809,099,495.00**	**1,186,950,663,085.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	593,373,082,756.00	637,814,146,849.00	644,192,288,318.00	651,932,524,765.00	657,855,863,736.00	664,555,741,700.00	670,589,379,712.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437,218,054,478.00	485,978,923,704.00	461,679,977,518.00	466,757,577,293.00	471,420,545,066.00	476,130,142,517.00	480,886,835,942.00
5.1.05	Belanja Hibah	97,040,493,119.00	35,884,470,224.00	34,090,246,712.00	34,431,149,179.00	34,775,460,671.00	35,123,215,278.00	35,474,447,431.00
5.1.06	Belanja Sosial	-	-	-	-	-	-	
5	**BELANJA MODAL**	**234,936,012,180.00**	**218,941,867,851.00**	**211,566,983,401.00**	**215,090,855,705.00**	**217,686,963,085.00**	**220,036,547,481.00**	**222,046,701,394.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,200,000,000.00	3,500,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,874,011,697.00	47,839,983,026.00	46,883,183,365.00	46,414,351,531.00	45,950,208,016.00	45,490,705,936.00	44,580,891,817.00

KODE	URAIAN	Baseline Tahun 2024	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
		Jumlah (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109,872,672,203.00	61,264,618,692.00	58,201,387,757.00	58,783,401,635.00	59,371,235,651.00	59,964,948,007.00	60,564,597,488.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69,886,965,629.00	105,270,284,349.00	100,006,770,131.00	103,006,973,235.00	105,067,112,700.00	107,168,454,954.00	109,311,824,053.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,727,956,521.00	4,206,755,784.00	4,122,620,668.00	4,040,168,254.00	3,959,364,889.00	3,880,177,592.00	3,763,772,264.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	574,406,130.00	360,226,000.00	353,021,480.00	345,961,050.00	339,041,829.00	332,260,992.00	325,615,772.00
5	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2,435,689,850.00**	**5,036,783,654.00**	**5,469,444,466.00**	**6,563,333,353.00**	**7,876,000,024.00**	**9,845,000,030.00**	**13,783,000,043.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,435,689,850.00	5,036,783,654.00	5,469,444,466.00	6,563,333,353.00	7,876,000,024.00	9,845,000,030.00	13,783,000,043.00
5	**BELANJA TRANSFER**	**146,432,017,701.00**	**159,442,203,125.00**	**161,142,472,793.00**	**162,861,862,110.00**	**164,600,604,614.00**	**167,257,547,894.00**	**170,042,154,332.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	10,584,763,725.00	10,796,458,999.00	11,012,388,179.00	11,232,635,943.00	12,355,899,537.00	13,591,489,491.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	146,432,017,701.00	148,857,439,400.00	150,346,013,794.00	151,849,473,931.00	153,367,968,671.00	154,901,648,357.00	156,450,664,841.00
Jumlah Belanja		**1,511,435,350,084.00**	**1,543,098,395,407.00**	**1,518,141,413,208.00**	**1,537,637,302,405.00**	**1,554,215,437,196.00**	**1,572,948,194,900.00**	**1,592,822,518,854.00**

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

2.2.5.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 48.875.617.649,00, yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan Kabupaten Pinrang memproyeksi pembiayaan pada tahun 2026-2030 sebesar Rp 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk tahun tersebut.

Selengkapnya hasil proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2030, dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.164

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pinrang

Tahun 2025 – 2030

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	9
PEMBIAYAAN DAERAH	**48,875,617,649.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**48,875,617,649.00**	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	48,875,617,649.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	

Sumber data: BPKPD diolah oleh Bapperida Kab pinrang 2025

2.2.6. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pinrang berencana tetap mengalokasikan minimal 10 persen dari APBD;
c. Belanja Infrastruktur pelayanan publik, paling rendah 40 persen dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
d. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

Selain itu, prioritas pertama juga dialokasikan dalam mendukung prioritas nasional. Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun

2025 – 2029 dan Prioritas ketiga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2026–2030, pembagian alokasi anggaran kapasitas riil ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.165
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	Sesuai Permendagri 62 tahun 2017					
	Proyeksi (Rp)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Asli Daerah	234,768,302,342.00	246,892,393,038.00	264,267,792,034.00	275,598,231,721.00	293,854,817,370.00	312,323,207,549.00
Dana Bagi Hasil	13,412,186,000.00	14,082,795,000.00	14,787,935,000.00	15,527,331,000.00	16,303,697,000.00	17,118,882,000.00
Dana Alokasi Umum	792,452,048,000.00	816,225,610,000.00	840,712,378,000.00	866,009,000,000.00	892,009,300,000.00	919,019,500,000.00
Jumlah Penerimaan	**1,040,632,536,342.00**	**1,077,200,798,038.00**	**1,119,768,105,034.00**	**1,157,134,562,721.00**	**1,202,167,814,370.00**	**1,248,461,589,549.00**
					Dikurangi :	
Belanja Pegawai	637,814,146,849.00	644,192,288,318.00	651,932,524,765.00	657,855,863,736.00	664,555,741,700.00	670,589,379,712.00
Kapisitas Rill Kemampuan Keuangan	**402,818,389,493.00**	**433,008,509,720.00**	**467,835,580,269.00**	**499,278,698,985.00**	**537,612,072,670.00**	**577,872,209,837.00**

Berdasarkan proyeksi APBD Kabupaten Pinrang 2025–2030 dan sesuai formula Permendagri No. 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah dihitung sebagai selisih jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU), dikurangi Belanja Pegawai.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 2026-2030 yang akan datang diproyeksikan meningkat dari 402,81 Milyar pada tahun 2025 menjadi Rp 577,87 Milyar pada tahun 2030. Berdasarkan perhitungan tersebut, kemampuan keuangan daerah Pinrang diperkirakan berada dalam kategori 'Sedang' pada 2025–2028, mendekati peralihan ke kategori 'Tinggi' pada 2029, dan secara resmi masuk kategori 'Tinggi' pada 2030. Hal ini mengindikasikan adanya tren peningkatan kapasitas fiskal daerah seiring meningkatnya penerimaan daerah dan stabilitas belanja pegawai.

Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreasitivitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen Pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah Pemerintah Pinrang dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan Perundangan, prioritas I dialokasikan untuk

membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, pemenuhan penerapan pelayanan dasar serta belanja yang menunjang pencapaian prioritas nasional. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah serta prioritas nasional. Prioritas II juga dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk periode 2026-2030 yang datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Pinrang akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama mencakup belanja untuk urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, serta belanja untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan Tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan Pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh daerah. Permasalahan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dan isu strategis adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam periode lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029. Analisis ini didasarkan pada data dan informasi terkini, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Dengan memahami secara mendalam permasalahan dan isu strategis ini, kita dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Bab ini akan menyajikan gambaran lengkap mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasinya.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki tujuan yang sangat penting dan strategis. Perumusan permasalahan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan di daerah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi aktual, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada secara lebih tepat.

Identifikasi permasalahan membantu dalam menentukan masalah yang paling mendesak dan memerlukan perhatian segera. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sumber daya dan upaya pada isu-isu yang memiliki dampak terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk menyediakan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan.

Penetapan prioritas permasalahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa upaya pembangunan difokuskan pada isu-isu yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah. Berdasarkan analisis

mendalam terhadap kondisi daerah, berikut adalah permasalahan prioritas yang menjadi fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Pinrang :

1. **Ketimpangan dan Keterbatasan dalam Layanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Kabupaten Pinrang, capaian indikator kesehatan menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi, salah satunya ditandai dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 74,47 tahun pada tahun 2023 menjadi 74,63 tahun pada tahun 2024. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sejenis seperti Sidrap, Enrekang, dan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Berbagai permasalahan struktural dan kultural masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sektor kesehatan.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah stunting, di mana prevalensinya masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 17,60%, namun pada tahun 2024 justru mengalami peningkatan menjadi 22,20%. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Penyebabnya beragam, mulai dari akses layanan kesehatan yang belum menjangkau daerah pedalaman, alokasi anggaran yang belum tepat sasaran, hingga tingginya angka pernikahan usia dini dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi.

Selain stunting, Kabupaten Pinrang juga menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan daya tampung rumah sakit. Jumlah ruang rawat inap yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, terutama di tengah peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Kondisi ini menyebabkan pasien harus mengantre dalam waktu lama, bahkan dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah Angka Kematian Ibu (AKI), yang merupakan indikator krusial dalam menilai kualitas sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selama lima tahun

terakhir, AKI di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2023, AKI sempat menurun menjadi 129 per 100.000 kelahiran hidup, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 82,64 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan maternal, namun tantangan masih tetap ada terutama terkait penanganan komplikasi kehamilan, akses terhadap fasilitas bersalin yang memadai, serta kesiapan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Selain itu, tingginya angka pernikahan usia dini juga turut meningkatkan risiko komplikasi dan kematian ibu pada usia kehamilan yang belum matang.

Di sisi lain, meningkatnya beban penyakit baik yang menular maupun tidak menular juga menjadi perhatian. Fasilitas kesehatan yang ada belum sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan untuk deteksi dini, menyebabkan banyak kasus penyakit terlambat ditangani. Disamping itu, pola hidup tidak sehat masyarakat seperti merokok, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik, serta minimnya kesadaran terhadap kebersihan dan sanitasi, turut memperburuk kondisi ini. Penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung semakin meningkat, sementara penyakit menular masih berpotensi menyebar di lingkungan yang tidak sehat.

Keseluruhan tantangan ini menuntut pendekatan holistik dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan daerah. Diperlukan strategi yang mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan, edukasi masyarakat, penguatan regulasi sosial seperti penanggulangan pernikahan dini, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Tantangan dan Kesenjangan Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas sumber daya manusia dan menjadi indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Kabupaten Pinrang mencatat capaian rata-rata lama sekolah sebesar 8,53 tahun pada tahun 2024, yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sidrap (8,21 tahun), namun masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Enrekang (9,11 tahun) dan Provinsi Sulawesi

Selatan (8,86 tahun). Sementara itu, harapan lama sekolah di Kabupaten Pinrang mencapai 13,28 tahun, lebih baik dari Sidrap (13,03 tahun), namun masih tertinggal dibanding Enrekang (13,88 tahun) dan Sulawesi Selatan (13,55 tahun).

Meskipun demikian, Indeks literasi dan numerasi pada tingkat SD dan SMP juga menunjukkan adanya ruang perbaikan, dengan indeks literasi SD sebesar 54 dan SMP 65,69, serta indeks numerasi SD 49,73 dan SMP 59,87 pada tahun 2024.

Berbagai tantangan menghambat peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Pertama, kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil masih menjadi persoalan serius. Sekolah di daerah ini umumnya kekurangan fasilitas memadai, akses terhadap teknologi modern seperti komputer dan internet sangat terbatas, serta minimnya sumber belajar seperti buku teks dan alat peraga yang memadai.

Kedua, kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang membatasi kesempatan anak-anak untuk terus bersekolah. Beban biaya langsung seperti seragam, buku, alat tulis, serta biaya tidak langsung seperti transportasi dan makan siang menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh keluarga berpendapatan rendah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta kurangnya akses informasi tentang program pendidikan dan beasiswa turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak anak yang memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan.

Ketiga, kualitas tenaga pendidik di wilayah terpencil masih jauh dari harapan. Terdapat kesenjangan signifikan dalam kualifikasi dan keterampilan antara guru di perkotaan dan daerah terpencil. Banyak guru di daerah pedalaman yang kurang terlatih dan belum memiliki sertifikasi yang memadai, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan berdampak pada hasil belajar siswa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang meliputi peningkatan infrastruktur dan sarana pendidikan di wilayah terpencil, program bantuan ekonomi dan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas dan pelatihan

tenaga pendidik. Upaya ini penting agar Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

3. Masih tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Pinrang meskipun potensi sumber daya alamnya cukup melimpah. Pada tahun 2024, sekitar 8,55% masyarakat Kabupaten Pinrang masih hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 414.198,-, menunjukkan penurunan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8,90% dengan garis kemiskinan Rp 400.091,-. Jika dibandingkan dengan kabupaten sejenis, persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sidrap yang memiliki 5,02%, namun lebih rendah dibanding Kabupaten Enrekang dengan angka kemiskinan 11,25%. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 0,42%, lebih rendah dari Sidrap (0,66%) dan Enrekang (1,24%).

Tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan meliputi ketidakmerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan kesenjangan kesempatan dan akses ekonomi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial belum optimal, terutama terkait validitas dan cakupan data penerima bantuan. Banyak keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak terdaftar secara tepat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akibat keterlambatan pengintegrasian data dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kondisi ini menyebabkan bantuan sosial tidak tersalurkan dengan tepat waktu dan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, keterbatasan kuota dalam program pelatihan keterampilan menjadi hambatan bagi anak putus sekolah dan individu rentan untuk memperoleh keterampilan yang dapat membuka peluang kerja dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Terbatasnya akses ini memperparah masalah pengangguran dan ketergantungan sosial.

Fenomena gelandangan dan pengemis dari luar daerah juga menambah kompleksitas permasalahan sosial di Kabupaten Pinrang. Mereka sering kali tidak memiliki tempat tinggal tetap maupun akses ke layanan sosial yang memadai, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan khusus agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan beban sosial lebih lanjut bagi masyarakat setempat.

Menghadapi tantangan ini, Kabupaten Pinrang perlu memperkuat sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial yang akurat dan tepat sasaran, memperluas akses pelatihan keterampilan yang inklusif, serta melakukan pendekatan terpadu antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4. Ketimpangan Keterampilan dan Terbatasnya Layanan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Di Kabupaten Pinrang, pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 3,12%, menunjukkan penurunan sebesar 0,52% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 3,64%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran. Namun, angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sidrap yang mencatat TPT sebesar 3,02%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang pada Agustus 2024 mencapai 64,17%, naik 3,66% dibandingkan Agustus 2023. Dari total 323,18 ribu penduduk usia kerja, sebanyak 207,38 ribu orang tergolong dalam angkatan kerja. Namun, terdapat catatan penting bahwa 33,52% dari penduduk yang bekerja masih berpendidikan maksimal SD ke bawah, yang menggambarkan tantangan serius dalam hal kualitas tenaga kerja.

Beberapa tantangan utama dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pinrang meliputi minimnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Meskipun TPT menunjukkan tren menurun, penciptaan

lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan masih menjadi persoalan yang perlu perhatian serius.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan antar kerja, seperti sistem informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta layanan penempatan kerja, menjadi kendala dalam mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Sistem yang belum optimal ini menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan serapan tenaga kerja secara lebih merata.

Untuk itu, solusi jangka panjang seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri, penguatan pelayanan antar kerja, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja baru sangat diperlukan demi menurunkan pengangguran secara berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

5. Kemajuan Gender yang belum sepenuhnya Inklusif

Peningkatan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa upaya menuju kesetaraan gender telah membuahkan hasil positif. IPG Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 mencapai 95,61%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, selisih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan terus menyempit, mencerminkan perkembangan positif dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan signifikan yang mencerminkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2023 tercatat hanya 39,92%, jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 82,02%. Ketimpangan ini menunjukkan masih terbatasnya ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam sektor ekonomi.

Selain itu, ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan yang masih terjadi meskipun memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang setara juga menjadi persoalan serius. Perempuan sering kali

menerima kompensasi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, mencerminkan adanya diskriminasi berbasis gender dalam dunia kerja.

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan juga masih rendah, dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan, serta dominasi laki-laki dalam struktur organisasi formal. Lebih jauh lagi, norma dan stereotipe sosial yang mengakar seperti anggapan bahwa perempuan harus mengutamakan urusan domestic membatasi ruang gerak mereka di sektor publik dan memperkuat ketimpangan gender.

Diskriminasi berbasis usia dan jenis kelamin juga menjadi tantangan tersendiri. Perempuan muda kerap dianggap belum kompeten, sementara perempuan yang lebih tua sering dianggap kurang produktif. Hal ini menciptakan hambatan ganda bagi perempuan untuk berkembang dalam karier maupun dalam peran sosial yang lebih luas.

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata, Kabupaten Pinrang perlu memperkuat kebijakan afirmatif dalam pemberdayaan perempuan, menghapus stereotipe gender, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam semua sektor pembangunan.

6. Globalisasi dan Krisis identitas Budaya Lokal

Transformasi budaya yang terjadi di Kabupaten Pinrang merupakan sebuah dinamika sosial yang tak terhindarkan dalam era globalisasi. Globalisasi sebagai kekuatan dominan telah mendorong integrasi internasional melalui pertukaran informasi, gaya hidup, nilai-nilai, hingga budaya populer dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Dampaknya terasa langsung pada kehidupan masyarakat lokal, khususnya dalam bentuk pergeseran nilai, norma, dan pola hidup yang mulai menjauh dari akar budayanya sendiri.

Budaya lokal yang dahulu menjadi identitas dan kebanggaan kini berada dalam tekanan besar. Munculnya budaya dominan dari luar seringkali menciptakan homogenisasi nilai dan gaya hidup, yang secara perlahan menggantikan keunikan lokal. Generasi muda menjadi kelompok yang paling terpengaruh, karena paparan terhadap media global menjadikan budaya luar lebih menarik dan relevan dibandingkan

warisan leluhur mereka sendiri. Hal ini menimbulkan gejala krisis identitas, di mana nilai-nilai budaya tradisional mulai ditinggalkan dan kehilangan tempat dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya itu, eksploitasi budaya lokal oleh sektor pariwisata dan industri hiburan demi keuntungan komersial juga menjadi ancaman tersendiri. Praktik ini seringkali mengubah esensi dan makna budaya menjadi sekadar tontonan, terdistorsi dari konteks aslinya, bahkan dipresentasikan secara stereotipikal.

Globalisasi juga berdampak pada keberlangsungan bahasa dan tradisi lokal. Dominasi bahasa global seperti Bahasa Inggris perlahan menggeser penggunaan bahasa daerah, menyebabkan kepunahan pengetahuan dan praktik budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Urbanisasi dan migrasi turut mempercepat perubahan sosial yang mengikis struktur tradisional masyarakat dan melemahkan solidaritas komunitas, yang selama ini menjadi benteng pelestarian budaya.

Dengan kondisi ini, transformasi budaya yang terjadi bukan hanya membawa perubahan, tetapi juga mengundang tantangan serius terkait pelestarian identitas lokal. Untuk menjaga budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi, perlu dilakukan penguatan edukasi budaya sejak dini melalui kurikulum sekolah, pembangunan pusat kebudayaan sebagai wadah pelatihan dan ekspresi seni, serta pelatihan digital agar generasi muda dapat mempromosikan budaya melalui media sosial.

7. Belum Optimalnya Hilirisasi Industri dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Pinrang mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada triwulan III tahun 2024, yaitu sebesar 5,45%. Angka ini menempatkan Pinrang di posisi yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten setara di sekitarnya seperti Sidrap yang hanya mencapai 3,15% dan Enrekang sebesar 3,98%. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peluang positif bagi pembangunan ekonomi daerah, namun di balik capaian tersebut, terdapat beragam tantangan yang menghambat optimalisasi produktivitas dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor primer masih mendominasi distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang dengan kontribusi signifikan mencapai 45,27%. Sektor ini mencakup subsektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Namun, potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut belum berhasil diolah secara maksimal menjadi produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Proses hilirisasi industri pengolahan, yang berperan penting dalam menambah nilai produk dan menciptakan lapangan kerja, menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Kurangnya minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di bidang industri pengolahan menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang industri pengolahan juga masih belum sesuai dengan tuntutan pasar, sementara mesin dan alat produksi yang digunakan relatif tertinggal dan kurang produktif. Ketiadaan kawasan industri yang representatif dan terorganisir turut mengurangi daya tarik investasi, sehingga potensi ekonomi lokal sulit untuk berkembang secara optimal.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga belum berkembang sesuai harapan. Kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Pinrang sebenarnya menjadi modal penting dalam mengembangkan berbagai bidang ekonomi kreatif seperti seni, kerajinan, kuliner, dan pariwisata. Namun, sejumlah tantangan nyata menghambat kemajuan sektor ini. Rendahnya minat masyarakat terhadap industri kerajinan dipengaruhi oleh persepsi pasar yang kurang menjanjikan, serta kebutuhan kompetensi khusus yang belum banyak dimiliki. Pelaku ekonomi kreatif juga masih cenderung beroperasi secara individual tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang kuat, sehingga mengurangi efektivitas pengembangan usaha dan pemasaran. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang pameran dan panggung pertunjukan membatasi ruang ekspresi dan pengembangan bakat kreatif masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal pun masih menghadapi

berbagai kendala signifikan. Banyak UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang memadai karena keterbatasan tenaga pendidik dan pelatih yang tersedia. Program pembinaan yang ada seringkali tidak mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya. Minimnya pemahaman dan keterampilan digital menjadi penghambat bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif dan global.

Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi andalan Kabupaten Pinrang juga masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks terkait produktivitas dan daya saing. Infrastruktur dan sarana prasarana yang belum memadai menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam meningkatkan hasil produksi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian ke area perumahan dan komersial semakin mengurangi luas lahan produktif yang dapat dikelola secara optimal. Para pelaku usaha perikanan menghadapi kesulitan besar dalam mengakses modal usaha karena persyaratan yang ketat dan kurangnya bantuan yang memadai. Kekurangan inovasi dan kreativitas dalam industri pengolahan hasil pertanian juga menghambat nilai tambah produk yang dihasilkan. Selain itu, kesehatan ternak yang kurang terjamin akibat minimnya operasional vaksinasi dan penyediaan obat-obatan menjadi ancaman bagi keberlangsungan produksi ternak berkualitas. Hal ini diperparah dengan belum adanya regulasi pengelolaan Instalasi Pembibitan Ternak (IPT) Malimpung yang terstruktur, sehingga proses pembibitan ternak belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan beragam tantangan yang ada, jelas bahwa Kabupaten Pinrang memerlukan langkah strategis dan komprehensif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses teknologi dan modal, penguatan infrastruktur, serta pembentukan regulasi yang mendukung akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.

8. Belum Optimalnya Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan

Infrastruktur dan kewilayahan merupakan pondasi utama dalam menunjang perkembangan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Pinrang, meskipun memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai, pengembangan infrastruktur masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kondisi topografi pegunungan yang mendominasi wilayah ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Pinrang memang menunjukkan peningkatan dari 1,81 pada tahun 2022 menjadi 2,18 pada tahun 2023, namun hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan infrastruktur yang optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Salah satu tantangan utama terlihat pada tingkat kemantapan jalan, di mana dari total 653,83 km ruas jalan kabupaten, hanya sekitar 67,72% yang dalam kondisi baik hingga sedang, sementara lebih dari 100 km jalan masih mengalami kerusakan berat. Kondisi ini jelas menghambat kelancaran transportasi dan distribusi barang maupun jasa, yang pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, jaringan irigasi yang melayani sekitar 60% dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten juga masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat mendukung produktivitas pertanian secara optimal. Ketersediaan air bersih juga menjadi permasalahan penting, di mana sumber air baku yang kurang mencukupi dan sarana perpipaan yang belum merata menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan.

Selain aspek fisik, aspek sumber daya manusia di sektor penyediaan air bersih juga masih kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Di sisi lain, meskipun jumlah desa mandiri di Kabupaten Pinrang meningkat dari 5 desa pada tahun 2022 menjadi 22 desa pada akhir 2023, masih terdapat 8 desa yang masuk

dalam kategori tertinggal. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kewilayahan belum merata dan membutuhkan perhatian khusus agar seluruh wilayah dapat berkembang secara berimbang.

Secara keseluruhan, belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan kewilayahan di Kabupaten Pinrang menjadi kendala yang perlu segera diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok daerah.

9. Belum Maksimalnya Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

Kabupaten Pinrang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keindahan alam yang memukau. Namun, upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang belum terselesaikan dengan baik.

Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan sampah yang belum efektif. Infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem pengumpulan yang efisien masih sangat terbatas. Akibatnya, sampah sering menumpuk di berbagai lokasi, sementara fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan kebiasaan lama yang sulit diubah menjadi faktor utama permasalahan ini. Selain itu, status kepemilikan TPA yang belum jelas dan belum menjadi aset resmi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup menghambat pengelolaan dan pengembangan TPA secara maksimal, serta menyulitkan alokasi anggaran yang memadai.

Permasalahan kedua adalah tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari aktivitas pertanian dan sektor transportasi serta industri. Praktik pembakaran lahan oleh petani yang masih umum digunakan untuk membersihkan lahan pertanian menjadi sumber utama pelepasan karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH_4) ke atmosfer, yang memperburuk pemanasan global. Selain itu, kendaraan bermotor yang tidak terawat dan kurangnya pengujian emisi secara rutin menyebabkan polusi udara meningkat, sementara industri lokal yang belum

menggunakan teknologi pengendalian emisi canggih juga berkontribusi pada meningkatnya emisi GRK di daerah ini.

Permasalahan ketiga adalah sarana dan prasarana penanganan bencana kebakaran yang masih jauh dari memadai. Ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran yang terbatas dan kesiapsiagaan penanganan kebakaran yang belum optimal meningkatkan risiko kerusakan yang lebih luas saat terjadi bencana kebakaran.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Selain itu, penerapan pertanian dan industri ramah lingkungan harus diperkuat dengan pengawasan emisi yang ketat. Peningkatan sarana dan kapasitas pemadam kebakaran juga penting untuk kesiapsiagaan bencana. Langkah terpadu ini akan membantu menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

10. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan berbagai upaya positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Pertama, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 mencapai angka 70,97 dengan predikat BB, pencapaian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi secara lebih signifikan. Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya maksimal dapat menghambat proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 mencatat nilai 64,93, yang menggambarkan masih adanya kendala dalam integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan sumber

daya dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Selanjutnya, walaupun Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Pinrang memperoleh skor 4,40 dan berada dalam kategori A-, layanan publik masih menghadapi tantangan dalam peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana, serta optimalisasi sistem informasi pelayanan. Hal ini menjadi perhatian penting agar pelayanan publik dapat lebih cepat, mudah, dan memuaskan bagi masyarakat.

Terakhir, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pinrang juga menunjukkan peningkatan dari indeks 2,79 pada tahun 2023 menjadi 3,49 pada tahun 2024 dengan predikat "Baik." Namun, pengembangan SPBE masih memerlukan percepatan agar penerapan teknologi informasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja melalui digitalisasi harus dipercepat untuk meningkatkan integrasi dan transparansi anggaran. Investasi pada infrastruktur pelayanan publik dan inovasi teknologi informasi harus menjadi prioritas agar pelayanan semakin responsif dan efektif. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan implementasi tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Analisis isu - isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena itu sangat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangkapanjang bagi berkelanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan

penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

1. Isu Global

1.1 Perubahan Iklim

Isu utama lingkungan secara global yaitu *triple planetary crisis*, Tiga krisis planet mengacu pada tiga masalah utama, yang saling terkait, yang saat ini dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya alam (keanekaragaman hayati), serta polusi dan limbah. Ironisnya konsekuensi paling parah akan dirasakan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya bukanlah penyebab terjadinya krisis.

Perubahan iklim (*Climate change*) adalah masalah paling mendesak yang dihadapi umat manusia saat ini. Sederhananya, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dalam jangka panjang akan sepenuhnya mengubah ekosistem yang mendukung kehidupan di planet ini. Aktivitas manusia adalah pendorong utama perubahan iklim. Hampir semua yang manusia lakukan menyebabkan pelepasan emisi. Namun, penggunaan energi, industri, transportasi, bangunan, dan pertanian adalah penyebab utama pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini sudah terwujud melalui peningkatan intensitas dan parahnya kekeringan, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai bencana dan penurunan keanekaragaman hayati.

Polusi (*Pollution*), mengacu pada berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air, udara dan tanah serta sampah. Namun pencemaran udara (air Pollution) menjadi penyebab terbesar penyakit dan kematian dini di dunia, dengan lebih dari tujuh juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun karena polusi. Hebatnya, sembilan dari sepuluh orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman WHO. Polusi disebabkan oleh segala sesuatu mulai dari lalu lintas dan pabrik hingga kebakaran hutan, gunung berapi, dan jamur. Penyebab polusi lainnya adalah polusi udara rumah tangga dalam ruangan dari memasak dengan bahan bakar dan teknologi yang mencemari, yang

secara komulatif menyebabkan sekitar 3,8 juta kematian pada tahun 2016 saja.

Kehilangan keanekaragaman hayati (*Biodiversity loss*) mengacu pada terjadinya penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati, yang meliputi hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya. Alasan hilangnya keanekaragaman hayati mencakup segala hal, dimulai dari penangkapan ikan yang berlebihan hingga hilangnya habitat (misalnya penggundulan hutan untuk membuka jalan bagi pembangunan) hingga penggurunan karena perubahan iklim. Keanekaragaman hayati adalah dasar untuk segala sesuatu di planet ini – karena pada akhirnya kita semua saling terkait. Hilangnya keanekaragaman hayati berdampak pada pasokan makanan dan akses ke air bersih – tanpanya kita tidak memiliki masa depan di planet kita.

1. Demografi Global

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Perubahan struktur umur penduduk dunia berdampak terhadap pola produksi dan konsumsi global. Revolusi industry akan semakin cepat sebagai respon atas masalah kelangkaan tenaga kerja di negara maju. PBB memproyeksikan jumlah penduduk usia produktif akan turun secara signifikan. Aktivitas produksi akan bergeser ke negara berkembang yang memiliki banyak tenaga kerja. Negara maju kemungkinan membuka keran migrasi masuk untuk memenuhi kebutuhan kerja.

2. Perdagangan Internasional

Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut. Ekspansi

perdagangan global, Indonesia dapat sepenuhnya mewujudkan potensi perdagangan untuk pembangunan ekonomi nasional ke depan. Indonesia memiliki ruang yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor, yang terkonsentrasi pada industri padat sumber daya, dengan cara mendiversifikasi ekonominya. Potensi di sektor jasa sebagian besar juga masih belum dimanfaatkan. Sejarah, lokasi, demografi, dan kekayaan sumber daya Indonesia mempersiapkannya untuk mencapai potensi perdagangan internasional yang unggul

3. Perkembangan Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices,* otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence.* Teknologi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan menghasilkan tingkat efisiensi dan efektifitas dengan memberikan dampak yang besar tetapi dengan tenaga yang minim. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat setiap harinya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dapat kita lihat perkembangan teknologi di mulai dari adanya era teknologi komunikasi dan informasi, era teknologi industry, hingga era teknologi pertanian. Pada era saat ini penguasaan teknologi menjadi salah satu alasan kemajuan suatu negara. Negara dapat dikatakan maju apabila memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi sangat dibutuhkan pada setiap negara. Perkembangan teknologi ini sangat mengubah kebiasaan manusia. Jika sebelumnya kita mencari informasi hanya dapat dilakukan dengan membaca kamus atau buku, kini mencari informasi dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan jaringan internet. Jenis-jenis pekerjaan juga tidak kalah untuk melakukan perubahan, yang sebelumnya harus menuntut kemampuan fisik sekarang beberapa jenis pekerjaan dapat digantikan dengan mesin otomatis.

2. Isu Strategis Nasional

2.1 Bonus Demografi

Bonus demografi sebagai bagian dari transisi demografi menurut World Bank dikelompokkan ke dalam tipologi bonus demografi diantaranya pasca bonus demografi, akhir bonus demografi, awal bonus demografi, dan pra bonus demografi. Indonesia setelah pencanangan Visi Indonesia Emas 2045. Bonus Demografi atau demographic bonus yang menunjukkan penduduk usia kerja atau produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

1. Pembangunan belum berkelanjutan

Guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70% daerah terbangun dan 30% daerah terbuka hijau serta 10% daerah terbuka hijau untuk lingkungan

permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70% merupakan kawasan lindung dan 30% Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah(IKD) penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparatur daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80%, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70%, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80%, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80%. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan .Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:(i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) Availability, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk

mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) Acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80% kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sum berdaya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang dan bersifat alami

ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dunia dan seluruh umat manusia selain masalah polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati atau sering dikenal dengan istilah Triple Planetary Crises. Fenomena perubahan iklim selalu diikuti dengan kerusakan lingkungan, bencana hidrometeorologi dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan data UNEP, bencana akibat perubahan iklim telah meningkat 5 kali dalam 50 tahun terakhir dan telah mengakibatkan 21,5 juta orang mengungsi setiap tahunnya akibat bencana terkait perubahan iklim (banjir, kekeringan dan badai). Oleh sebab itu perlu upaya bersama dari seluruh negara dan masyarakat dunia untuk mengubah pola hidup dan lebih bijak dalam menggunakan sumber daya dan lebih mengedepankan aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan dan meminimalkan terjadinya pemborosan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.Peran strategis yang dapat dilakukan dalam Upaya menghadapi isu perubahan iklim, yaitu: (i) Pengelolaan sampah dan limbah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca; (ii) Pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi; (iii) Adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air yang diintegrasikan dengan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim; (iv) Rehabilitasi lingkungan melalui penanaman vegetasi untuk menghindari longsor dan polusi udara; (v) Pengendalian banjir perkabupatenan melalui pembuatan sumur resapan; dan (vi) Pengurangan efek gas rumah kaca dengan cara hemat energi, tidak konsumtif, mengelola sampah dan efisiensi penggunaan transportasi.

3. Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi,

dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini. Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran. Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa

dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

4. IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan termasuk Kabupaten Pinrang yang bertetangga langsung dengan Kota Pare Pare yang mempunyai Pelabuhan yakni pelabuhan Nusantara Pare Pare yang merupakan akses langsung ke pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Timur belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pembangunan di Pinrang antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). Peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan isual arts, kuliner).

3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Global

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel- variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Suku

Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, dan Ekspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan) mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan.

Tingkat stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan relatif rendah, terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

2. Pemanfaatan Bonus Demografi

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan. Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah

penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

3. Pengelolaan Pusat – Pusat Pertumbuhan

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota

Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah

berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

4. **Kontribusi Sulawesi Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional**

Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera. Meningkatnya kebutuhan pangan sebagai dampak pertumbuhan penduduk menjadi tantangan Sulawesi Selatan dalam menguatkan ketahanan pangan daerah. Selain itu kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana yg dapat merusak lahan pertanian serta tingginya alih fungsi lahan pertanian, yang diperparah dengan menurunnya kualitas dan produktifitas lahan, serta infrastruktur pertanian yang kurang

memadai, juga berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi dan berkualitas di masyarakat. Posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang perlu dikuatkan ditunjukkan oleh kondisi Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di tahun 2024, masih berada di urutan ke 4 dengan IKP tertinggi dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan nilai 83,82 persen dibawah Provinsi Bali (88,23), Provinsi Jawa Tengah (85,34), dan DKI Jakarta (85,13). Selain itu, jumlah petani skala kecil di Sulawesi Selatan mencapai 556.446 unit atau 53,35 persen dari total petani yang ada atau dari 100 petani 53 diantaranya petani skala keci, Sulsel peringkat ke 28 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia. Selain ketahanan pangan, posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan seyogyanya memberi dampak positif terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan yang mencerminkan rendahnya akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar penduduk. Distribusi pangan yang tidak merata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Masalah utama yang menyebabkan ketidakmerataan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai, rantai pasok yang masih kompleks, serta kurangnya koordinasi antara daerah yang berdampak pada fluktuasi harga pangan, dan pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi pangan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan ke depan, perlu diperhatikan upaya peningkatan akses terhadap sarana pangan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah sulit akses. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk mengoptimalkan diversifikasi pangan dan meningkatkan literasi gizi masyarakat, agar masyarakat lebih menyadari pentingnya mengonsumsi beragam jenis pangan yang lebih bergizi dan menyehatkan. Perubahan iklim dan kejadian bencana yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan

dan meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi sumber pangan lokal. Olehnya itu, penting untuk meningkatkan pendampingan dan pendidikan petani tentang pertanian berkelanjutan dan menjaga produktifitas lahan yang ramah lingkungan.

5. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam dalam suatu industri manufaktur dan mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam beragam dan tersebar pada seluruh wilayah. Sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai wilayah penyangga IKN dapat menjadi modal utama untuk menjamin/menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi serta dukungan pembinaan/ permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan multiplayer effect melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

6. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip kepemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, kuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan publik semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya. Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Kapasitas fiskal ini mencerminkan kekuatan dan kesehatan keuangan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya keuangannya, yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan, besaran belanja yang harus ditanggung, tingkat utang, dan kondisi ekonomi secara umum, baik di tingkat nasional maupun

regional. Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, baik oleh salah faktor ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah juga masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Selain itu, inflasi yang belum terkendali, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, belum optimalnya peningkatan kontribusi pajak daerah, dan keterbatasan digitalisasi hampir pada semua sektor juga mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal Sulawesi Selatan.

7. **Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Ekosistem Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)**

   Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital *dan kecerdasan buatan (artificial inteligent/AI)* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian

presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantang dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

8. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi/pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pemerataan hingga daerah 3T, perbaikan gizi masyarakat berbasis siklus hidup, pemenuhan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas

hidup perempuan, anak dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak termasuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

9. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyediaan air, jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan banjir serta jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, jasa lingkungan penyediaan air di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kategori kelas rendah (sangat rendah-rendah) telah meliputi 65,32% dari total luas wilayah. Untuk jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor untuk kategori kelas rendah seluas 35,32% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaran kategori rendah terluas adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu sekitar 4,89% dari seluruh luasan wilayah kabupatennya. Untuk jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir untuk kategori rendah (rendah-sangat rendah) seluas 67,1% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaran terutama di kabupaten Bone, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara dan Wajo. Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati dengan kategori kelas rendah (rendah-sangat rendah) sebarannya mencakup 60,98% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan jika kemampuan daya dukung untuk jasa-jasa lingkungan tersebut telah membutuhkan upaya-upaya perbaikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya dukungnya. Untuk daya dukung air, beberapa wilayah kabupaten/kota telah menunjukkan angka negatif yang berarti kebutuhan air di wilayah tersebut lebih tinggi dari ketersediaannya. Walaupun ada juga kabupaten yang memiliki ketersediaan air melimpah. Dari hasil analisis hingga tahun 2029, kabupaten yang tingkat kebutuhan airnya lebih tinggi dari ketersediaannya antara

lain adalah Kota Makassar, Parepare dan Palopo serta Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidenreng Rappang. Data ini menunjukkan bahwa di tahun 2029, tiga kota dan beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mampu memenuhi kebutuhan air (domestik dan lahan) atau telah melewati ambang batas. Untuk itu isu terkait daya dukung lingkungan terutama daya dukung air memerlukan perhatian yang serius dan menjadi prioritas. Terutama karena wilayahwilayah tersebut sebagian besar merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memiliki jumlah penduduk terbesar. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan menurunnya daya tampung yang diindikasikan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sampah dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan

10. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman global yang dikenal dengan Triple Planetary Crisis yaitu perubahan iklim, berkurangnya biodiversity serta penumpukan limbah dan polusi. Perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sudah menjadi perhatian serius hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim seperti, cuaca ekstrem, kenaikan suhu dan permukaan laut, meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir, meningkatnya kegagalan panen dan

bencana kelaparan serta meningkatnya risiko penyakit. Indonesia termasuk Sulawesi Selatan juga terdampak secara nyata dan signifikan pada kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim dapat mengancam posisi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi pangan dan mengganggu suplai pangan baik skala domestik, regional dan internasional. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi pantai dan bencana hidrometeorologi lainnya juga meningkatkan kerentanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan pula terhadap sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dampak ini dapat bersifat langsung, seperti kenaikan suhu air laut dan perubahan pola arus, maupun tidak langsung, seperti peningkatan frekuensi badai dandegradasi ekosistem pesisir. Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif dari pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan risiko tersebut. Oleh karena itu penguatan kapasitas pada level lokal/komunitas, kabupaten/kota dan provinsi dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

4. Isu Strategis Daerah

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 46 menjelaskan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah, pada proses Laporan Akhir Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS – RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga di perlukan identifikasi dilakukan melalui tahapan: 1) pra-pelingkupan, yaitu proses mengindentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan; 2) Pelingkupan, yaitu proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun hasil dari kajian tersebut mendapatkan beberapa hasil isu isu pokok dari berbagai OPD/Bidang antara lain :

Tabel 2.166
Isu Pokok Menurut OPD / Bidang hasil Identifikasi
Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1	Potensi peningkatan timbulan sampah domesik dan industri sementara kapasitas penanganan dan pengelolaan yang masih terbatas
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	2	Pembangunan dan pengelolaan air minum yang aman dan berkelanjutan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Penerbitan Kebijakan terkait Pendidikan Lingkungan Hidup seperti Proyek "Gaya Hidup Berkelanjutan" dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penguatan Kerjasama Mewujudkan Sekolah Adiwiyata
	5	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	6	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, yang mengancam ketersediaan lahan untuk memproduksi ketersediaan pangan
	7	Dampak fenomena Iklim (Musim Hujan/Musim Kemarau) yang ekstrim, yang dapat mengganggu peningkatan hasil produksi pertanian
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan kegiatan manajemen koperasi yang profesional dan Berorientasi pasar
	9	Peningkatan standarisasi produk-produk hasil produksi UMKM melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran kemitraaan, pemasaran, permodalan yang berbasis IT
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	10	Dampak Pengelolaan Sampah yang kurang maksimal di Pasar Rakyat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, mendatangkan bau yang tidak sedap dan dapat mengakibatkan berbagai penyakit serta mengganggu masyarakat yang ada disekitarnya

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
	11	Penanganan Drainase di area pasar rakyat sangat penting untuk mengurangi genangan air yang dapat mengakibatkan banjir sekaligus mengatuskan kelebihan air hujan, sehingga para pengunjung nyaman dalam melakukan aktifitas yang berada di pasar
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12	Penanganan & Pengelolaan Sampah di Lokasi Wisata
	13	Tatakelola air pada lokasi destinasi wisata yang masih terbatas, termasuk dranase
Dinas Perhubungan dan Pertanahan	14	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan transportasi darat dan lalu lintas: Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi
Dinas Sosial	15	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	Peningkatan upaya mitigasi bencana dan kesiapsigagaan, pengurangan risiko bencana.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	*Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi:* Melaksanakan dan penyediaan tenaga kerja trampil dan berkompeten
	18	*Pengembangan kawasan transmigrasi:* Pemetaan, Pembangunan dan penanggulangan kemiskinan warga transmigrasi
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Pinrang	19	Pengendalian daya rusak air melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Jaringan Pengairan Lainnya.

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Desa Tertinggal: Kaseralau, dan Watang Kassa
Dinas Perikanan	21	Adanya degradasi lingkungan, perubahan musim, iklim dan cuaca ekstrim menyebabkan menurunnya produksi hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap
Dinas Ketahanan Pangan	22	Pembangunan lumbung pangan masyarakat dalam hal ini RMU (*Rice Milling Unit*) yang tidak ramah lingkungan dalam pengelolaan hasil pertanian terutama gabah sehingga dapat mencemari lingkungan
Sekretariat Daerah	23	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang klembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta perencanaan, reformasi birokrasi dan kinerja.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	24	Pengembangan Sistem Catatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang tinggi
Dinas Kesehatan	25	Penyediaan Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
SATPOL PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26	Kurang Optimalnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
	27	Peningkatan Penanganan dan Pencegahan Kebakaran

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	Investasi berkelanjutan adalah proses investasi yang mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, mencakup Environment (lingkungan hidup), Social, dan Governance (ESG) untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan kehidupan di Bumi.
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	29	Perbedaan peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti sosialisasi, budaya yang berlaku serta kebiasaan yang ada
Dinas Peternakan dan Perkebunan	30	Kurang Optimalnya Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan Berkelanjutan
	31	Anomaly Iklim Bencana dan Serangan OPT Komoditi Perkebunan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	Profesionalisme ASN: Terwujudnya ASN yang professional, kompoten dan kompetitif; Meningkatnya Kualitas, Kompetensi dan Profesionalisme ASN
Inspektorat	33	Harapan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	34	- Pembangunan jaringan internet di daerah terpencil. -Penyediaan wifi gratis di tempat pelayanan publik
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35	Implementasi e-goverment dalam rangka peningkatan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

Institusi / OPD	Nomor Isu	Isu Pokok / Utama Sesuai Bidang
Sekretariat DPRD	36	Belum Optimalnya Ketersediaan sarana dan Prasarana serta Pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat

Dari kumpulan 36 (tiga puluh enam) isu hasil identifikasi isu isu pokok yang telah dikelompokkan menurut OPD/Bidang, berikutnya akan melalui tahap penapisan guna menghasilkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan (Isu TPB/SDGs untuk periode jangka menengah yang akan datang. Hasil penapisan akan mengagregasi isu-isu TPB tersebut kedalam isu-isu strategis setelah melihat lebih dalam keterkaitan antar isu pokok institusional/bidang dengan isu-isu TPB/SDGs.

Adapun **Isu Strategis KLHS** Hasil Penapisan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melahirkan 9 (Sembilan) isu strategis diantaranya :

1. **Masih terbatasnya upaya-upaya yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.**

   Beberapa permasalahan pokok pada OPD/bidang mengindikasikan bahwa upaya upaya Mitigasi terhadap perubahan iklim masih kurang optimal terutama pada sektor pertanian. Gejala perubahan iklim yang dilaporkan antara lain terjadinya perubahan musim yang ekstrim yang kemudian mempengaruhi hasil produksi pertanian. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Pinrang terlihat banyaknya bulan basah pada Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 5 dan 9 bulan basah, kemudian pada Tahun 2017 terdapat 3 bulan basah; sementara antara Tahun 2018-2020 masing-masing hanya terdapat 1 (satu) bulan basah pertahun; di Tahun 2021 banyak bulan basah kembali meningkat menjadi 4 bulan basah; dan pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 2

bulan basah.

2. **Potensi limbah domestik dan limbah B3 yang mengalami peningkatan sementara kapasitas pengendalian dan pengelolaan persampahan masih terbatas.**

Isu strategis berikut berkaitan dengan potensi peningkatan timbulan sampah domesik dan industri sementara kapasitas penanganan dan pengelolaan yang masih terbatas dalam daerah. Dampak Pengelolaan Sampah yang kurang maksimal juga ditemukan di area Pasar Rakyat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap serta potensi timbulnya berbagai penyakit yang dapat secara langsung mengganggu masyarakat yang ada disekitarnya. Keluah yang sama juga dilihat pada beberapa lokasi destinasi wisata, dimana penanganan dan pengolahan sampah pada lokasi tersebut masih cukup terbatas.

Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggng jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010. Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat adalah (1) kegiatan pewadahan dan pemilihan sampah di sumber, (2) pengelolaan sampah skala masyarakat di sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah permukiman yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan Kabupaten Pinrang, berupa (1) penampungan sampah berupa TPS, (2) pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (3) pengelolaan sampah skala kota, dan (4) pemrosesan akhir sampah. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah antara lain dengan pengembangan TPA dan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), dan saat ini tercatat terdapat sebuah

TPA dan 7 (tujuh) buah TPS3R.

3. **Akses rumah tangga terhadap air minum layak yang belum tercapai, terjadinya penurunan kualitas air baku, tatakelola air lingkungan kota dan lahan pertanian.**

   Terdapat tiga substansi dalam isu stratgis ini, yaitu, penyediaan air minum layak, penurunan kualitas air baku, dan tatakelola air baik untuk kebutuhan minum maupun untuk kebutuhan lahan pertanian.

   Pada sisi penyediaan dan pengelolaan air minum yang aman dan berkelanjutan, saat ini cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Pinrang adalah 36.366 jiwa atau baru sekitar 10% dari jumlah penduduk dan jumlah ini setara dengan 19,47% dari jumlah penduduk yang berada di wilayah teknis jaringan pipa PDAM yang berjumlah 94.229 jiwa.

   Wilayah perkotaan merupakan pusat segala kegiatan manusia, pusat perdagangan, pusat produsen, sekaligus pusat konsumen. Di daerah perkotaan tinggal banyak manusia, banyak terdapat fasilitas umum, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Saluran drainase di daerah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga dan limbah pabrik. Penanganan drainase di area pasar rakyat saat ini masih kurang memadai, sementara hal ini sangat penting untuk mengurangi genangan air yang dapat mengakibatkan banjir sekaligus mengatuskan kelebihan air hujan, sehingga para pengunjung nyaman dalam melakukan aktifitas yang berada di pasar. Tatakelola air pada lokasi destinasi wisata yang masih terbatas, termasuk dranase. Terkait dengan lahan pertanian, pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Jaringan Pengairan Lainnya. Penyediaan hidran guna penanganan dan pencegahan Kebakaran.

4. **Rendahnya kualitas pelayanan dasar/SPM bidang pendidikan, dan perlunya dukungan Kebijakan pemerintah daerah terkait Pendidikan Lingkungan Hidup**

   Saat ini terdapat sebanyak 195 sekolah PAUD/TK; 333

gedung sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/Sederajat); 89 sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat; 21 sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA, dan 15 buah SMK di Kabupaten Pinrang (Hasil olah Data BPS, 2022). Dari sejumlah bangunan sekolah tersebut di atas, teridentifikasi berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, pada jenjang pendidikan SD/MI, terdapat sebanyak 113 ruang/sekolah dengan kondisi ruang kelas “Rusak Ringan”; dan 20 dengan kondisi “Rusak Berat”. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, terdapat sebanyak 23 ruang kelas dengan kondisi “Rusak Ringan”; dan satu kelas dengan kondisi “Rusak Berat”.

Dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait Pendidikan Lingkungan Hidup seperti Proyek "Gaya Hidup Berkelanjutan" dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan penguatan Kerjasama Mewujudkan Sekolah Adiwiyata. Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghidarkan dampak lingkungan yang negatif. Prinsip dasar program Adiwiyata adalah partisipatif yang artinya komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. Yang kedua, berkelanjutan yakni seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

5. **Masih terdapat wilayah desa dengan akses jalan R4 yang tidak memadai dan minim sarana / jaringan telekomunikasi /informasi**

Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan transportasi darat dan lalu lintas: Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa

transportasi. Pengembangan kawasan transmigrasi: Pemetaan. Pembangunan dan penanggulangan kemiskinan warga transmigrasi. Desa Tertinggal: Kaseralau, dan Watang Kassa, pada kedua desa diperlukan adanya peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi anak usia dini. Perbaikan jalan dan peningkatan akses antar desa, serta mitigasi bencana alam. Termasuk penyediaan wifi gratis di tempat pelayanan publik.

6. **Keterampilan penduduk usia kerja yang belum memenuhi kebutuhan lapangan kerja**

   Menurut hasil konsultasi publik, kebanyakan dari tenagakerja yang ikut pembinaan/pelatihan menemukan ketidak sesuaian antara pendidikan/pelatihan yang mereka terima dengan lapangan usaha yang tersedia. Sehingga diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan kegiatan manajemen yang profesional dan lebih berorientasi pasar. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi: Melaksanakan dan penyediaan tenaga kerja trampil dan berkompeten.

7. **Kelembagaan koperasi dan UMKM yang relatif lemah dalam menghadapi persaingan usaha secara lebih terbuka**

   Peningkatan standarisasi produk-produk hasil produksi UMKM melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran kemitraaan, pemasaran, permodalan yang berbasis IT. Dibutuhkannya perhatian /pembinaan pada proses pembangunan lumbung pangan masyarakat dalam hal ini RMU (*Rice Milling Unit*) yang tidak ramah lingkungan dalam pengelolaan hasil pertanian terutama gabah sehingga dapat mencemari lingkungan.

8. **Perlunya peningkatan kompotensi, dan kinerja aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi institusional**

   Investasi berkelanjutan adalah proses investasi yang mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, mencakup Environment (lingkungan hidup), Social, dan Governance (ESG) untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan kehidupan di Bumi. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang klembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta perencanaan , reformasi birokrasi dan kinerja. Profesionalisme ASN: Terwujudnya ASN yang professional, kompoten dan kompetitif; Meningkatnya Kualitas, Kompetensi dan Profesionalisme ASN Harapan Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

9. **Perlunya peningkatan prasarana dan sarana guna meningkatkan kualitas pelayanan public**

Pembangunan jaringan internet di daerah terpencil, penyediaan wifi gratis ditempat pelayanan publik. Implementasi e-goverment dalam rangka peningkatan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Belum Optimalnya Ketersediaan sarana dan Prasarana serta Pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang dirumuskan dengan memperhatikan rumusan permasalahan pokok dan Isu strategis KLHS hasil penapisan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan perumusan tersebut maka Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang tahun 2025 -2029 adalah :

1. **Pembangunan Manusia yang Bekualitas dan Berkarakter serta Berkeadilan.**

Pengembangan Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, tangguh, unggul dan berdaya saing dengan menitik beratkan pada aspek pendidikan dan kesehatan serta memperhatikan perlindungan sosial yang adaptif terhadap masyarakat adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang

sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyrakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia. Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai - nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai - nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Kebutuhan dasar yang terpenuhi turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk manusia yang berkualitas. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar; berwawasan lingkungan; serta

Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Inovasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Tantangan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan industri adalah semakin menguatnya keterbukaan ekonomi internasional atau globalisasi. Era globalisasi mengakibatkan seluruh industri daerah berhadapan secara langsung, baik di pasar domestik maupun internasional, dengan tingkat persaingan yang semakin tajam. Kondisi ini menuntut setiap daerah meningkatkan daya saingnya. Daya saing negara harus ditumpukan pada daya saing daerah sehingga daerah-daerah di Indonesia perlu mengembangkan keunggulan kompetitifnya melalui pemilihan dan pengembangan produk unggulan daerah. Pemilihan produk unggulan dari suatu wilayah akan berimplikasi wilayah tersebut berkonsentrasi pada produk tersebut sehingga wilayah tersebut menjadi terspesialisasi, pembinaan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah, yang berarti meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Kemandirian dalam mengelola potensi daerah dengan mendorong akselerasi kualitas dan kuantitas beragam produk unggulan berorientasi pasar dan perdagangan global, mengakselarasi kemajuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan agropolitan dan minapolitan, dan pemanfaatan teknologi dalam menunjang produktivitas ekonomi serta mendorong terciptanya inovasi yang memajukan potensi local daerah berbasis ekonomi hijau dan biru.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi

Peningkatan Pelayanan, Kualitas Budaya Kerja dan transformasi digital adalah transformasi bentuk sistem organisasi yang bersifat fundamental yang mengedepankan prinsip supremasi hukum, akuntabilitas,

transparansi, dan berintegritas yang bertanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajiban berawal dari pemahaman visi dan misi yang kemudian berupaya menerapkan teknologi informasi (digitalisasi) menjadi lebih cepat, baik, transparan dan akuntabel. Aspek lain yang tak kalah penting adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak daerah masih menghadapi masalah birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tata kelola yang buruk mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut seharusnya para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan peningkatan efisiensi birokrasi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Kemandirian Fiskal Daerah

Peningkatan stabilitas keamanan daerah dan kemandirian fiskal merupakan dua aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Stabilitas keamanan daerah memastikan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk beraktivitas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Tanpa keamanan yang terjamin, berbagai program pembangunan daerah akan terhambat karena adanya gangguan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

Di sisi lain kemandirian fiskal daerah menjadi faktor penentu dalam kemampuan daerah untuk membiayai

pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Dengan pendapatan yang cukup, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Di Kabupaten Pinrang kondisi Pendapatan Asli Daerah terbilang masih kurang dibanding dengan Anggaran Belanja Daerah sehingga perlu perhatian khusus guna meningkatkan sumber penghasilan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara stabilitas keamanan dan kemandirian fiskal akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Ketika daerah aman dan mandiri secara fiskal, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan adanya pendapatan yang stabil dan cukup, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan siklus positif yang memperkuat stabilitas dan kemandirian daerah secara keseluruhan.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung kemandirian daerah. Sementara itu, pemerintah daerah harus proaktif dalam menggali potensi daerah dan mengelola sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan stabilitas keamanan dan kemandirian fiskal dapat terwujud,

membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

5. **Ketahanan Sosial dalam menghadapi globalisasi dan transformasi budaya**

Kesetaraan gender di daerah juga menghadapi berbagai hambatan, terutama karena norma-norma budaya yang masih patriarkal dan diskriminatif. Perempuan seringkali terbatas aksesnya ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik. Di banyak daerah, perempuan lebih banyak berperan dalam pekerjaan domestik dan kurang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Begitupun halnya mengenai tingginya angka pernikahan dini. Kondisi ini menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dan kekerasan berbasis gender. Padahal, peran perempuan sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan, karena mereka seringkali lebih dekat dengan sumber daya alam dan berperan sebagai penjaga lingkungan.

Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan yang terpadu dan inklusif. Program-program lingkungan hidup harus disertai dengan upaya toleransi antar umat beragama, pemberdayaan perempuan dan pendidikan kesetaraan gender. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk menciptakan inisiatif yang mempromosikan kesadaran lingkungan, toleransi dan memberdayakan perempuan. Program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi sekaligus mengajarkan praktik-praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan. pelestarian lingkungan dari berbagai aspek baik dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan kualitas lingkungan hidup dan kesetaraan gender di daerah dapat meningkat, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

6. Pemerataan Pembangunan antar Wilayah

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. . Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.

Di Kabupaten Pinrang Kondisi wilayah yang sangat luas tersebut dan dengan kondisi topografi yang berbeda serta keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam pula bisa menimbulkan ketidak seimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan terutama wilayah Kabupaten Pinrang bagian utara yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian wilayah Berada diantara 2 – 1.908 mdpl. Hal ini memerlukan penanganan khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas jalan dan pemukiman karena potensi luas wilayah dan sumberdaya alam di Pinrang ini terbilang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat dari tempat produksi ketempat pengolahan atau pusat perdagangan maupun kefasilitas kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Begitupun halnya pembangunan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi beserta dengan sarana pendukungnya dengan memperhatikan sarana aksesbilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi dalam rangka peningkatan interaksi antar desa atau kawasan.

7. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pembangunan infrastruktur dasar yang tangguh dan berkelanjutan merupakan kunci dari pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah langkah penting untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan dan ekonomi masyarakat Dengan pendekatan yang terintegrasi, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan

infrastruktur dasar yang tangguh, dan mitigasi bencana dapat berjalan seiring untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan berkelanjutan di Indonesia

Abrasi di sepanjang Sungai Saddang dan kawasan pesisir menjadi isu strategis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Di kawasan sungai, abrasi terjadi akibat kerusakan daerah aliran sungai (DAS), aktivitas penambangan, serta alih fungsi lahan yang menyebabkan tebing sungai tergerus dan berdampak pada permukiman serta lahan pertanian.

Sementara itu, abrasi pantai dipicu oleh gelombang pasang, naiknya muka air laut, dan rusaknya vegetasi pelindung seperti mangrove. Hal ini menyebabkan penyusutan garis pantai, kerusakan ekosistem pesisir, serta mengancam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Penanganan abrasi sungai dan pantai tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari langkah strategis pelestarian lingkungan hidup yang lebih luas. Ini mencakup pengelolaan sumber daya air yang baik, rehabilitasi DAS, penataan sempadan sungai dan pantai, serta pembangunan infrastruktur pengaman. Selain itu, penyediaan akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan fasilitas publik lainnya perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan infrastruktur layanan dasar harus diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk mendorong ketahanan wilayah terhadap risiko abrasi sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Pinrang yang akan diwujudkan pada akhir periode 2025 - 2029. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai medan magnet dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada pencapaian cita-cita bersama sebagai entitas daerah. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi yang secara proses politik telah menghantarkan ditetapkannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rumusan visi ini kemudian dijabarkan pokok-pokok visinya secara teknokratis sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 - 2029 juga memperhatikan dua visi lain, yakni visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2025 - 2045 yang memberi arahan jangka panjang dimana RPJMD saat ini merupakan periode RPJMD pertama dalam RPJPD tersebut, dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2029 yang memberi arahan kewilayahan karena Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2025 – 2045 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pinrang Yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”.** Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2029 adalah **“Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”.**

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi.

Berdasarkan pertimbangan demikian maka rumusan visi dan pokok visi dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 - 2029 adalah:

“Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri”

Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJPD Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya kemajuan, kemandirian dan keberlanjutan. Rumusan visi ini juga memiliki konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2029, dimana pokok visi **“Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”** yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan yang dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengelolaan lingkungan serta memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (taro ada taro gau). Karakter ini akan membentuk Pembangunan Sulawesi Selatan dengan mengedepankan nilai-nilai yang unggul, adaptif, kompetitif dan berbasis kearifan lokal.

Tabel 3.1

Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten

Visi RPJMN	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Visi RPJMD Kabupaten Pinrang
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Pinrang Berkelanjutan, Inklusif dan Mandiri

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029 mengandung empat pokok visi yakni **“Berkelanjutan”, “Inklusif”, “Maju” dan “Mandiri”**. Adapun kandungan dari empat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

Berkelanjutan, merupakan kondisi Kabupaten Pinrang yang mampu menciptakan keseimbangan yang sehat antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, Sehingga wilayah dapat berkembang dalam jangka panjang. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi berkelanjutan adalah terbangunnya sistem dan perencanaan pembangunan yang bersinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kondisi Sumberdaya manusia dan Sumber daya alam.Begitupun halnya dengan adanya keberlanjutan dalam kelembagaan politik dan hukum yang mantap; terjaminnya hak-hak warga, keamanan, ketenteraman dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Inklusif, kondisi Kabupaten Pinrang pada tahun 2029 yang telah mampu menerapkan keterbukaan, kesetaraan dan partisipasi bagi seluruh warganya dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, atau sosial. Pinrang yang inklusif mencakup perwujudan pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur dan sektor pembangunan lainnya yang responsive dengan memperhatikan kebutuhan spesifik warga masyarakat kelompok rentan

Maju, Maju adalah kondisi Kabupaten Pinrang yang mampu mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Kondisi maju ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, ekonomi tumbuh dan merata, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah kabupaten, tata kelola semakin membaik berbasis digitalisasi, serta inovasi dan teknologi di berbagai bidang pembangunan berkembang.

Mandiri, menunjukkan kondisi Kabupaten Pinrang pada tahun 2029 yang mampu untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar dan sanggup meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya. Karena menyangkut sikap,

kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh, serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi yang mendeskripsikan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjadi pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi .

Misi dalam RPJMD ini merupakan hasil reformulasi misi pasangan kepala daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada KPUD tanpa mengurangi substansinya. Reformulasi rumusan misi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Reformulasi Misi Berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah Yang Diserahkan KPUD

Misi sesuai Dokumen Visi Misi		Reformulasi Misi	
1	Melaksanakan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis indeks layanan infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur vital dan sarana – prasarana public dasar serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis ekonomi hijau dan mengoptimalkan pengelolaan tata ruang wilayah dalam rangka pelestarian ekosistem, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.	1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

Misi sesuai Dokumen Visi Misi		Reformulasi Misi	
2	Meningkatkan produktifitas pertanian dan perikanan sebagai sumber utama penghasilan masyarakat dan penggerak roda perekonomian daerah serta meningkatkan dan mengembangkan sektor UMKM, usaha ekonomi kreatif, sektor jasa, perdagangan dan perindustrian serta sektor usaha kreatif lainnya dalam rangka menciptakan peluang berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat	2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3	Meningkatkan pencapaian kualitas hidup masyarakat atas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan	3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
4	Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi institusional, digitalisasi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan dan peningkatan sarana prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
5	Memperkuat peran lembaga sosial kemasyarakatan, keagamaan, Adat, Organisasi Politik, Profesi, PKK dan Kepemudaan / Kemahasiswaan dalam upaya menangkal dampak negative dari transformasi budaya global serta menjadikan Kabupaten Pinrang Sebagai Kabupaten Inklusif.	5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh

Berdasarkan hasil reformulasi misi sebagaimana tabel diatas, maka rumusan misi RPJMD tahun 2025 – 2029 berikut penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.**

   Misi ini mencakup pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, infrastruktur pendukung pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana konektivitas jalur darat distribusi logistik, serta pemenuhan fasilitas publik lainnya dengan tetap

memperhatikan dampak lingkungan serta Pengembangan sistem infromasi dan sistem mitigasi, penanggulangan dan tanggap darurat bencana

2. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.**

   Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan dengan penerapan ekonomi hijau dan biru yang menggunakan skema pendekatan kawasan agropolitan dan minapolitan, Hilirisasi produk pertanian dan perikanan, serta menumbuh kembangkan sektor UMKM, usaha ekonomi kreatif, perdagangan, perindustrian dan sektor jasa dalam rangka menciptakan peluang berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

3. **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.**

   Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan pencapaian kualitas hidup masyarakat atas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Peningkatan Kualitas Layanan dan Fasilitas Kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan

4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.**

   Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi institusional, digitalisasi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan dan peningkatan sarana prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital.

5. **Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.**

   Misi ini mencakup penguatan peran lembaga sosial kemasyarakatan, keagamaan, Adat, Organisasi Politik, Profesi, PKK

dan Kepemudaan / Kemahasiswaan dalam upaya menangkal dampak negative dari transformasi budaya global serta menjadikan Kabupaten Pinrang Sebagai Kabupaten Inklusif.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada misi RPJPD Kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2045 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJMD 2025-2029 dengan Misi dalam RPJPD 2025 -2045, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Keselarasan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2045

MISI RPJMD 2025-2029		MISI RPJPD 2025 - 2045	
1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.	5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dan Ekologi
		6	Pembangunan Berbasis Kawasan yang Mendorong Perkembangan Wilayah
		7	Pemenuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan dan ramah Lingkungan
		8	Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Regional Yang Berkelanjutan
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal Yang Produktif, Kreatif dan Inklusif
		4	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah serta Kemandirian Fiskal Daerah
		8	Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Regional Yang Berkelanjutan
3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Tangguh,dan Berdaya Saing
		8	Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Regional Yang Berkelanjutan
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	3	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

MISI RPJMD 2025-2029		MISI RPJPD 2025 - 2045	
5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh	4	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah serta Kemandirian Fiskal Daerah
		5	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dan Ekologi

Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 - 2029 juga memiliki keselarasan dengan misi RPJMN 2025 - 2029 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4

Keselarasan Misi pada RPJMN 2025 - 2029 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029

Asta Cita		MISI RPJMD 2025-2029	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.
		2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.

Asta Cita		MISI RPJMD 2025-2029	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.
		2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengn lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.
		5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.

Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu Misi dalam RPJMD Kabupaten pinrang 2025 – 2029 memliki keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi selatan 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Keselarasan Misi pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2029 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2029

Misi RPJMD Sulawesi Selatan 2025-2029		Misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing	3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh.

Misi RPJMD Sulawesi Selatan 2025-2029		Misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029	
2	Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan	2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3	Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif dan melayani	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
4	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

B. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi serta relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dan Sasaran masing – masing misi diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah, yang memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
   - Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana public dasar
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi

b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana, yang memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
    - Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim
    - Meningkatnya ketahanan terhadap bencana

Misi 2 **:** Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal, yang memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :
    - Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal
    - Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal
    - Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja
    - Menurunnya kemiskinan

Misi 3 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing, yang memiliki 1 (satu) sasaran yaitu :
    - Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

Misi 4 **:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif, yang memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
    - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik
    - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital

Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh. Tujuan dari misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya, yang memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
- Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat
- Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai – nilai lokal masyarakat
- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Tabel 3.6

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 - 2029

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana**	**T.1**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah**			**IT.1**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**3,35**	**3,35**	**3,40**	**3,50**	**3,60**	**3,70**	**3,80**
				S.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana publik dasar	IS.1.1.1	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	67,31	71,83	73,49	75,14	76,80	78,46	80,11
						IS.1.1.2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman dan berkelanjutan	27,87	30,35	33,05	36,00	39,21	42,70	46,50
						IS.1.1.3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,66	2,89	5, 09	7,15	9,17	11,66	14,00
				S.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	IS.1.2.1	Tingkat Kemantapan Jalan	68,54	70,22	71,75	73,28	74,81	76,34	77,87
						IS.1.2.1	Rasio Jaringan Irigasi	80,71	79,58	80,18	80,78	81,38	91,99	82,59
						IS.1.2.2	Persentase Desa Mandiri	52,17	57,97	63,77	68,12	72,46	75,36	78,26

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
		T.2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana**			**IT.2**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67,07**	**73,52**	**73,69**	**73,86**	**74,03**	**74,20**	**74,38**
				S.2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim	IS.2.1.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	18,09	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
						IS.2.1.2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	5,36	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
						IS.2.1.3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	29,56	29,56	31,69	32,75	33,84	38,42	40,84
				S.2.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	IS.2.2.1	Indeks Resiko Bencana	157,36	148,00	145,70	145,50	142,50	142,30	141,00

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	T.3	Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal			IT.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71	5,89	6,59	7,12	7,65	8,29	8,59
						IT.4	Kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	3,83	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97
						IT.5	PDRB per kapita (Rp Juta)	62,77	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	96,73
						IT.6	Gini Ratio	0,299	0,293	0,286	0,280	0,274	0,268	0,261
						IT.7	Indeks Akses Keuangan Daerah	4,57	4,61	4,63	4,65	4,67	4,69	4,70
				S.3.1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal	IS.3.1.1	Laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	5.64	3,48	3,78	4,28	4,50	4,78	5,25

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
				S.3.2	Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal	IS.3.2.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,37	6,78	6,85	7,01	7,22	7,43	7,65
						IS.3.2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,07	1,10	1,20	1,50	1,75	2,00	2,01
						IS.3.2.3	Laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	5,89	6,2	6,47	6,85	7,42	7,86	7,95
				S.3.3	Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja	IS.3.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,12	3,03	2,94	2,75	2,64	2,67	2,57
						IS.3.3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,17	65,25	66,72	68,35	69,15	70,05	70,95

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
				S.3.4	Menurunnya kemiskinan	IS.3.4.1	Tingkat Kemiskinan	8,55	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	6,31
3	**Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**	**T.4**	**Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing**			**IT.8**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,43**	**75,83**	**76,27**	**76,83**	**77,34**	**77,63**	**78,04**
				S.4.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	IS.4.1.1	Rata - rata Lama Sekolah	8,53	8,40	8,60	8,80	9,00	9,20	9,40
						IS.4.1.2	Harapan Lama Sekolah	13,28	13,40	13,50	13,60	13,70	13,80	13,87
						IS.4.1.3	Literasi Membaca (SD/SMP)	54,00 / 65,69	56,50/ 66,79	59,00 / 67,89	61,50 / 68,99	64,00 / 70,09	66,50/7 1,19	69,00 / 72,29
						IS.4.1.4	Numerasi (SD/SMP)	49,73 / 59,87	52,63 / 61,37	55,53 / 62,87	58,43 / 64,37	61,33 / 65,87	64,23 / 67,37	67,13 / 68,87
						IS.4.1.5	Usia Harapan Hidup	74,63	74,80	75,10	75,40	75,70	76,00	76,30
						IS.4.1.6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	22,20	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	12,75
						IS.4.1.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,56	100	100	100	100	100	100

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**	**T.5**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif**			**IT.9**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**79,47 (BB)**	**80,02 (BB)**	**81 (BB)**	**82 (BB)**	**83 (BB)**	**84 (BB)**	**85 (BB)**
				S.5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	IS.5.1.1	Nilai MCP KPK	57,51	75,00	80,00	82,00	85,00	89,00	91,00
						IS.5.1.2	Nilai SAKIP Kabupaten	65,32	66,20	67,10	68,00	69,30	70,50	71,00
				S.5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital	IS.5.2.1	Indeks SPBE	3,49	3,52	3,57	3,62	3,68	3,75	3,82
						IS.5.2.2	Indeks Pelayanan Publik	3,95	4,00	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
						IS.5.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,25	90,50	90,72	91,00	91,25	91,50	92,00
						IS.5.2.4	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP4)	95,05	95,15	95,30	95,50	95,75	96,00	96,20

Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri									2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	**Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh**	**T.6**	**Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya**			**IT.10**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**61,74**	**62,24**	**63,24**	**64,24**	**66,24**	**67,24**	**67,50**
						IT.11	**Indeks Pembangunan Gender**	**96,69**	**96,73**	**96,84**	**96,92**	**96,93**	**96,94**	**96,9**
				S.6.1	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	IS.6.1.1	Indeks Perlindungan Anak	N.A	60,47	60,47	60,47	60,47	70,00	70,00
				S.6.2	Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat	IS.6.2.1	Persentase Angka kriminalitas yang ditangani	87,73	87,75	87,77	87,79	87,81	87,83	87,86
						IS.6.2.2	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
				S.6.3	Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai - nilai lokal masyarakat	IS.6.3.1	Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	100	100
				S.6.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	IS.6.4.1	Indeks Ketimpangan Gender	0,280	0,274	0,269	0,264	0,259	0,249	0,239

Tabel 3.7

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025 - 2029

Misi		Tujuan		Sasaran		Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN)	
Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri							
1	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana**	**T.1**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah**	S.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana publik dasar	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
				S.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		T.2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana**	S.2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengn lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				S.2.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		

Misi		Tujuan		Sasaran		Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN)	
2	**Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru**	**T.3**	**Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal**	S.3.1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal	PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
						PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatakan nilai tambah di dalam negeri
				S.3.2	Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
				S.3.3	Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja		
				S.3.4	Menurunnya kemiskinan	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Misi		Tujuan		Sasaran		Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN)	
3	**Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**	**T.4**	**Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing**	S.4.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	PN 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**	**T.5**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif**	S.5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
				S.5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital		
5	**Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh**	**T.6**	**Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya**	S.6.1	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	PN 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi		Tujuan		Sasaran		Misi RPJMN / Asta Cita / Prioritas Nasional (PN)	
				S.6.2	Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
				S.6.3	Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai - nilai lokal masyarakat	PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
						PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengn lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				S.6.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	PN 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

3.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan elemen penting dalam perencanaan yang memuat langkah – langkah strategis dan konkrit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2029 dijabarkan dalam lima tahapan pembangunan yang tiap tahapan memiliki rentang waktu satu tahun guna mencapai target sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2029. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Ekonomi Yang Produktif Melalui Pengelolaan Potensi Unggulan, Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pembangunan Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing, Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	Akselerasi Pembangunan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sumber daya Manusia dan Infrastruktur	Pemerataan Pembangunan dalam Mewujudkan Kabupaten Pinrang Maju dan Mandiri	Optimalisasi Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

A. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan merupakan rumusan kerangka pikIr atau kerangka kerja untuk mencapai target sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan memperhatikan aspek orientasi, tujuan dan langkah strategis yang akan diambil dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai sasaran dalam suatu periode waktu. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran

keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta menggambarkan fokus dari tiap – tiap sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 – 2029

Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri					
Tujuan		**Sasaran**		**Arah Kebijakan**	
Misi 1 :					
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana					
T.1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah**	S.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana publik dasar	1	Memperluas dan meningkatkan kualitas penyediaan sarana prasarana publik dasar yang terjangkau, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
		S.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	2	Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana konektivitas jalur darat, infrastruktur desa dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan serta memfasilitasi pengembangan sarana pendukung konektivitas perhubungan laut pada jalur ALKI II
T.2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana**	S.2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim	3	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem dan adaptasi perubahan iklim
		S.2.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	4	Meningkatkan Tata Kelola dan Pengembangan sistem infromasi dan sistem mitigasi, penanggulangan dan tanggap darurat bencana

Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri					
Tujuan		**Sasaran**		**Arah Kebijakan**	
Misi 2 :					
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru					
T.3	**Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal**	S.3.1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal	5	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditi sektor unggulan berbasis potensi lokal
		S.3.2	Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal	6	Meningkatkan dan mengembangkan Sektor UMKM, usaha ekonomi kreatif, sektor jasa, koperasi serta sektor usaha kreatif lainnya
		S.3.3	Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja	7	Meningkatkan Keterampilan berbasis kompetensi dan kemampuan kewirausahaan guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
		S.3.4	Menurunnya kemiskinan	8	Meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dengan memanfaatkan Data Terpadu Sensus Ekonomi dan Sosial Nasional (DTSEN)

Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri					
Tujuan		**Sasaran**			**Arah Kebijakan**
Misi 3 :					
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing					
T.4	**Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing**	S.4.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	9	Meningkatkan pencapaian kualitas hidup masyarakat atas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang mewujudkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan serta Peningkatan Kualitas Layanan dan Fasilitas Kesehatan yang mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Misi 4 :					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
T.5	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif**	S.5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	10	Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi institusional serta digitalisasi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan
		S.5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital	11	Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital

Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri					
Tujuan		**Sasaran**		**Arah Kebijakan**	
Misi 5 :					
Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh					
T.6	**Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya**	S.6.1	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	12	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak
		S.6.2	Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat	13	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta menjaga toleransi antar umat beragama
		S.6.3	Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai - nilai lokal masyarakat	14	Meningkatkan daya saing pemuda dalam era globalisasi serta meningkatkan kualitas seni budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah
		S.6.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	15	Meningkatkan pemberdayaan responsif gender

2. Strategi

Strategi merupakan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan. Rumusan strategi memperhatikan factor eksternal dan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang serta mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Dalam menyusun strategi pembangunan terdapat beberapa langkah yang ditempuh, antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan langkah – langkah tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 3.10 :

Tabel 3.10
Rumusan Strategi Pembangunan

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
Tujuan 1 :								
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah				**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana publik dasar	1	Memperluas dan meningkatkan kualitas penyediaan sarana prasarana publik dasar yang terjangkau, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak melalui perluasan jaringan distribusi air bersih, termasuk di wilayah sulit air, dan peningkatan cakupan sanitasi layak melalui pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik dan fasilitas sanitasi berbasis masyarakat.	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak melalui perluasan jaringan distribusi air bersih, termasuk di wilayah sulit air, dan peningkatan cakupan sanitasi layak melalui pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik dan fasilitas sanitasi berbasis masyarakat.	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak melalui perluasan jaringan distribusi air bersih, termasuk di wilayah sulit air, dan peningkatan cakupan sanitasi layak melalui pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik dan fasilitas sanitasi berbasis masyarakat.	Optimalisasi operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem sanitasi yang telah dibangun, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air dan sanitasi berbasis masyarakat agar berkelanjutan.	Optimalisasi operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem sanitasi yang telah dibangun, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air dan sanitasi berbasis masyarakat agar berkelanjutan.
				Normalisasi dan peningkatan saluran drainase guna mengurangi risiko banjir dan genangan.	Rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase perkotaan serta pembangunan saluran baru di kawasan perumahan, pusat ekonomi, dan jalan strategis.	Peningkatan kapasitas sistem drainase dengan teknologi ramah lingkungan, termasuk sumur resapan dan kolam retensi untuk menahan limpasan air hujan.	Peningkatan kapasitas sistem drainase dengan teknologi ramah lingkungan, termasuk sumur resapan dan kolam retensi untuk menahan limpasan air hujan.	Pemeliharaan rutin drainase melalui gotong royong masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan.
				Pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur.	Pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur.	Pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur.	Pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur.	Pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan melalui optimalisasi peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Memfasilitasi pembangunan, rehabilitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,sekaligus mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni	Memfasilitasi pembangunan, rehabilitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,sekaligus mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni	Memfasilitasi pembangunan, rehabilitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,sekaligus mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni	Mendorong penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari pencapaian program 3 juta rumah.	Mendorong penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari pencapaian program 3 juta rumah.
				Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Menata kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perbaikan prasarana dasar.	Menata kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perbaikan prasarana dasar.
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	2	Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana konektivitas jalur darat, infrastruktur desa dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan serta memfasilitasi pengembangan sarana pendukung konektivitas perhubungan laut pada jalur ALKI II	Penuntasan rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi dan ekonomi, yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi lokal, mobilitas penduduk, serta keberlanjutan lingkungan	Penuntasan rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi dan ekonomi, yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi lokal, mobilitas penduduk, serta keberlanjutan lingkungan	Penuntasan rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi dan ekonomi, yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi lokal, mobilitas penduduk, serta keberlanjutan lingkungan	Penuntasan rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi dan ekonomi, yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi lokal, mobilitas penduduk, serta keberlanjutan lingkungan	Memperkuat penyusunan rencana detail tata ruang yang responsif terhadap dinamika wilayah, dengan mengintegrasikan jaringan transportasi utama dan pusat kegiatan ekonomi lokal.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan sebagai sarana konektivitas jalur darat distribusi logistik	Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk.	Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk.	Integrasi jaringan jalan dengan kawasan produksi, pelabuhan darat, dan sentra perdagangan untuk memperkuat rantai pasok lokal dan regional.	Integrasi jaringan jalan dengan kawasan produksi, pelabuhan darat, dan sentra perdagangan untuk memperkuat rantai pasok lokal dan regional.
				Fasilitasi peningkatan fasilitas dasar pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.	Fasilitasi peningkatan fasilitas dasar pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.	Fasilitasi peningkatan fasilitas dasar pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.	Fasilitasi peningkatan fasilitas dasar pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.	Fasilitasi peningkatan fasilitas dasar pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.
				Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kewenangan desa serta mengembangkan potensi unggulan desa untuk perluasan lapangan pekerjaan	Memperkuat pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar desa agar berfungsi optimal mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.	Mendorong pengembangan potensi unggulan desa berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa.	Membangun pusat-pusat ekonomi desa yang terintegrasi dengan pasar regional serta memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk unggulan.	Meningkatkan kerja sama antar-desa dan dengan pihak swasta dalam pengelolaan potensi unggulan guna menciptakan nilai tambah ekonomi dan peluang kerja baru.
				Meningkatkan dan memperluas infrastruktur irigasi serta mengembangkan inovasi pengelolaan irigasi berbasis teknologi dan data spasial untuk adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatkan dan memperluas infrastruktur irigasi serta mengembangkan inovasi pengelolaan irigasi berbasis teknologi dan data spasial untuk adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatkan dan memperluas infrastruktur irigasi serta mengembangkan inovasi pengelolaan irigasi berbasis teknologi dan data spasial untuk adaptasi terhadap perubahan iklim	Optimalisasi jaringan irigasi melalui revitalisasi saluran dan pemanfaatan sistem monitoring cerdas untuk meningkatkan efisiensi distribusi air.	Optimalisasi jaringan irigasi melalui revitalisasi saluran dan pemanfaatan sistem monitoring cerdas untuk meningkatkan efisiensi distribusi air.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
Tujuan 2 :								
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana								
3	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim	3	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPS3R dengan berorientasi pada prinsip ekonomi berorientasi lingkungan.	Peningkatan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPS3R dengan berorientasi pada prinsip ekonomi berorientasi lingkungan.	Peningkatan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPS3R dengan berorientasi pada prinsip ekonomi berorientasi lingkungan.	Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu berbasis ekonomi sirkular melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas, sehingga sampah tidak hanya tertangani tetapi juga bernilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.	Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu berbasis ekonomi sirkular melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas, sehingga sampah tidak hanya tertangani tetapi juga bernilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
				Melestarikan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan melalui sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Melestarikan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan melalui sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Melestarikan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan melalui sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Mengoptimalkan program rehabilitasi dan konservasi kawasan sungai, gunung, bukit, dan hutan melalui pendekatan berbasis ekosistem serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati.	Mengoptimalkan program rehabilitasi dan konservasi kawasan sungai, gunung, bukit, dan hutan melalui pendekatan berbasis ekosistem serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
4	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	4	Meningkatkan Tata Kelola dan Pengembangan sistem infromasi dan sistem mitigasi, penanggulangan dan tanggap darurat bencana	Meningkatkan tata kelola manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana	Meningkatkan tata kelola manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana	Meningkatkan tata kelola manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan tanggap dan respon bencana	Mengembangkan sistem peringatan dini dan pusat data kebencanaan berbasis teknologi informasi untuk memperkuat mitigasi serta meningkatkan efektivitas tanggap darurat di tingkat daerah.	Mengembangkan sistem peringatan dini dan pusat data kebencanaan berbasis teknologi informasi untuk memperkuat mitigasi serta meningkatkan efektivitas tanggap darurat di tingkat daerah.
Tujuan 3 :								
Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal								
5	Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal	5	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditi sektor unggulan berbasis potensi lokal	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor unggulan melalui Penguatan Infrastruktur pertanian dan perikanan, Penyediaan Sarana Produksi, penydiaan bibit unggul pertanian dan perikanan, Penjaminan Ketersediaan dan distribusi pupuk lancar dan terjangkau	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor unggulan melalui Penguatan Infrastruktur pertanian dan perikanan, Penyediaan Sarana Produksi, penydiaan bibit unggul pertanian dan perikanan, Penjaminan Ketersediaan dan distribusi pupuk lancar dan terjangkau	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor unggulan melalui Penguatan Infrastruktur pertanian dan perikanan, Penyediaan Sarana Produksi, penydiaan bibit unggul pertanian dan perikanan, Penjaminan Ketersediaan dan distribusi pupuk lancar dan terjangkau	Mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna, optimalisasi jaringan irigasi, serta penguatan rantai pasok agar produktivitas dan kualitas hasil meningkat.	Mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna, optimalisasi jaringan irigasi, serta penguatan rantai pasok agar produktivitas dan kualitas hasil meningkat.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Pengembangan sistem budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dan perikanan secara berkelanjutan	Pengembangan sistem budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dan perikanan secara berkelanjutan	Pengembangan sistem budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dan perikanan secara berkelanjutan	Mengoptimalkan penerapan praktik budidaya berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi komoditas, serta peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya air.	Mengoptimalkan penerapan praktik budidaya berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi komoditas, serta peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya air.
				Mendorong Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda yang Profesional, Mandiri, dan Mampu Berinovasi dalam Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.	Mendorong Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda yang Profesional, Mandiri, dan Mampu Berinovasi dalam Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.	Mendorong Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda yang Profesional, Mandiri, dan Mampu Berinovasi dalam Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.	Mendorong Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda yang Profesional, Mandiri, dan Mampu Berinovasi dalam Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.	Mendorong Peningkatan Kualitas SDM melalui Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Muda yang Profesional, Mandiri, dan Mampu Berinovasi dalam Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.
				Pengembangan dan penguatan kerjasama perluasan pasar, serta rantai pasok produk perikanan	Pengembangan dan penguatan kerjasama perluasan pasar, serta rantai pasok produk perikanan	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pelatihan manajemen usaha, standar mutu produk, dan pengemasan agar mampu bersaing di pasar regional.	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pelatihan manajemen usaha, standar mutu produk, dan pengemasan agar mampu bersaing di pasar regional.	Memperkuat jaringan distribusi dengan membangun kerja sama antara nelayan, koperasi, dan pelaku usaha logistik guna memperlancar rantai pasok.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Penguatan kelembagaan petani dan nelayan serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas akses distribusi.	Penguatan kelembagaan petani dan nelayan serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas akses distribusi.	Penguatan kelembagaan petani dan nelayan serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas akses distribusi.	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
				Memperkuat produksi pangan akuatik, hewani, lokal, dan nabati melalui peningkatan sarana produksi dan pendampingan teknologi budidaya.	Memperkuat produksi pangan akuatik, hewani, lokal, dan nabati melalui peningkatan sarana produksi dan pendampingan teknologi budidaya.	Memperkuat produksi pangan akuatik, hewani, lokal, dan nabati melalui peningkatan sarana produksi dan pendampingan teknologi budidaya.	Memperkuat produksi pangan akuatik, hewani, lokal, dan nabati melalui peningkatan sarana produksi dan pendampingan teknologi budidaya.	Mengembangkan inovasi industri pangan sehat dan berkelanjutan, termasuk digitalisasi rantai pasok untuk memperluas jangkauan pemasaran.
6	Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal	6	Meningkatkan dan mengembangkan Sektor UMKM, usaha ekonomi kreatif, sektor jasa, koperasi serta sektor usaha kreatif lainnya	Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan inovasi	Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan inovasi	Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan inovasi	Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan inovasi	Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan inovasi
				Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan.	Mendorong inovasi produk wisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya serta kearifan lokal dengan dukungan teknologi digital.	Mendorong inovasi produk wisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya serta kearifan lokal dengan dukungan teknologi digital.	Memperluas jejaring kerja sama promosi pariwisata dan ekonomi kreatif ke tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan daya saing.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi dan kualitas produk serta memberikan dukungan dalam hal pengadaan teknologi, pelatihan teknis, atau insentif untuk pengembangan dalam teknologi baru	Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi dan kualitas produk serta memberikan dukungan dalam hal pengadaan teknologi, pelatihan teknis, atau insentif untuk pengembangan dalam teknologi baru	Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi dan kualitas produk serta memberikan dukungan dalam hal pengadaan teknologi, pelatihan teknis, atau insentif untuk pengembangan dalam teknologi baru	Memperluas akses pelaku usaha terhadap teknologi tepat guna melalui program pendampingan teknis dan kemudahan memperoleh sarana produksi berbasis inovasi.	Memperluas akses pelaku usaha terhadap teknologi tepat guna melalui program pendampingan teknis dan kemudahan memperoleh sarana produksi berbasis inovasi.
				Mendorong promosi dan pemasaran produk industri pengolahan skala kabupaten dapat meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar domestik maupun Regional serta mendorong penciptaan identitas merek atau branding yang kuat untuk produk industri pengolahan skala kabupaten	Mendorong promosi dan pemasaran produk industri pengolahan skala kabupaten dapat meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar domestik maupun Regional serta mendorong penciptaan identitas merek atau branding yang kuat untuk produk industri pengolahan skala kabupaten	Mendorong promosi dan pemasaran produk industri pengolahan skala kabupaten dapat meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar domestik maupun Regional serta mendorong penciptaan identitas merek atau branding yang kuat untuk produk industri pengolahan skala kabupaten	Memperkuat jejaring kemitraan dengan sektor swasta, asosiasi industri, dan lembaga promosi dagang untuk memperluas penetrasi pasar regional.	Memperkuat jejaring kemitraan dengan sektor swasta, asosiasi industri, dan lembaga promosi dagang untuk memperluas penetrasi pasar regional.
				Mendorong dan mengembangkan alternatif pembiayaan bagi Koperasi, IKM dan UMKM	Mendorong dan mengembangkan alternatif pembiayaan bagi Koperasi, IKM dan UMKM	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan untuk mempercepat akses permodalan yang mudah, murah, dan transparan.	Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penjaminan untuk meningkatkan keberlanjutan dan keamanan pembiayaan.	Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penjaminan untuk meningkatkan keberlanjutan dan keamanan pembiayaan.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Membangun Sentra Edukasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai sarana aktualisasi dan pengembangan produk kreatif para pelaku UMKM pada tiap kecamatan	Membangun Sentra Edukasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai sarana aktualisasi dan pengembangan produk kreatif para pelaku UMKM pada tiap kecamatan	Memperluas pembangunan sentra edukasi di seluruh kecamatan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan usaha, dan ruang pamer produk.	Memperluas pembangunan sentra edukasi di seluruh kecamatan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan usaha, dan ruang pamer produk.	Memperluas pembangunan sentra edukasi di seluruh kecamatan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan usaha, dan ruang pamer produk.
7	Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja	7	Meningkatkan Keterampilan berbasis kompetensi dan kemampuan kewirausahaan guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Program Pelatihan, Peningkatan Keterampilan, serta Pembaharuan Kompetensi yang Responsif terhadap Kebutuhan Pasar Kerja dan Perkembangan Dunia Usaha.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Program Pelatihan, Peningkatan Keterampilan, serta Pembaharuan Kompetensi yang Responsif terhadap Kebutuhan Pasar Kerja dan Perkembangan Dunia Usaha.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Program Pelatihan, Peningkatan Keterampilan, serta Pembaharuan Kompetensi yang Responsif terhadap Kebutuhan Pasar Kerja dan Perkembangan Dunia Usaha.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Program Pelatihan, Peningkatan Keterampilan, serta Pembaharuan Kompetensi yang Responsif terhadap Kebutuhan Pasar Kerja dan Perkembangan Dunia Usaha.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Program Pelatihan, Peningkatan Keterampilan, serta Pembaharuan Kompetensi yang Responsif terhadap Kebutuhan Pasar Kerja dan Perkembangan Dunia Usaha.
				Membangun Kemitraan dengan Sektor Industri untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja	Membangun Kemitraan dengan Sektor Industri untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja	Membangun Kemitraan dengan Sektor Industri untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja	Membangun Kemitraan dengan Sektor Industri untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja	Membangun Kemitraan dengan Sektor Industri untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
8	Menurunnya kemiskinan	8	Meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dengan memanfaatkan Data Terpadu Sensus Ekonomi dan Sosial Nasional (DTSEN)	Penguatan Perlindungan Sosial melalui Peningkatan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dalam Rangka Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Memberikan Jaminan Kehidupan Layak bagi Keluarga Miskin dan Rentan.	Penguatan Perlindungan Sosial melalui Peningkatan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dalam Rangka Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Memberikan Jaminan Kehidupan Layak bagi Keluarga Miskin dan Rentan.	Penguatan Perlindungan Sosial melalui Peningkatan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dalam Rangka Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Memberikan Jaminan Kehidupan Layak bagi Keluarga Miskin dan Rentan.	Penguatan Perlindungan Sosial melalui Peningkatan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dalam Rangka Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Memberikan Jaminan Kehidupan Layak bagi Keluarga Miskin dan Rentan.	Penguatan Perlindungan Sosial melalui Peningkatan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dalam Rangka Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Memberikan Jaminan Kehidupan Layak bagi Keluarga Miskin dan Rentan.
				Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Pada Masyarakat Miskin dan rentan miskin	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Pada Masyarakat Miskin dan rentan miskin	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Pada Masyarakat Miskin dan rentan miskin	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Pada Masyarakat Miskin dan rentan miskin	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Pada Masyarakat Miskin dan rentan miskin
				Memprioritaskan pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dilengkapi dengan peralatan kerja bagi masyarakat rentan miskin untuk menghindari meningkatnya angka kemiskinan	Memprioritaskan pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dilengkapi dengan peralatan kerja bagi masyarakat rentan miskin untuk menghindari meningkatnya angka kemiskinan	Mendorong penguatan kelembagaan TKM melalui pembentukan kelompok usaha bersama serta integrasi dengan koperasi dan UMKM.	Mendorong penguatan kelembagaan TKM melalui pembentukan kelompok usaha bersama serta integrasi dengan koperasi dan UMKM.	Mendorong penguatan kelembagaan TKM melalui pembentukan kelompok usaha bersama serta integrasi dengan koperasi dan UMKM.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
Tujuan 4 :								
Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing								
9	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	9	Meningkatkan pencapaian kualitas hidup masyarakat atas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang mewujudkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan serta Peningkatan Kualitas Layanan dan Fasilitas Kesehatan yang mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendidikan, peningkatan akses pendidikan terutama pada Wilayah Terpencil dan perluasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendidikan, peningkatan akses pendidikan terutama pada Wilayah Terpencil dan perluasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendidikan, peningkatan akses pendidikan terutama pada Wilayah Terpencil dan perluasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendidikan, peningkatan akses pendidikan terutama pada Wilayah Terpencil dan perluasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendidikan, peningkatan akses pendidikan terutama pada Wilayah Terpencil dan perluasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta Pemerataan kualitas antar satuan Pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Dukungan terhadap pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) melalui Penyediaan Beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta optimalisasi program beasiswa berbasis prestasi akademik dan non akademik	Dukungan terhadap pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) melalui Penyediaan Beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta optimalisasi program beasiswa berbasis prestasi akademik dan non akademik	Dukungan terhadap pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) melalui Penyediaan Beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta optimalisasi program beasiswa berbasis prestasi akademik dan non akademik	Dukungan terhadap pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) melalui Penyediaan Beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta optimalisasi program beasiswa berbasis prestasi akademik dan non akademik	Dukungan terhadap pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) melalui Penyediaan Beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta optimalisasi program beasiswa berbasis prestasi akademik dan non akademik
				Transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan distribusi guru / tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran guru terutama pada kemampuan literasi dan numerasi serta mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter	Transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan distribusi guru / tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran guru terutama pada kemampuan literasi dan numerasi serta mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter	Transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan distribusi guru / tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran guru terutama pada kemampuan literasi dan numerasi serta mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter	Transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan distribusi guru / tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran guru terutama pada kemampuan literasi dan numerasi serta mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter	Transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan distribusi guru / tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran guru terutama pada kemampuan literasi dan numerasi serta mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa seperti kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Perluasan upaya promotif (edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat) dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan, promosi vaksinasi, peningkatan sanitasi, dan pengurangan faktor risiko kesehatan) di seluruh Kecamatan	Perluasan upaya promotif (edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat) dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan, promosi vaksinasi, peningkatan sanitasi, dan pengurangan faktor risiko kesehatan) di seluruh Kecamatan	Perluasan upaya promotif (edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat) dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan, promosi vaksinasi, peningkatan sanitasi, dan pengurangan faktor risiko kesehatan) melalui penyuluhan, kampanye publik, dan media digital di seluruh Kecamatan	Perluasan upaya promotif (edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat) dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan, promosi vaksinasi, peningkatan sanitasi, dan pengurangan faktor risiko kesehatan) melalui penyuluhan, kampanye publik, dan media digital di seluruh Kecamatan	Perluasan upaya promotif (edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat) dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan, promosi vaksinasi, peningkatan sanitasi, dan pengurangan faktor risiko kesehatan) melalui penyuluhan, kampanye publik, dan media digital di seluruh Kecamatan
				Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas secara bertahap, guna memperluas daya tampung, memperbaiki fasilitas pelayanan, dan memenuhi standar kapasitas ideal sesuai pertumbuhan kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas secara bertahap, guna memperluas daya tampung, memperbaiki fasilitas pelayanan, dan memenuhi standar kapasitas ideal sesuai pertumbuhan kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas secara bertahap, guna memperluas daya tampung, memperbaiki fasilitas pelayanan, dan memenuhi standar kapasitas ideal sesuai pertumbuhan kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas secara bertahap, guna memperluas daya tampung, memperbaiki fasilitas pelayanan, dan memenuhi standar kapasitas ideal sesuai pertumbuhan kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas secara bertahap, guna memperluas daya tampung, memperbaiki fasilitas pelayanan, dan memenuhi standar kapasitas ideal sesuai pertumbuhan kebutuhan masyarakat.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu lintas sektor, serta memperkuat peran posyandu dalam deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita dan edukasi gizi secara rutin	Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu lintas sektor, serta memperkuat peran posyandu dalam deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita dan edukasi gizi secara rutin	Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu lintas sektor, serta memperkuat peran posyandu dalam deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita dan edukasi gizi secara rutin	Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu lintas sektor, serta memperkuat peran posyandu dalam deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita dan edukasi gizi secara rutin	Pencegahan dan Penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu lintas sektor, serta memperkuat peran posyandu dalam deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita dan edukasi gizi secara rutin
				Meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan, dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan penempatan di daerah terpencil, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan, dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan penempatan di daerah terpencil, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan, dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan penempatan di daerah terpencil, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan, dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan penempatan di daerah terpencil, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Meningkatkan kualitas, pemenuhan kebutuhan, dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan penempatan di daerah terpencil, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan.	Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan.	Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan.	Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan.	Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Sosial di Bidang Kesehatan.
				Penanggulangan penyakit menulat dan tidak menular melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penanggulangan penyakit menulat dan tidak menular melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penanggulangan penyakit menulat dan tidak menular melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penanggulangan penyakit menulat dan tidak menular melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penanggulangan penyakit menulat dan tidak menular melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
Tujuan 5 :								
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif								
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	10	Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi institusional serta digitalisasi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan	Optimalisasi aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah melalui inovasi pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Optimalisasi aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah melalui inovasi pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Optimalisasi aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah melalui inovasi pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Optimalisasi aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah melalui inovasi pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Optimalisasi aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan aset dan pendapatan asli daerah melalui inovasi pengelolaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital	11	Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan satu pintu berbasis digital yang terintegrasi, serta pengembangan mekanisme respon cepat terhadap aduan masyarakat secara inklusif untuk mendorong terciptanya layanan publik yang responsif dan bebas keluhan (zero complain).	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan satu pintu berbasis digital yang terintegrasi, serta pengembangan mekanisme respon cepat terhadap aduan masyarakat secara inklusif untuk mendorong terciptanya layanan publik yang responsif dan bebas keluhan (zero complain).	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan satu pintu berbasis digital yang terintegrasi, serta pengembangan mekanisme respon cepat terhadap aduan masyarakat secara inklusif untuk mendorong terciptanya layanan publik yang responsif dan bebas keluhan (zero complain).	Optimalisasi sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital dan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain serta penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	Optimalisasi sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital dan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain serta penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah
Tujuan 6 :								
Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya								
12	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	12	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak	Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan	Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat melalui kampanye, sosialisasi, dan pelatihan tentang hak anak dan perempuan.	Memperkuat regulasi, prosedur, dan mekanisme pelaporan tindak kekerasan, termasuk hotline pengaduan, layanan konseling, dan sistem perlindungan terpadu.	Memperkuat regulasi, prosedur, dan mekanisme pelaporan tindak kekerasan, termasuk hotline pengaduan, layanan konseling, dan sistem perlindungan terpadu.	Menyediakan program rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial bagi korban serta pelatihan bagi tenaga pendamping profesional.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Meningkatkan peranan Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan karakter khususnya untuk menanamkan nilai etika dan moral bagi anak di rumah	Meningkatkan peranan Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan karakter khususnya untuk menanamkan nilai etika dan moral bagi anak di rumah	Meningkatkan peranan Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan karakter khususnya untuk menanamkan nilai etika dan moral bagi anak di rumah	Meningkatkan peranan Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan karakter khususnya untuk menanamkan nilai etika dan moral bagi anak di rumah	Meningkatkan peranan Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan karakter khususnya untuk menanamkan nilai etika dan moral bagi anak di rumah
13	Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat	13	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta menjaga toleransi antar umat beragama	Meningkatkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama serta Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama serta Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.	Menguatkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama serta Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama serta Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.	Memaksimalkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama serta memaksimalkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal serta meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan dan rasa nasionalisme	Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal serta meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan dan rasa nasionalisme	Menguatkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal sertamenguatkan kesadaran hukum, kedisiplinan dan rasa nasionalisme	Menguatkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal serta menguatkan kesadaran hukum, kedisiplinan dan rasa nasionalisme	Memaksimalkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal serta memaksimalkan kesadaran hukum, kedisiplinan dan rasa nasionalisme
14	Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai - nilai lokal masyarakat	14	Meningkatkan daya saing pemuda dalam era globalisasi serta meningkatkan kualitas seni budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah	Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda serta peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan pemuda dalam dinamika globalisasi	Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda serta peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan pemuda dalam dinamika globalisasi	Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda serta peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan pemuda dalam dinamika globalisasi	Penguatan kompetensi dan daya saing pemuda serta Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan pemuda dalam dinamika globalisasi	Penguatan kompetensi dan daya saing pemuda serta Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi
				Meningkatkan akses dan kualitas sarana olahraga masyarakat melalui revitalisasi lapangan di setiap kecamatan menjadi sport centre terbuka yang fungsional, meliputi jogging track, outdoor gym, dan lapangan serbaguna untuk mendukung aktivitas komunitas dan olahraga pelajar	Meningkatkan akses dan kualitas sarana olahraga masyarakat melalui revitalisasi lapangan di setiap kecamatan menjadi sport centre terbuka yang fungsional, meliputi jogging track, outdoor gym, dan lapangan serbaguna untuk mendukung aktivitas komunitas dan olahraga pelajar	Melanjutkan pembangunan sport centre di kecamatan lainnya secara bertahap, disertai penyediaan fasilitas multifungsi dan ruang interaksi terbuka untuk mendukung aktivitas komunitas dan olahraga pelajar.	Mengoptimalkan pemanfaatan sport centre melalui penguatan program olahraga berbasis masyarakat, pelibatan pemuda dan komunitas lokal, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan.	Mengoptimalkan pemanfaatan sport centre melalui penguatan program olahraga berbasis masyarakat, pelibatan pemuda dan komunitas lokal, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan.

Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi				
				Peningkatan kualitas kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Peningkatan kualitas kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Peningkatan kualitas kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Peningkatan kualitas kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	Peningkatan kualitas kesenian dan budaya daerah sebagai bagian dari perwujudan identitas daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi
15	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	15	Meningkatkan pemberdayaan responsif gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
				Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector	Pengintegrasian GEDSI (Gender equity dissability, and social inclusion) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh sector
				Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan seperti UMKM atau usaha industri rumahan yang dikelola oleh kaum ibu rumah tangga atau home industri	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan seperti UMKM atau usaha industri rumahan yang dikelola oleh kaum ibu rumah tangga atau home industri	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan seperti UMKM atau usaha industri rumahan yang dikelola oleh kaum ibu rumah tangga atau home industri	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan seperti UMKM atau usaha industri rumahan yang dikelola oleh kaum ibu rumah tangga atau home industri	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan seperti UMKM atau usaha industri rumahan yang dikelola oleh kaum ibu rumah tangga atau home industri

B. Program - Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah berperan dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah serta memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan 11 Program Bupati yang tercantum dalam dokumen visi dan misi yang diserahkan ke KPUD. 11 Program Bupati dalam dokumen visi dan misi adalah sebagai berikut :

- Percepatan Pembangunan jalan dan jembatan
- Normalisasi jaringan irigasi dan Pompanisasi
- BPJS Kesehatan Gratis
- Pupuk tersedia, lancar dan terjangkau untuk pertanian dan Perikanan
- Pembangunan Sekolah Vokasi Pertanian dan Perikanan
- Pembangunan sentra edukasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di setiap Kecamatan
- Pembangunan Sport centre di setiap Kecamatan
- Peningkatan SDM dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
- Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi serta Pengelolaan Persampahan
- Insentif Kader Kesehatan pada Posyandu dan Peningkatan Insentif pegawai Sara'/Guru mengaji serta mengikutkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut ini disajikan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah dengan mencermati Sasaran Pembangunan dan 11 Program Bupati ditampilkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2029

No	Prioritas Pembangunan Daerah	11 Program Bupati
1	Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	- Percepatan pembangunan jalan dan jembatan - Pemenuhan air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan
2	Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	- Normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi - Pupuk tersedia, lancar, dan terjangkau untuk pertanian dan perikanan - Fasilitasi pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan
3	Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	- BPJS Kesehatan gratis - Insentif kader kesehatan pada posyandu - Pengikutsertaan kader kesehatan dan guru mengaji dalam BPJS Ketenagakerjaan
4	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	- Fasilitasi sekolah vokasi pertanian dan perikanan (fokus kompetensi teknis) - Peningkatan kapasitas ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
5	Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	- Pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di setiap kecamatan
6	Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	- Pembangunan sport centre di setiap kecamatan
7	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital - Peningkatan kapasitas SDM dan TPP ASN untuk mendukung digitalisasi
8	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	- Insentif pegawai Sara'/guru mengaji - BPJS Ketenagakerjaan untuk guru mengaji dan kader kesehatan

Delapan program prioritas pembangunan sebagaimana tabel diatas merupakan prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan 5 misi pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel kesesuaian berikut ini.

Tabel 3.12

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

MISI RPJMD 2025-2029		Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029
1	Mewujudkan pembanguinan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.	Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan
		Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital
		Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah
		Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan
3	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah
		Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan
		Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2025 – 2029 juga telah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.13

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan		

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Nasional
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Rangkaian kinerja secara lengkap dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut ini

Tabel 3.14

Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
VISI : Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri								
MISI 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana								
T.1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Wilayah**				**IT.1**	**Indeks Layanan Infrastruktur**		
		S.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan sarana prasarana publik dasar		IS.1.1.1	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
					IS.1.1.2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman dan berkelanjutan		
					IS.1.1.3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana**
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman		Persentase Perumahan yang sdh dilengkapi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya penduduk yang menggunakan layanan akses sistem penyediaan air minum yang layak dan aman		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
						Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi (%)		
				Meningkatnya penduduk yang memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		S.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur strategis pendukung pusat - pusat pertumbuhan ekonomi		IS.1.2.1	Tingkat Kemantapan Jalan		
					IS.1.2.1	Rasio Jaringan Irigasi		
					IS.1.2.2	Persentase Desa Mandiri		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				terpenuhinya layanan air irigasi yang optimal bagi lahan pertanian melalui pemamfaatan jaringan irigasi kabu paten yang berfungsi baik.		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana**
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Angka)		
				Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten		Persentase Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembangunan Desa		Persentase BUM Desa Maju	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
						Persentase Desa Mandiri		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
T.2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana**				**IT.2**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
		S.2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sehat dan berketahanan iklim		IS.2.1.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
					IS.2.1.2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		
					IS.2.1.3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Persentase Sampah Terkelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana**
				Menurunnya tingkat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		S.2.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		IS.2.2.1	Indeks Resiko Bencana		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya layanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana		Persentase Desa /Kelurahan Tangguh Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana**
				Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana sosial dan alam		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
MISI 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru								
T.3	**Terwujudnya ekonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal**				**IT.3**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
					IT.4	**Kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)**		
					IT.5	**PDRB per kapita (Rp Juta)**		
					IT.6	**Gini Ratio**		
					IT.7	**Indeks Akses Keuangan Daerah**		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		S.3.1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan berbasis potensi lokal		IS.3.1.1	Laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan (%)		
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan**
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Volume produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan		Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Menigkatnya distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Menigkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan / Peternakan sesuai peruntukannya		
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase kelompok tani penerima bantuan (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Presentase meningkatnya Sumber Daya Petani		
		S.3.2	Meningkatnya kemandirian pelaku ekonomi lokal		IS.3.2.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)		
					IS.3.2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
					IS.3.2.3	Laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)		
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital**
				Meningkatnya daya saing umkm		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Meningkatnya Investasi Iklim Penanaman Modal Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
						Meningkatnya Investasi Iklim Penanaman Modal Asing		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		S.3.3	Meningkatnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja		IS.3.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka		
					IS.3.3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah**
		S.3.4	Menurunnya kemiskinan		IS.3.4.1	Tingkat Kemiskinan		
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan**
						Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
						Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
						Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
MISI 3 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing								
T.4	**Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing**				**IT.8**	**Indeks Pembangunan Manusia**		
		S.4.1	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat		IS.4.1.1	Rata - rata Lama Sekolah		
					IS.4.1.2	Harapan Lama Sekolah		
					IS.4.1.3	Literasi Membaca (SD/SMP)		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
					IS.4.1.4	Numerasi (SD/SMP)		
					IS.4.1.5	Usia Harapan Hidup		
					IS.4.1.6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)		
					IS.4.1.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah**
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan		Indeks Pemerataan Guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
						Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan**

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
T.5	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan responsif**				**IT.9**	**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		S.5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik		IS.5.1.1	Nilai MCP KPK		
					IS.5.1.2	Nilai SAKIP Kabupaten		
				Meningkatnya transparansi pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem berbasis Elektronik		Persentase laporan keuangan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
						Opini BPK Atas Laporan Keuangan		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				peningkatan kualitas Pelaporan inventaris Asset/barang daerah		Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Evaluasi SPIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
						Kapabilitas APIP		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
						Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		S.5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berbasis digital		IS.5.2.1	Indeks SPBE		
					IS.5.2.2	Indeks Pelayanan Publik		
					IS.5.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat		
					IS.5.2.4	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP4)		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase SKPD yang memanfaatan egovernment	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan**

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**dan Pelayanan Publik**
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pegawai ASN serta pembinaan kepegawaian		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
						Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		
MISI 5 : Mewujudkan ketahanan sosial dan keluarga yang tangguh								
T.6	**Terwujudnya masyarakat dan keluarga yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi dan budaya**				**IT.10**	**Indeks Pembangunan Keluarga**		
					IT.11	**Indeks Pembangunan Gender**		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		S.6.1	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak		IS.6.1.1	Indeks Perlindungan Anak		
				terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase forum anak yg termasuk tingkat kecamatan (%)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan**
		S.6.2	Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat		IS.6.2.1	Persentase Angka kriminalitas yang ditangani		
					IS.6.2.2	Persentase konflik yang ditangani		
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan**

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		S.6.3	Meningkatnya ketahanan budaya dan nilai - nilai lokal masyarakat		IS.6.3.1	Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah		
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam		Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				pengembangan kebudayaan		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan		**Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan**
				Mewujudkan layanan pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat		Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan		Persentase Pertumbuhan Pemuda Yang Dikembangkan Kapasitas Daya Saingnya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda**
						Rasio Wirausaha Pemuda		

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
						Persentase atlet berprestasi		
		S.6.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender		IS.6.4.1	Indeks Ketimpangan Gender		
				meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,pemenuhan hak,serta Perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran keluarga (puspaga) yang gender dan hak anak sesuai standar (Lembaga)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan**

Tujuan		Sasaran		Outcome	Indikator		Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan (Angka)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Parepare yang terdiri atas; Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru. Kawasan Parepare diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan.**

Secara geografis Kabupaten Pinrang memiliki posisi yang strategis karena dilalui oleh Jalur Laut Selat Makassar yang merupakan bagian utama dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Gambar 3.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang

Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2025 – 2029 Kabupaten Pinrang merupakan lokasi prioritas pada **Kawasan Komoditas Unggulan – Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi** serta **Kawasan**

Swasembada Pangan, Air, Energi – Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya.

Disamping itu Kabupaten Pinrang juga menjadi lokasi Prioritas pada Kegiatan **Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya**, **Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)**, **Pengembangan Pangan Hewani** serta **Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**. Keempat kegiatan tersebut merupakan **Kegiatan Prioritas Utama Nasional** di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 3.2
Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan Dalam RPJMN 2025 - 2029

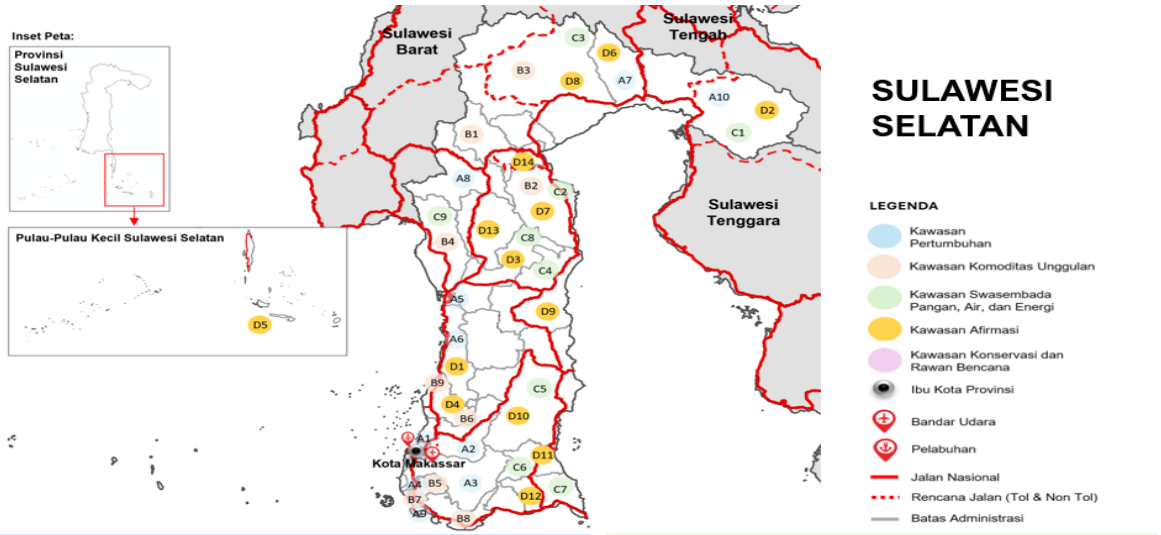

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya
1. Kota Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Gowa
4. Kabupaten Takalar
5. Kota Pare-Pare
6. Kabupaten Barru

Kawasan Perkotaan Kecil
7. Kabupaten Luwu Timur
8. Kabupaten Tana Toraja

Kawasan Industri Takalar
9. Kabupaten Takalar

Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako
10. Kabupaten Luwu Timur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi
1. Kabupaten Toraja Utara
2. Kabupaten. Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Pinrang

Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut
5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Kawasan Sentra Garam
7. Kabupaten Takalar
8. Kabupaten Jeneponto
9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya
1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Wajo
5. Kabupaten Bone
6. Kabupaten Sinjai
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Kabupaten Pinrang

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru

Kawasan Transmigrasi (KT)
2. KT Mahalona, Kabupaten Luwu Timur
3. KT Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan
4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Kabupaten Kepulauan Selayar

Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya
6. Kabupaten Luwu Timur
7. Kabupaten Luwu
8. Kabupaten Luwu Utara
9. Kabupaten Wajo
10. Kabupaten Bone
11. Kabupaten Sinjai
12. Kabupaten Bulukumba
13. Kabupaten Enrekang
14. Kota Palopo

Tabel 3.15

Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan

No	Lokasi Prioritas RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi	
1	**Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi > B4 : Kabupaten Pinrang**	BatuLappa	1	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
			2	Implementasi pertanian rendah karbon
			3	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumberdaya produktif
		Lembang	1	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
			2	Implementasi pertanian rendah karbon
			3	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumberdaya produktif
2	**Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya > C9 : Kabupaten Pinrang**	Suppa	1	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			2	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			3	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			5	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
			6	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
		Mattirobulu	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
			3	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan

No	Lokasi Prioritas RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi	
		Mattiro Sompe	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			4	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			5	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			6	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			7	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
		Lanrisang	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			4	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			5	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			6	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			7	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan

No	Lokasi Prioritas RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi	
		Watang Sawitto	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
		Paleteang	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
		Tiroang	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
		Cempa	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			4	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			5	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			6	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			7	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan

No	Lokasi Prioritas RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi	
		Patampanua	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
			3	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			4	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
		Batulappa	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
		Duampanua	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			4	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			5	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			6	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			7	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan

No	Lokasi Prioritas RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi	
		Lembang	1	Ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana
			2	Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
			3	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
			4	Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya
			5	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan
			6	Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut
			7	Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan
			8	Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten Pinrang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Parepare dan Sekitarnya yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di kabupaten Pinrang akan difokuskan melalui:

1. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses

pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan eliminasi penyakit tropis terabaikan serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage dan rural heritage, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan serta pemanfaatan cagar budaya diprioritaskan di kabupaten Barru dan kota

Parepare yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik.

3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak termasuk pengembangan pangan hewani. Pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan pengembangan pangan local dan nabati diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian melalui peningkatan produktivitas pertanian yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengembangan kawasan sentra perkebunan kakao diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, implementasi pertanian rendah karbon dan peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru termasuk pengembangan pangan akuatik (*blue food*) diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut diarahkan pada pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan logistic, peningkatan daya saing sumber

daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistic, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan. pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

4. Peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta penguatan swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi

pelaksanaan reforma agraria, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan transmigrasi Mahalona melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dan pemerataan pembangunan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local

6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan kabupaten Luwu Timur juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; dan penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan Kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
7. Peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman

kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman melalui pengembangan SPAM regional terintegrasi hulu ke hilir, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir. Serta pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca

disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten Pinrang yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pinrang

Pembangunan kewilayahan Kabupaten Pinrang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi wilayah berbasis sumber daya lokal, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memastikan pelayanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterkaitan antarwilayah, serta potensi kawasan strategis sebagai penggerak utama pembangunan.

Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu 5 tahun ditinjau berdasarkan wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Suppa

Kecamatan Suppa memiliki luas sekitar 6.978,67 Ha serta terdiri atas 8 desa dan 2 kelurahan. Wilayah kecamatan Suppa merupakan Kawasan Perikanan budidaya, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dan Kawasan Peruntukan Industri.

Kecamatan Suppa merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Berdasarkan perda RTRW nomor 3 tahun 2022, Kecamatan Suppa memiliki 3 pelabuhan yakni Pelabuhan Pengumpan Regional Marabombang, Pelabuhan Pengumpan Lokal Ujung Lero dan Pelabuhan Perikanan Pantai Lero.

Kecamatan suppa memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor budidaya perikanan dan merupakan kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan perikanan terpadu dan kawasan pengembangan peternakan SIPAENRE

serta kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan Minapolitan LUWITA yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan. Luas areal budidaya perikanan mencapai 1.574,55 Ha mencakup luas tambak 1.539,15 Ha, Luas Kolam 30,40 Ha dan Luas Sawah yang digunakan untuk budidaya perikanan 5,00 Ha yang menghasilkan produksi komoditas perikanan sebesar 6.242,93 ton. Untuk perikanan tangkap, Jumlah produksi mencapai 7.417,12 ton.

Pada sektor peternakan, jumlah populasi Sapi Potong 1.854 ekor, Kambing 435 ekor dan Unggas 275.494 ekor . Produksi daging selama tahun 2024 mencakup Sapi potong 71.446 Kg, Kambing 3.025,80 Kg dan Unggas 23.399,23 Kg serta produksi telur sebesar 864.128,94 Kg.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Suppa diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Suppa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

2. Kecamatan Mattiro Bulu

Kecamatan Mattiro bulu memiliki luas sekitar 12.771,30 Ha serta terdiri atas 7 desa dan 2 kelurahan. Wilayah kecamatan Mattiro Bulu merupakan kawasan hutan produksi, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, Kawasa Peternakan dan kawasan peruntukan industri. Kecamatan Mattirobulu juga ditetapkan sebagai Kawasan strategis Provinsi yaitu Kawasan Pengembangan Peternakan SIPAENRE serta Kawasan Strategis Kabupaten yaitu Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta dan Makkawaru (WALIMA) yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan.

Kecamatan Mattiro Bulu memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor pertanian . Komoditas pertanian yang menonjol pada

kecamatan Mattiro Bulu adalah padi dan jagung. Untuk komoditas padi luas panen 9.739 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 51.871,14 ton sedangkan jagung untuk pakan ternak memiliki luas panen 6.282 Ha dengan produksi PK (Pipilan Kering) sebesar 41.329 Ton.

Pada sektor peternakan, jumlah populasi Sapi Potong 1.032 ekor, Kerbau 245 ekor, Kambing 287 ekor dan Unggas 376.341 ekor . Produksi daging selama tahun 2024 mencakup Sapi potong 40.220,50 Kg, Kerbau 13.186,80 Kg, Kambing 2.066,40 Kg dan Unggas 34.038,85 Kg serta produksi telur sebesar 1.588.964,81 Kg.

Pada wilayah kecamatan Mattiro Bulu terdapat areal pertanaman kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat dengan luas areal 27,20 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 36 Ton. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Mattirobulu diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan
Kecamatan Mattirobulu

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan; • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

3. Kecamatan Mattiro Sompe

Kecamatan Mattiro Sompe memiliki luas sekitar 9.046,24 Ha serta terdiri atas 7 desa dan 2 kelurahan. Wilayah kecamatan Mattiro Sompe merupakan Kawasan Perikanan budidaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan pariwisata dan kawasan transportasi.

Wilayah kecamatan Mattiro Sompe memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang sektor pertanian dan sektor perikanan serta merupakan kecamatan yang ditetapkan sebagai Kawasan strategis Provinsi

yaitu Kawasan perikanan terpadu dan kawasan strategis Kabupaten yaitu Kawasan Minapolitan Luwita Malace yang berbasis Agrobisnis budidaya komoditas perikanan. Luas areal budidaya perikanan mencapai 2.745,79 Ha mencakup luas tambak 2.667,69 Ha, Luas Kolam 54,60 Ha dan Luas Sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan 23,50 Ha yang menghasilkan produksi komoditas perikanan sebesar 5.201,80 ton

Kecamatan Mattiro Sompe merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Pantai Ammani merupakan destinasi wisata yang berpotensial untuk dikembangkan serta Pelabuhan Langnga yang terletak pada kecamatan mattiro sompe yang merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Sementara pada sektor perikanan, jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 3.181,37 ton

Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Mattiro Sompe adalah komoditas padi dengan luas panen 11.221 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 54.545,26 ton.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Mattiro Sompe diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Mattiro Sompe

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies,

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

4. Kecamatan Lanrisang

Kecamatan Lanrisang memiliki luas sekitar 6.548,41 Ha serta terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan. Wilayah kecamatan Lanrisang merupakan Kawasan Perikanan budidaya, Kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan Kawasan Tanaman Pangan

Wilayah kecamatan Lanrisang memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang sektor pertanian dan sektor perikanan. Kecamatan Lanrisang juga ditetapkan sebagai Kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan perikanan terpadu dan kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan Minapolitan Malace yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan. Luas areal budidaya perikanan mencapai 1.139,39 Ha mencakup luas tambak 1.050,24 Ha, Luas Kolam 68,95 Ha dan Luas Sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan 20,20 Ha yang menghasilkan produksi komoditas perikanan sebesar 1.645,97 ton

Kecamatan Lanrisang merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 1.515,33 ton

Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Lanrisang adalah komoditas padi dengan luas panen 9.487 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 50.982,16 ton.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Lanrisang diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Lanrisang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

5. Watang Sawitto

Kecamatan Watang Sawitto merupakan Kawasan Perkotaan Pinrang yang memiliki luas sekitar 6.176,74 Ha serta terdiri atas 8 kelurahan. Wilayah kecamatan Watang Sawitto merupakan Pusat Kegiatan Lokal sekaligus Pusat Pemerintahan di Kabupaten Pinrang dengan berbagai fasilitas umum. Sebagian dari Wilayah Kecamatan Watang Sawitto merupakan Kawasan Tanaman Pangan, kawasan hortikultura, kawasan pembangkit tenaga listrik dan kawasan pariwisata.

Kecamatan Watang Sawitto memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor pertanian . Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Watang Sawitto adalah padi. Untuk komoditas padi luas panen 9.420 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 56.590,66 ton.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Watang Sawitto diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Watang Sawitto

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP);

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

6. Paleteang

Kecamatan Paleteang merupakan Kawasan Perkotaan Pinrang yang memiliki luas sekitar 4.632,25 Ha serta terdiri atas 6 kelurahan. Wilayah kecamatan Paleteang merupakan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Pinrang. Sebagian dari Wilayah Kecamatan Paleteang merupakan Kawasan Tanaman Pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata Alam permandian Air panas sulili.

Kecamatan Paleteang memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor pertanian . Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Paleteang adalah padi. Untuk komoditas padi luas panen 5.405 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 29.340,36 ton.

Pada wilayah kecamatan Paleteang terdapat areal pertanaman kelapa sawit dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 3,0 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 11,50 Ton. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman,

pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Paleteang diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Paleteang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

7. Tiroang

Kecamatan Tiroang merupakan Kawasan Perkotaan Pinrang yang memiliki luas sekitar 7.744,49 Ha serta terdiri atas 6 kelurahan. Wilayah kecamatan Tiroang merupakan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Pinrang. Sebagian dari Wilayah Kecamatan Tiroang merupakan Kawasan Tanaman Pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan

Kecamatan Tiroang memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor pertanian . Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Tiroang adalah padi. Untuk komoditas padi luas panen 10.548 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 54.199,75 ton.

Pada wilayah kecamatan Tiroang terdapat areal pertanaman kelapa sawit dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 5,0 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 7,0 Ton. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap

kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Tiroang diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Tiroang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

8. Cempa

Kecamatan Cempa memiliki luas sekitar 8.801,00 Ha serta terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan. Wilayah kecamatan Cempa merupakan Kawasan Perikanan budidaya, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata dan Kawasan Tanaman Pangan

Wilayah kecamatan Cempa memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang sektor pertanian dan sektor perikanan. Kecamatan Cempa juga ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan perikanan terpadu dan kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan minapolitan MALACE yang berbasis agrobisnis komoditas perikanan, Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan. Luas areal budidaya perikanan mencapai 2.358,71 Ha mencakup luas tambak 1.393,91 Ha, Luas Kolam 949,80 Ha dan Luas Sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan 15,00 Ha yang menghasilkan produksi komoditas perikanan sebesar 4.234,06 ton

Kecamatan Cempa merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Pantai Dewata merupakan destinasi wisata yang berpotensial untuk dikembangkan. Sementara pada sektor perikanan, jumlah produksi perikanan tangkap belum maksimal hanya mencapai 303,95 ton.

Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Cempa adalah komoditas padi dengan luas panen 10.780 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 52.274,88 ton.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Cempa diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Cempa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan,

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP);

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

9. Patampanua

Kecamatan Patampanua memiliki luas wilayah sekitar 12.402,09 hektare, yang terdiri atas 7 desa dan 4 kelurahan. Di wilayah ini terdapat Bendungan Benteng, yang memiliki fungsi strategis sebagai sumber irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang dan wilayah sekitarnya. Secara geografis, Patampanua merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah bawahannya, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan pembangkitan tenaga listrik .

Kecamatan Patampanua ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten yaitu Kawasan Agropolitan SIPUNDANG yang berbasis Agrobisnis komoditas perkebunan dan hortikultura. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Patampanua. Luas panen padi mencapai **13.558 hektare**, dengan total produksi **Gabah Kering Giling (GKG)** sebesar **69.973,11 ton**. Selain itu, terdapat **areal kelapa sawit** seluas **329 hektare** dalam kategori **Tanaman Menghasilkan (TM)** dengan produksi sekitar **670 ton**. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat

mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Meski didominasi oleh wilayah pegunungan, masyarakat juga aktif dalam sektor perikanan, khususnya **budidaya perikanan air tawar**, dengan luas areal mencapai **429,75 hektare**, yang terdiri atas **kolam (403,35 ha)** dan **sawah yang dimanfaatkan untuk perikanan (26,40 ha)**. Dari kegiatan ini, diperoleh produksi perikanan sebesar **1.441,35 ton**. Sementara itu, pada sektor peternakan, terdapat **Instalasi Pembibitan Rakyat di Desa Malimpung** dengan populasi 47 ekor sapi , serta aktivitas peternakan unggas dan hewan ruminansia yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dengan jumlah populasi Sapi Potong 1.993 ekor, Sapi Perah 29 ekor, Kerbau 97 ekor, Kambing 172 ekor, Babi 385 ekor dan Unggas 567.185 ekor . Produksi daging selama tahun 2024 mencakup Sapi potong 77.485,50 Kg, Kerbau 5.046,80 Kg, Kambing 1.180,80 Kg, Babi 800,26 Kg dan Unggas 50.112,55 Kg serta produksi telur sebesar 2.538.189,50 Kg.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Patampanua diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.24
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Patampanua

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		• penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

10. Batulappa

Kecamatan Batulappa memiliki luas sekitar 16.459,22 Ha serta terdiri atas 4 desa dan 1 kelurahan. Wilayah kecamatan Batulappa merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura serta kawasan perkebunan.

Kecamatan Batulappa memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang pada sektor perkebunan dan juga ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan. Pada wilayah kecamatan Batulappa terdapat perkebunan rakyat dengan jenis komoditas yaitu Kakao dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 2.742,50 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 2.728,70 Ton. Untuk Komoditas Kopi Robusta terdapat perkebunan rakyat dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 28,00 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 4,20 Ton. Untuk meningkatkan produksi Komoditas Kakao dan Kopi Robusta maka luas areal pertanaman dapat ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan mengingat terdapatnya kawasan hutan lindung pada kecamatan Batulappa.

Pada sektor pertanian, Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Batulappa adalah komoditas padi dengan luas panen 1.947 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 9.686,25 ton.

Pada sektor peternakan, jumlah populasi Sapi Potong 2.525 ekor, Kerbau 15 ekor, Kambing 416 ekor dan Unggas 14.781 ekor . Produksi daging selama tahun 2024 mencakup Sapi potong 97.788,50 Kg, Kambing 2.878,20 Kg dan Unggas 2.077,97 Kg serta produksi telur sebesar 30.521,30 Kg.

Pada wilayah kecamatan Batu Lappa terdapat areal pertanaman kelapa sawit dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 71,50 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 122 Ton. pengelolaan kelapa sawit

berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya serta lokasi prioritas Kawasan Komoditas Unggulan – Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Batulappa diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Batulappa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	• kawasan kakao, Kawasan Kopi, hilirisasi industri pengolahan kakao dan kopi, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP);

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

11. Duampanua

Kecamatan Duampanua memiliki luas sekitar 28.442,02 Ha serta terdiri atas 10 desa dan 5 kelurahan. Wilayah kecamatan Duampanua merupakan Kawasan Perikanan budidaya Kawasan hutan produksi, kawasan hortikutura, kawasan perkebunan dan Kawasan Tanaman Pangan.

Wilayah kecamatan Duampanua memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang sektor pertanian dan sektor perikanan dan juga ditetapkan sebagai Kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan perikanan terpadu dan kawasan strategis kabupaten itu kawasan Minapolitan PADABIMA yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan. Luas areal budidaya perikanan mencapai 5.612,01 Ha mencakup luas tambak 5.401,74 Ha, Luas Kolam 193,07 Ha dan Luas Sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan 17,20 Ha yang menghasilkan produksi komoditas perikanan sebesar 10.733,95 ton

Kecamatan Duampanua merupakan wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Pantai

Kappe merupakan destinasi wisata yang berpotensial untuk dikembangkan. Sementara pada sektor perikanan, jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 1.533,61 ton

Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Duampanua adalah komoditas padi dengan luas panen 13.466 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 75.208,94 ton. Pada wilayah kecamatan Duampanua terdapat areal pertanaman kelapa sawit dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 9,0 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 20,50 Ton. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Duampanua diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.26
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Duampanua

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan; ▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

12. Lembang

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pinrang dengan luas sekitar 69.654,58 Ha serta terdiri atas 14 desa dan 2 kelurahan. Pada Wilayah kecamatan Lembang terdapat PLTA Bakaru yang merupakan pusat energy terbarukan yang menyalurkan energy listrik untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilayah Kecamatan Lembang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan Perikanan budidaya, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata Alam dan kawasan transportasi.

Wilayah kecamatan Lembang memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang sektor perkebunan dan peternakan serta Kecamatan Lembang juga ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan perikanan terpadu dan Kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan agropolitan Bakaru yang berbasis Agrobisnis pertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan. Pada wilayah kecamatan Lembang terdapat perkebunan rakyat dengan jenis komoditas yaitu Kakao dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 6.739,15 Ha

yang menghasilkan jumlah produksi 5.295,60 Ton. Untuk Komoditas Kopi Robusta terdapat perkebunan rakyat dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 3.053,00 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 1.781 Ton serta Kopi Arabika terdapat perkebunan rakyat dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 548,50 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 244,30 Ton. Untuk meningkatkan produksi Komoditas Kakao dan Kopi maka luas areal pertanaman dapat ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan mengingat terdapatnya kawasan hutan lindung pada kecamatan Lembang. Pada wilayah kecamatan Lembang terdapat areal pertanaman kelapa sawit dengan luas areal TM (Tanaman Menghasilkan) 14,50 Ha yang menghasilkan jumlah produksi 51 Ton. pengelolaan kelapa sawit berbasis kelapa sawit rakyat mengedepankan program peremajaan tanaman, pelatihan teknis, penerapan prinsip keberlanjutan, dukungan kelembagaan dan pembiayaan, serta inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan

Kecamatan Lembang terdapat wilayah pesisir yang memiliki pantai dan laut yang strategis untuk pengembangan ekonomi maritim. Pantai Salopi merupakan destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan perda RTRW nomor 3 tahun 2022, Kecamatan Lembang memiliki 2 pelabuhan yakni Pelabuhan Pengumpan Lokal Kajuanging dan Pangkalan Pendaratan Ikan Pajalele. Pada sektor perikanan, jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 1.259,69 ton

Komoditas pertanian yang menonjol pada kecamatan Lembang adalah komoditas padi dengan luas panen 4.718 Ha dengan hasil produksi GKG sebesar 23.693,30 ton.

Pada sektor peternakan, jumlah populasi Sapi Potong 6.253 ekor, Kerbau 627 Ekor, Babi 2.137 ekor, Kambing 1.205 ekor dan Unggas 83.705 ekor. Produksi daging selama tahun 2024 mencakup Sapi potong 242.351 Kg, Kerbau 33.374 Kg, Babi 4.317,24 Kg, Kambing 8.437,80 Kg dan Unggas 10.162,51 Kg serta produksi telur sebesar 220.135,75 Kg. Pengembangan sektor peternakan sangat potensial pada wilayah ini mengingat hijauan pakan ternak tersedia dalam jumlah yang melimpah serta masih luasnya areal yang dapat digunakan untuk penggembalaan ternak.

Arah pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2025, menetapkan kabupaten Pinrang sebagai lokasi prioritas klaster pemerataan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi - Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya serta lokasi prioritas dalam Kawasan Komoditas Unggulan – Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi. Memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah tersebut dan sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional berupa Kegiatan Prioritas Utama, maka pembangunan kecamatan Lembang diarahkan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Highlight indikasi intervensi
Kecamatan Lembang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Peningkatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Aman, Sehat dan Ramah Iklim serta Mitigasi Bencana	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar	▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD yang terintegrasi; ▪ pembangunan dan rehabilitasi serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat	▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) dan pembangunan pelabuhan pengumpan local yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah termasuk jalan desa; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan kabupaten dan peningkatan keselamatan angkutan darat
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang serta pengelolaan hutan lestari	▪ peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan di danau; ▪ peningkatan pengelolaan kualitas udara; ▪ Peningkatan kualitas lahan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah radioaktif; ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang; ▪ penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penyusunan rencana detail tata ruang
	Reformasi pengelolaan sampah	▪ penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ▪ peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	▪ perlindungan dan pengelolaan serta konservasi ekosistem dan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ▪ penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi
	Pembangunan rendah karbon	▪ penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan multi sektor; ▪ peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan serta di ekosistem karbon biru, ; ▪ peningkatan upaya dekarbonisasni industry; ▪ penguatan tata kelola pengurangan emisi karbon; ▪ pengembangan transportasi hijau; ▪ pengembangan pertanian rendah karbon
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana	▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ pemberian layanan informasi rawan bencana; ▪ pemberian edukasi dan layanan informasi mitigasi dan penanganan bencana bagi masyarakat;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir; ▪ tanggap darurat bencana ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana
Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya;	▪ ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian; ▪ modernisasi, hilirisasi, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan ▪ peningkatan kapasitas petani dan nelayan; ▪ pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; ▪ pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; ▪ pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis komoditas unggulan; ▪ penguatan dan tata kelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; ▪ pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ normalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi; dan ▪ Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
	pengembangan pangan hewani;	▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; • peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan • penguatan kapasitas SDM; serta • penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian; • penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian; • pendukung peningkatan produksi pertanian; • penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani; • fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• peningkatan produktifitas lahan pertanian; • peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; • pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; • modernisasi dan digitalisasi data pangan; • serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	• kawasan kakao, Kawasan Kopi, hilirisasi industri pengolahan kakao dan kopi, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	• pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata • pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	▪ penguatan ekosistem dan pemberdayaan pemangku ekonomi kreatif, fesyen dan kriya serta kuliner; ▪ pembangunan sentra edukasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;; ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan perizinan usaha; ▪ peningkatan kapasitas pelaku UMKM ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	• pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan • penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • peningkatan keterampilan tenaga kerja; • dukungan pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif.
Perluasan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan bergerak; ▪ peningkatan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis; ▪ pemberian insentif kader kesehatan pada Posyandu; ▪ peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, ▪ peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; dan ▪ peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	▪ penuntasan TBC, ▪ pengendalian penyakit HIV/AIDS, ▪ pengendalian penyakit malaria, ▪ pengendalian penyakit kusta, ▪ pengendalian penyakit rabies, ▪ penguatan intervensi spesifk stunting dan ▪ peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
		▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Berbasis Potensi Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, dan perluasan akses pendidikan	▪ pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; ▪ dukungan peyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran satuan PAUD dan Pendidikan dasar; ▪ pemanfaatan *Platform* Digital pembelajaran dalam peninkatan kompetensi; ▪ peningkatan akses layanan Pendidikan untuk keluarga tidak mampu; ▪ penanganan anak tidak sekolah; ▪ pembangunan sport center; dan ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan	▪ Penguatan kerja sama antar daerah dan antar desa untuk mendorong ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah; ▪ peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP); ▪ Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage	▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local
Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Peningkatan Kualitas dan Prestasi Generasi Muda	Peningkatan ketahanan sosial	▪ peningkatan kerukunan antar umat beragama ▪ Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda; ▪ peningkatan kesejahteranaan pegawai Sara'/Guru mengaji

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja langsung program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk lima tahun periode pemerintahan 2025 - 2030 Kabupaten Pinrang yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja langsung program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah, sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Pinrang yang akan datang.

1.1 Asumsi Makro Ekonomi Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun dari sisi peningkatan belanja daerah. Asumsi-asumsi makro ekonomi daerah tersebut, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi aerah, (2) PDRB per kapita, (3) tingkat inflasi, (4) tingkat kemiskinan, (5) tingkat pengangguran terbuka, (6) Indeks Gini, serta (7) indeks pembangunan manusia (IPM) yang akan menjadi tujuan dan sasaran makro ekonomi daerah Kabupaten Pinrang lima tahun yang akan datang.

Pada sisi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan daerah menempatkan asumsi makro ekonomi daerah ini sebagai potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi makro

ekonomi dan sosial daerah yang baik, bukan hanya akan memperbaiki kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi diekspektasikan akan mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, dengan asumsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berjalan dengan baik.

Sebaliknya, pada sisi belanja, target-target makro ekonomi daerah akan berdampak pada kebutuhan alokasi belanja daerah yang besar. Semakin tinggi target makro ekonomi dan sosial daerahsemakin tinggi kebutuhan fiskal daerah bersangkutan. Selanjutnya, capaian indikator makro ekonomi daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga antara asumsi-asumsi makro ekonomi ini akan memiliki hubungan timbal balik dengan aspek keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja daerah.

Berikut asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Pinrang yang hendak dicapai dan diharapkan menjadi instrumen pokok dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun implementasi pembangunan daerah ke depan.

Tabel 4. 1

Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang,

Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	6,01	6,59	6,75	6,8	6,95	7,02
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	67,89	70,85	85,55	98,72	115,45	145,92
3	Kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,35	7,25	6,45	6,35	6,05	5,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02	2,94	2,75	2,64	2,50	2,44
6	Indeks Gini	0,291	0,286	0,280	0,274	0,266	0,260
7	Indeks Pembangunan Manusia	75,75	76,27	76,83	77,34	77,85	78,02
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	30,56	31,69	32,75	33,84	34,56	35,78
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,52	73,69	73,86	74,03	74,20	74,38

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Hasil proyeksi asumsi makro ekonomi daerah ini berdasarkan pada capaian Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir. Selain itu, asumsi- asumsi tersebut memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, serta wilayah- wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi Kabupaten Pinrang. Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Pinrang yang diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi keuangan daerah Kabupaten Pinrang mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah dan secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang selama lima tahun ke depan diasumsikan tumbuh secara konsisten sehingga secara perlahan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan untuk lima tahun kedepan.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Pinrang akan terus membaik. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Pinrang juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik.

1.2 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal pendapatan daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 2025-2029 ke depan.

Pendapatan daerah untuk Lima tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang yang semakin membaik. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Pinrang adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan asumsi-asumsi makro ekonomi daerah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tidak cukup kuat dalam mendorong peningkatan PAD dan pendapatan daerah secara umum jika tidak disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban fiskalnya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghadirkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang baik, mampu mengelola segenap potensi PAD yang berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan

peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah beserta dengan sumber- sumber pendapatan PAD lainnya.

Selengkapnya hasil proyeksi pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2030, dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 - 2030 (Rupiah)

Kode	Uraian	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**234.768.302.342,00**	**246.892.393.038,00**	**264.267.792.034,00**	**275.598.231.721,00**	**293.854.817.370,00**	**312.323.207.549,00**
4.1.01	Pajak Daerah	85.861.596.425,00	96.274.217.373,00	111.917.942.215,00	121.475.512.840,00	137.997.710.596,00	154.709.863.318,00
4.1.02	Retribusi Daerah	132.290.498.000,00	133.669.643.590,00	135.062.347.103,00	136.489.466.110,00	137.871.188.949,00	139.267.708.048,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.636.207.917,00	10.848.932.075,00	11.065.910.716,00	11.287.228.931,00	11.512.973.509,00	11.743.232.980,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.980.000.000,00	6.099.600.000,00	6.221.592.000,00	6.346.023.840,00	6.472.944.316,00	6.602.403.203,00
4	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.259.454.475.416,00**	**1.271.249.020.170,00**	**1.273.369.510.371,00**	**1.278.617.205.475,00**	**1.279.093.377.530,00**	**1.280.499.311.305,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.614.957.000,00	1.183.331.106.570,00	1.185.164.417.635,00	1.190.116.061.812,00	1.190.387.222.430,00	1.191.379.094.654,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.839.518.416,00	87.917.913.600,00	88.205.092.736,00	88.501.143.663,00	88.706.155.100,00	89.120.216.651,00
4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**1.494.222.777.758,00**	**1.518.141.413.208,00**	**1.537.637.302.405,00**	**1.554.215.437.196,00**	**1.572.948.194.900,00**	**1.592.822.518.854,00**
5	**BELANJA DAERAH**						
5	**BELANJA OPERASI**	**1.159.677.540.777,00**	**1.139.962.512.548,00**	**1.153.121.251.237,00**	**1.164.051.869.473,00**	**1.175.809.099.495,00**	**1.186.950.663.085,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	637.814.146.849,00	644.192.288.318,00	651.932.524.765,00	657.855.863.736,00	664.555.741.700,00	670.589.379.712,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.978.923.704,00	461.679.977.518,00	466.757.577.293,00	471.420.545.066,00	476.130.142.517,00	480.886.835.942,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.884.470.224,00	34.090.246.712,00	34.431.149.179,00	34.775.460.671,00	35.123.215.278,00	35.474.447.431,00
5.1.06	Belanja Sosial	-	-	-	-	-	

Kode	Uraian	Rancangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Tahun Anggaran 2026	Rancangan Tahun Anggaran 2027	Rancangan Tahun Anggaran 2028	Rancangan Tahun Anggaran 2029	Rancangan Tahun Anggaran 2030
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	**BELANJA MODAL**	**218.941.867.851,00**	**211.566.983.401,00**	**215.090.855.705,00**	**217.686.963.085,00**	**220.036.547.481,00**	**222.046.701.394,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.839.983.026,00	46.883.183.365,00	46.414.351.531,00	45.950.208.016,00	45.490.705.936,00	44.580.891.817,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.264.618.692,00	58.201.387.757,00	58.783.401.635,00	59.371.235.651,00	59.964.948.007,00	60.564.597.488,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.270.284.349,00	100.006.770.131,00	103.006.973.235,00	105.067.112.700,00	107.168.454.954,00	109.311.824.053,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.206.755.784,00	4.122.620.668,00	4.040.168.254,00	3.959.364.889,00	3.880.177.592,00	3.763.772.264,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	360.226.000,00	353.021.480,00	345.961.050,00	339.041.829,00	332.260.992,00	325.615.772,00
5	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.036.783.654,00**	**5.469.444.466,00**	**6.563.333.353,00**	**7.876.000.024,00**	**9.845.000.030,00**	**13.783.000.043,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.036.783.654,00	5.469.444.466,00	6.563.333.353,00	7.876.000.024,00	9.845.000.030,00	13.783.000.043,00
5	**BELANJA TRANSFER**	**159.442.203.125,00**	**161.142.472.793,00**	**162.861.862.110,00**	**164.600.604.614,00**	**167.257.547.894,00**	**170.042.154.332,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.584.763.725,00	10.796.458.999,00	11.012.388.179,00	11.232.635.943,00	12.355.899.537,00	13.591.489.491,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	148.857.439.400,00	150.346.013.794,00	151.849.473.931,00	153.367.968.671,00	154.901.648.357,00	156.450.664.841,00
	Jumlah Belanja	**1.543.098.395.407,00**	**1.518.141.413.208,00**	**1.537.637.302.405,00**	**1.554.215.437.196,00**	**1.572.948.194.900,00**	**1.592.822.518.854,00**
	Total Surplus/(Defisit)	48.875.617.649,00	-	-	-	-	-
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
6	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**48.875.617.649,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.875.617.649,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	

Sumber data : Data Olahan Bapperida, 2025

Selama periode 2025 – 2029, pendapatan daerah Kabupaten Pinrang diharapkan meningkat secara konsisten dari Rp 1,475 trilyun pada tahun 2025 menjadi Rp. 1,558 trilyun pada tahun 2029. Peningkatan ini diasumsikan lebih banyak disebabkan oleh pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan Transfer.

Proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan PDRB per kapita yang cukup besar, peningkatan IPM yang konsisten hingga setara dengan provinsi, serta penurunan tingkat kemiskinan yang tajam dan tingkat pengangguran yang kembali pada posisi terendah selama periode pembangunan sebelumnya, akan mendorong kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang juga meningkat secara konsisten selama periode yang sama.

Target-target makro ekonomi berimplikasi besar pada alokasi belanja langsung, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Implikasinya, proyeksi alokasi kebutuhan belanja langsung secara bertahap akan lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan dukungan untuk pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

4.1.2 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah merumuskan rencana program prioritas serta program-program lainnya yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025 hingga 2030. Seluruh program ini disusun secara strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan program-program tersebut akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, sebagai sumber pembiayaan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana program ini mencakup berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang meliputi bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Masing-masing program dirancang dengan mempertimbangkan capaian target pembangunan jangka menengah, keterpaduan dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pinrang selama kurun waktu Tahun 2025 – 2030 disajikan berdasarkan Urusan dan Program.

Tabel 4. 3

Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030 Kabupaten Pinrang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					457.507.107.800		460.651.149.577		461.840.928.314		463.318.061.689		466.601.055.205	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					328.751.780.960		328.960.144.576		328.960.144.576		329.010.144.574		329.130.144.575	
Meningkatnya layanan adminstrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	328.751.780.960	100	328.960.144.576	100	328.960.144.576	100	329.010.144.574	100	329.130.144.575	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					128.346.942.240		131.222.952.709		132.405.744.041		133.820.993.583		136.965.465.779	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 (%)	74,94	77,98	81,02	128.346.942.240	83,99	131.222.952.709	86,96	132.405.744.041	89,93	133.820.993.583	92,9	136.965.465.779	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (%)	97,88	98,23	98,58		98,93		99,28		99,63		99,98		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	32,75	37,72	42,7		47,68		52,66		57,63		62,61		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					50.000.000		52.500.000		53.287.500		54.406.538		60.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	53.287.500	100	54.406.538	100	60.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					251.643.000		256.675.860		259.242.619		264.686.714		270.245.135	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Proporsi PTK yang bersertifikat (%)	32	33	34	251.643.000	35	256.675.860	36	259.242.619	37	264.686.714	38	270.245.135	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					106.741.600		108.876.432		110.509.578		112.830.280		115.199.716	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan / diperbarui (%)	80	81	82	106.741.600	83	108.876.432	84	110.509.578	85	112.830.280	86	115.199.716	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0		50.000.000		52.000.000		55.000.000		60.000.000	
Terlestarinya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra (%)	70	72	73	0	74	50.000.000	75	52.000.000	76	55.000.000	77	60.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					339.905.737.638		343.052.737.638		344.052.737.638		347.252.737.638		349.352.737.638	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					101.354.689.638		101.354.689.638		101.354.689.638		101.354.689.638		101.354.689.638	
Meningkatnya Layanan Administrasi Urusan Kesehatan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	101.354.689.638	100	101.354.689.638	100	101.354.689.638	100	101.354.689.638	100	101.354.689.638	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					230.377.748.000		233.377.748.000		234.377.748.000		236.877.748.000		238.977.748.000	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (%)	100	100	100	230.377.748.000	100	233.377.748.000	100	234.377.748.000	100	236.877.748.000	100	238.977.748.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.994.800.000		7.024.800.000		7.024.800.000		7.324.800.000		7.324.800.000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan (Angka)	100	100	100	6.994.800.000	100	7.024.800.000	100	7.024.800.000	100	7.324.800.000	100	7.324.800.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					495.000.000		595.000.000		595.000.000		695.000.000		695.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Angka)	100	100	100	495.000.000	100	595.000.000	100	595.000.000	100	695.000.000	100	695.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					683.500.000		700.500.000		700.500.000		1.000.500.000		1.000.500.000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keseheatan (%)	100	100	100	683.500.000	100	700.500.000	100	700.500.000	100	1.000.500.000	100	1.000.500.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					102.251.615.216		107.061.615.216		111.151.615.216		118.191.615.216		123.131.615.216	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.049.527.408		23.672.565.718		24.731.053.468		24.655.230.918		24.970.300.918	
Meningkatnya penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi secara efektif dan efisien	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	96,92	96,92	97,89	13.176.083.708	98,87	12.237.549.833	99,86	13.296.037.583	99,99	13.220.215.033	100	13.535.285.033	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	75,56	76	76,2	10.873.443.700	76,4	11.435.015.885	76,6	11.435.015.885	76,8	11.435.015.885	77	11.435.015.885	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,25	90,5	90,72		91		91,25		91,5		92		1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.433.871.450		6.870.546.365		7.858.205.820		9.365.248.248		11.178.107.984	
Terpenuhinya layanan air irigasi, air baku dan layanan infrastruktur sumber daya air lainnya.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	50	50	51	6.433.871.450	51	6.870.546.365	52	7.858.205.820	52	9.365.248.248	52	11.178.107.984	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Angka)	80,71	81	81,5		82		82,5		83		83,5		1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.270.000.000		3.740.000.000		3.801.000.000		4.740.000.000		5.840.000.000	
Meningkatnya penduduk yang menggunakan layanan akses sistem penyediaan air minum yang layak dan aman	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan (%)	8,35	8,43	8,56	2.270.000.000	8,73	3.740.000.000	8,96	3.801.000.000	9,23	4.740.000.000	9,55	5.840.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi (%)	88,53	88,7	89,03		89,44		89,91		90,46		90,45		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					975.000.000		1.400.000.000		1.380.000.000		1.820.000.000		1.900.000.000	
Meningkatnya penduduk yang memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Kinerja Pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	1,12	1,36	3,53	975.000.000	5,55	1.400.000.000	7,53	1.380.000.000	9,99	1.820.000.000	12,09	1.900.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Kinerja Pelayanan SPALD-T Akses Aman (%)	1,54	1,53	1,56		1,6		1,64		1,67		1,91		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.295.000.000		2.886.000.000		3.087.760.000		4.571.300.000		4.594.000.000	
Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Angka)	23,44	53,09	59,49	2.295.000.000	66,39	2.886.000.000	73,5	3.087.760.000	80,82	4.571.300.000	85,85	4.594.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					2.000.000.000		1.000.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000	
Meningkatnya infrastruktur permukiman yang terbangun dalam kawasan strategis daerah	Persentase Kawasan Strategis yang terfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur permukiman (%)	14,29	7,14	7,14	2.000.000.000	7,14	1.000.000.000	7,14	1.900.000.000	7,14	1.900.000.000	7,14	1.900.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.280.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota (Angka)	0,98	1	1	1.280.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					550.000.000		800.000.000		835.000.000		1.250.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Rasio penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten (Rasio)	0,032	0,033	0,033	550.000.000	0,033	800.000.000	0,033	835.000.000	0,033	1.250.000.000	0,033	1.200.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					61.280.528.358		64.313.062.233		65.191.814.483		67.090.097.033		68.772.327.033	
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Persentase Kemantapan Jalan (%)	68,54	70,22	71,75	61.280.528.358	73,28	64.313.062.233	74,81	65.191.814.483	76,34	67.090.097.033	77,87	68.772.327.033	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					235.058.000		246.810.900		259.151.445		272.109.017		399.249.281	
Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifkat kompetensi (Angka)	1	1	1	235.058.000	1	246.810.900	1	259.151.445	1	272.109.017	1	399.249.281	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					882.630.000		882.630.000		857.630.000		1.127.630.000		977.630.000	
Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dalam RTRW (%)	100	100	100	882.630.000	100	882.630.000	100	857.630.000	100	1.127.630.000	100	977.630.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.591.907.208		1.775.000.000		2.190.000.000		2.705.000.000		2.955.000.000	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					155.000.000		360.000.000		565.000.000		580.000.000		580.000.000	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Progam Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	0	0,2	0,2	155.000.000	0,2	360.000.000	0,2	565.000.000	0,2	580.000.000	0,2	580.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					636.907.208		425.000.000		535.000.000		885.000.000		1.085.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (Angka)	1,02	1,73	20	636.907.208	25	425.000.000	33,33	535.000.000	50	885.000.000	100	1.085.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					250.000.000		555.000.000		555.000.000		555.000.000		555.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Rumah tidak layak huni pad wilayah pencegahan kumuh (%)	0,44	4,34	4,32	250.000.000	4,16	555.000.000	4,02	555.000.000	3,89	555.000.000	3,76	555.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					550.000.000		435.000.000		535.000.000		685.000.000		735.000.000	
Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Persentase Perumahan yang sdh dilengkapi PSU (%)	0	0,012	0,036	550.000.000	0,034	435.000.000	0,032	535.000.000	0,03	685.000.000	0,029	735.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.190.904.338		18.630.904.338		19.612.904.338		19.854.904.338		22.354.904.338	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.340.827.888		12.386.827.888		12.872.827.888		12.399.827.888		12.399.827.888	
Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	3.411.118.012	100	3.457.118.012	100	3.461.118.012	100	3.470.118.012	100	3.470.118.012	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	95	95	8.929.709.876	95	8.929.709.876	95	9.411.709.876	95	8.929.709.876	95	8.929.709.876	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.856.259.000		1.946.259.000		2.046.259.000		2.170.259.000		4.670.259.000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	282.198.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	351.000.000	100	400.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	1.574.061.000	100	1.616.259.000	100	1.716.259.000	100	1.819.259.000	100	4.270.259.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.255.865.450		2.409.865.450		2.505.865.450		2.696.865.450		2.696.865.450	
Meningkatnya layanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana	Persentase Desa /Kelurahan Tangguh Bencana (%)	100	100	100	2.255.865.450	100	2.409.865.450	100	2.505.865.450	100	2.696.865.450	100	2.696.865.450	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.737.952.000		1.887.952.000		2.187.952.000		2.587.952.000		2.587.952.000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	95	95	95	30.000.000	95	100.000.000	95	150.000.000	95	300.000.000	95	300.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	95	95	95	1.707.952.000	95	1.787.952.000	95	2.037.952.000	95	2.287.952.000	95	2.287.952.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.693.047.530		4.815.047.530		5.041.047.530		5.476.047.530		5.576.047.530	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.927.047.530		4.026.024.530		4.020.047.530		4.285.547.530		4.364.047.530	
Meningkatnya Layanan Administrasi Bidang Sosial	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	3.927.047.530	100	4.026.024.530	100	4.020.047.530	100	4.285.547.530	100	4.364.047.530	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					114.000.000		123.023.000		153.500.000		160.500.000		165.000.000	
Meningkatnya Kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	114.000.000	100	123.023.000	100	153.500.000	100	160.500.000	100	165.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					5.000.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000		12.000.000	
Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan secara cepat, layak, dan berkeadilan melalui pemulangan dan reintegrasi sosial	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	7.500.000	100	10.000.000	100	12.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					290.500.000		278.500.000		357.000.000		407.000.000		422.000.000	
Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	290.500.000	100	278.500.000	100	357.000.000	100	407.000.000	100	422.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					46.000.000		52.000.000		124.000.000		170.000.000		170.000.000	
Meningkatnya akses dan penerimaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin	Persentase kegiatan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana (%)	100	100	100	46.000.000	100	52.000.000	100	124.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					232.500.000		249.500.000		298.000.000		357.000.000		357.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana sosial dan alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	232.500.000	100	249.500.000	100	298.000.000	100	357.000.000	100	357.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					78.000.000		81.000.000		81.000.000		86.000.000		86.000.000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan taman makam pahlawan (Angka)	100	100	100	78.000.000	100	81.000.000	100	81.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.604.003.310		5.915.493.310		6.195.493.310		6.310.493.310		6.360.493.310	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.818.643.310		5.018.643.310		5.254.993.310		5.355.493.310		5.380.493.310	
Meningkatnya ketercapaian pelayanan penunjang pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	4.818.643.310	100	5.018.643.310	100	5.254.993.310	100	5.355.493.310	100	5.380.493.310	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					25.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Angka)	70	70	72	25.000.000	75	15.000.000	80	15.000.000	85	15.000.000	90	25.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					525.000.000		625.000.000		650.000.000		655.000.000		660.000.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	25	27	30	525.000.000	35	625.000.000	40	650.000.000	45	655.000.000	50	660.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					144.985.000		145.960.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	60	63,5	65	144.985.000	67,5	145.960.000	70	150.000.000	72	155.000.000	75	160.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					90.375.000		110.890.000		125.500.000		130.000.000		135.000.000	
Meningkatnya pekerja Indonesia (dalam daerah) yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	5.000	5.050	5.100	90.375.000	5.200	110.890.000	5.250	125.500.000	5.300	130.000.000	5.500	135.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					953.000.000		976.500.000		1.156.500.000		1.356.500.000		1.356.500.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					271.000.000		275.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000	
meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	30,81	32,1	32,8	271.000.000	33	275.000.000	33,2	285.000.000	33,8	285.000.000	34	285.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					442.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan (Angka)	0,01	0,05	0,04	442.000.000	0,04	450.000.000	0,03	500.000.000	0,03	500.000.000	0,03	500.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					35.500.000		40.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000	
meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,pemenuhan hak,serta Perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang gender dan hak anak sesuai standar (Lembaga)	0	1	1	35.500.000	1	40.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					36.500.000		36.500.000		46.500.000		46.500.000		46.500.000	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	100	100	36.500.000	100	36.500.000	100	46.500.000	100	46.500.000	100	46.500.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					73.000.000		75.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000	
terjaminnya tumbuh kembang anak	Persentase forum anak yg termasuk tingkat kecamatan (%)	100	100	100	73.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					95.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi,penelantaran,perkawinandan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	95.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					6.802.435.944		6.905.435.944		7.237.435.944		7.422.435.944		7.422.435.944	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694	
Meningkatnya penunjang urusan pemerintah bidang pangan					3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694		3.933.671.694	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					115.000.000		115.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5,65	6,75	7,4	115.000.000	8,35	115.000.000	9,1	135.000.000	9,85	135.000.000	10,2	135.000.000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.184.889.250		2.284.889.250		2.484.889.250		2.684.889.250		2.684.889.250	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,9	92,6	93,2	2.184.889.250	94,1	2.284.889.250	94,9	2.484.889.250	95,2	2.684.889.250	95,9	2.684.889.250	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					508.875.000		508.875.000		608.875.000		608.875.000		608.875.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,93	11,01	10,1	508.875.000	9,17	508.875.000	9,17	608.875.000	9,17	608.875.000	9,17	608.875.000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					60.000.000		63.000.000		75.000.000		60.000.000		60.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	96	100	100	60.000.000	100	63.000.000	100	75.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					230.177.000		230.177.000		230.177.000		230.177.000		230.177.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					172.927.000		172.927.000		172.927.000		172.927.000		172.927.000	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	21,134	23,149	27,169	172.927.000	25,987	172.927.000	33,119	172.927.000	33,149	172.927.000	35	172.927.000	2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					57.250.000		57.250.000		57.250.000		57.250.000		57.250.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	92,03	92,85	95,04	57.250.000	92,86	57.250.000	93,67	57.250.000	94,44	57.250.000	95,02	57.250.000	2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.295.000.000		16.191.907.208		16.671.907.208		17.226.907.208		17.926.907.208	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.475.000.000		8.181.000.000		8.606.907.208		8.665.000.000		8.625.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Transparan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	7.475.000.000	100	8.181.000.000	100	8.606.907.208	100	8.665.000.000	100	8.625.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					95.000.000		60.000.000		60.000.000		360.000.000		360.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	95.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000		260.000.000		275.000.000		285.000.000		285.000.000	
Menurunnya tingkat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten (Angka)	67,07	73,52	73,69	200.000.000	73,86	260.000.000	74,03	275.000.000	74,2	285.000.000	74,38	285.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					150.000.000		130.000.000		130.000.000		165.000.000		165.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	13,93	0,0075	0,0075	150.000.000	0,0075	130.000.000	0,0075	130.000.000	0,0075	165.000.000	0,0075	165.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					35.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	87,565	87,565	87,582	35.000.000	87,579	30.000.000	87,584	30.000.000	87,593	30.000.000	87,593	30.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					100.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab usaha da/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Angka)	100	100	100	100.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	15.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan Hidup (%)	100	100	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.135.000.000		7.380.907.208		7.420.000.000		7.571.907.208		8.311.907.208	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Sampah Terkelola (%)	63,68	67,73	71,18	7.135.000.000	74,99	7.380.907.208	79	7.420.000.000	83,42	7.571.907.208	87,5	8.311.907.208	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.528.140.934		6.618.140.934		6.700.140.934		6.810.140.934		6.960.140.934	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.127.821.934		5.185.946.934		5.238.910.934		5.309.963.934		5.406.838.934	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Kependudukan	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	81	5.127.821.934	82	5.185.946.934	82	5.238.910.934	83	5.309.963.934	83	5.406.838.934	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					800.785.000		815.785.000		829.449.000		847.777.000		872.777.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	15	16	18	800.785.000	20	815.785.000	25	829.449.000	28	847.777.000	30	872.777.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					234.540.000		243.915.000		252.455.000		263.910.000		279.535.000	
Meningkatnya Kualitas Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,46	99,65	99,7	234.540.000	99,75	243.915.000	99,75	252.455.000	99,8	263.910.000	99,82	279.535.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					364.994.000		372.494.000		379.326.000		388.490.000		400.990.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	364.994.000	100	372.494.000	100	379.326.000	100	388.490.000	100	400.990.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					78.158.470.854		78.218.470.854		78.588.470.854		78.738.470.854		78.738.470.854	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.778.470.854		4.838.470.854		4.998.470.854		5.078.470.854		5.078.470.854	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,25	90,5	90,72	4.778.470.854	91	4.838.470.854	91,25	4.998.470.854	91,5	5.078.470.854	92	5.078.470.854	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70,55	71,3	71,45		71,6		71,75		71,9		71,1		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	45	50	60	400.000.000	65	400.000.000	70	400.000.000	80	400.000.000	90	400.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					120.000.000		120.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya efektifitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	5,79	7,24	10,14	120.000.000	14,49	120.000.000	21,73	200.000.000	28,98	200.000.000	36,23	200.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					71.690.000.000		71.690.000.000		71.690.000.000		71.720.000.000		71.720.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	52,17	57,97	63,77	71.690.000.000	67,14	71.690.000.000	72,46	71.690.000.000	75,36	71.720.000.000	78,76	71.720.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUM Desa Maju (Persentase)	0	0,14	0,28		0,43		0,57		0,72		0,86		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.170.000.000		1.170.000.000		1.300.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan (Angka)	90	91	92	1.170.000.000	93	1.170.000.000	94	1.300.000.000	95	1.340.000.000	96	1.340.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.592.390.203		13.809.390.203		13.979.390.203		14.082.390.203		14.082.390.203	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.991.890.203		6.991.890.203		6.991.890.203		6.991.890.203		6.991.890.203	
meningkatnya layanan administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan,pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	79,8	81,77	86,85	6.991.890.203	88,81	6.991.890.203	89,03	6.991.890.203	89,33	6.991.890.203	91,02	6.991.890.203	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					286.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	23.2-23.3	23.2-23.3	22.5-22.7	286.000.000	22.5-22.7	330.000.000	21.8-21.9	330.000.000	21.4-21.43	330.000.000	21.10-21.14	330.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.327.000.000		4.500.000.000		4.650.000.000		4.750.000.000		4.750.000.000	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Angka)	6,18	10,54	10,21	4.327.000.000	9,88	4.500.000.000	9,55	4.650.000.000	9,55	4.750.000.000	9,22	4.750.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.987.500.000		1.987.500.000		2.007.500.000		2.010.500.000		2.010.500.000	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	80	85	85	1.987.500.000	85	1.987.500.000	90	2.007.500.000	90	2.010.500.000	90	2.010.500.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.517.554.730		8.517.554.730		8.643.554.730		8.968.554.730		8.968.554.730	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.790.082.730		7.790.082.730		7.790.082.730		7.890.082.730		7.890.082.730	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,55	72,56	72,57	7.790.082.730	72,58	7.790.082.730	72,59	7.790.082.730	72,6	7.890.082.730	72,61	7.890.082.730	2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					628.243.000		628.243.000		743.994.853		963.520.996		963.520.996	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Transportasi Darat (Angka)	0,58	0,58	0,59	628.243.000	0,59	628.243.000	0,59	743.994.853	0,6	963.520.996	0,6	963.520.996	2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	0,44	0,44	0,44		0,45		0,45		0,45		0,45		2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					99.229.000		99.229.000		109.477.147		114.951.004		114.951.004	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Angka)	1	1	1	99.229.000	0,66	99.229.000	0,66	109.477.147	0,66	114.951.004	0,66	114.951.004	2.15.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.275.232.436		9.838.229.436		9.913.229.436		9.913.229.436		10.058.229.436	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.918.016.436		5.636.829.436		5.863.859.436		5.432.439.436		5.548.029.436	
Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.918.016.436	100	5.636.829.436	100	5.863.859.436	100	5.432.439.436	100	5.548.029.436	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.260.012.000		1.501.470.000		1.349.370.000		1.580.790.000		1.410.000.000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik (Angka)	92,66	93	93,5	1.260.012.000	93,75	1.501.470.000	94	1.349.370.000	94,5	1.580.790.000	95	1.410.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.097.204.000		2.699.930.000		2.700.000.000		2.900.000.000		3.100.200.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang memanfaatan egovernment (Angka)	100	100	100	2.097.204.000	100	2.699.930.000	100	2.700.000.000	100	2.900.000.000	100	3.100.200.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.807.413.887		4.287.413.887		4.751.413.887		5.010.413.887		5.285.413.887	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.308.002.887		3.729.413.887		3.747.413.887		3.747.413.887		3.747.413.887	
Meningkatnya ketercapaian pelayanan penunjang pemerintahan daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,85	79	80	3.308.002.887	82	3.729.413.887	84	3.747.413.887	85	3.747.413.887	86	3.747.413.887	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					56.011.000		58.400.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang (Angka)	39	40	41	56.011.000	42	58.400.000	43	65.000.000	44	70.000.000	45	75.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					15.000.000		17.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat di Kab / Kota (%)	0,6	0.6-0.69	0.7-0.79	15.000.000	0.8-0.89	17.000.000	0.8-0.89	90.000.000	0.8-0.89	95.000.000	0.8-0.89	100.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					41.400.000		54.600.000		250.000.000		278.000.000		325.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	42	45	48	41.400.000	50	54.600.000	53	250.000.000	55	278.000.000	57	325.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					167.000.000		188.000.000		253.757.000		275.000.000		338.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	50,13	50,41	50,7	167.000.000	50,98	188.000.000	51,26	253.757.000	51,54	275.000.000	51,82	338.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					180.000.000		190.000.000		225.000.000		295.000.000		350.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	50,13	50,41	50,7	180.000.000	50,98	190.000.000	51,26	225.000.000	51,54	295.000.000	51,82	350.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					40.000.000		50.000.000		120.243.000		250.000.000		350.000.000	
Meningkatnya daya saing umkm	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	17	18	19	40.000.000	20	50.000.000	21	120.243.000	22	250.000.000	23	350.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.374.110.398		7.438.610.398		7.558.610.398		7.558.610.398		7.558.610.398	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.183.610.398		6.183.610.398		6.183.610.398		6.183.610.398		6.183.610.398	
Terselenggaranya administrasi penunjang urusan penanaman modal	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74	75	75,60	6.183.610.398	76,20	6.183.610.398	76,81	6.183.610.398	77,43	6.183.610.398	78,05	6.183.610.398	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					60.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0,02	3,80	3,88	60.000.000	3,96	75.000.000	4,04	100.000.000	4,12	100.000.000	4,2	100.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					528.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	528.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					267.500.000		275.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	267.500.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					160.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	160.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.583.531.050		8.760.827.050		8.956.731.050		8.995.581.050		9.192.715.526	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.526.731.050		4.605.827.050		4.725.527.050		4.731.581.050		4.848.027.050	
Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Urusan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	4.526.731.050	100	4.605.827.050	100	4.725.527.050	100	4.731.581.050	100	4.848.027.050	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.516.800.000		1.600.000.000		1.650.000.000		1.680.000.000		1.690.000.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	20	21	22	1.516.800.000	23	1.600.000.000	24	1.650.000.000	25	1.680.000.000	26	1.690.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.445.000.000		2.455.000.000		2.471.204.000		2.474.000.000		2.542.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi (%)	50	50	80	2.445.000.000	50	2.455.000.000	50	2.471.204.000	50	2.474.000.000	70	2.542.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					95.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		112.688.476	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan (Angka)	50	50	55	95.000.000	55	100.000.000	57	110.000.000	57	110.000.000	58	112.688.476	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					48.267.000		150.000.000		175.000.000		175.000.000		180.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					48.267.000		150.000.000		175.000.000		175.000.000		180.000.000	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral (%)	100	100	100	48.267.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					63.930.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					63.930.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi (Angka)	100	100	100	63.930.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.756.258.000		1.739.305.420		1.757.158.474		1.792.782.803		1.829.113.241	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					636.966.000		649.705.320		656.202.373		669.982.623		684.052.258	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan (Nilai)	4	5	6	636.966.000	7	649.705.320	8	656.202.373	9	669.982.623	10	684.052.258	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)	4,5	5	5,5		6		6,5		7		7,5		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					418.724.000		427.098.480		431.369.465		440.428.224		449.677.216	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional (Angka)	1	1,3	1,5	418.724.000	1,8	427.098.480	2	431.369.465	2,3	440.428.224	2,5	449.677.216	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					648.531.000		608.501.620		613.586.636		624.371.956		635.383.767	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase objek diduga cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya (%)	18	20	22	648.531.000	23	608.501.620	24	613.586.636	25	624.371.956	26	635.383.767	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					52.037.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000		60.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Pengelolaan, Pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	8	9	10	52.037.000	10,5	54.000.000	11	56.000.000	11,5	58.000.000	12	60.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.132.000.000		1.158.000.000		1.182.000.000		1.182.000.000		1.194.000.000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.031.000.000		1.048.000.000		1.062.000.000		1.062.000.000		1.070.000.000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	71,34	71,4	71,5	1.031.000.000	71,55	1.048.000.000	71,6	1.062.000.000	71,7	1.062.000.000	71,8	1.070.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					101.000.000		110.000.000		120.000.000		120.000.000		124.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	1	1	101.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	124.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					5.220.489.220		5.274.489.220		5.299.792.220		5.299.792.220		5.312.792.220	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.006.256.140		5.029.489.220		5.034.792.220		5.034.792.220		5.036.792.220	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).dan kualitas pelayanan publik melalui dukungan sarana, prasarana, dan SDM aparatur.	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.006.256.140	100	5.029.489.220	100	5.034.792.220	100	5.034.792.220	100	5.036.792.220	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					99.160.000		108.000.000		115.000.000		115.000.000		119.000.000	
Meningkatnya Tata kelola Arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	77	77,1	77,12	99.160.000	77,15	108.000.000	77,17	115.000.000	77,19	115.000.000	77,2	119.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					80.490.000		92.000.000		98.000.000		98.000.000		101.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	20	25	27	80.490.000	30	92.000.000	32	98.000.000	35	98.000.000	37	101.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					34.583.080		45.000.000		52.000.000		52.000.000		56.000.000	
Meningkatnya tatakelola perizinan pemanfaatan arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	5	10	12	34.583.080	15	45.000.000	20	52.000.000	15	52.000.000	30	56.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.639.607.494		10.239.607.494		10.994.607.494		11.794.607.494		12.669.607.494	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.899.607.494		6.266.747.494		6.728.897.494		7.218.507.494		7.754.037.494	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Perikanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	81,2	81,6	81,6	5.899.607.494	81,8	6.266.747.494	82	6.728.897.494	82,2	7.218.507.494	82,4	7.754.037.494	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					940.000.000		998.590.000		1.072.130.000		1.150.140.000		1.235.470.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Ton),	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.365,2	15.407,6	15.450,1	940.000.000	15.492,6	998.590.000	15.535,8	1.072.130.000	15.577,5	1.150.140.000	15.620	1.235.470.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.900.000.000		2.018.260.000		2.167.070.000		2.324.760.000		2.497.220.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton),	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	69.811,6	71.110	75.389	1.900.000.000	75.952,1	2.018.260.000	76.560,7	2.167.070.000	77.174,3	2.324.760.000	77.787,9	2.497.220.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					300.000.000		318.670.000		342.170.000		367.070.000		394.290.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	0	10	10	300.000.000	10	318.670.000	10	342.170.000	10	367.070.000	10	394.290.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					600.000.000		637.340.000		684.340.000		734.130.000		788.590.000	
Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan	Produksi hasil olahan perikanan konsumsi (Ton)	787,24	826,6	867,93	600.000.000	911,33	637.340.000	956,9	684.340.000	1.004,74	734.130.000	1.054,98	788.590.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.225.000.000		1.295.704.000		1.454.000.000		1.465.150.000		1.558.015.524	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					357.000.000		377.000.000		510.000.000		515.150.000		560.015.524	
Meningkatnya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	82,25	82,27	82,27	357.000.000	83	377.000.000	83	510.000.000	83,1	515.150.000	85	560.015.524	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					400.000.000		430.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	25	30	400.000.000	30	430.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	40	400.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					149.000.000		159.704.000		169.000.000		169.000.000		189.000.000	
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Zona Ekonomi Kreatif (Angka)	50	50	55	149.000.000	55	159.704.000	60	169.000.000	60	169.000.000	70	189.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					319.000.000		329.000.000		375.000.000		381.000.000		409.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata (Angka)	50	50	50	319.000.000	55	329.000.000	55	375.000.000	55	381.000.000	55	409.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					45.276.764.946		46.913.764.946		49.963.764.946		52.563.764.946		56.663.764.946	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.593.074.294		18.593.074.294		18.593.074.294		18.593.074.294		18.593.074.294	
Meningkatnya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja pemerintah daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.382.890.616	100	5.382.890.616	100	5.382.890.616	100	5.382.890.616	100	5.382.890.616	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	76,9	74	74	13.210.183.678	74	13.210.183.678	74	13.210.183.678	74	13.210.183.678	74	13.210.183.678	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.631.161.400		3.931.161.400		4.731.161.400		5.031.161.400		6.331.161.400	
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Peternakan dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	1	1,5	1,5	1.427.476.400	1,5	1.627.476.400	1,5	1.927.476.400	1,5	2.227.476.400	1,5	3.027.476.400	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
	Persentase Peningkatan Area Kebun Produktif (%)	1	1	1		1		1		1		1		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan utama (Padi)	Jumlah luas lahan komoditi unggulan (padi) yang mendapatkan bantuan sarana produksi dalam satu tahun (ha) (Ha)	51.124,38	51.124,38	51.124,38	2.203.685.000	51.124,38	2.303.685.000	51.124,38	2.803.685.000	51.124,38	2.803.685.000	51.124,38	3.303.685.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,84	11,34	4,72		1,66		1,06		2,78		2,82		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					19.786.571.000		21.086.571.000		23.086.571.000		25.386.571.000		28.186.571.000	
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Peternakan dan Perkebunan	Persentase Luas Area Perkebunan yang terdampak pembangunan prasarana perkebunan (%)	100	100	100	5.686.260.000	100	5.986.260.000	100	6.986.260.000	100	8.286.260.000	100	9.586.260.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Kelompok Ternak yg terdampak pembangunan/ penyediaan Prasarana Peternakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	40,461	40,461	40,461	14.100.311.000	40,461	15.100.311.000	40,461	16.100.311.000	40,461	17.100.311.000	40,461	18.600.311.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.130.609.000		1.130.609.000		1.250.609.000		1.250.609.000		1.250.609.000	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategi (PHMS) (%)	21	1,13	1,2	1.130.609.000	1,25	1.130.609.000	1,27	1.250.609.000	1,07	1.250.609.000	1,15	1.250.609.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					562.562.000		572.562.000		672.562.000		672.562.000		672.562.000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Lahan Komoditi Unggulan yang dikendalikan pertahun (Ha) (Ha)	51.124,38	51.124,38	51.124,38	537.600.000	51.124,38	537.600.000	51.124,38	537.600.000	51.124,38	537.600.000	51.124,38	537.600.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan (Angka)	100	100	100	24.962.000	100	34.962.000	100	134.962.000	100	134.962.000	100	134.962.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					143.521.050		150.521.050		150.521.050		150.521.050		150.521.050	
Meningkatnya Jumlah Produktivitas Padi	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	2	0	10	143.521.050	10	150.521.050	10	150.521.050	10	150.521.050	10	150.521.050	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.429.266.202		1.449.266.202		1.479.266.202		1.479.266.202		1.479.266.202	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	1.272.670.202	100	1.292.670.202	100	1.302.670.202	100	1.302.670.202	100	1.302.670.202	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pembinaan Kelompok Tani (%)	100	100	100	156.596.000	100	156.596.000	100	176.596.000	100	176.596.000	100	176.596.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Peternakan dan Perkebunan

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					4.337.000		5.337.000		6.337.000		7.337.000		7.337.000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					4.337.000		5.337.000		6.337.000		7.337.000		7.337.000	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota (%)	0	100	100	4.337.000	100	5.337.000	100	6.337.000	100	7.337.000	100	7.337.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					7.241.569.000		7.382.569.000		7.507.569.000		7.636.569.000		7.636.569.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					38.230.000		39.230.000		40.230.000		42.230.000		42.230.000	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Angka)	100	100	100	38.230.000	100	39.230.000	100	40.230.000	100	42.230.000	100	42.230.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					7.007.453.000		7.112.453.000		7.217.453.000		7.322.453.000		7.322.453.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI (Angka)	21,43	22	22,5	7.007.453.000	23,5	7.112.453.000	24,5	7.217.453.000	25,5	7.322.453.000	26,5	7.322.453.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					59.910.000		72.910.000		83.910.000		92.910.000		92.910.000	
Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu (Angka)	9	9	9	59.910.000	9	72.910.000	9	83.910.000	9	92.910.000	9	92.910.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					25.947.000		35.947.000		36.947.000		37.947.000		37.947.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan) (Angka)	-.783,63	-.300	-.300	25.947.000	-.300	35.947.000	-.300	36.947.000	-.300	37.947.000	-.300	37.947.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					94.367.000		103.367.000		108.367.000		115.367.000		115.367.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur (Angka)	71,43	73	75	94.367.000	75,5	103.367.000	76	108.367.000	76,5	115.367.000	77	115.367.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					15.662.000		18.662.000		20.662.000		25.662.000		25.662.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	15.662.000	100	18.662.000	100	20.662.000	100	25.662.000	100	25.662.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.113.404.791		7.426.404.791		7.620.404.791		7.826.404.791		7.826.404.791	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.317.319.791		6.533.319.791		6.679.319.791		6.850.319.791		6.850.319.791	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi (%)	98	99,44	100	6.317.319.791	100	6.533.319.791	100	6.679.319.791	100	6.850.319.791	100	6.850.319.791	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					717.443.000		805.443.000		845.443.000		871.443.000		871.443.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (Angka)	51,47	52	52,47	717.443.000	53,47	805.443.000	53,47	845.443.000	55,47	871.443.000	56,47	871.443.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					54.578.000		60.578.000		65.578.000		70.578.000		70.578.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	54.578.000	100	60.578.000	100	65.578.000	100	70.578.000	100	70.578.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					24.064.000		27.064.000		30.064.000		34.064.000		34.064.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	69,35	70	70	24.064.000	71	27.064.000	72	30.064.000	73	34.064.000	74	34.064.000	3.31.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					105.490.000		125.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					74.490.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	25	25	50	74.490.000	50	35.000.000	50	40.000.000	70	40.000.000	70	40.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	13,33	13,33	13,33	0	13,33	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	26,66	50.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					31.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	25	25	50	31.000.000	50	40.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	100	40.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					51.596.069.442		51.896.069.442		52.276.069.442		52.276.069.442		52.276.069.442	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.186.697.842		41.286.697.842		41.436.697.842		41.436.997.842		41.436.997.842	
Mewujudkan Pelayanan administrasi yang baik, pengadaan barang milik daerah yang efektif, dan sarana prasarana yang memadai	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi (%)	95,55	96,1	96,6	41.186.697.842	97,1	41.286.697.842	97,6	41.436.697.842	98,1	41.436.997.842	99,1	41.436.997.842	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.209.028.600		9.309.028.600		9.459.028.600		9.458.728.600		9.458.728.600	
Mewujudkan layanan pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana (%)	96,75	97,1	97,6	9.209.028.600	98,1	9.309.028.600	98,6	9.459.028.600	99,1	9.458.728.600	99,6	9.458.728.600	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.200.343.000		1.300.343.000		1.380.343.000		1.380.343.000		1.380.343.000	
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana (%)	84,49	90,1	91,5	1.200.343.000	92,1	1.300.343.000	93,5	1.380.343.000	94,1	1.380.343.000	95,5	1.380.343.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					44.071.557.431		44.371.557.431		45.121.557.431		45.121.557.431		45.121.557.431	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.625.587.231		27.625.587.231		27.625.587.231		27.625.587.231		27.625.587.231	
Persentase terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,95	80	81	27.625.587.231	82	27.625.587.231	83	27.625.587.231	84	27.625.587.231	85	27.625.587.231	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.445.970.200		16.745.970.200		17.495.970.200		17.495.970.200		17.495.970.200	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	16.445.970.200	100	16.745.970.200	100	17.495.970.200	100	17.495.970.200	100	17.495.970.200	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.482.282.765		8.252.282.765		8.257.282.765		8.452.282.765		8.377.282.765	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.294.764.765		5.216.725.000		5.206.830.500		5.328.012.254		5.259.571.122	
Terfasilitasinya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran (%)	100	100	100	5.294.764.765	100	5.216.725.000	100	5.206.830.500	100	5.328.012.254	100	5.259.571.122	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					867.301.000		626.793.475		627.212.610		635.306.890		626.230.482	
Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Terukur untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi RPJMD terhadap RKPD (%)	100	100	100	867.301.000	100	626.793.475	100	627.212.610	100	635.306.890	100	626.230.482	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Rata - Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	90	91	92		93		94		95		96		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.320.217.000		2.408.764.290		2.423.239.655		2.488.963.621		2.491.481.161	
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA yang Konsisten, Terpadu dan Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	2.320.217.000	100	2.408.764.290	100	2.423.239.655	100	2.488.963.621	100	2.491.481.161	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Konsistensi RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Konsistensi RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					147.384.468.707		147.384.468.707		147.384.468.707		147.384.468.707		147.384.468.707	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.635.419.550		12.635.419.550		12.635.419.550		12.635.419.550		12.635.419.550	
Meningkatnya kualitas layanan Penunjang Administrasi Kuangan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	73,35	73,6	73,7	12.635.419.550	73,8	12.635.419.550	73,9	12.635.419.550	74	12.635.419.550	74,1	12.635.419.550	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,25	90,5	90,72		91		91,25		91,5		92		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					131.244.978.598		131.244.978.598		131.244.978.598		131.244.978.598		131.244.978.598	
Meningkatnya transparansi pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem berbasis Elektronik	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	131.244.978.598	100	131.244.978.598	100	131.244.978.598	100	131.244.978.598	100	131.244.978.598	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang dalam Pengelolaanya berbasis Sistem Informasi SIPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					817.554.256		817.554.256		817.554.256		817.554.256		817.554.256	
Meningkatnya kualitas Pelaporan inventaris Barang Milik Daerah daerah	Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik menggunakan sistem berbasis elektronik (%)	100	100	100	817.554.256	100	817.554.256	100	817.554.256	100	817.554.256	100	817.554.256	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.686.516.303		2.686.516.303		2.686.516.303		2.686.516.303		2.686.516.303	
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang mengedepankan pelayanan yang berkeadilan gender	Peningkatan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	12,07	12,09	12,11	2.686.516.303	12,13	2.686.516.303	12,15	2.686.516.303	12,17	2.686.516.303	12,19	2.686.516.303	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.029.073.000		7.284.017.000		7.229.073.000		7.150.073.000		7.150.073.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.930.193.000		6.130.193.000		6.130.193.000		6.130.193.000		6.130.193.000	
meningkatnya ketercapainya penunjang urusan	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.930.193.000	100	6.130.193.000	100	6.130.193.000	100	6.130.193.000	100	6.130.193.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.098.880.000		1.153.824.000		1.098.880.000		1.019.880.000		1.019.880.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pegawai ASN serta pembinaan kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN (Angka)	70,82	70,82	77,01	1.098.880.000	75,01	1.153.824.000	77,01	1.098.880.000	79,01	1.019.880.000	80,01	1.019.880.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik (Angka)	65	70	70,5		71,5		72,05		75		75		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					295.806.788		200.862.788		375.806.788		454.806.788		454.806.788	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					295.806.788		200.862.788		375.806.788		454.806.788		454.806.788	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)	95	95	95	295.806.788	95	200.862.788	95	375.806.788	95	454.806.788	95	454.806.788	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					845.000.000		1.075.000.000		1.070.000.000		875.000.000		950.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					845.000.000		875.000.000		870.000.000		775.000.000		750.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan serta Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah (%)	80	86	88	845.000.000	89	875.000.000	90	870.000.000	91	775.000.000	92	750.000.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		200.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	100	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					70.419.000		70.419.000		90.419.000		90.419.000		90.419.000	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					70.419.000		70.419.000		90.419.000		90.419.000		90.419.000	
Meningkatnya pengembangan infrastruktur	Persentase Tapal Batas yang terselesaikan sesuai aturan (%)	95,21	96,1	96,5	70.419.000	97,1	70.419.000	97,5	90.419.000	98,1	90.419.000	98,5	90.419.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					18.243.193.235		18.543.193.235		18.693.193.235		18.693.193.235		18.693.193.235	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.726.756.235		12.334.498.635		12.410.488.350		12.370.470.835		12.206.835.035	
Terpenuhinya layanan urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	12.726.756.235	100	12.334.498.635	100	12.410.488.350	100	12.370.470.835	100	12.206.835.035	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.059.527.000		5.662.287.700		5.746.477.785		5.763.909.100		5.904.354.400	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (%)	85	85	85	5.059.527.000	85	5.662.287.700	85	5.746.477.785	85	5.763.909.100	85	5.904.354.400	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					456.910.000		546.406.900		536.227.100		558.813.300		582.003.800	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Evaluasi SPIP (Level)	3	3	3	456.910.000	3	546.406.900	3	536.227.100	3	558.813.300	3	582.003.800	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3		3		3		3		3		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					64.340.512.427		64.340.512.427		64.340.512.427		64.340.512.427		64.340.512.427	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.059.343.427		50.054.342.847		50.059.343.427		50.054.343.427		50.059.343.427	
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	96	100	8.267.578.523	100	8.267.578.523	100	8.267.578.523	100	8.267.578.523	100	8.267.578.523	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Watang Sawitto
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	96	100	100	6.691.338.447	100	6.691.338.447	100	6.691.338.447	100	6.691.338.447	100	6.691.338.447	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Paleteang
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	5.343.630.198	100	5.343.630.198	100	5.343.630.198	100	5.343.630.198	100	5.343.630.198	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tiroang
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	90	90	90	3.462.023.438	90	3.462.023.438	90	3.462.023.438	90	3.462.023.438	90	3.462.023.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mattiro Bulu
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	3.229.226.340	100	3.229.226.340	100	3.229.226.340	100	3.229.226.340	100	3.229.226.340	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Suppa
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.943.285.779	100	2.943.285.779	100	2.943.285.779	100	2.943.285.779	100	2.943.285.779	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Mattiro Sompe

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.277.653.633	100	2.277.653.633	100	2.277.653.633	100	2.277.653.633	100	2.277.653.633	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lanrisang
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	90	100	100	4.697.778.592	100	4.697.778.592	100	4.697.778.592	100	4.697.778.592	100	4.697.778.592	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Patampanua
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	95	96	4.806.820.761	97	4.806.820.761	98	4.806.820.761	99	4.806.820.761	99	4.806.820.761	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Duampanua
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	100	100	1.974.063.831	100	1.974.063.831	100	1.974.063.831	100	1.974.063.831	100	1.974.063.831	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Batulappa
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.717.261.865	100	2.712.261.285	100	2.717.261.865	100	2.712.261.865	100	2.717.261.865	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Cempa
Meningkatnya Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	98	98	99	3.648.682.020	99	3.648.682.020	99	3.648.682.020	99	3.648.682.020	99	3.648.682.020	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lembang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					111.047.000		111.047.000		111.047.000		111.047.000		111.047.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	95	100	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Watang Sawitto
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Paleteang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	9.040.000	100	9.040.000	100	9.040.000	100	9.040.000	100	9.040.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tiroang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	80,48	80	80,5	16.250.000	81	16.250.000	81,5	16.250.000	82	16.250.000	82,5	16.250.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mattiro Bulu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	6.215.000	100	6.215.000	100	6.215.000	100	6.215.000	100	6.215.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Suppa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	16.841.000	100	16.841.000	100	16.841.000	100	16.841.000	100	16.841.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lanrisang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Patampanua
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	9.447.000	100	9.447.000	100	9.447.000	100	9.447.000	100	9.447.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Duampanua
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	95	100	100	7.814.000	100	7.814.000	100	7.814.000	100	7.814.000	100	7.814.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Batulappa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	9.375.000	100	9.375.000	100	9.375.000	100	9.375.000	100	9.375.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Cempa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	8.215.000	100	8.215.000	100	8.215.000	100	8.215.000	100	8.215.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lembang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.164.015.000		14.169.015.580		14.164.015.000		14.169.015.000		14.164.015.000	
Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	380.565.000	100	380.565.000	100	380.565.000	100	380.565.000	100	380.565.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lanrisang
Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	1.623.578.000	100	1.623.578.000	100	1.623.578.000	100	1.623.578.000	100	1.623.578.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Duampanua
Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	749.775.000	100	749.775.000	100	749.775.000	100	749.775.000	100	749.775.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lembang
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	95	100	100	2.518.242.000	100	2.518.242.000	100	2.518.242.000	100	2.518.242.000	100	2.518.242.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Watang Sawitto
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	2.325.000.000	100	2.325.000.000	100	2.325.000.000	100	2.325.000.000	100	2.325.000.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Paleteang
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	2.075.470.000	100	2.075.470.000	100	2.075.470.000	100	2.075.470.000	100	2.075.470.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tiroang

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	90	91	741.955.000	92	741.955.000	93	741.955.000	94	741.955.000	95	741.955.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mattiro Bulu
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	749.746.000	100	749.746.000	100	749.746.000	100	749.746.000	100	749.746.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Suppa
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	778.000.000	100	778.000.000	100	778.000.000	100	778.000.000	100	778.000.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Mattiro Sompe
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Patampanua
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	95	100	100	373.485.000	100	373.485.000	100	373.485.000	100	373.485.000	100	373.485.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Batulappa
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonom (%)	100	100	100	348.199.000	100	353.199.580	100	348.199.000	100	353.199.000	100	348.199.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Cempa

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					6.107.000		6.107.000		6.107.000		6.107.000		6.107.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	1.687.000	100	1.687.000	100	1.687.000	100	1.687.000	100	1.687.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Suppa
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	1.020.000	100	1.020.000	100	1.020.000	100	1.020.000	100	1.020.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Lanrisang
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	3.400.000	100	3.400.000	100	3.400.000	100	3.400.000	100	3.400.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Duampanua
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Batulappa
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.094.132.486		8.714.132.486		8.714.132.486		8.714.132.486		8.714.132.486	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.236.876.086		3.236.876.086		3.236.876.086		3.236.876.086		3.236.876.086	
Meningkatnya layanan administrasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	3.236.876.086	100	3.236.876.086	100	3.236.876.086	100	3.236.876.086	100	3.236.876.086	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					835.357.400		935.357.400		935.357.400		935.357.400		935.357.400	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	835.357.400	100	935.357.400	100	935.357.400	100	935.357.400	100	935.357.400	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.372.667.000		1.472.667.000		1.472.667.000		1.472.667.000		1.472.667.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	1.372.667.000	100	1.472.667.000	100	1.472.667.000	100	1.472.667.000	100	1.472.667.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.201.633.000		1.301.633.000		1.301.633.000		1.301.633.000		1.301.633.000	
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan Bantuan Dana Hibah	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan (Angka)	100	100	100	1.201.633.000	100	1.301.633.000	100	1.301.633.000	100	1.301.633.000	100	1.301.633.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					38.966.000		58.966.000		58.966.000		58.966.000		58.966.000	
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dan meningkatkan kemajuan visi dan misi dibidang sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunana Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	38.966.000	100	58.966.000	100	58.966.000	100	58.966.000	100	58.966.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.408.633.000		1.708.633.000		1.708.633.000		1.708.633.000		1.708.633.000	
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang di selesaikan (%)	100	100	100	1.408.633.000	100	1.708.633.000	100	1.708.633.000	100	1.708.633.000	100	1.708.633.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**1.518.141.413.208,00**		**1.537.637.302.405,00**		**1.554.215.437.196,00**		**1.572.948.194.900,00**		**1.592.822.518.854,00**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengukur keberhasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi dan misi selama masa jabatan. Keberhasilan ini dinilai dari capaian program pembangunan setiap tahun hingga akhir periode RPJMD. Indikator ini penting untuk menunjukkan kemajuan daerah sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Indikator yang digunakan mencakup Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Selain itu, informasi dan data yang ada dalam indikator kinerja ini dapat digunakan untuk mendeteksi masalah pembangunan, memilih kebijakan yang paling tepat, menentukan pembagian anggaran, mendeteksi lebih awal potensi masalah, serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4. 4

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pinrang

Tahun 2025-2030

No	Indikator	Capaian	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,71	5,89	6,59	7,12	7,65	8,29	8,59
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	62,77	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	96,73
3	Kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	3,83	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,55	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	6,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	3,03	2,94	2,75	2,64	2,67	2,57
6	Indeks Gini	0,299	0,293	0,286	0,280	0,274	0,268	0,261

No	Indikator	Capaian	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks Pembangunan Manusia	75,43	75,83	76,27	76,83	77,34	77,63	78,04
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	29,56	29,56	31,69	32,75	33,84	38,42	40,84
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,07	73,52	73,69	73,86	74,03	74,20	74,38

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2025, diolah Bapperida 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 target untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 5

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IT.1	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	3,35	3,35	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80
IS.1	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	67,31	71,83	73,49	75,14	76,8	78,46	80,11
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman dan berkelanjutan	Persen	27,87	30,35	33,05	36,00	39,21	42,70	46,5
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen	2,66	2,89	5, 09	7,15	9,17	11,66	14,00
IS.2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	68,54	70,22	71,75	73,28	74,81	76,34	77,87
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	80,71	79,58	80,18	80,78	81,38	91,99	82,59
	Persentase Desa Mandiri	Persen	52,17	57,97	63,77	68,12	72,46	75,36	78,26
IT.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,07	73,52	73,69	73,86	74,03	74,2	74,38
IS.3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	18,09	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	5,36	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	29,56	29,56	31,69	32,75	33,84	38,42	40,84
IS.4	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,36	148,00	145,70	145,50	142,50	142,30	141,00
IT.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	5,89	6,59	7,12	7,65	8,29	8,59
	Kontribusi PDRB Kabupaten Pinrang Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	Persen	3,83	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97
	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	62,77	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	96,73
	Gini Ratio	Nilai	0,299	0,293	0,286	0,28	0,274	0,268	0,261
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4,57	4,61	4,63	4,65	4,67	4,69	4,70
IS.5	Laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Persen	5.64	3,48	3,78	4,28	4,50	4,78	5,25
IS.6	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	6,37	6,78	6,85	7,01	7,22	7,43	7,65
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,07	1,10	1,20	1,50	1,75	2,00	2,01
	Laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Persen	5,89	6,20	6,47	6,85	7,42	7,86	7,95
IS.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,12	3,03	2,94	2,75	2,64	2,67	2,57

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	64,17	65,25	66,72	68,35	69,15	70,05	70,95
IS.8	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,55	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	6,31
IT.4	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	75,43	75,83	76,27	76,83	77,34	77,63	78,04
IS.9	Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	8,53	8,40	8,60	8,80	9,00	9,20	9,40
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	13,40	13,50	13,60	13,70	13,80	13,87
	Literasi Membaca (SD/SMP)	Nilai	54,00 / 65,69	56,50/ 66,79	59,00 / 67,89	61,50 / 68,99	64,00 / 70,09	66,50/71,19	69,00 / 72,29
	Numerasi (SD/SMP)	Nilai	49,73 / 59,87	52,63 / 61,37	55,53 / 62,87	58,43 / 64,37	61,33 / 65,87	64,23 / 67,37	67,13 / 68,87
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,63	74,80	75,10	75,40	75,70	76,00	76,30
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Persen	22,20	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	12,75
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Persen	98,56	100	100	100	100	100	100
IT.5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79,47 (BB)	80,02 (BB)	81,00 (BB)	82,00 (BB)	83,00 (BB)	84,00 (BB)	85,00 (BB)
IS.10	Nilai MCP KPK	Nilai	57,51	75,00	80,00	82,00	85,00	89,00	91,00
	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	65,32	66,20	67,10	68,00	69,30	70,50	71,00
IS.11	Indeks SPBE	Nilai	3,49	3,52	3,57	3,62	3,68	3,75	3,82
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,95	4,00	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,25	90,5	90,72	91,00	91,25	91,50	92,00
	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP4)	Nilai	95,05	95,15	95,30	95,50	95,75	96,00	96,20
IT.6	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	61,74	62,24	63,24	64,24	66,24	67,24	67,50
	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,69	96,73	96,84	96,92	96,93	96,94	96,90
IS.12	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	N.A	60,47	60,47	60,47	60,47	70,00	70,00
IS.13	Persentase Tindak kriminalitas yang ditangani	Persen	87,73	87,75	87,77	87,79	87,81	87,83	87,86
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
IS.14	Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
IS.15	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,28	0,274	0,269	0,264	0,259	0,249	0,239

Sumber Data : Data Diolah oleh Bapperida, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah (IKD) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based**)*** pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6

Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan										
	Konsumsi Listrik perKapita (Kwh)	kwh	1.809	1.841	1.873	1.905	1.937	1.969	2.000	
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	5,99	5,92	5,85	5,78	5,71	5,64	5,57	
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	86,94	87,10	87,90	88,30	89,00	89,20	89,70	
	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Skor	84,70	86,26	87,10	88,20	89,4	90,10	91,90	
	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Skor	91,9	92.60	93,20	94,10	94,90	95,20	95,90	
	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,263	0,583	0,875	1,233	1,511	1,722	1,819	
Lingkungan Hidup Berkualitas										
	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	Persen	0	0,48	1,50	1,90	2,08	2,46	2,64	
	Indeks pertanaman (IP) padi	Nilai	200	200	200	200	200	200	200	
	Proporsi sawah irigasi	Persen	86,39	87,00	87,50	88,00	88,50	90,00	90,60	
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	69.811,53	71.110,00	75.389,00	75.952,10	76.560,00	77.174,30	77.787,90	
	Produktivitas Perikanan Budidaya (ton/ha)	ton/ha	4,42	4,50	4,77	4,81	4,85	4,89	4.93	
	Produktifitas Budidaya Perikanan Tambak (ton/ha)	ton/ha	4,42	2,21	2,52	2,53	2,55	2,57	2,59	
	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	15.365,20	15407,60	15450,10	15492,60	15535,80	15577,50	15620,00	
	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	kg/kapita	68,18	68,98	69,78	70,58	71,38	72,18	72,98	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,07	73,52	73,69	73,86	74,03	74,2	74,38	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,66	2,89	5,09	7,15	9,17	11,66	14	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengelola Sampah	Persen	18,09	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	5,36	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	
	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Aman (Air Siap Minum Perpipaan)	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	8,35	10,47	10,59	10,74	10,91	11,08	11,30	
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman dan berkelanjutan	Persen	27,87	30,35	33,05	36,00	39,21	42,70	46,50	
Risilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim										
	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,36	148,00	145,70	145,50	142,50	142,30	141,00	
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	29,56	29,56	31,69	32,75	33,84	38,42	40,84	
Demografi										
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1,25	1,25	2,50	3,74	4,99	6,24	7,49	
	Rasio Jenis Kelamin (%)	Persen	97,89	98,47	89,03	97,32	97,30	70,64	72,31	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
KESEJAHTERAAN EKONOMI										
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	5,89	6,59	7,12	7,65	8,29	8,59	
	PDRB Perkapita	juta rupiah	62,77	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	96,73	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,55	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	6,31	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,12	3,03	2,94	2,75	2,64	2,67	2,57	
	Indeks Gini	Nilai	0,299	0,293	0,286	0,28	0,274	0,268	0,261	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	75,43	75,83	76,27	76,83	77,34	77,63	78,04	
	Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	Persen	3,83	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97	
	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	Persen	91,45	91,65	92,75	93,55	93,65	93,95	94,95	
KESEHATAN UNTUK SEMUA										
	Indeks Kesehatan	Nilai	77,92	84,24	84,44	84,64	84,84	85,04	85,20	
	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,63	74,80	75,10	75,40	75,70	76,00	76,30	
	Angka Kematian Ibu	Nilai	82,64	122,00	109,00	97,00	86,00	77,00	68,00	
	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	Persen	22,2	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	14,00	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA +	Persen	81,93	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	88,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Persen	98,56	100	100	100	100	100	100	
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA										
	Indeks Pendidikan	Nilai	68,35	71,35	74,35	77,35	80,35	83,35	86,35	
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	8,53	8,40	8,60	8,80	9,00	9,20	9,40	
	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	13,28	13,40	13,50	13,60	13,70	13,80	13,87	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	72,19	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,80	
	Indeks Literasi Membaca SD/SMP	Persen	54,00 / 65,69	56,50 / 66,79	59,00 / 67,89	61,50 / 68,99	64,00 / 70,09	66,50/71,19	69,00 / 72,29	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Indeks Numerasi SD/SMP	Persen	49,73 / 59,87	52,63 / 61,37	55,53 / 62,87	58,43 / 64,37	61,33 / 65,87	64,23 / 67,37	67,13 / 68,87	
	Iklim Keamanan SD/SMP	Nilai	76,06 / 70,89	76,96 / 72,39	77,86 / 73,89	78,76/ 75,39	79,66 / 76,89	80,56 / 78,39	81,46 / 79,89	
	Iklim Kebinekaan SD/SMP	Nilai	72,98 / 70,39	73,98 / 71,39	74,98 / 72,39	75,98 / 75,39	76,98 / 74,39	77,98 / 75,39	78,98 / 76,39	
	Iklim Inklusivitas SD/SMP	Nilai	59,67 / 57,11	62,17 / 59,51	64,67 / 61,91	67,17 / 64,31	69,67 / 66,71	72,17 / 69,11	74,67 / 71,51	
	APS PAUD/Dasar /Kesetaraan	Nilai	74,94 / 97,88 / 32,75	77,98 / 98,23 / 37,72	81,02 / 98,58 / 42,70	83,99 / 98,93 / 47,68	86,96 / 99,28 / 52,66	88,93 / 99,63 / 57,63	92,90 / 99,98 / 62,61	
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	12,07	12,13	12,21	12,28	12,35	12,37	12,40	
	Persentase Pekerja Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persen	20,71	15,92	16,42	16,92	17,42	17,92	18,42	
PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF										
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	72,02	73,00	73,50	74,35	74,80	75,10	75,65	
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	0,380	0,390	0,390	0,400	0,400	0,410	0,410	
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU										
	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi	Persen	70,83	70,83	70,83	75,00	75,00	75,00	79,17	
	Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	0	5	8	12	15	18	20	
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF										
	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	61,74	62,24	63,24	64,24	66,24	67,24	67,50	
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	60,27 (2023)	60,38	60,58	61,76	62,94	63,94	64,75	
	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	Belum Rilis	60,47	60,47	60,47	60,47	70,00	70,00	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,280	0,274	0,269	0,264	0,259	0,249	0,239	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,69	96,73	96,84	96,92	96,93	96,94	96,95	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	75,43	75,83	76,27	76,83	77,34	77,63	78,04	
	Rasio Ketergantungan	Persen	47,97	50,24	50,15	50,05	49,96	49,86	49,78	
IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI										
	Laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Persen	5.64	3,48	3,78	4,28	4,50	4,78	5,25	
	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	6,37	6,78	6,85	7,01	7,22	7,43	7,65	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,07	1,10	1,20	1,50	1,75	2,00	2,01	
	Laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Persen	5,89	6,20	6,47	6,85	7,42	7,86	7,95	
	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	163.833	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
	Persentase Koperasi Sehat (%)	Persen	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,70	4,30	
	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	industri	3.307	4.119	4.981	5.905	6.903	7.994	9.199	
	Return On Asset (ROA) BUMD (%)	Persen	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	
	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	industri	1.287	1.580	1.873	2.166	2.459	2.752	3.045	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	64,17	65,25	66,72	68,35	69,15	70,05	70,95	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	46,53	46,80	47,07	47,34	47,61	47,88	48,15	
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,29	49,89	50,49	51,09	51,79	52,25	53,75	
	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Nilai	1,74	1,85	1,96	2,07	2,18	2,30	2,45	
	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	4,19	4,20	4,22	4,24	4,25	4,27	4,30	
	Produktivitas Padi (ton/ha)	ton/ha	5,26	6,00	6,10	6,10	6,15	6,20	6,25	
	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	ton	85.176,70	86.517,60	90.839,10	91.444,70	92.095,80	92.751,80	93.407,90	
	Nilai Tukar Petani	Nilai	150,43	110,00	115,00	115,25	115,50	115,75	116,00	
PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU										
	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	Belum Rilis	63,09	66,78	70,48	74,17	77,86	77,86	
	Indeks Ekonomi Biru	Skor	Belum Rilis	96,47	106,76	117,43	125,87	137,82	138,49	
TRANSFORMASI DIGITAL										
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL										
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	35,74	36,85	36,93	37,01	37,08	37,16	37,24	
	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	Persen	13,10	6,79	6,67	6,55	6,44	6,20	6,10	
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	-2,94	-2,15	-2,08	-2,01	-1,94	-1,8	-1,75	
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI										
	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	3,35	3,35	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	80,71	79,58	80,18	80,78	81,38	91,99	82,59	
	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	67,31	71,83	73,49	75,14	76,8	78,46	80,11	
	Persentase Desa Mandiri	Persen	52,17	57,97	63,77	68,12	72,46	75,36	78,26	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	Persen	3,83	3,84	3,88	3,92	3,94	3,96	3,97	
STABILITAS EKONOMI MAKRO										
	Inflasi	Nilai	1,73	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	
	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	11,74	15,21	16,26	17,19	17,73	18,68	19,61	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	1,82	1,85	1,92	2	2,07	2,15	2,26	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,8606 (B)	78,5	78,5	78,89	79,28	80,05	80,44	
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,57	4,61	4,63	4,65	4,67	4,69	4,70	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	0,02	3,80	3,88	3,96	4,04	4,12	4,20	
	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	Persen	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79,47 (BB)	80,02	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
	Nilai SAKIP	Nilai	65,32	66,20	67,10	68,00	69,30	70,50	71,00	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,95	4,00	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,25	90,50	90,72	91,00	91,25	91,50	92,00	
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	3,49	3,52	3,57	3,62	3,68	3,75	3,82	
	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	66,00	76,10	77,10	77,25	77,75	78,25	78,75	
	Nilai MCP KPK	Nilai	57,51	75,00	80,00	82,00	85,00	89,00	91,00	
	Indeks Maturitas	Nilai	3,001 (level 3)	3,001 (level 3)	3,078 (Level 3)	3,190 (level 3)	3,190 (level 3)	3,290 (level 3)	3,290 (level 3)	
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	95,30	98,70	98,98	99,28	99,85	100	100	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP4)	Nilai	95,05	95,15	95,30	95,50	95,75	96,00	96,20	
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL										
	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	Persen	87,73	87,75	87,77	87,79	87,81	87,83	87,86	
	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	Persen	15	10	10	10	10	10	10	
	Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD	perda	1	2	2	2	2	2	2	
	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	Persen	34	34	34	34,29	34,29	34,29	34,29	
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN										
	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,43	3,46	3,49	3,51	3,54	3,57	3,59	
	Persentase Kerjasama Kab/Kota dengan Kab/Kota lainnya/Provinsi/Sister City/Skala Regional yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
I	**PENDIDIKAN**									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	74,94	77,98	81,02	83,99	86,96	89,93	92,9	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	89,78	90,28	90,78	91,28	91,78	92,28	92,78	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	68,93	69,43	69,93	70,43	70,93	71,43	71,93	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	32,75	37,72	42,7	47,68	52,66	57,63	62,61	
II	**KESEHATAN**									
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	Persen	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,1	0,1	
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	90	90	90,02	89,99	90,04	90,09	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
III	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	25,8	29,1	32,53	35,95	39,37	42,8	46,22	
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	37,89	38,71	40,14	41,58	43,01	44,44	45,88	
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,71	79,58	80,18	80,78	81,38	81,99	82,59	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	96,88	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	98,63	100	100	100	100	100	100	
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	rasio	1	1	1	1	1	1	1	
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	68,54	70,22	71,75	73,28	74,81	76,34	77,87	
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	95,61	90,8	89,15	88,91	89,03	87,74	87,32	
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	99,69	100	99,9	99,8	99,8	
IV	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	1,02	1,73	20	25	33,33	50	100	
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	4,36	4,34	4,32	4,16	4,02	3,89	3,76	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	2,05	100	100	100	100	100	100	
V	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa / kecamatan	250.060 Jiwa/ 12 Kecamatan	350.060 Jiwa/ 12 Kecamatan	350.600 Jiwa/ 12 Kecamatan	450.200 Jiwa/ 12 Kecamatan	470.240 Jiwa/ 12 Kecamatan	500.240 Jiwa/ 12 Kecamatan	550.060 Jiwa/ 12 Kecamatan	
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa / kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	79.108 jiwa/12 kecamatan	
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa / kecamatan	6.199 Jiwa / 12 Kecamatan	3.300 Jiwa / 12 Kecamatan	2.230 Jiwa / 12 Kecamatan	1.400 Jiwa / 12 Kecamatan	1.270 Jiwa / 12 Kecamatan	1.000Jiwa / 12 Kecamatan	530 Jiwa / 12 Kecamatan	
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	95,24	95,26	95,28	95,3	95,32	95,34	95,36	
39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	8,2 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	
VI	**SOSIAL**									
40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
I	**TENAGA KERJA**									
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	75	75	75	77	77	78,57	78,57	
43	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3,18	3,38	3,69	4,27	4,77	5,26	6,14	
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	juta rupiah	7.570,44	7.661,80	7.890,94	7.982,15	8.042,67	8.170,41	8.316,88	
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	71,71	71,74	72,39	73,59	74,68	74,84	75,27	
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	64,56	65,04	66,18	67,96	68,12	69,16	70,19	
II	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	30,81	32,1	32,8	33	33,2	33,8	34	
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0,01	100	100	100	100	100	100	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai	0,01	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,025	
III	**PANGAN**									
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	12,51	6,1	7,1	8,1	9,1	10	10	
IV	**PERTANAHAN**									
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	92,03	92,85	95,04	92,86	93,67	94,44	93,54	
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
V	**LINGKUNGAN HIDUP**									
57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	Nilai	67,07	73,52	73,69	73,86	74,03	74,2	74,38	
58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	43,85	44,49	45,09	45,77	46,37	46,97	47,22	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
VI	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
60	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,88	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65	
61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	55,63	60	62	65	67	69	71	
62	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	99,46	99,5	99,7	99,8	99,85	99,86	99,87	
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	41,86	12	16	19	21	26	28	
VII	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	12,5	100	100	50	50	50	50	
65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	34,21	10	12	12,5	4,35	4,55	5	
VIII	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
66	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,1	2,1	
67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	59,13	60,7	61,7	62,7	63,7	64,7	65,7	
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12,19	11	10	9	8	7	6	
IX	**PERHUBUNGAN**									
69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
70	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
X	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	62,5	66,7	66,7	66,7	77,8	77,8	
73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	92,66	93	93,5	93,75	94	94,5	95	
XI	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	11,14	11,37	11,7	12,12	12,53	12,94	13,3	
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	50,13	50,41	50,7	50,98	51,26	51,54	51,82	
XII	**PENANAMAN MODAL**									
76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Persen	0,02	3,8	3,88	3,96	4,04	4,12	4,2	
XIII	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	21	22	23	24	25	26	27	
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,5	11	11,1	11,12	11,14	11,16	11,18	
79	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	5	4	5	5	5	5	5	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
XIV	**STATISTIK**									
80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
XV	**PERSANDIAN**									
82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	31,47	38,75	42,63	46,51	62,01	77,51	93,02	
XVI	**KEBUDAYAAN**									
83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	9,09	6,38	13,73	20	25,42	30,16	34,3	
XVII	**PERPUSTAKAAN**									
84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Persen	71,34	71,4	71,5	71,6	71,8	71,9	71	
85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	72,19	72,3	72,4	72,5	72,6	72,7	72,8	
XVIII	**KEARSIPAN**									
86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	75,03	75,1	75,15	75,2	75,25	75,3	75,35	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,33	83,38	83,4	83,47	83,52	83,56	83,6	
URUSAN PILIHAN										
I	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	ton	85.176,70	86.517,60	90.839,10	91.444,70	92.096,50	92.751,80	93.407,90	
II	**PARIWISATA**									
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	16,67	4	5	5	5	5	6	
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	182,25	100	100	100	100	100	100	
91	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	4,37	4,38	4,39	4,4	4,41	4,42	4,43	
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87	
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2	2	2,05	2,05	2,05	2,06	2,07	
III	**PERTANIAN**									
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	5,26	6	6,1	6,1	6,15	6,2	6,25	
95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-21,11	0	0	0	0	0	0	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
IV	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									
96	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di di Kabupaten / Kota	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
V	**PERDAGANGAN**									
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	95,45	95,65	95,83	96	96,15	96,3	96,43	
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	58	58,17	58,34	58,51	58,67	58,84	59	
99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	61,9	65,19	65,43	65,63	65,87	66,35	67,31	
VI	**PERINDUSTRIAN**									
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	67,31	5,05	6,16	7,19	8,24	9,32	10,45	
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	107,22	95	96	97	98	99	100	
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	20	22	24	26	28	30	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
I	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
106	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	12,91	16	15,8	15,6	15,4	15,2	15	
107	Rasio PAD Terhadap APBD Non Migas	Persen	12,69	12,7	12,72	12, 74	12,75	12,77	12, 79	
108	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
109	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
110	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	69,13	68,9	68,7	68,5	68,3	68,1	67,9	
111	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
II	**PENGADAAN**									
112	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
113	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	0,33	0,5	0,72	0,95	1	1,18	1,21	
114	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	95,05	95,29	95,43	95	95,14	95,26	95,38	
III	**KEPEGAWAIAN**									
115	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	528,95	512,53	518,49	534,04	540,8	550,78	557,29	
116	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	41,88	41,66	41,67	41,46	41,53	41,86	41,86	
117	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	31,64	31,66	31,67	31,65	24,29	31,7	31,68	
IV	**MANAJEMEN KEUANGAN**									
118	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-5,43	5,4	5,39	5,37	5,37	5,35	5,32	
119	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-8,61	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	
120	Manajemen Aset	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	1. Apakah ada daftar aset tetap		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
121	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	3,17	3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	
V	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**									
122	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	105,72	103,13	106,2	107	107,15	105,25	105,5	
123	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang dan Diolah oleh Bapperida, 2025

4.2.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indicator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7

Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**Pendidikan**										
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	persen	97,88	98,23	98,58	98,93	99,28	99,63	99,98	Dikbud
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa berdasarkan Asesmen Nasional (pada jenis pelayanan dasar : pendidikan dasar)	persen	SD 54.00 SMP 65,69	SD 56,50 SMP 66,79	SD 59,00 SMP 67,89	SD 61,50 SMP 68,99	SD 64,00 SMP 70,09	SD 66,50 SMP 71,19	SD 69,00 SMP 72,29	Dikbud
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa berdasarkan Asesmen Nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	persen	SD 49.73 SMP 59,87	SD 52,63 SMP 61,37	SD 55,53 SMP 62,87	SD 58,43 SMP 64,37	SD 61,33 SMP 65,87	SD 64,23 SMP 67,37	SD 67,13 SMP 68,87	Dikbud
		Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	SD 76.06 SMP 70,89	SD 76.96 SMP 72.39	SD 77.86 SMP 73.89	SD 78,76 SMP 75,39	SD 79,66 SMP 76,89	SD 80,56 SMP 78,39	SD 81,46 SMP 79,89	Dikbud
		Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	SD 72.98 SMP 70,39	SD 73.98 SMP 71.39	SD 74.98 SMP 72.39	SD 75,98 SMP 75,39	SD 76,98 SMP 74,39	SD 77,98 SMP 75,39	SD 78,98 SMP 76,39	Dikbud

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan (SD/SMP)	persen	SD 59.67 SMP 57,11	SD 62.17 SMP 59.51	SD 64.67 SMP 61.91	SD 67,17 SMP 64,31	SD 69,67 SMP 66,71	SD 72,17 SMP 69,11	SD 74,67 SMP 71,51	Dikbud
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	32,75	37,72	42,70	47,68	52,66	57,63	62,61	Dikbud
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	74,94	77,98	81,02	83,99	86,96	89,93	92,9	Dikbud
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	persen	77,00	100	100	100	100	100	100	Dikbud
		Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/D4	persen	73,79	76,75	77,25	77,75	78,25	78,75	79,25	Dikbud
II	**Kesehatan**										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang Mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
10	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
III	**Pekerjaan Umum**										
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari–hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	98,49	100	100	100	100	100	100	Bimacipta

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	98,46	100	100	100	100	100	100	Bimacipta
IV	**Perumahan Rakyat**										
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100	100	100	100	100	Perkimlh
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	100	100	100	100	100	Perkimlh
V	**Trantibumlinmas**										
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol P3K
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol P3K
VI	**Sosial**										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target						OPD Pengampu
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos

Sumber Data: OPD Pengampu SPM dan Data Olahan Bapperida KabupatenPinrang 2025

4.2.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Daerah. Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4. 8
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Pinrang

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1. Tanpa kemiskinan										
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	Bapperida
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan , menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	8,55	7,67	7,37	6,85	6,65	6,37	BPS
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	DINSOS/ dinkes / dikbud /disperindag	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	DINSOS/ dinkes/ dikbud / disperindag
	DIMENSI KESEHATAN									
	IMUNISASI DASAR									
	Persentase penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	Dinkes	%	2,87%	2%	1%	0%	0%	0%	Dinkes
	STANDAR HIDUP									
	Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama.	Dinkes	%	5,28	5,14	5,01	4,88	4,76	4,63	Dinkes
	Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	Disperindagem	%	0,52	0,5	0,47	0,45	0,43	0,4	Disperindagem

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya hanya menggunakan elpiji 3kg	Disperindagem	%	95,45	95,57	95,69	95,81	95,93	96,05	Disperindagem
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinsos	%	45,56%	45,56%	44,68%	44,04%	43,55%	43,02%	Dinsos
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Disnakertrans	%	4,44	4,55	4,61	4,68	4,78	5,38	Disnakertrans
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	DINAS PERKIMLH								DINAS PERKIMLH
	Proporsi rumah tangga dengan Rumah Sewa	DINAS PERKIMLH	%	0,39	0,213	0,181	0,155	0,132	0,112	DINAS PERKIMLH
	Proporsi rumah tangga dengan Rumah kontrak	DINAS PERKIMLH		0,39	0,213	0,181	0,155	0,132	0,112	DINAS PERKIMLH
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD								BPBD
	Jumlah korban meninggal per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	1.88	1,39	0,92	0,45	0	0	BPBD
	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPBD
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	THN 2023 (0.72)	0,46	0	0	0	0	BPBD

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	thn 2023 (1,67)	1,16	0,67	0,22	0	0	BPBD
1.5.4*	"Jumlah pemerintah daerah kabupaten yang menerapkan strategi bencana nasional"	BPBD	kab	1	1	1	1	1	1	BPBD
Tujuan 2. Tanpa kelaparan										
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES (DATA SSGI)								DINKES (DATA SSGI)
	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	DINKES	%	3,8	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	DINKES
	Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)	DINKES	%	1,4	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	DINKES
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES (DATA SSGI)								DINKES (DATA SSGI)
	"Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting)"	DINKES	%	2,2	8	7,5	7	6,5	5	DINKES
	"Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (wasting)"	DINKES	%	2,2	8	7,5	7	6,5	5	DINKES

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas										
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas tanaman dan hortikultura	%	100	100	100	100	100	100	Dinas tanaman dan hortikultura
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera										
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	per/100.000	82,64	122	109	97	86	77	DINKES
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES	per/1000	0,04	<1Per 1000	<1Per 1000	<1Per 1000	<1Per 1000	<1Per 1000	DINKES
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	DINKES	per/100.000	28,83	28,35	27,88	27,65	27,41	27,17	DINKES
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a)Filariasis dan (b) Kusta.	DINKES	%	98%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	DINKES
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	Dinkes	orang	171	160	150	138	127	115	Dinkes
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	DP2KBP3A	%	59,13	60,7	61,7	62,7	63,7	64,7	DP2KBP3A

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	DP2KBP3A	Per 1000	26,2	24,7	23,2	21,7	20,2	18,7	DP2KBP3A
3.7.2.a	Total Fertility Rate (TFR).	DP2KBP3A	per 1000	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,1	DP2KBP3A
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES	%	98,56	100	100	100	100	100	DINKES
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat,dan SMA/sederajat	DIKBUD		78,74	79,79	80,84	81,89	82,94		DIKBUD
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISKOMINFO								
	"Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)"	DISKOMINFO	%	TAHUN 2023 (73,13)	PM	PM	PM	PM	PM	
	"Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)"	DISKOMINFO	%	TAHUN 2023 (73,13)	PM	PM	PM	PM	PM	

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d)disabilitas/tanpa disabilitas.	DIKBUD								DIKBUD
	Rasio antara APM perempuan dan laki- laki pada usia 7 sampai 12 tahun	DIKBUD	%	92,94	93,99	95,04	96,09	97,14		DIKBUD
	Rasio antara APM Perdesaan dan Perkotaan pada usia 7 sampai 12 tahun	DIKBUD	%	92,94	93,99	95,04	96,09	97,14		DIKBUD
	Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi pada usia 7 sampai 12 tahun	DIKBUD	%	92,94	93,99	95,04	96,09	97,14		DIKBUD
	Rasio antara APM siswa disabilitas dan siswa tanpa disabilitas pada usia 7 sampai 12 tahun	DIKBUD	%	0,04	1,04	1,04	1,04	1,04		DIKBUD
	Rasio antara APK perempuan dan laki- laki di jenjang pendidikan i	DIKBUD	%	0,04	1,04	1,04	1,04	1,04		DIKBUD
	Rasio antara APK Perdesaan dan Perkotaan di jenjang pendidikan i	DIKBUD	%	100	100	100	100	100		DIKBUD
	Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan i	DIKBUD	%	100	100	100	100	100		DIKBUD
	Rasio antara APK siswa disabilitas dan siswa tanpa disabilitas di jenjang pendidikan i	DIKBUD	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		DIKBUD

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DIKBUD	%	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98		DIKBUD
Tujuan 5. Kesetaraan gender										
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DP2KBP3A	PERDA	1	1	1	1	1	1	DP2KBP3A
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan Perempuan										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	KOMINFO	%	Tahun 2023 (91,7)	PM	PM	PM	PM	PM	KOMINFO
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	BINA MARGA	%	27,87	30,35	33,05	36	39,21	42,7	BINA MARGA
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyrakat rentan										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.									
	"Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air"	DINKES	%	96,56	100	100	100	100	100	DINKES

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
	"Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka"	DINKES	%	0	0	0	0	0	0	DINKES
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	BINA MARGA	%	2,66	2,89	5,09	7,15	9,17	11,66	BINA MARGA
	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	BINA MARGA	%	1,54%	1,53%	1,56%	1,60%	1,64%	1,67%	BINA MARGA
	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	BINA MARGA	%	2,66%	3,05%	3,43%	3,81%	4,17%	4,52%	BINA MARGA
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	DISPERKIMLH	%	75,465	75,461	75,431	75,236	75,454	75,541	DISPERKIMLH
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau										
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	DISPERINDAGEM	%	99,78	99,8	99,81	99,83	99,84	99,85	DISPERINDAGEM
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	5,71	5,89	6,59	7,12	7,65	8,29	BPS/Bapperida
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS	(juta)	62,77	66,47	70,85	78,55	88,72	96,73	BPS/Bapperida
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	-2,40%	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/Bapperida

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur										
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan kabupaten	BINAMARGA	%	68,54	70,22	71,75	73,28	74,81	76,34	BINAMARGA
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	BPS	%	6,01	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/Bapperida
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS / BAPPERIDA/ DINSOS	%	8,55	8,35	7,25	6,45	6,35	6,05	BPS/ BAPPERIDA/ DINSOS
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	Dinas PMD	Desa	7	5	4	3	2	1	Dinas PMD
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.	Dinas PMD	Desa	36	41	43	45	48	50	Dinas PMD
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS/DINAS PMD	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	BPS/DINAS PMD
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	SETDA HUKUM		0	1	1	1	1	1	SETDA HUKUM
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	DISNAKER		72,02	73,00	73,5	74,35	74,8	75,1	DISNAKER

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan										
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD								
	Jumlah korban meninggal per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	1.88	1,39	0,92	0,45	0	0	BPBD
	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPBD
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	THN 2023 (0.72)	0,46	0	0	0	0	BPBD
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000	thn 2023 (1.67)	1,16	0,67	0,22	0	0	BPBD
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto.	BPBD	%	0,01	PM	PM	PM	PM	PM	BPBD
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.	PERKIMLH	%	4,05	4,08	4,12	4,15	4,18	4,21	PERKIMLH
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	PERKIMLH	Nilai	93,04	80,48	80,68	80,88	81,08	81,28	PERKIMLH
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030										
11.b.2*	Jumlah pemerintah daerah kabupaten yang menerapkan strategi bencana nasional	BPBD	kab	1	1	1	1	1	1	BPBD

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab										
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	PERKIMLH	ton	8,573	8,497	8,394	8,293	8,195	8,099	PERKIMLH
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	PERKIMLH	%	87,565	87,565	87,582	87,579	87,584	87,593	PERKIMLH
12.5										
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas	PERKIMLH	%	47,36	49,96	52,5	55,03	57,39	59,75	PERKIMLH
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	PERKIMLH		1	1	1	1	1		PERKIMLH
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development).	DISPASPOR		n/a	3	3	4	4	4	DISPASPOR
Tujuan 13. Perubahan iklim										
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.3*	Jumlah pemerintah daerah kabupaten yang menerapkan strategi bencana nasional	BPBD	kab	1	1	1	1	1	1	BPBD
Tujuan 14. Ekosistem lautan										
Tujuan 15. Ekosistem daratan										

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh										
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.										
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kesbangpol		0,023	0	0	0	0	0	Kesbangpol
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Kesbangpol		0,024	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	Kesbangpol
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini (WTP).	BPKPD	%	100	100	100	100	100	100	BPKPD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	SETDA	%	100	100	100	100	100	100	SETDA
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	SETDA	%	100	100	100	100	100	100	SETDA
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	SETDA	Lokus	6	6	6	6	6	6	SETDA
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPRD								DPRD
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DPRD	%	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	DPRD

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota	DPRD	%	15	10	10	10	10	10	DPRD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	9,68	9,68	14,29	14,29	14,29	14,29	BKD
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DISDUKCAPIL	%	99,60%	99,44%	99,25%	99,30%	99,36%	99,31%	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL	%	99,46%	99,5	99,5	99,6	99,7	99,8	DISDUKCAPIL
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	SETDA	kebijakan	0	1	1	1	1	1	SETDA
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan										
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	SETDA	dokumen	0	1	1	1	1	1	SETDA
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	SETDA	proyek	0	1	1	1	1	1	SETDA
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani.	SETDA	nilai	0	1	1	1	1	1	SETDA

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DISDUKCAPIL		ada	ada	ada	ada	ada	ada	DISDUKCAPIL

Sumber Data : Data Olahan Bapperida KabupatenPinrang

BAB V
P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan yang telah disusun berdasarkan kondisi riil daerah, aspirasi masyarakat, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Pinrang dalam mencapai Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029 melalui Peraturan Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan**

   Konsistensi antar dokumen perencanaan dijaga untuk memastikan keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, hingga KUA-PPAS dan APBD. Setiap indikator dalam RPJMD wajib terintegrasi ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana sektoral seperti master plan, strategi daerah, dan peta jalan, sehingga seluruh tahapan pembangunan daerah berjalan searah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

2. **Pendanaan Pembangunan**

   Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui berbagai sumber pembiayaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah. Inovasi pendanaan, integrasi program, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan anggaran yang tepat sasaran. Peningkatan kualitas belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pembangunan di Kabupaten Pinrang dirancang sebagai sistem terpadu yang memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai arah RPJMD serta mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan dukungan regulasi yang jelas dan perangkat teknologi yang saling terhubung mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Regulasi yang disusun diharapkan mampu mengintegrasikan ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Integrasi ini menjadi landasan koordinasi yang efektif, baik antarperangkat daerah maupun dalam lingkup internal Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga proses pengendalian dapat berlangsung selaras dan saling memperkuat.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen strategis dalam kerangka ini. Berbagai platform digital seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), E-Monev Kabupaten Pinrang, Satu Data Indonesia, serta aplikasi pendukung lainnya digunakan secara optimal untuk mempercepat proses perencanaan, mempermudah pemantauan, memperkuat evaluasi, dan meningkatkan transparansi pembangunan. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan data dan pelaporan yang lebih cepat, presisi, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kombinasi regulasi yang sinkron, koordinasi yang solid, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara real-time, hambatan dapat diidentifikasi sejak dini, dan keputusan perbaikan dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pelaksanaan RPJMD dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.

4. Mekanisme Perubahan RPJMD

RPJMD disusun untuk menjadi pedoman pembangunan lima tahunan, namun tetap harus memiliki fleksibilitas menghadapi dinamika yang tidak dapat

diprediksi. Dalam situasi kahar (*force majeure*) seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana alam, deviasi signifikan capaian sasaran pembangunan, atau penyesuaian akibat kebijakan nasional, dilakukan pemutakhiran dokumen. Penyesuaian tersebut dapat melalui revisi target pada RKPD atau perubahan RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan, realistis, dan selaras dengan tantangan terkini.

5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan RPJMD 2025–2029 memerlukan strategi komunikasi publik yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi diarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Berbagai metode komunikasi digunakan untuk mempermudah pemahaman, mendorong partisipasi, serta membuka ruang bagi masukan, kritik, dan dukungan. Prinsip keterbukaan, akses yang luas, informasi yang jelas, cepat, tepat, dan obyektif menjadi landasan utama guna meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil Pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan Masyarakat Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari proses pencapaian Visi daerah yakni "**Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri".**

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID